



Katalog: 4102002
ISSN 2086-2369

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

2025 Volume 20, 2026



BADAN PUSAT STATISTIK

Katalog: 4102002
ISSN 2086-2369

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

2025 Volume 20, 2026

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2025

VOLUME 20, 2026

Katalog: 4102002

ISSN: 2086-2369

Nomor Publikasi: 07300.26007

Ukuran Buku: 17,6 cm × 25 cm

Jumlah Halaman: xxvi+198 Halaman

Penyusun Naskah:

Direktorat Analisis Statistik dan Neraca Satelit

Penyunting:

Direktorat Analisis Statistik dan Neraca Satelit

Pembuat Kover:

Direktorat Analisis Statistik dan Neraca Satelit

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi:

canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2025
Volume 20, 2026

Pengarah
Moh. Edy Mahmud

Penanggung Jawab
Etjih Tasriah

Penyunting
Indah Budiati · Adwi Hastuti

Penulis
Adi Nugroho · Alvina Clarissa · Farhan Anshari Arsyi · Julita
Lovitawati Br. Aritonang · Nabila Aurelliza Candrika Putri
· Nia Setiyawati · Nurarifin · Muhammad Ihsan · Syifasari
Diennabila · Syukriyah Delyana · Tika Meilaningsih · Valent
Gigih Saputri

Pengolah Data
Adi Nugroho · Alvina Clarissa

Penata Letak
Nurarifin

KATA PENGANTAR

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menyajikan informasi mengenai perkembangan pembangunan manusia di Indonesia secara komprehensif. Data dan indikator yang disajikan di dalam publikasi ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat dalam memahami dinamika pembangunan manusia dan merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup penduduk. Penyusunan publikasi ini juga merupakan bagian dari upaya Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyediakan statistik yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk mendukung proses perencanaan, pemantauan, serta evaluasi pembangunan.

IPM bersama dengan indikator terkait seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan instrumen penting dalam menggambarkan capaian pembangunan manusia. Melalui indikator-indikator tersebut, BPS berupaya mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis data (*evidence-based policy*). IPM sendiri dibangun dari tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memberikan gambaran mengenai kualitas hidup masyarakat sekaligus menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Kami menyadari bahwa publikasi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan publikasi di masa mendatang.

Kami berharap publikasi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta mendukung kebutuhan pengguna data dalam proses perencanaan, analisis, dan evaluasi pembangunan manusia, sehingga dapat berkontribusi pada terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih maju, produktif, berdaya saing, dan sejahtera.

Jakarta, April 2026
Kepala Badan Pusat Statistik



Amalia Adininggar Widayanti



Ringkasan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2025 mencapai 75,90, meningkat 0,88 poin dibandingkan tahun sebelumnya (75,02). IPM 2025 tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM meningkat, terutama standar hidup layak dan pengetahuan.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada 2025 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,47 tahun, meningkat 0,32 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,09 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,21 tahun menjadi 13,30 tahun. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,22 tahun, dari 8,85 tahun pada 2024 menjadi 9,07 tahun pada 2025. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan meningkat 461 ribu rupiah (3,74 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Sejak 2020, status pembangunan manusia Indonesia sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020–2025, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,83 persen per tahun, dari 72,81 pada 2020 menjadi 75,90 pada 2025.

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020–2025, UHH telah meningkat sebesar 0,78 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,30 persen per tahun. Pada 2020, UHH Indonesia adalah 73,37 tahun dan pada 2025 mencapai 74,47 tahun. Kedua indikator pembentuk dimensi pengetahuan juga terus meningkat. Selama periode 2020–2025, HLS Indonesia rata-rata meningkat 0,49 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,35 persen per tahun. Sementara itu, untuk dimensi standar hidup layak, indikator pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Indonesia meningkat sebesar 3,06 persen per tahun selama periode 2020–2025. Pada tahun 2020 pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan mencapai Rp11.013.000, meningkat menjadi Rp12.802.000 pada tahun 2025.

Pada 2025, status pembangunan manusia di Kepulauan Riau meningkat dari “tinggi” menjadi “sangat tinggi”, dengan capaian IPM sebesar 80,53. Sementara itu, Papua Barat Daya meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM sebesar 70,55. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah provinsi dengan status pembangunan manusia “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) menjadi sebanyak 30 provinsi, status “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$) sebanyak 4 provinsi, dan satu provinsi dengan status “rendah” ($\text{IPM} < 60$). Sementara itu, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta dan Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan status capaian pembangunan manusia “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$).

Daftar Isi

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2025
Volume 20, 2026

	Halaman
Kata Pengantar	v
Ringkasan	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xxv
Bab 1 Pengukuran Pembangunan Manusia	1
1.1 Memahami Konsep Pembangunan Manusia	3
1.2 Mengukur Pembangunan Manusia	8
1.3 Indeks Pembangunan Manusia dan Perencanaan Pembangunan	12
Bab 2 Capaian Pembangunan Manusia	15
2.1 Pembangunan Manusia di Era Globalisasi	17
2.2 Capaian Pembangunan Manusia Tingkat Nasional	25
2.3 Capaian Pembangunan Manusia Indonesia di Tingkat Daerah	30
Bab 3 Tantangan dan Peluang Mempercepat Pembangunan Manusia	37
3.1 Tantangan	39
3.2 Peluang	47
3.3 Strategi Menghadapi Tantangan dan Memanfaatkan Peluang	54
Bab 4 Peran Gender dalam Pembangunan Manusia	57
4.1 Capaian Pembangunan Gender	59
4.2 Hubungan IPG dan IPM	67
Bab 5 Profil Pembangunan Manusia Nasional dan Provinsi	71
Daftar Pustaka	153
Catatan Teknis	157
Lampiran	165

Daftar Tabel

Tabel	Halaman
1.1 Dimensi dan Indikator Penyusun IPM BPS	8
1.2 Perbandingan Dimensi dan Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Manusia Menurut UNDP dan BPS.....	10
2.1 Rata-rata Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan untuk Setiap Murid Tahun 2018 dan Persentase Angka Putus Sekolah Tahun 2023 Menurut Kawasan dan Jenjang Sekolah.....	21
2.2 Capaian HDI dan Variabel Penyusunnya Menurut Kategori Capaian HDI, 2023	23
2.3 Indikator Penyusun <i>Human Development Index</i> di Negara-Negara ASEAN, 2023.....	25
2.4 Indikator Kesehatan Indonesia, 2024 dan 2025	27
2.5 Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Indonesia, 2021–2025	29
2.6 IPM dan Komponen Penyusunnya pada Provinsi dengan Capaian IPM Tertinggi dan Terendah, 2024 dan 2025	33
3.1 Beberapa Indikator Kesehatan, 2025	40
3.2 Beberapa Indikator Pendidikan Menurut Pulau, 2025.....	41
3.3 Beberapa Indikator Capaian Standar Hidup Layak Menurut Pulau, 2025	42
3.4 Hubungan Antara Kemiskinan dan IPM di Tingkat Provinsi, 2025	44
3.5 Persentase Pengguna Internet, 2023	45
3.6 Beberapa Indikator Digitalisasi di Indonesia, 2025.....	46
3.7 Skor <i>Programme for International Student Assessment</i> (PISA) Indonesia dan Negara-Negara ASEAN, 2022	48
3.8 Jumlah dan Persentase Desa yang Memiliki Sekolah Luar Biasa (SLB) serta Penyandang Disabilitas, 2014 dan 2024	52
3.9 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Kelompok Pengeluaran Penduduk Terendah (Kuintil 1) dan Tertinggi (Kuintil 5), 2019 dan 2025.....	53
5.1 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Indonesia, 2025	74
5.2 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Indonesia, 2024 dan 2025	75
5.3 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Aceh, 2025	76
5.4 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Aceh, 2024 dan 2025.....	77
5.5 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Sumatera Utara, 2025	78

Tabel	Halaman
5.6 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sumatera Utara, 2024 dan 2025.....	79
5.7 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Sumatera Barat, 2025.....	80
5.8 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sumatera Barat, 2024 dan 2025	81
5.9 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Riau, 2025	82
5.10 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Riau, 2024 dan 2025	83
5.11 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Jambi, 2025	84
5.12 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Jambi, 2024 dan 2025	85
5.13 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Sumatera Selatan, 2025	86
5.14 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sumatera Selatan, 2024 dan 2025.....	87
5.15 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Bengkulu, 2025	88
5.16 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Bengkulu, 2024 dan 2025.....	89
5.17 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Lampung, 2025	88
5.18 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Lampung, 2024 dan 2025.....	91
5.19 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Bangka Belitung, 2025	92
5.20 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kep. Bangka Belitung, 2024 dan 2025	93
5.21 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kepulauan Riau, 2025.....	94
5.22 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kepulauan Riau, 2024 dan 2025.....	95
5.23 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM DKI Jakarta, 2025.....	96
5.24 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia DKI Jakarta, 2024 dan 2025	97
5.25 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Jawa Barat, 2025	98
5.26 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Jawa Barat, 2024 dan 2025.....	99
5.27 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Jawa Tengah, 2025.....	100
5.28 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Jawa Tengah, 2024 dan 2025	101
5.29 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM DI Yogyakarta, 2025.....	102
5.30 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia DI Yogyakarta, 2024 dan 2025	103
5.31 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Jawa Timur, 2025	104

Tabel**Halaman**

5.32	Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Jawa Timur, 2024 dan 2025.....	105
5.33	Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Banten, 2025	106
5.34	Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Banten, 2024 dan 2025.....	107
5.35	Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Bali, 2025	108
5.36	Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Bali, 2024 dan 2025.....	109
5.37	Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Nusa Tenggara Barat, 2025	110
5.38	Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Nusa Tenggara Barat, 2024 dan 2025.....	111
5.39	Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Nusa Tenggara Timur, 2025	112
5.40	Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Nusa Tenggara Timur, 2024 dan 2025.....	113
5.41	Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kalimantan Barat, 2025.....	114
5.42	Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kalimantan Barat, 2024 dan 2025.....	115
5.43	Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kalimantan Tengah, 2025.....	116
5.44	Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kalimantan Tengah, 2024 dan 2025	117
5.45	Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kalimantan Selatan, 2025	118
5.46	Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kalimantan Selatan, 2024 dan 2025	119
5.47	Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kalimantan Timur, 2025	120
5.48	Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kalimantan Timur, 2024 dan 2025.....	121
5.49	Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kalimantan Utara, 2025	122
5.50	Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kalimantan Utara, 2024 dan 2025	123
5.51	Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Sulawesi Utara, 2025.....	124
5.52	Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sulawesi Utara, 2024 dan 2025	125
5.53	Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Sulawesi Tengah, 2025	126
5.54	Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sulawesi Tengah, 2024 dan 2025.....	127
5.55	Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Sulawesi Selatan, 2025.....	128
5.56	Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan, 2024 dan 2025.....	129
5.57	Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Sulawesi Tenggara, 2025	130

Tabel	Halaman
5.58 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sulawesi Tenggara, 2024 dan 2025	131
5.59 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Gorontalo, 2025	132
5.60 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Gorontalo, 2024 dan 2025	133
5.61 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Sulawesi Barat, 2025	134
5.62 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sulawesi Barat, 2024 dan 2025	135
5.63 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Maluku, 2025	136
5.64 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Maluku, 2024 dan 2025	137
5.65 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Maluku Utara, 2025	138
5.66 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Maluku Utara, 2024 dan 2025	139
5.67 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Papua Barat, 2025	140
5.68 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Papua Barat, 2024 dan 2025	141
5.69 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Papua Barat Daya, 2025	142
5.70 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Papua Barat Daya, 2024 dan 2025	143
5.71 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Papua, 2025	144
5.72 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Papua, 2024 dan 2025	145
5.73 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Papua Selatan, 2025	146
5.74 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Papua Selatan, 2024 dan 2025	147
5.75 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Papua Tengah, 2025	148
5.76 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Papua Tengah, 2024 dan 2025	149
5.77 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Papua Pegunungan 2025	150
5.78 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Papua Pegunungan, 2024 dan 2025	151

Daftar Gambar

Gambar	Halaman
1.1 Perkembangan Metodologi Indeks Pembangunan Manusia oleh UNDP	5
1.2 Perkembangan Implementasi Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.....	9
2.1 <i>Human Development Index</i> (HDI) Dunia, 2010–2023	18
2.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata–Rata Lama Sekolah Dunia (tahun), 2010–2023	19
2.3 Umur Harapan Hidup Dunia (tahun), 2010–2023	19
2.4 Pendapatan Nasional Bruto per Kapita Dunia (ribu US\$), 2010–2023.....	20
2.5 <i>UHC Service Coverage Index</i> Menurut Kategori Pendapatan Negara, 2021	22
2.6 Kontribusi Pendapatan Nasional Menurut Kawasan dan Kategori Pendapatan, 2023	22
2.7 Perkembangan <i>Human Development Index</i> Negara–Negara ASEAN, 1990–2023	24
2.8 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, 2020–2025.....	26
2.9 Capaian dan Pertumbuhan Umur Harapan Hidup saat Lahir Indonesia (tahun), 2020–2025	27
2.10 Capaian dan Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Indonesia (tahun), 2020–2025	28
2.11 Capaian dan Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah Indonesia (tahun), 2020–2025	29
2.12 Capaian dan Pertumbuhan Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan di Indonesia (ribu rupiah), 2020–2025	30
2.13 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi, 2025.....	31
2.14 Disparitas Capaian Indeks Pembangunan Manusia Antarprovinsi di Indonesia, 2022–2025	32
2.15 Persentase Provinsi Menurut Status Capaian Pembangunan Manusia, 2022–2025	33
2.16 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota Tertinggi (Kota Banda Aceh) dan Kabupaten/ Kota Terendah (Nduga) terhadap Indonesia, 2020–2025.....	34
2.17 Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tertinggi (Kota Banda Aceh) dan Kabupaten/ Kota Terendah (Nduga) terhadap Indonesia, 2021–2025.....	35
2.18 Disparitas dan Capaian Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Indonesia, 2020–2025	36
2.19 Jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia Menurut Status IPM, 2020–2025	36

Gambar	Halaman
3.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), 2006–2025	51
3.2 Persentase Lansia yang Mengakses Internet, Sebagai Peserta JKN, dan yang Menerima Kredit Pengembangan Usaha 2019 dan 2025.....	51
4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Perempuan di Indonesia (persen), 2021–2025.....	60
4.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia, 2020–2025	61
4.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Provinsi, 2025.....	62
4.4 Umur Harapan Hidup saat Lahir Menurut Jenis Kelamin (tahun), 2020–2025	62
4.5 Selisih Umur Harapan Hidup saat Lahir antara Perempuan dan Laki–Laki Menurut Provinsi (tahun), 2025	63
4.6 Rata–Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Jenis Kelamin (tahun), 2020–2025 ...	64
4.7 Selisih Rata–Rata Lama Sekolah (RLS) antara Perempuan dan Laki–Laki Menurut Provinsi (tahun), 2025	64
4.8 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin (tahun), 2020–2025	65
4.9 Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan Menurut Jenis Kelamin (tahun), 2020–2025	65
4.10 Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan antara Perempuan dan Laki–Laki Menurut Provinsi (tahun), 2025.....	66
4.11 Pembagian Kuadran Provinsi berdasarkan Angka IPG dan IPM, 2025.....	68
5.1 Indeks Indikator Komponen IPM Indonesia, 2025	74
5.2 Perkembangan IPM Indonesia, 2022–2025	74
5.3 Pertumbuhan IPM Indonesia, 2023–2025	74
5.4 Disparitas dan Capaian IPM Provinsi Tertinggi dan Terendah di Indonesia, 2022–2025	74
5.5 Jumlah Provinsi di Indonesia Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	74
5.6 Indeks Indikator Komponen IPM Aceh, 2025.....	76
5.7 Perkembangan IPM Aceh, 2022–2025	76
5.8 Pertumbuhan IPM Aceh, 2023–2025.....	76
5.9 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/ Kota Tertinggi dan Terendah di Aceh, 2022–2025	76
5.10 Jumlah Kabupaten/Kota di Aceh Menurut Status IPM, 2022 dan 2025.....	76
5.11 Indeks Indikator Komponen IPM Sumatera Utara, 2025.....	78
5.12 Perkembangan IPM Sumatera Utara, 2022–2025.....	78
5.13 Pertumbuhan IPM Sumatera Utara, 2023–2025	78
5.14 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Sumatera Utara, 2022–2025	78
5.15 Jumlah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Menurut Status IPM, 2022 dan 2025.....	78

Gambar	Halaman
5.16 Indeks Indikator Komponen IPM Sumatera Barat, 2025	80
5.17 Perkembangan IPM Sumatera Barat, 2022–2025	80
5.18 Pertumbuhan IPM Sumatera Barat, 2023–2025	80
5.19 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Sumatera Barat, 2022–2025	80
5.20 Jumlah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	80
5.21 Indeks Indikator Komponen IPM Riau, 2025	82
5.22 Perkembangan IPM Riau, 2022–2025	82
5.23 Pertumbuhan IPM Riau, 2023–2025	82
5.24 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Riau, 2022–2025	82
5.25 Jumlah Kabupaten/Kota di Riau Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	82
5.26 Indeks Indikator Komponen IPM Jambi, 2025	84
5.27 Perkembangan IPM Jambi, 2022–2025	84
5.28 Pertumbuhan IPM Jambi, 2023–2025	84
5.29 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Jambi, 2022–2025	84
5.30 Jumlah Kabupaten/Kota di Jambi Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	84
5.31 Indeks Indikator Komponen IPM Sumatera Selatan, 2025	86
5.32 Perkembangan IPM Sumatera Selatan, 2022–2025	86
5.33 Pertumbuhan IPM Sumatera Selatan, 2023–2025	86
5.34 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Sumatera Selatan, 2022–2025	86
5.35 Jumlah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	86
5.36 Indeks Indikator Komponen IPM Bengkulu, 2025	88
5.37 Perkembangan IPM Bengkulu, 2022–2025	88
5.38 Pertumbuhan IPM Bengkulu, 2023–2025	88
5.39 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Bengkulu, 2022–2025	88
5.40 Jumlah Kabupaten/Kota di Bengkulu Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	88
5.41 Indeks Indikator Komponen IPM Lampung, 2025	90
5.42 Perkembangan IPM Lampung, 2022–2025	90
5.43 Pertumbuhan IPM Lampung, 2023–2025	90
5.44 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Lampung, 2022–2025	90
5.45 Jumlah Kabupaten/Kota di Lampung Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	90
5.46 Indeks Indikator Komponen IPM Kep. Bangka Belitung, 2025	92

Gambar	Halaman
5.47 Perkembangan IPM Kep. Bangka Belitung, 2022–2025	92
5.48 Pertumbuhan IPM Kep. Bangka Belitung, 2023–2025	92
5.49 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kep. Bangka Belitung, 2022–2025	92
5.50 Jumlah Kabupaten/Kota di Kep. Bangka Belitung Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	92
5.51 Indeks Indikator Komponen IPM Kep. Riau, 2025.....	94
5.52 Perkembangan IPM Kep. Riau, 2022–2025.....	94
5.53 Pertumbuhan IPM Kep. Riau, 2023–2025	94
5.54 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kep. Riau, 2022–2025	94
5.55 Jumlah Kabupaten/Kota di Kep. Riau Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	94
5.56 Indeks Indikator Komponen IPM DKI Jakarta, 2025.....	96
5.57 Perkembangan IPM DKI Jakarta, 2022–2025.....	96
5.58 Pertumbuhan IPM DKI Jakarta, 2023–2025	96
5.59 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di DKI Jakarta, 2022–2025	96
5.60 Jumlah Kabupaten/Kota di DKI Jakarta Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	96
5.61 Indeks Indikator Komponen IPM Jawa Barat, 2025.....	98
5.62 Perkembangan IPM Jawa Barat, 2022–2025.....	98
5.63 Pertumbuhan IPM Jawa Barat, 2023–2025	98
5.64 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Jawa Barat, 2022–2025	98
5.65 Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Menurut Status IPM, 2022 dan 2025 ..	98
5.66 Indeks Indikator Komponen IPM Jawa Tengah, 2025	100
5.67 Perkembangan IPM Jawa Tengah, 2022–2025	100
5.68 Pertumbuhan IPM Jawa Tengah, 2023–2025	100
5.69 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Jawa Tengah, 2022–2025.....	100
5.70 Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	100
5.71 Indeks Indikator Komponen IPM D.I Yogyakarta, 2025.....	102
5.72 Perkembangan IPM D.I Yogyakarta, 2022–2025	102
5.73 Pertumbuhan IPM D.I Yogyakarta, 2023–2025	102
5.74 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di D.I Yogyakarta, 2022–2025	102
5.75 Jumlah Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	102
5.76 Indeks Indikator Komponen IPM Jawa Timur, 2025.....	104
5.77 Perkembangan IPM Jawa Timur, 2022–2025.....	104

Gambar	Halaman
5.78 Pertumbuhan IPM Jawa Timur, 2023–2025	104
5.79 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Jawa Timur, 2022–2025	104
5.80 Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Menurut Status IPM, 2022 dan 2025 .	104
5.81 Indeks Indikator Komponen IPM Banten, 2025	106
5.82 Perkembangan IPM Banten, 2022–2025	106
5.83 Pertumbuhan IPM Banten, 2023–2025	106
5.84 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Banten, 2022–2025	106
5.85 Jumlah Kabupaten/Kota di Banten Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	106
5.86 Indeks Indikator Komponen IPM Bali, 2025	108
5.87 Perkembangan IPM Bali, 2022–2025	108
5.88 Pertumbuhan IPM Bali, 2023–2025	108
5.89 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Bali, 2022–2025	108
5.90 Jumlah Kabupaten/Kota di Bali Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	108
5.91 Indeks Indikator Komponen IPM Nusa Tenggara Barat, 2025	110
5.92 Perkembangan IPM Nusa Tenggara Barat, 2022–2025	110
5.93 Pertumbuhan IPM Nusa Tenggara Barat, 2023–2025	110
5.94 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Nusa Tenggara Barat, 2022–2025	110
5.95 Jumlah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	110
5.96 Indeks Indikator Komponen IPM Nusa Tenggara Timur, 2025	112
5.97 Perkembangan IPM Nusa Tenggara Timur, 2022–2025	112
5.98 Pertumbuhan IPM Nusa Tenggara Timur, 2023–2025	112
5.99 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Nusa Tenggara Timur, 2022–2025	112
5.100 Jumlah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	112
5.101 Indeks Indikator Komponen IPM Kalimantan Barat, 2025	114
5.102 Perkembangan IPM Kalimantan Barat, 2022–2025	114
5.103 Pertumbuhan IPM Kalimantan Barat, 2023–2025	114
5.104 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kalimantan Barat, 2022–2025	114
5.105 Jumlah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	114
5.106 Indeks Indikator Komponen IPM Kalimantan Tengah, 2025	116
5.107 Perkembangan IPM Kalimantan Tengah, 2022–2025	116

Gambar	Halaman
5.108 Pertumbuhan IPM Kalimantan Tengah, 2023–2025	116
5.109 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kalimantan Tengah, 2022–2025.....	116
5.110 Jumlah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	116
5.111 Indeks Indikator Komponen IPM Kalimantan Selatan, 2025	118
5.112 Perkembangan IPM Kalimantan Selatan, 2022–2025	118
5.113 Pertumbuhan IPM Kalimantan Selatan, 2023–2025.....	118
5.114 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kalimantan Selatan, 2022–2025.....	118
5.115 Jumlah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	118
5.116 Indeks Indikator Komponen IPM Kalimantan Timur, 2025.....	120
5.117 Perkembangan IPM Kalimantan Timur, 2022–2025.....	120
5.118 Pertumbuhan IPM Kalimantan Timur, 2023–2025	120
5.119 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kalimantan Timur, 2022–2025	120
5.120 Jumlah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	120
5.121 Indeks Indikator Komponen IPM Kalimantan Utara, 2025	122
5.122 Perkembangan IPM Kalimantan Utara, 2022–2025	122
5.123 Pertumbuhan IPM Kalimantan Utara, 2023–2025.....	122
5.124 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kalimantan Utara, 2022–2025	122
5.125 Jumlah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Menurut Status IPM, 2022 dan 2025.....	122
5.126 Indeks Indikator Komponen IPM Sulawesi Utara, 2025.....	124
5.127 Perkembangan IPM Sulawesi Utara, 2022–2025.....	124
5.128 Pertumbuhan IPM Sulawesi Utara, 2023–2025	124
5.129 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Sulawesi Utara, 2022–2025	124
5.130 Jumlah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	124
5.131 Indeks Indikator Komponen IPM Sulawesi Tengah, 2025.....	126
5.132 Perkembangan IPM Sulawesi Tengah, 2022–2025.....	126
5.133 Pertumbuhan IPM Sulawesi Tengah, 2023–2025.....	126
5.134 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Sulawesi Tengah, 2022–2025	126

5.135 Jumlah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	126
5.136 Indeks Indikator Komponen IPM Sulawesi Selatan, 2025	128
5.137 Perkembangan IPM Sulawesi Selatan, 2022–2025	128
5.138 Pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan, 2023–2025	128
5.139 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Sulawesi Selatan, 2022–2025	128
5.140 Jumlah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	128
5.141 Indeks Indikator Komponen IPM Sulawesi Tenggara, 2025	130
5.142 Perkembangan IPM Sulawesi Tenggara, 2022–2025	130
5.143 Pertumbuhan IPM Sulawesi Tenggara, 2023–2025	130
5.144 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Sulawesi Tenggara, 2022–2025	130
5.145 Jumlah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	130
5.146 Indeks Indikator Komponen IPM Gorontalo, 2025	132
5.147 Perkembangan IPM Gorontalo, 2022–2025	132
5.148 Pertumbuhan IPM Gorontalo, 2023–2025	132
5.149 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Gorontalo, 2022–2025	132
5.150 Jumlah Kabupaten/Kota di Gorontalo Menurut Status IPM, 2022 dan 2025 ...	132
5.151 Indeks Indikator Komponen IPM Sulawesi Barat, 2025	134
5.152 Perkembangan IPM Sulawesi Barat, 2022–2025	134
5.153 Pertumbuhan IPM Sulawesi Barat, 2023–2025	134
5.154 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Sulawesi Barat, 2022–2025	134
5.155 Jumlah Kabupaten/Kota di Sulawesi Barat Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	134
5.156 Indeks Indikator Komponen IPM Maluku, 2025	136
5.157 Perkembangan IPM Maluku, 2022–2025	136
5.158 Pertumbuhan IPM Maluku, 2023–2025	136
5.159 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Maluku, 2022–2025	136
5.160 Jumlah Kabupaten/Kota di Maluku Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	136
5.161 Indeks Indikator Komponen IPM Maluku Utara, 2025	138
5.162 Perkembangan IPM Maluku Utara, 2022–2025	138
5.163 Pertumbuhan IPM Maluku Utara, 2023–2025	138

Gambar**Halaman**

5.164 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Maluku Utara, 2022–2025	138
5.165 Jumlah Kabupaten/Kota di Maluku Utara Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	138
5.166 Indeks Indikator Komponen IPM Papua Barat, 2025	140
5.167 Perkembangan IPM Papua Barat, 2022–2025	140
5.168 Pertumbuhan IPM Papua Barat, 2023–2025	140
5.169 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Papua Barat, 2022–2025	140
5.170 Jumlah Kabupaten/Kota di Papua Barat Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	140
5.171 Indeks Indikator Komponen IPM Papua Barat Daya, 2025	142
5.172 Perkembangan IPM Papua Barat Daya, 2022–2025	142
5.173 Pertumbuhan IPM Papua Barat Daya, 2023–2025	142
5.174 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Papua Barat Daya, 2022–2025	142
5.175 Jumlah Kabupaten/Kota di Papua Barat Daya Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	142
5.176 Indeks Indikator Komponen IPM Papua, 2025	144
5.177 Perkembangan IPM Papua, 2022–2025	144
5.178 Pertumbuhan IPM Papua, 2023–2025	144
5.179 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Papua, 2022–2025	144
5.180 Jumlah Kabupaten/Kota di Papua Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	144
5.181 Indeks Indikator Komponen IPM Papua Selatan, 2025	146
5.182 Perkembangan IPM Papua Selatan, 2022–2025	146
5.183 Pertumbuhan IPM Papua Selatan, 2023–2025	146
5.184 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Papua Selatan, 2022–2025	146
5.185 Jumlah Kabupaten/Kota di Papua Selatan Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	146
5.186 Indeks Indikator Komponen IPM Papua Tengah, 2025	148
5.187 Perkembangan IPM Papua Tengah, 2022–2025	148
5.188 Pertumbuhan IPM Papua Tengah, 2023–2025	148
5.189 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Papua Tengah, 2022–2025	148
5.190 Jumlah Kabupaten/Kota di Papua Tengah Menurut Status IPM, 2022 dan 2025	148
5.191 Indeks Indikator Komponen IPM Papua Pegunungan, 2025	150

Gambar	Halaman
5.192 Perkembangan IPM Papua Pegunungan, 2022–2025	150
5.193 Pertumbuhan IPM Papua Pegunungan, 2023–2025	150
5.194 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Papua Pegunungan, 2022–2025.....	150
5.195 Jumlah Kabupaten/Kota di Papua Pegunungan Menurut Status IPM, 2022 dan 2025.....	150

<https://www.bps.go.id>

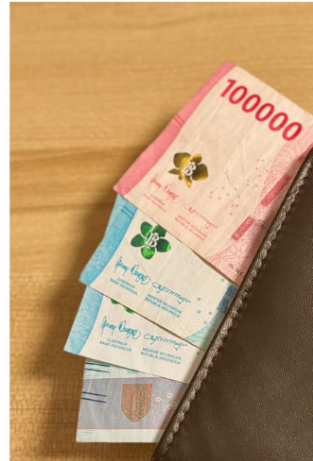
Daftar Lampiran

Lampiran	Halaman
1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2025	167
2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2025	168
3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2022–2025	184
4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/ Kota, 2022–2025	185
5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Negara-Negara Anggota ASEAN, 1990–2023	198

<https://www.bps.go.id>

BAB 1

PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA



Pengukuran Pembangunan Manusia

1.1 Memahami Konsep Pembangunan Manusia

Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya merupakan proses transformasi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam sejarah perencanaan pembangunan, pemahaman mengenai makna kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan mengalami evolusi yang signifikan. Pada periode awal, pembangunan cenderung dimaknai secara sempit sebagai proses peningkatan output ekonomi. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), industrialisasi, dan akumulasi modal diposisikan sebagai tujuan utama, dengan asumsi bahwa manfaat pembangunan akan menetes secara otomatis kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pendekatan pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi tersebut memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan nasional. Namun, pengalaman empiris di berbagai negara menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas hidup penduduk. Ketimpangan pendapatan, kemiskinan yang persisten, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia tetap menjadi persoalan mendasar meskipun perekonomian tumbuh relatif pesat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa indikator ekonomi makro belum sepenuhnya mampu menangkap kompleksitas kesejahteraan manusia.

Keterbatasan pendekatan pembangunan yang berorientasi semata pada pertumbuhan ekonomi mendorong lahirnya kebutuhan akan paradigma pembangunan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada manusia. Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada peningkatan kapasitas ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas manusia sebagai pelaku utama pembangunan. Tanpa manusia yang sehat, terdidik, dan produktif, pertumbuhan ekonomi tidak akan mampu dipertahankan dalam jangka panjang.

Sebagai respons terhadap keterbatasan paradigma pembangunan konvensional tersebut, *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan konsep pembangunan manusia melalui penerbitan *Human Development Report* (HDR) pertama pada tahun 1990. HDR 1990 menjadi tonggak penting dalam pemikiran pembangunan global dengan menegaskan bahwa pembangunan seharusnya dipahami sebagai proses

memperluas pilihan dan kemampuan (*capabilities*) manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Dengan pendekatan ini, fokus pembangunan secara tegas bergeser dari sekadar “*means of development*” menuju “*ends of development*”.

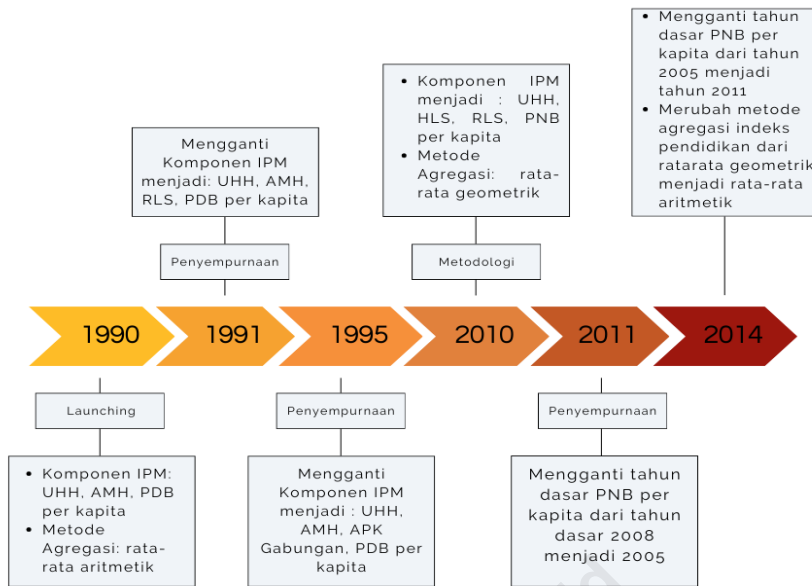
Pada tahap awal pengembangannya pada dekade 1990-an, *United Nations Development Programme* (UNDP) merumuskan pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut dipandang sebagai fondasi minimum kesejahteraan manusia yang bersifat universal dan relevan lintas negara. Untuk mengoperasionalkan konsep pembangunan manusia tersebut, UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator komposit yang mampu merangkum capaian pembangunan manusia dalam satu ukuran ringkas yang dapat digunakan untuk perbandingan antarwilayah dan antarwaktu.

Seiring dengan perkembangan pemikiran dan dinamika pembangunan global, UNDP terus menyempurnakan konsep dan metodologi pembangunan manusia. Memasuki dekade 2000-an, perhatian terhadap isu ketimpangan dalam capaian pembangunan manusia semakin menguat. Hal ini diwujudkan melalui pengenalan *Inequality-adjusted Human Development Index* (IHDI) dalam *Human Development Report* 2010, yang menekankan bahwa capaian pembangunan manusia tidak hanya perlu dilihat dari nilai rata-rata, tetapi juga dari bagaimana capaian tersebut terdistribusi di dalam masyarakat.

Pada tahap selanjutnya, UNDP semakin menegaskan keterkaitan antara pembangunan manusia dan keberlanjutan lingkungan. *Human Development Report* 2020 memperkenalkan pendekatan pembangunan manusia dalam konteks Anthropocene, dengan menyoroti bahwa kemajuan pembangunan manusia tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan hidup yang menopangnya. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta tekanan terhadap sumber daya alam dipandang sebagai tantangan mendasar yang dapat menghambat keberlanjutan pembangunan manusia di masa depan.

Perkembangan terbaru dalam kerangka pembangunan manusia juga menyoroti meningkatnya ketidakpastian dan kerentanan global. *Human Development Report* dan laporan-laporan UNDP setelahnya menekankan pentingnya ketahanan (*resilience*) pembangunan manusia dalam menghadapi berbagai guncangan, seperti pandemi, krisis ekonomi, dan konflik global. Dalam konteks ini, pembangunan manusia tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan capaian kesejahteraan, tetapi juga untuk memastikan bahwa capaian tersebut tidak bersifat rapuh dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Perkembangan konsep dan metodologi pembangunan manusia oleh UNDP berlangsung secara bertahap dan adaptif terhadap dinamika global. Ringkasan perkembangan metodologi Indeks Pembangunan Manusia oleh UNDP disajikan pada Gambar 1.1.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1 Perkembangan Metodologi Indeks Pembangunan Manusia oleh UNDP

Secara keseluruhan, perkembangan konsep pembangunan manusia oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) menunjukkan bahwa pembangunan manusia merupakan paradigma yang dinamis dan terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Meskipun kerangka dasarnya relatif konsisten, penekanan isu dan pendekatan analisisnya masih terus berkembang. Kerangka inilah yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, dan dioperasionalkan sesuai dengan konteks nasional masing-masing.

Di Indonesia, relevansi pembangunan manusia semakin menguat seiring dengan dinamika pembangunan nasional dan daerah. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah menuntut pemerintah untuk memiliki instrumen pengukuran pembangunan yang mampu menangkap kondisi kesejahteraan masyarakat secara lebih dekat dan kontekstual. Dalam konteks tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator strategis yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik untuk memotret capaian pembangunan manusia secara komprehensif, lintas waktu, dan lintas wilayah, dengan tetap mengacu pada kerangka konseptual dan metodologi yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP).

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pembangunan manusia berangkat dari pemahaman bahwa kesejahteraan manusia bersifat multidimensional. Manusia tidak hanya membutuhkan pendapatan untuk hidup, tetapi juga membutuhkan kesehatan yang baik, pengetahuan, rasa aman, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan manusia menuntut pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Kerangka ini merujuk dan selaras dengan kerangka pembangunan manusia yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui *Human Development Report* (HDR).

UNDP memperkenalkan pembangunan manusia sebagai pendekatan alternatif terhadap paradigma pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi. Dalam pendekatan UNDP, pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses memperluas kemampuan (*capabilities*) dan pilihan hidup manusia. Kerangka ini menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan (*ends*), sementara pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kemajuan teknologi diposisikan sebagai sarana (*means*) untuk mencapai tujuan tersebut.

Badan Pusat Statistik mengadopsi kerangka konseptual UNDP tersebut dengan melakukan penyesuaian pada aspek indikator dan metodologi agar sesuai dengan konteks Indonesia dan ketersediaan data statistik nasional. Adopsi ini memastikan bahwa pengukuran pembangunan manusia di Indonesia tetap sejalan dengan standar internasional, sekaligus relevan untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional dan daerah.

Dalam kerangka UNDP, pembangunan manusia direpresentasikan melalui tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut dipandang sebagai prasyarat minimum bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bermartabat. BPS mengadopsi ketiga dimensi tersebut secara konsisten sebagai fondasi pengukuran IPM di Indonesia. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Pilihan tersebut mencakup kesempatan untuk hidup panjang dan sehat, memperoleh pengetahuan, serta menikmati standar hidup yang layak. Ketiga pilihan ini dipandang sebagai dimensi dasar yang memungkinkan manusia mengembangkan potensi diri dan berkontribusi secara produktif dalam pembangunan.

Dimensi umur panjang dan hidup sehat mencerminkan kemampuan manusia untuk bertahan hidup dan menjalani kehidupan yang berkualitas. Dimensi ini tidak hanya berkaitan dengan angka harapan hidup, tetapi juga mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat secara umum, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, kecukupan gizi, serta lingkungan hidup yang mendukung.

Dimensi pengetahuan merepresentasikan kemampuan manusia untuk mengakses pendidikan dan mengembangkan kapasitas intelektual. Pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan manusia karena berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas, mobilitas sosial, serta kemampuan individu untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan manusia menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang fundamental.

Dimensi standar hidup layak menggambarkan kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar melalui sumber daya ekonomi yang dimilikinya. Dimensi ini berkaitan dengan daya beli, kesempatan kerja, dan tingkat kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Standar hidup yang layak memungkinkan individu untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, sehingga memperkuat keterkaitan antardimensi pembangunan manusia. Dalam konteks Indonesia, kerangka konseptual pembangunan manusia diadaptasi dengan mempertimbangkan ketersediaan data statistik dan relevansi kebijakan. Badan Pusat Statistik menggunakan Umur Harapan Hidup saat lahir sebagai indikator dimensi kesehatan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah sebagai indikator dimensi pengetahuan, serta pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sebagai indikator dimensi standar hidup layak.

Ketiga dimensi pembangunan manusia tersebut saling terkait dan saling memperkuat. Peningkatan pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan dan produktivitas ekonomi. Sebaliknya, peningkatan kesejahteraan ekonomi memperluas akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Hubungan timbal balik ini menegaskan bahwa pembangunan manusia harus dipahami sebagai suatu sistem yang terintegrasi, bukan sebagai kumpulan sektor yang berdiri sendiri.

Tujuan dan Manfaat

Pengukuran pembangunan manusia bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian pembangunan dari perspektif kualitas hidup manusia. Melalui Indeks Pembangunan Manusia, pembangunan dapat dievaluasi secara lebih utuh dengan mempertimbangkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak secara simultan.

Tujuan utama pengukuran pembangunan manusia adalah untuk memantau kemajuan pembangunan manusia dari waktu ke waktu dan membandingkan capaian antarwilayah. Informasi ini penting untuk mengidentifikasi wilayah atau kelompok penduduk yang tertinggal dalam pembangunan manusia, sehingga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, IPM memiliki manfaat strategis sebagai instrumen evaluasi kebijakan pembangunan. Perubahan nilai IPM dapat digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan telah berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, IPM berfungsi sebagai penghubung antara data statistik dan proses pengambilan keputusan publik.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, IPM tetap relevan sebagai alat ukur komplementer yang mendukung analisis situasi dan evaluasi kinerja pembangunan manusia. Pemanfaatannya difokuskan pada penyediaan bukti empiris mengenai capaian dan kesenjangan pembangunan, yang menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup penduduk secara berkelanjutan.

1.2 Mengukur Pembangunan Manusia

Metodologi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu mengukur tingkat kemajuan suatu negara dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, yang mencerminkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakatnya. Keberhasilan pemerintah dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan dan program-program pembangunan yang diterapkan berhasil meningkatkan ketiga dimensi tersebut, yaitu melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, perbaikan sistem kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, IPM mencerminkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

UNDP menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pada kali pertama IPM dirilis, ketiga dimensi tersebut diwakili dengan tiga indikator dalam penghitungan, yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Angka Melek Huruf (AMH), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Metode agregasi yang dilakukan untuk menghitung IPM menggunakan rata-rata aritmetik.

Seiring berjalannya waktu, UNDP melakukan penyempurnaan pada metode penghitungan IPM, untuk mencerminkan kondisi sosial-ekonomi yang lebih akurat dan relevan. Salah satu perubahan signifikan terjadi pada tahun 2010, dengan mengubah agregasi Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menjadi agregasi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sementara itu, PDB per kapita diubah menjadi angka Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain perubahan pada indikator yang digunakan, UNDP memperkenalkan konsep “IPM yang disesuaikan dengan ketimpangan” (*Inequality-adjusted Human Development Index* atau IHDI). Konsep ini berupaya menghilangkan ketimpangan yang ada dalam akses terhadap kesehatan, pendidikan, atau pendapatan dengan merubah metode penghitungan aritmetik dengan metode geometrik. Tabel berikut menjelaskan dimensi, indikator dan agregasi yang digunakan untuk menghitung IPM.

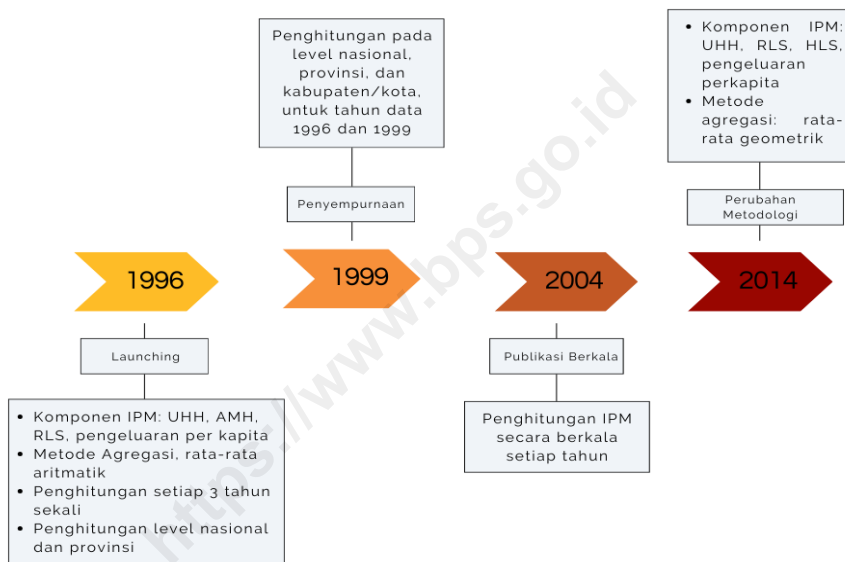
Tabel 1.1 Dimensi dan Indikator Penyusun IPM BPS

Dimensi	Indikator
(1)	(2)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat	Umur Harapan Hidup saat Lahir
Dimensi Pengetahuan	Harapan Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah
Dimensi Standar Hidup Layak	Pengeluaran Riil Perkapita per Tahun yang Disesuaikan

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada hakikatnya banyak dimensi dasar dalam pembangunan manusia, namun konsep pembangunan yang dibangun oleh UNDP menyatakan dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak sudah cukup. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Badan Pusat Statistik (BPS) mulai mengadopsi penghitungan IPM yang dilakukan oleh UNDP sejak tahun 1996. Awalnya, BPS hanya menghitung IPM setiap tiga tahun sekali, berdasarkan metode penghitungan UNDP yang diperkenalkan pada tahun 1990. Sejak tahun 2004, IPM dihitung secara berkala setiap tahun sampai dengan level kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan. Sejak tahun 2015 dengan nilai IPM tahun data 2014, Indonesia mengaplikasikan metode penghitungan IPM yang diperbarui UNDP pada tahun 2010 dan untuk memenuhi ketersediaan data tahun sebelumnya dilakukan *backcasting* untuk periode data 2010–2013.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.2 Perkembangan Implementasi Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia

Pengukuran IPM di Indonesia mengacu pada tiga dimensi yang diperkenalkan UNDP pada tahun 1990. Namun pada penggunaan indikatornya, sedikit berbeda dengan yang digunakan oleh UNDP. UNDP menggunakan data Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita sebagai indikator pada dimensi standar hidup layak. Di Indonesia data tersebut tidak tersedia di tingkat daerah, sehingga digunakan indikator pengeluaran riil per Kapita yang disesuaikan sebagai alternatif. Indikator ini dapat dihitung hingga tingkat kabupaten/kota. Indikator pengeluaran riil per kapita juga mampu mencerminkan indikator pendapatan masyarakat dan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai output dari kegiatan ekonomi.

Dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator tersebut merefleksikan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan formal. HLS menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal, sedangkan RLS menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah. Penghitungan kedua indikator ini memanfaatkan data yang bersumber dari SUSENAS bulan Maret. Pengukuran HLS menggunakan faktor koreksi berupa data jumlah siswa yang menjalani pendidikan dengan bermukim dari Kementerian Agama, serta hasil inventarisasi data sektoral di kabupaten/kota. Angka ini digunakan untuk mencakup peserta didik yang tidak dicakup dalam SUSENAS, sehingga angka HLS yang dihasilkan mencakup seluruh peserta didik.

Kemudian, Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan indikator yang merefleksikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Penggunaan indikator ini didasarkan pada kenyataan bahwa umur panjang merupakan sesuatu yang tak ternilai dan dapat terwujud jikalau manusia mendapatkan nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik. Dilihat dari sisi definisi, UHH merupakan perkiraan rata-rata lamanya waktu yang dapat dijalani oleh seseorang selama hidupnya (dalam tahun). Metodologi penghitungan indikator ini menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*) dan distandardisasi menggunakan standar penghitungan UNDP.

Perbedaan antara penggunaan indikator yang digunakan oleh UNDP dan BPS ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Perbandingan Dimensi dan Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Manusia Menurut UNDP dan BPS

Dimensi	Indikator	
	UNDP	BPS
(1)	(2)	(3)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat	Umur Harapan Hidup saat Lahir	Umur Harapan Hidup saat Lahir
Dimensi Pengetahuan	Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah
	Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah
Dimensi Standar Hidup Layak	PNB per Kapita	Pengeluaran Riil per Kapita Tahunan yang Disesuaikan

Sumber: Badan Pusat Statistik

Memaknai Angka IPM dalam Pembangunan Manusia

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan gambaran ringkas mengenai tingkat capaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Sebagai indeks komposit, IPM dirancang untuk merangkum berbagai dimensi dasar pembangunan manusia ke dalam satu ukuran yang mudah dipahami dan digunakan dalam analisis pembangunan. Secara umum, semakin tinggi nilai IPM suatu wilayah, semakin baik pula kualitas hidup penduduk yang tercermin dari aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Untuk mempermudah interpretasi dan analisis komparatif, IPM diklasifikasikan ke dalam empat kategori capaian pembangunan manusia, yaitu sangat tinggi untuk $IPM \geq 80$, tinggi untuk $70 \leq IPM < 80$, sedang untuk $60 \leq IPM < 70$, dan rendah untuk $IPM < 60$. Pengelompokan ini bertujuan memberikan kerangka interpretasi yang lebih operasional bagi perencana dan pengambil kebijakan dalam menilai posisi relatif pembangunan manusia suatu wilayah.

Meskipun demikian, IPM tidak dimaksudkan sebagai ukuran yang mencakup seluruh aspek kesejahteraan manusia. IPM hanya merepresentasikan dimensi-dimensi dasar pembangunan manusia dan belum sepenuhnya menangkap kompleksitas kesejahteraan, seperti ketimpangan antarkelompok penduduk, kemiskinan multidimensi, kualitas lingkungan hidup, maupun aspek subjektif kesejahteraan. Oleh karena itu, IPM perlu dipahami sebagai indikator ringkas (*summary measure*) yang berfungsi sebagai pintu masuk analisis, bukan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.

Pemaknaan angka IPM yang tepat menjadi sangat penting agar tidak terjadi penyederhanaan berlebihan dalam evaluasi pembangunan. Peningkatan nilai IPM perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui dimensi mana yang menjadi pendorong utama perubahan tersebut, apakah berasal dari perbaikan kesehatan, peningkatan capaian pendidikan, atau peningkatan standar hidup layak. Selain itu, penting untuk menilai apakah peningkatan IPM terjadi secara merata di seluruh kelompok penduduk atau hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Angka IPM juga mencerminkan hasil dari proses pembangunan manusia yang bersifat jangka panjang. Pembangunan manusia merupakan proses bertahap yang memerlukan investasi berkelanjutan, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Perubahan pada indikator-indikator pembentuk IPM, seperti harapan hidup atau rata-rata lama sekolah, umumnya tidak terjadi secara cepat. Oleh karena itu, fluktuasi IPM dalam periode yang relatif singkat perlu ditafsirkan secara hati-hati dan tidak selalu mencerminkan kemajuan atau kemunduran pembangunan manusia secara substantif.

Dalam praktik analisis pembangunan, perbandingan atau peringkat IPM antarwilayah sering digunakan sebagai salah satu rujukan untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia. Namun demikian, peringkat IPM bukanlah satu-satunya aspek yang perlu diperhatikan. Yang tidak kalah penting adalah laju atau kecepatan pertumbuhan IPM, karena indikator ini mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam mengakselerasi perbaikan kualitas hidup penduduknya.

Daerah dengan tingkat IPM yang relatif rendah, tetapi memiliki pertumbuhan IPM yang tinggi, menunjukkan adanya upaya pembangunan manusia yang efektif dan berpotensi memperkecil kesenjangan antardaerah. Sebaliknya, daerah dengan IPM tinggi namun pertumbuhannya melambat perlu mendapat perhatian agar capaian pembangunan manusia yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pemaknaan IPM perlu mempertimbangkan secara simultan tingkat capaian (status IPM) dan dinamika perubahannya (pertumbuhan IPM) untuk memperoleh gambaran pembangunan manusia yang lebih utuh dan berimbang.

1.3 Indeks Pembangunan Manusia dan Perencanaan Pembangunan

Keberhasilan pembangunan dapat dicapai ketika didukung dengan pembangunan manusia yang kuat. Oleh sebab itu, kualitas manusia memegang peranan penting dalam mendorong kesuksesan pembangunan suatu wilayah. Sebagai ukuran capaian pembangunan kualitas manusia, IPM seringkali digunakan menjadi instrumen perencanaan dan evaluasi pembangunan. IPM menggambarkan sejauh mana penduduk suatu wilayah memiliki kesempatan untuk mengakses hasil pembangunan, dalam hal kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Berbagai program dan kebijakan dirancang untuk mendorong peningkatan kualitas manusia dari ketiga dimensi dasar ini. IPM juga menjadi instrumen diagnostik, dilihat dari capaian nilai indeks atau nilai indikator pembentuk IPM untuk mengidentifikasi pada dimensi dan indikator mana pembangunan manusia suatu wilayah perlu dioptimalkan. Dengan demikian, IPM menyediakan data dasar yang digunakan dalam perencanaan dan evaluasi target pembangunan manusia dari waktu ke waktu.

Peran IPM dan Dimensi Pembentuknya dalam Perencanaan Pembangunan

IPM mengukur kualitas pembangunan manusia melalui tiga dimensi pembentuk dan setiap dimensi merefleksikan kondisi kesejahteraan penduduk. Kondisi ini menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan publik yang tepat guna mendorong peningkatan kualitas hidup.

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat diukur melalui Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Semakin tinggi UHH, semakin baik kualitas layanan kesehatan masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bagaimana program kesehatan pemerintah mampu mendukung capaian tingkat kesehatan di Indonesia. Ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang memadai menjamin kemudahan penduduk untuk mengakses layanan kesehatan. Intervensi gizi terutama bagi ibu dan anak juga mengoptimalkan perkembangan dan pertumbuhan anak, bahkan sejak masih dalam kandungan ibu. Penguatan sistem jaminan kesehatan nasional membantu masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah agar tetap mampu memperoleh layanan kesehatan di tengah keterbatasan biaya. Adanya jaminan kesehatan juga membantu penduduk untuk menghindari atau bahkan menangani penyakit menular dan tidak menular.

Kebijakan yang mengarah pada investasi jangka panjang di sektor kesehatan melalui pembangunan sistem kesehatan universal akan menciptakan masyarakat sehat dan produktif yang berkontribusi lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi.

Dimensi pendidikan dibentuk oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dan berhubungan positif dengan tingkat produktivitas. Pembangunan sarana pendidikan yang memadai dan program wajib belajar menjadi ujung tombak perluasan akses pendidikan agar lebih merata. Pemberian beasiswa bagi keluarga kurang mampu menjadi jaring pengaman agar setiap anak di Indonesia memperoleh pendidikan yang layak. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, kualitas tenaga pendidik dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan

dunia kerja juga perlu didorong. Digitalisasi pendidikan akan mendorong peserta didik semakin berkompetensi.

Kebijakan pembangunan yang berorientasi pendidikan akan memberikan dampak jangka panjang dan berkelanjutan. Melalui pendidikan yang semakin tinggi, inovasi dan daya saing tenaga kerja juga akan terangkat.

Dimensi standar hidup layak diukur dari indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Untuk mendorong daya beli masyarakat, program pengentasan kemiskinan utamanya dibutuhkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Perlindungan sosial berupa bantuan tunai dan subsidi juga turut membantu penduduk untuk dapat hidup layak di tengah keterbatasan yang ada. Selain dari bantuan, upaya untuk meningkatkan taraf ekonomi rumah tangga adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dari sisi pemerintah, stabilisasi harga dan pengendalian inflasi membantu menjaga kestabilan situasi kondisi nasional.

Untuk mengatasi daya beli masyarakat yang masih rendah, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Pertumbuhan yang inklusif berarti kemiskinan dan ketimpangan berkurang dengan tetap mengedepankan distribusi kesejahteraan yang merata.

Hubungan antara IPM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

IPM bersifat strategis karena menginterpretasikan aspek sosial dan ekonomi secara simultan. Ada beberapa keterkaitan antara IPM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), antara lain;

1. Kesamaan tujuan dasar, yaitu peningkatan kesejahteraan manusia.

Secara konsep, IPM dan SDGs memiliki landasan filosofis yang sama, yaitu menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar: Kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), Pendidikan (pengetahuan), dan Standar hidup layak (pengeluaran per kapita). Sementara SDGs merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan tidak meninggalkan siapa pun (*leave no one behind*). Dengan demikian, IPM dapat dipandang sebagai ukuran ringkas dari sebagian tujuan utama SDGs yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan manusia.

2. Keterkaitan dimensi IPM dengan tujuan SDGs

Dimensi dalam IPM secara langsung berkaitan dengan beberapa tujuan SDGs, terutama yang terkait dengan pembangunan sosial dan ekonomi. Dimensi Kesehatan (Umur Panjang dan Hidup Sehat) di IPM dengan UHH sebagai indikatornya berkaitan erat dengan tujuan 3 SDGs yaitu *Good Health and Well-Being*. Dimensi Pendidikan (Pengetahuan) di IPM yang diwakili oleh RLS dan HLS sebagai indikatornya berkaitan erat dengan tujuan 4 SDGs yaitu *Quality Education*. Terakhir Dimensi Standar Hidup Layak di

IPM yang diwakili oleh pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sebagai indikatornya berkaitan erat dengan tujuan 1 SDGs yaitu *No Poverty* dan tujuan 8 yaitu *Decent Work and Economic Growth*. Selain itu, peningkatan dimensi IPM juga dipengaruhi oleh kemajuan tujuan SDGs lain seperti Tujuan SDGs 2: *Zero Hunger* (gizi dan ketahanan pangan), Tujuan SDGs 6: *Clean Water and Sanitation*, serta Tujuan SDG 10: *Reduced Inequalities*. Hal ini menunjukkan bahwa IPM merupakan hasil dari berbagai intervensi pembangunan yang tercermin dalam indikator SDGs.

Secara umum, hubungan antara IPM dan SDGs bersifat komplementer dan saling memperkuat. IPM memberikan ukuran ringkas mengenai capaian pembangunan manusia. SDGs menyediakan kerangka pembangunan yang lebih komprehensif yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, peningkatan capaian SDGs terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi, akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan IPM. Sementara IPM dapat digunakan sebagai indikator strategis untuk menilai kualitas pembangunan manusia dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

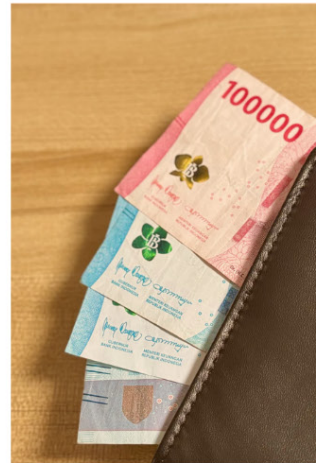
Strategi dan Kebijakan untuk Meningkatkan IPM

Ketiga dimensi pembentuk IPM saling terkait dan memberikan dampak simultan. Pendidikan dapat meningkatkan pendapatan. Pendapatan yang tinggi berkorelasi dengan akses kesehatan yang baik sehingga mendorong produktivitas. Produktivitas yang melaju pada akhirnya akan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, IPM menggeser paradigma pembangunan yang bukan hanya dinilai dari seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi seberapa besar kualitas hidup manusia meningkat. Pembangunan yang berorientasi pada IPM cenderung akan lebih inklusif dan berkelanjutan karena menempatkan manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Untuk itu, diperlukan strategi pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan menempatkan peningkatan kualitas manusia sebagai prioritas dalam perencanaan kebijakan. Pemerintah perlu memperkuat investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial secara simultan, disertai dengan upaya pemerataan akses antarwilayah dan kelompok masyarakat. Rancangan berbasis data menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi kesenjangan pembangunan manusia. Selain itu, dukungan terhadap penciptaan lapangan kerja yang berkualitas serta penguatan ekonomi masyarakat juga harus terus didorong untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan. Dengan sinergi lintas sektor dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, peningkatan IPM diharapkan dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB 2

CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA



<https://www.bps.go.id>

Capaian Pembangunan Manusia

2.1 Pembangunan Manusia di Era Globalisasi

Pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi berlangsung sangat pesat sehingga mempermudah pertukaran informasi di berbagai belahan dunia. Internet sebagai media komunikasi terus berkembang dan memungkinkan interaksi antarindividu menjadi lebih cepat dan luas. Pada tahun 2025, sekitar 68,7 persen penduduk dunia tercatat telah menggunakan internet, atau sekitar 5,65 miliar orang di seluruh dunia (*World Bank*, 2025).

Globalisasi juga membawa berbagai perubahan signifikan dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang bagi suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional. Namun di sisi lain, globalisasi dapat menimbulkan ketergantungan terhadap perekonomian global serta berpotensi mengikis nilai-nilai sosial dan budaya lokal yang dianut oleh masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan globalisasi tersebut, suatu negara perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi. Sumber daya manusia yang unggul dapat memberikan kontribusi positif bagi negara dalam merespons berbagai dinamika global. Oleh karena itu, pembangunan manusia menjadi salah satu faktor kunci dalam memastikan suatu negara mampu bersaing secara berkelanjutan di tingkat global.

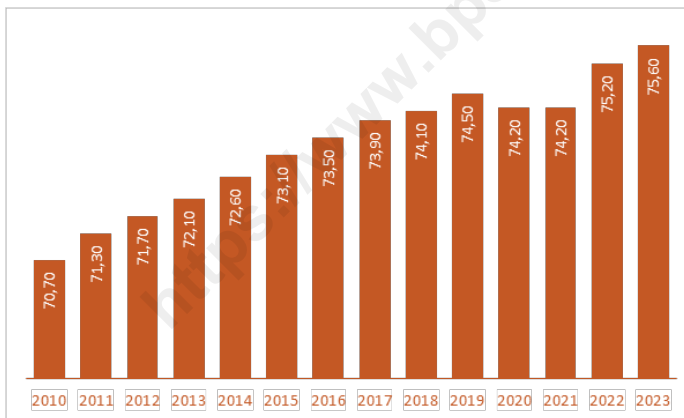
Di tengah perubahan kondisi global yang semakin dinamis, pembangunan manusia menjadi isu yang mendapat perhatian luas. Pembangunan manusia tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup, perluasan kesempatan, serta pemenuhan hak-hak dasar setiap individu. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak lagi menjadi tanggung jawab masing-masing negara semata, melainkan telah menjadi bagian dari agenda bersama dunia yang tercermin dalam berbagai kesepakatan internasional seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Dalam kerangka SDGs, pembangunan manusia dipandang sebagai fondasi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk mencapai hasil pembangunan manusia yang optimal, diperlukan strategi yang adaptif dalam menghadapi berbagai isu global. Dinamika kondisi global dan krisis iklim menjadi tantangan penting dalam upaya meningkatkan capaian pembangunan manusia. Namun demikian, setiap negara memiliki kondisi dan kapasitas yang berbeda dalam menghadapi tantangan tersebut, sehingga memengaruhi tingkat pencapaian pembangunan manusia di masing-masing negara.

Pembangunan Manusia dalam Agenda Global

Pembangunan manusia kini menjadi fokus utama dalam agenda global karena dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Namun, di tengah pesatnya kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi, dunia masih dihadapkan pada berbagai tekanan, seperti pandemi COVID-19 dan konflik di berbagai wilayah. Penyebaran COVID-19 yang melintasi batas negara telah mengganggu sektor kesehatan dan pendidikan secara luas, serta memicu kerugian ekonomi global (UNDP, 2024). Pandemi ini juga berdampak pada penurunan kualitas kesehatan dan harapan hidup manusia (Schöley et al, 2022 dan Aburto et al, 2022). Selain itu, penutupan sekolah dan perguruan tinggi untuk menekan penyebaran virus turut mengganggu proses pembelajaran dan menurunkan capaian Pendidikan (Teräs et al, 2020 dan Stanistreet et al, 2020). Pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi selama pandemi juga menyebabkan kontraksi ekonomi global hingga memicu resesi global (Băhnăreanu, 2020).

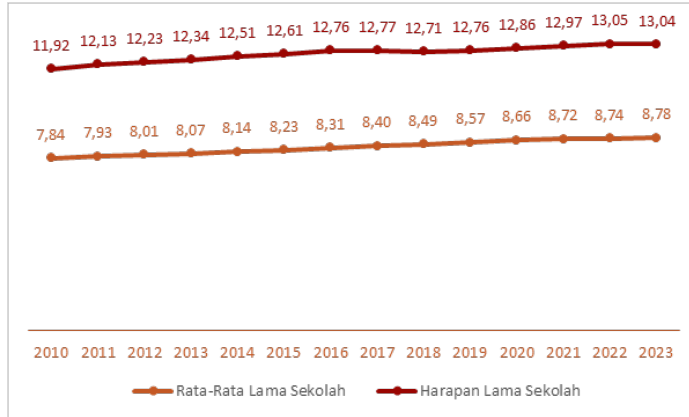
Penurunan kinerja di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi tersebut berdampak langsung pada penurunan *Human Development Index* (HDI) secara global. Pada tahun 2020 dan 2021, dunia mengalami penurunan HDI yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini mencerminkan besarnya dampak pandemi (UNDP, 2024). Seiring dengan meredanya pandemi yang terjadi, kondisi HDI secara global mulai membaik. Pada tahun 2023, HDI global mencapai angka 75,60 yang menjadi capaian tertinggi sepanjang waktu (Gambar 2.1).



Sumber: United Nations Development Programme, 2025

Gambar 2.1 Human Development Index (HDI) Dunia, 2010–2023

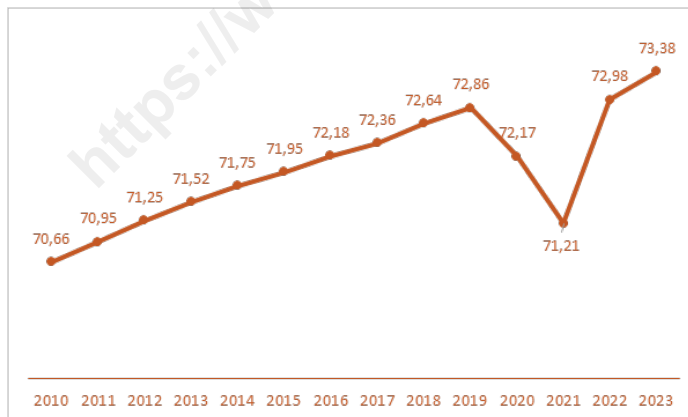
Perubahan HDI selama periode pandemi dan pemulihannya juga terlihat dari indikator penyusunnya. Di sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk dewasa dunia pada tahun 2023 tercatat sebesar 8,78 tahun. Sementara itu, harapan lama sekolah berada di angka 13,04 tahun, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, secara umum indikator ini tetap menunjukkan adanya akses pendidikan yang cukup baik serta kemampuan sistem pendidikan dalam menjangkau generasi muda (Gambar 2.2).



Sumber: United Nations Development Programme, 2025

Gambar 2.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Dunia (tahun), 2010–2023

Dampak pandemi terhadap sektor kesehatan sangat signifikan, terutama karena tingginya jumlah kasus dan kematian. Hingga April 2024, kasus COVID-19 di dunia mencapai sekitar 705 juta dengan lebih dari 7 juta kematian (Sumber: *Worldometers*). Kondisi ini berpengaruh besar terhadap umur harapan hidup, termasuk di Indonesia. Setelah meningkat secara konsisten sejak 2010, umur harapan hidup di Indonesia mengalami penurunan tajam dari 72,86 tahun pada 2019 menjadi 71,21 tahun pada 2021. Penurunan ini mencerminkan tekanan berat pada sistem kesehatan dan tingginya angka kematian, terutama pada kelompok lansia. Namun, sejak 2022 kondisi mulai pulih, dan pada 2023 umur harapan hidup meningkat menjadi 73,38 tahun, bahkan melampaui tingkat sebelum pandemi.

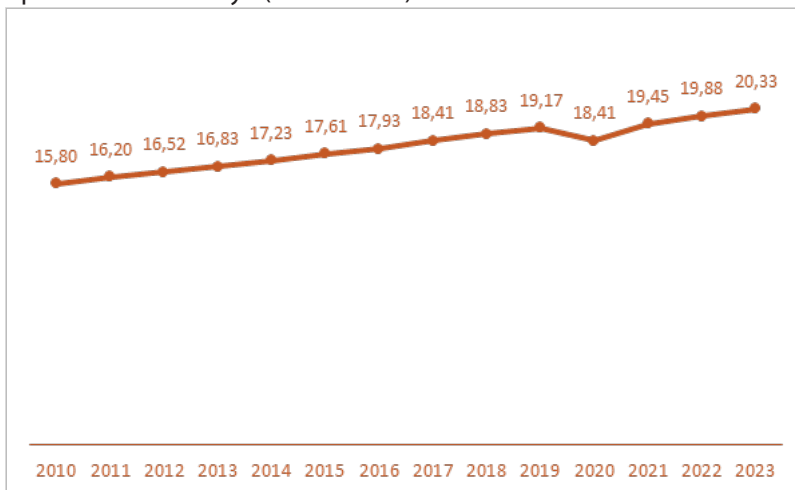


Sumber: United Nations Development Programme, 2025

Gambar 2.3 Umur Harapan Hidup Dunia (tahun), 2010–2023

Di sisi lain, pemulihan ekonomi global berlangsung lebih cepat dibandingkan sektor pendidikan dan kesehatan. Setelah mengalami kontraksi tajam pada tahun 2020 dengan pertumbuhan hanya 2,88 persen (Sumber: *World Bank Data*), ekonomi dunia mulai bangkit pada tahun berikutnya. Fluktuasi ini tercermin pada pendapatan nasional bruto

per kapita global, yang sempat menurun pada 2020 sebelum kembali meningkat dalam beberapa tahun setelahnya (Gambar 2.4).



Sumber: *United Nations Development Programme, 2025*

Gambar 2.4 Pendapatan Nasional Bruto per Kapita Dunia (ribu US\$), 2010–2023

Tren dan Perbandingan Capaian Pembangunan Manusia Antarnegara

Walaupun pembangunan manusia secara global mulai pulih setelah mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19, berbagai tantangan masih terus dihadapi. Dunia masih bergulat dengan ketimpangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pendapatan, serta tingginya tingkat kemiskinan dan dampak krisis iklim. Berbagai persoalan ini menjadi isu lintas negara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan yang merata. Tantangan tersebut juga tercermin dalam Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menekankan pentingnya pemerataan. Ketimpangan antarnegara menjadi perhatian utama karena menghambat pencapaian target pembangunan yang inklusif.

Dalam konteks pembangunan manusia, pendidikan merupakan komponen yang sangat penting. Namun, kondisi global menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antarnegara dalam hal akses, kualitas, dan hasil Pendidikan (Tabel 2.1). Anak-anak di negara berpenghasilan rendah, khususnya di kawasan Afrika dan Asia Selatan, memiliki peluang yang lebih kecil untuk menamatkan pendidikan dasar dibandingkan dengan anak-anak di negara berpenghasilan tinggi seperti di Amerika Utara, Eropa, dan Asia Timur. Hal ini berdampak pada tingginya angka putus sekolah di wilayah tersebut. Di Afrika Sub Sahara, tingkat putus sekolah sangat tinggi baik pada jenjang dasar maupun menengah, berbeda jauh dengan negara-negara maju yang memiliki tingkat putus sekolah sangat rendah. Di Asia Tenggara, angka putus sekolah pada jenjang sekolah menengah atas tergolong cukup tinggi dan berada di atas rata-rata dunia. Sementara itu, Indonesia mencatat angka putus sekolah di tingkat tersebut masih di bawah rata-rata global, meskipun pada jenjang sekolah menengah pertama justru lebih tinggi dibandingkan rata-rata kawasan (Sumber: UNESCO, *Global Education Monitoring Report 2023*).

Tabel 2.1 Rata-rata Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan untuk Setiap Murid Tahun 2018 dan Persentase Angka Putus Sekolah Tahun 2023 Menurut Kawasan dan Jenjang Sekolah

Kawasan	Pengeluaran untuk Pendidikan per Murid (2016 PPP US\$)			Tingkat Putus Sekolah (persen)		
	Sekolah Dasar	Sekolah Menengah	Sekolah Tinggi	Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Afrika Sub-Sahara	271	408	2.635	19	33	46
Asia Barat & Afrika Utara	6.822	7.147	4.970	11	10	21
Asia Selatan	895	752	3.523	8	13	40
Asia Timur	8.936	10.660	8.413	5	6	11
Asia Tenggara	1.514	4.135	7.364	4	10	33
Amerika Latin & Karibia	2.033	2.602	3.146	4	7	19
Eropa	7.856	8.031	8.315	2	1	6
Amerika Utara	9.659	12.711	12.657	3	2	4
Dunia	2.313	3.169	4.895	10	14	30

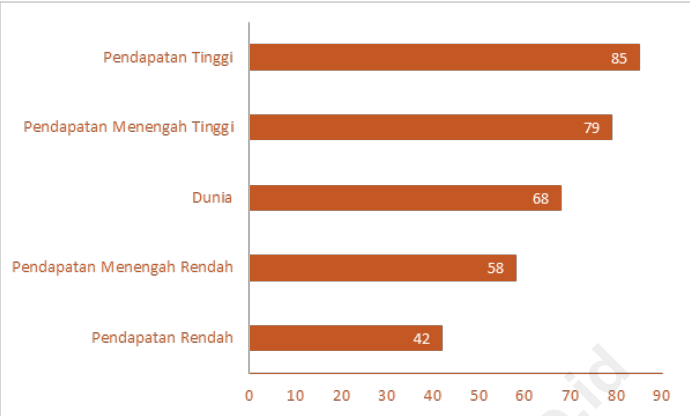
Sumber: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *Global Education Monitoring Report 2020 dan 2023*

Perbedaan tingkat putus sekolah tersebut tidak terlepas dari kondisi kesejahteraan suatu negara, yang salah satunya tercermin dari besaran anggaran pendidikan. Negara-negara dengan tingkat putus sekolah tinggi umumnya memiliki alokasi anggaran pendidikan yang lebih rendah. Sebagai gambaran, anggaran pendidikan pada jenjang sekolah dasar di negara-negara Amerika Utara bisa mencapai 35 kali lipat dibandingkan dengan negara-negara di Afrika Sub Sahara. Kesenjangan serupa juga terlihat pada jenjang pendidikan menengah yang mencapai 31 kali lipat (Tabel 2.1). Perbedaan alokasi ini turut memengaruhi indikator pendidikan dalam pembangunan manusia seperti rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Ketimpangan tidak hanya terjadi di bidang pendidikan, tetapi juga pada akses terhadap layanan kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari *Universal Health Care Service Coverage Index* yang mengukur tingkat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas. Indeks ini mencakup berbagai aspek seperti kesehatan ibu dan anak, penyakit menular dan tidak menular, serta kapasitas layanan Kesehatan (Sumber: *Global Health Observatory 2023*, WHO). Sebagai bagian dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya cakupan kesehatan semesta, indeks ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara negara berpendapatan tinggi dan rendah. Negara berpendapatan tinggi memiliki nilai indeks yang jauh lebih tinggi, bahkan bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan negara berpendapatan rendah, yang sebagian besar berada di kawasan Afrika (Gambar 2.5).

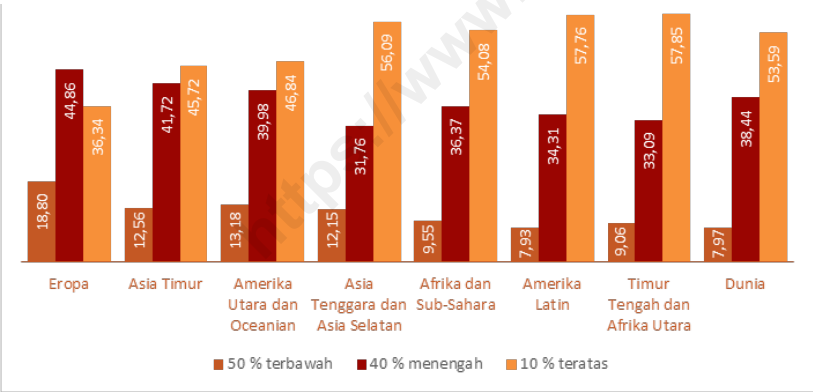
Terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan berdampak langsung pada tingginya angka kematian balita, terutama di kawasan Afrika. Angka kematian balita di wilayah ini mencapai sekitar 70 per 1000 kelahiran hidup, yang merupakan tingkat tertinggi secara global dan jauh melampaui kawasan lain seperti Eropa (WHO, 2024). Bahkan, kawasan

Afrika menyumbang lebih dari separuh total kematian balita di dunia pada tahun 2023 (Sumber: <https://childmortality.org/>). Selain itu, Asia Selatan juga mencatat angka kematian balita yang cukup tinggi, dengan jumlah mencapai 1,25 juta kasus. Secara keseluruhan, kedua kawasan tersebut menyumbang lebih dari 80 persen kematian balita global, sehingga menunjukkan besarnya tantangan dalam sektor kesehatan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan.



Sumber: United Nations Development Programme, 2024

Gambar 2.5 UHC Service Coverage Index Menurut Kategori Pendapatan Negara, 2021



Sumber: World Inequality Database, 2024

Gambar 2.6 Kontribusi Pendapatan Nasional Menurut Kawasan dan Kategori Pendapatan, 2023

Di tengah perkembangan global, ketimpangan pendapatan antarnegara masih menjadi perhatian utama karena berpotensi menghambat terwujudnya pembangunan manusia yang adil dan inklusif. Negara-negara maju di kawasan Eropa, Asia Timur, dan Amerika Utara umumnya memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah dibandingkan banyak negara berkembang. Hal ini tercermin dari distribusi pendapatan, di mana kelompok 40 persen penduduk berpendapatan menengah menyumbang hampir 50 persen dari total pendapatan, bahkan lebih besar dibandingkan kontribusi kelompok 10 persen teratas. Kondisi serupa juga terlihat di negara-negara Asia Timur seperti China, Jepang,

dan Korea Selatan yang tergolong negara maju (Gambar 2.6). Keberhasilan ini didukung oleh berbagai kebijakan yang mendorong pemerataan, seperti jaminan sosial yang luas, cakupan layanan kesehatan yang lebih universal, pendidikan yang gratis atau terjangkau, serta bantuan sosial bagi pengangguran dan kelompok miskin. Selain itu, penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan turut memastikan distribusi sumber daya dan kekayaan dapat berlangsung secara lebih adil.

Tabel 2.2 Capaian HDI dan Variabel Penyusunnya Menurut Kategori Capaian HDI, 2023

Kawasan/Wilayah	HDI	UHH Saat Lahir (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	PNB per Kapita (PPP US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Eropa dan Asia Tengah	0,818	74,79	15,56	10,70	23.171
Asia Timur dan Pasifik	0,775	75,91	14,59	8,26	19.520
Amerika Latin dan Karibia	0,783	75,61	14,77	9,13	18.048
Negara-negara Arab	0,719	72,47	11,97	8,07	15.825
Asia Selatan	0,672	71,87	12,15	6,79	8.722
Afrika Sub Sahara	0,568	62,51	10,35	6,16	4.352
Dunia	0,756	73,38	13,04	8,78	20.327

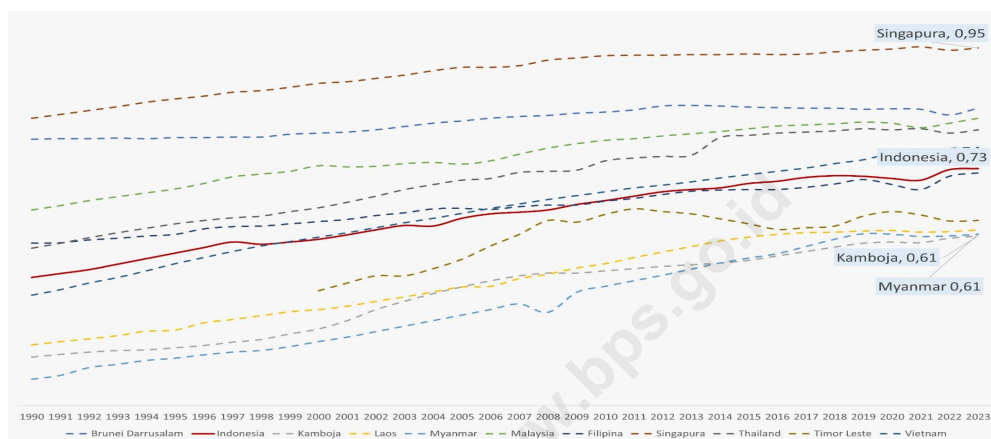
Sumber: *United Nations Development Programme, 2025*

Sebaliknya, ketimpangan yang tinggi tidak hanya menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga menghambat efisiensi dan pertumbuhan ekonomi (Stiglitz, 2012). Ketimpangan pendapatan yang besar dapat menghambat pencapaian pembangunan manusia di suatu negara. Negara dengan tingkat ketimpangan tinggi cenderung memiliki nilai pembangunan manusia yang lebih rendah, sementara negara dengan ketimpangan rendah umumnya memiliki capaian yang lebih baik. Hal ini terlihat pada negara-negara di kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah yang memiliki tingkat pembangunan manusia di bawah rata-rata dunia dan diikuti oleh ketimpangan pendapatan yang tinggi. Sebaliknya, negara-negara di Eropa yang memiliki tingkat pembangunan manusia tinggi menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif rendah (Tabel 2.2).

Jika tidak segera ditangani, ketimpangan global ini dapat menimbulkan dampak yang semakin besar. Tantangan tersebut menjadi semakin kompleks dengan adanya krisis iklim, konflik regional, dan ketegangan perdagangan yang memengaruhi ketersediaan pangan serta mengganggu sistem distribusi global. Negara-negara miskin menjadi pihak yang paling rentan terhadap dampak tersebut, termasuk ancaman terhadap ketahanan pangan dan meningkatnya risiko krisis kemanusiaan. Ketergantungan terhadap bantuan eksternal juga dapat memperlemah kondisi ekonomi mereka. Apabila berbagai tantangan ini tidak diatasi secara bersama, maka pencapaian pembangunan manusia secara global akan semakin terhambat.

Tren dan Perbandingan Capaian Pembangunan Manusia Indonesia diantara Negara-Negara ASEAN

Sejak tahun 1990, HDI Indonesia menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada tahun tersebut, HDI Indonesia berada di angka 0,53 dan masih tergolong dalam kategori rendah. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 1998 dan 2004, nilai HDI terus meningkat hingga mencapai 0,72 pada tahun 2018. Setelah itu, terjadi kembali penurunan pada tahun berikutnya, sebelum akhirnya meningkat menjadi 0,73 pada tahun 2023. Pada tahun 2023, posisi Indonesia berada di peringkat ke-6 dari 11 negara di kawasan ASEAN. Nilai HDI tertinggi dicapai oleh Singapura sebesar 0,95. Sementara itu, Kamboja dan Myanmar berada pada posisi terendah dengan nilai HDI yang sama, yaitu 0,61 (Gambar 2.7).



Sumber: United Nations Development Programme, 2025

Gambar 2.7 Perkembangan Human Development Index Negara-Negara ASEAN, 1990–2023

Secara global, Singapura menempati peringkat ke-13 sebagai negara dengan HDI tertinggi di dunia, diikuti oleh Brunei Darussalam pada peringkat ke-60, Malaysia pada peringkat ke-67, dan Thailand pada peringkat ke-76 (Tabel 2.3). Keempat negara tersebut masuk dalam 100 besar dunia. Sementara itu, Indonesia berada pada posisi ke-113 pada tahun 2023. Dari sisi komponen penyusunnya, Singapura unggul pada seluruh indikator, yaitu Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Produk Nasional Bruto per Kapita. Pada indikator Umur Harapan Hidup, Malaysia menempati posisi kedua di kawasan dengan nilai 76,66 tahun, sedangkan Indonesia berada di peringkat keenam di ASEAN dengan angka 71,15 tahun.

Pada dimensi pendidikan, Indonesia berada di peringkat kelima untuk Harapan Lama Sekolah dengan nilai 13,34 tahun, tepat di bawah Brunei Darussalam. Namun, untuk Rata-rata Lama Sekolah, Indonesia masih berada di bawah rata-rata dunia dan menempati peringkat ketujuh di ASEAN dengan capaian 8,70 tahun, hanya lebih tinggi dibandingkan Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Sementara itu, pada indikator Produk Nasional Bruto per kapita, Indonesia juga masih berada di bawah rata-rata global dan menempati posisi kelima di kawasan ASEAN, yang menunjukkan bahwa capaian pada dimensi ekonomi masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.3 Indikator Penyusun *Human Development Index* di Negara-Negara ASEAN, 2023

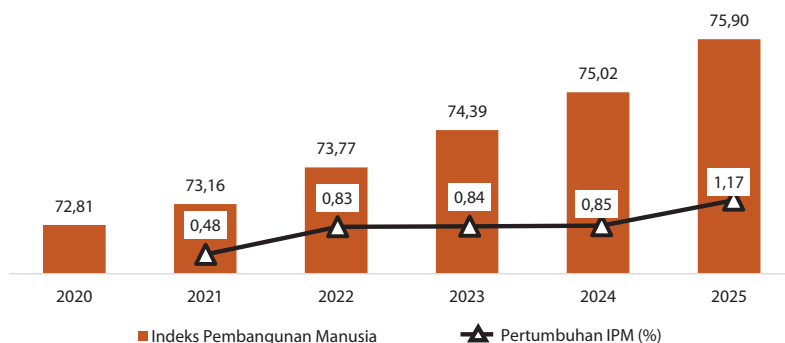
Negara	UHH Saat Lahir (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	PNB per Kapita (PPP \$)	HDI	Peringkat HDI Dunia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Singapura	83,74	16,74	11,99	111.239	0,95	13
Brunei Darussalam	75,33	13,70	9,28	75.827	0,84	60
Malaysia	76,66	12,68	11,09	32.553	0,82	67
Thailand	76,41	15,36	9,04	20.570	0,80	76
Vietnam	74,59	15,46	8,98	13.033	0,77	93
Indonesia	71,15	13,34	8,70	13.700	0,73	113
Filipina	69,83	12,82	9,98	10.731	0,72	117
Laos	68,96	9,61	6,06	8.106	0,62	147
Myanmar	66,89	11,50	6,38	4.919	0,61	150
Kamboja	70,67	11,20	5,20	4.931	0,61	151
Timor Leste	67,69	13,25	6,23	5.435	0,63	142
Dunia	73,38	13,04	8,78	20.327	0,76	

Sumber: *United Nations Development Programme, 2025*

2.2 Capaian Pembangunan Manusia Tingkat Nasional

Pembangunan manusia merupakan pendekatan fundamental dalam mengukur keberhasilan suatu negara dengan menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh proses pembangunan. Upaya ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup layak. Untuk menangkap capaian tersebut secara komprehensif, digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator terintegrasi yang merepresentasikan tiga dimensi utama.

Melalui pengukuran dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, IPM memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas hidup penduduk serta dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Bagi Indonesia, yang masih menghadapi tantangan ketimpangan antarwilayah dan kelompok sosial, IPM berfungsi sebagai cermin kondisi pembangunan manusia yang aktual, sekaligus alat untuk mengidentifikasi daerah yang membutuhkan intervensi kebijakan lebih lanjut. Meskipun pendekatan baru seperti Indeks Modal Manusia mulai dikembangkan untuk menilai potensi produktivitas jangka panjang, IPM tetap relevan sebagai indikator yang komunikatif, mudah dipahami oleh publik, dan konsisten digunakan dalam statistik resmi serta publikasi pembangunan nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, 2025

Gambar 2.8 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, 2020–2025

Pembangunan manusia di Indonesia terus memperlihatkan perkembangan yang positif sejak tahun 2020. Pada tahun 2025, IPM Indonesia berhasil mencapai angka 75,90 yang berada pada kategori tinggi. Selain itu, pertumbuhan IPM Indonesia mencapai laju pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir, yakni sebesar 1,17 persen selama periode 2020–2025. Jika dirata-ratakan, pertumbuhan IPM Indonesia dalam periode 2020–2025 mencapai sekitar 1,04 persen per tahun. Percepatan kenaikan IPM 2025 didorong oleh seluruh dimensi penyusunnya.

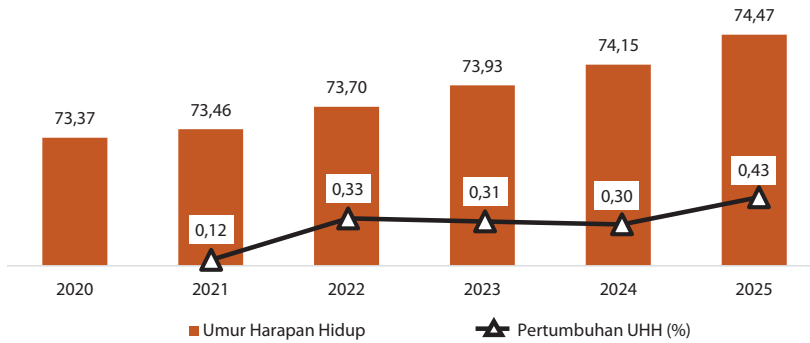
Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia juga menjadi hal yang penting. Berubahnya status pembangunan manusia merupakan indikator untuk melihat perkembangan pembangunan manusia. Status pembangunan manusia berdasarkan capaian IPM diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu:

- Sangat Tinggi: $IPM \geq 80$
- Tinggi: $70 \leq IPM < 80$
- Sedang: $60 \leq IPM < 70$
- Rendah: $IPM < 60$

Pembangunan manusia di Indonesia secara umum semakin baik. Selain ditandai dengan peningkatan level IPM, perkembangan Indonesia juga terlihat dari status pembangunan manusia. Sejak tahun 2016, Indonesia telah memasuki pembangunan manusia dengan status tinggi. Begitupula dengan kondisi saat ini, capaian pembangunan manusia yang sudah mencapai 75,90 menunjukkan bahwa Indonesia telah berstatus tinggi dalam pencapaian pembangunan manusia.

Masyarakat Indonesia Semakin Sehat

Salah satu komponen penyusun IPM adalah dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. UHH saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan UHH menunjukkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dalam semua aspek kesehatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, 2025

Gambar 2.9 Capaian dan Pertumbuhan Umur Harapan Hidup saat Lahir Indonesia (tahun), 2020–2025

Umur harapan hidup saat lahir Indonesia selama tahun 2020 sampai dengan 2025 terus mengalami peningkatan, atau meningkat sebesar 1,10 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir mempunyai harapan untuk dapat menjalani hidup lebih panjang. Secara tidak langsung, hal ini juga mencerminkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. UHH saat lahir Indonesia pada tahun 2025 mencapai 74,47 tahun, yang artinya bahwa bayi yang lahir pada tahun tersebut memiliki peluang hidup hingga usia lebih dari 74 tahun (Gambar 2.9). Jika dibandingkan tahun sebelumnya, UHH meningkat 0,32 tahun.

Tabel 2.4 Indikator Kesehatan Indonesia, 2024 dan 2025

Indikator Kesehatan	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebulan yang lalu	27,34	28,31
Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan (dokter, bidan dan tenaga medis)	96,81	97,19
Persentase Balita yang pernah mendapat imunisasi BCG	90,55	86,66
Persentase Balita yang pernah mendapat imunisasi DPT	85,88	83,53
Persentase Balita yang pernah mendapat imunisasi Polio	90,37	86,43
Persentase Balita yang pernah mendapat imunisasi Campak	72,45	63,52
Persentase penduduk yang berobat jalan sebulan yang lalu	38,70	39,64
Persentase penduduk yang rawat inap setahun terakhir	3,74	4,77

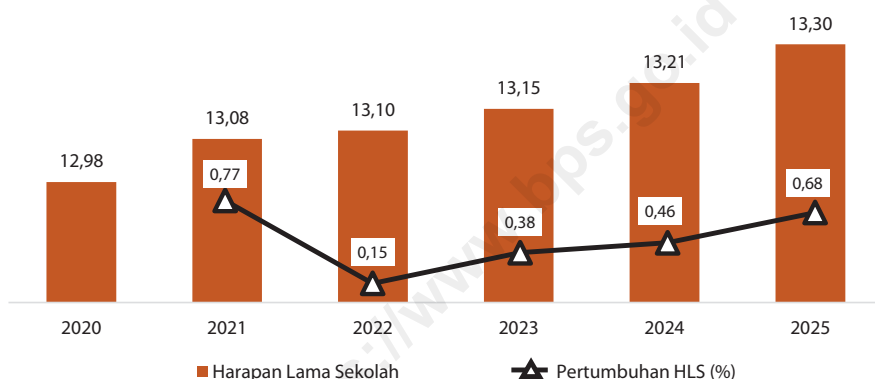
Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2025

Capaian peningkatan UHH pada 2025 dibarengi dengan peningkatan indikator kesehatan lainnya, yaitu peningkatan persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (Tabel 2.4). Namun demikian, tingkat keluhan kesehatan juga mengalami kenaikan. Kondisi ini juga diikuti oleh upaya untuk berobat jalan maupun yang melakukan rawat inap. Hal ini terlihat dari peningkatan persentase penduduk yang melakukan berobat jalan dan melakukan rawat inap (Tabel 2.4). Dengan semakin meningkatnya angka

keluhan kesehatan, diperlukan upaya perbaikan sistem kesehatan, akses layanan, serta langkah-langkah preventif, sehingga semua penduduk mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

Masyarakat Indonesia Semakin Berpengetahuan

Dimensi pengetahuan terdiri dari dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Cakupan dalam menghitung harapan lama sekolah adalah pendidikan penduduk dari usia 7 tahun ke atas, sementara cakupan penduduk untuk menghitung rata-rata lama sekolah yaitu dari usia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang, sedangkan harapan lama sekolah menggambarkan keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Lebih jauh, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah. Kedua indikator ini dikomposisikan menjadi indeks pendidikan dalam penghitungan IPM.



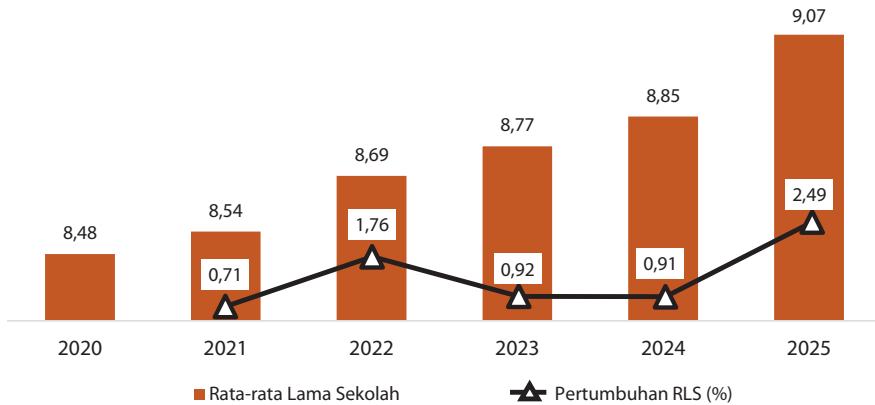
Sumber: Badan Pusat Statistik, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, 2025

Gambar 2.10 Capaian dan Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Indonesia (tahun), 2020–2025

Berdasarkan series data tahun 2020–2025, HLS dan RLS menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pertumbuhan HLS relatif lebih lambat dibandingkan dengan angka RLS. Hal ini disebabkan karena pada HLS masih terdapat ruang perbaikan yang cukup luas, terutama pada kelompok pendidikan dasar. HLS menggambarkan ukuran capaian program-program pendidikan dalam jangka pendek, sedangkan RLS menggambarkan ukuran capaian dalam jangka panjang. Kedua indikator ini menggambarkan penambahan (*flow*) dan capaian (*stock*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah. Secara rata-rata, HLS tumbuh sebesar 0,61 persen per tahun selama tahun 2020–2025, sedangkan RLS tumbuh sebesar 1,70 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama.

Angka RLS Indonesia pada 2025 tercatat sebesar 9,07 tahun (Gambar 2.11). Artinya, rata-rata penduduk berumur 25 tahun ke atas menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang SMP kelas IX. Angka ini meningkat sebesar 0,22 tahun atau tumbuh sebesar 2,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu angka HLS Indonesia pada 2025 sebesar 13,30 tahun (Gambar 2.10), yang berarti anak yang berusia 7 tahun pada 2025

diharapkan dapat bersekolah selama 13,30 tahun atau sampai dengan jenjang perguruan tinggi tahun pertama. HLS mengalami peningkatan 0,09 tahun atau sebesar 0,68 persen dibandingkan tahun sebelumnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, 2025

Gambar 2.11 Capaian dan Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah Indonesia (tahun), 2020–2025

Tabel 2.5 Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Indonesia, 2021–2025

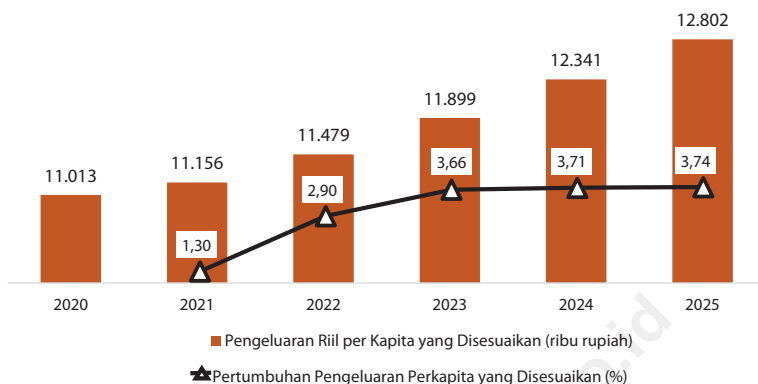
Indikator Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
APS Usia 7–12 Tahun	99,19	99,10	99,16	99,19	99,23
APS Usia 13–15 Tahun	95,99	95,92	96,10	96,17	96,30
APS Usia 16–18 Tahun	73,09	73,15	73,42	74,64	77,86
APM SD	97,80	97,88	97,89	97,94	97,00
APM SMP	80,59	80,89	81,35	81,73	80,65
APM SMA	61,65	61,97	62,53	64,32	67,44

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2025

Kenaikan RLS dan HLS didukung oleh kenaikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Data indikator pendidikan tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar di Indonesia sudah sangat merata, tercermin dari tingginya APS untuk usia 7–12 tahun yang stabil di atas 99 persen dan menengah pertama (usia 13–15 tahun) juga cukup tinggi dengan APS di atas 95 persen. APS usia 16–18 tahun juga mengalami peningkatan dari 73,09 persen menjadi 77,86 persen, namun angka ini masih jauh di bawah kelompok usia lainnya. Di sisi lain, Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD dan SMP tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, masing-masing sebesar 0,94 persen dan 1,08 persen. Sebaliknya, APM pada jenjang SMA menunjukkan peningkatan sebesar 3,12 persen. Meskipun mengalami peningkatan, capaian APM SMA masih berada jauh di bawah APM pada jenjang SD dan SMP. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat berbagai hambatan bagi penduduk usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yang dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, geografis, maupun sosial.

Kesejahteraan Masyarakat Semakin Tinggi

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Dari tahun ke tahun, pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan Indonesia pada 2025 adalah 12,8 juta rupiah per tahun, atau meningkat sebesar 3,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Gambar 2.12).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, 2025

Gambar 2.12 Capaian dan Pertumbuhan Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan di Indonesia (ribu rupiah), 2020–2025

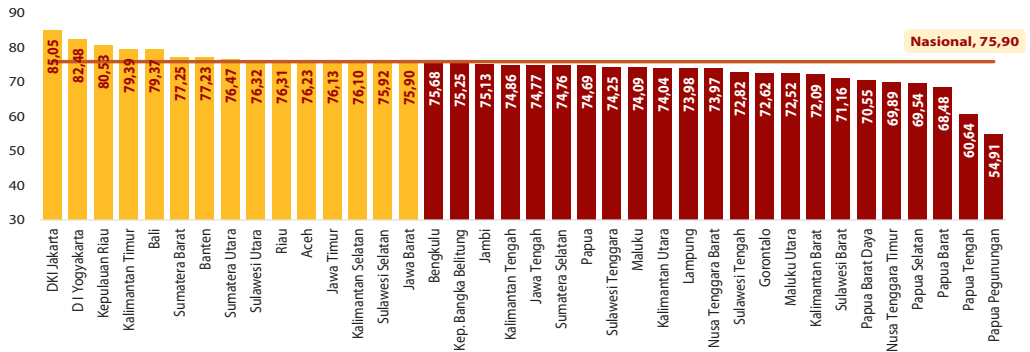
Peningkatan angka capaian pengeluaran riil per kapita penduduk Indonesia juga didukung indikator-indikator makro lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan pengangguran. Perekonomian Indonesia tetap tumbuh pada sekitar angka 5 persen pada tahun 2024 dan 2025, sementara tingkat penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 8,47 persen, menurun 0,10 persen poin terhadap September 2024 dan menurun 0,56 persen poin terhadap Maret 2024. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 sebesar 4,85 persen, turun 0,06 persen poin dibanding Agustus 2024. Tren positif ini mengindikasikan adanya optimisme pada perekonomian Indonesia, sekaligus pada pencapaian pembangunan manusia yang lebih baik.

2.3 Capaian Pembangunan Manusia Indonesia di Tingkat Daerah

Capaian Pembangunan Manusia di Tingkat Provinsi

Pembangunan manusia di tingkat nasional menunjukkan capaian yang positif dan konsisten berada pada kategori tinggi. Namun demikian, capaian agregat tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang merata antarprovinsi di Indonesia. Pada tahun 2025, DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan capaian IPM tertinggi, yakni sebesar 85,05 (kategori sangat tinggi). Sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang sebagai

pusat pemerintahan dan ekonomi nasional, tingginya capaian tersebut didukung oleh infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang relatif lebih memadai, akses layanan dasar yang inklusif, serta kondisi ekonomi yang telah berkembang maju dalam jangka panjang.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, 2025

Gambar 2.13 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi, 2025

Pola keunggulan ini juga terlihat pada provinsi-provinsi dengan capaian tertinggi lainnya yang mayoritas terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera. Kondisi tersebut menegaskan bahwa tingginya capaian IPM merupakan cerminan dari akumulasi investasi pembangunan manusia yang berkelanjutan, seiring dengan pemusatan aktivitas ekonomi dan tingginya tingkat urbanisasi di wilayah-wilayah tersebut.

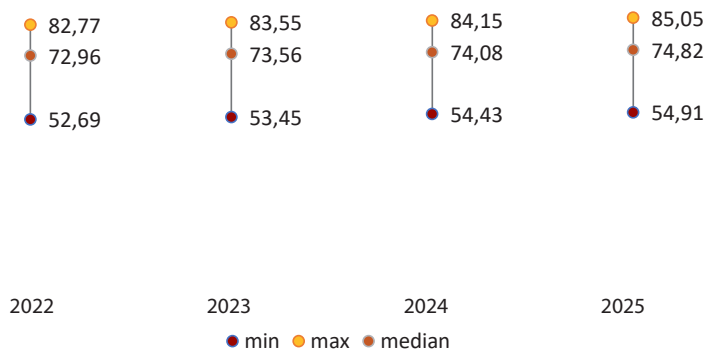
Sebaliknya, provinsi dengan capaian IPM rendah umumnya terkonsentrasi di wilayah Indonesia timur, khususnya pada provinsi-provinsi Daerah Otonom Baru (DOB). Pada tahun 2025, capaian IPM di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 54,91, menjadikan provinsi tersebut satu-satunya provinsi dengan IPM berkategori rendah. Sementara itu, provinsi DOB lainnya seperti Provinsi Papua Tengah (60,64), Provinsi Papua Barat (68,48) dan Provinsi Papua Selatan (69,54) telah berada di kategori sedang. Kondisi ini menunjukkan masih besarnya tantangan dalam meningkatkan pembangunan manusia di wilayah DOB. Besarnya tantangan ini sejalan dengan temuan Haryono, Dandan, dan St Ramlah (2024), yang menggarisbawahi bahwa ketertinggalan di wilayah Timur Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, serta masih minimnya akses terhadap layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Selain itu, ketimpangan ini juga merupakan akibat dari kebijakan pembangunan dan investasi yang selama ini lebih terpusat di wilayah Barat.

Apabila dilihat secara umum, capaian IPM terus mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan kualitas pembangunan manusia yang terus meningkat. Hal tersebut bukan hasil dari pembangunan dalam waktu singkat, melainkan cerminan akumulasi pembangunan manusia dalam jangka panjang di suatu wilayah. Meskipun demikian, isu utama yang menjadi perhatian dalam melihat capaian IPM antarprovinsi adalah kesenjangan antarprovinsi.

Disparitas pembangunan manusia antarprovinsi masih cukup signifikan, tercermin dari rentang capaian IPM antara provinsi tertinggi dan terendah yang mencapai lebih dari 30

Indeks Pembangunan Manusia 2025

poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan IPM secara nasional belum diiringi dengan penyempitan kesenjangan antarwilayah.

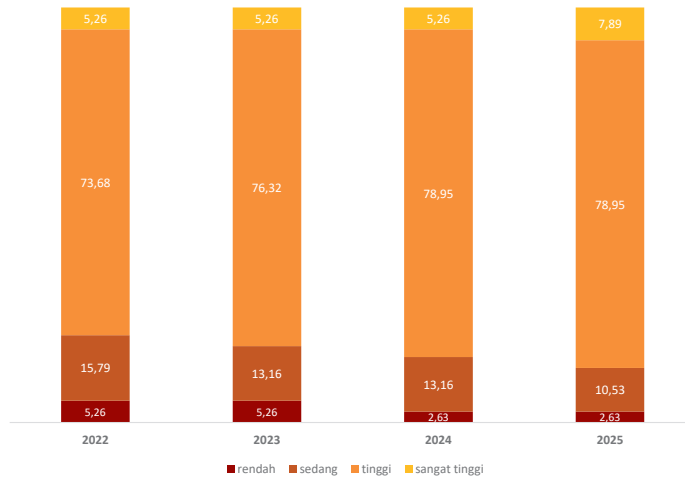


Sumber: Badan Pusat Statistik, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, 2025

Gambar 2.14 Disparitas Capaian Indeks Pembangunan Manusia Antarprovinsi di Indonesia, 2022–2025

Perkembangan IPM menunjukkan bahwa laju pertumbuhan IPM pada provinsi dengan nilai minimum relatif lebih lambat dibandingkan dengan provinsi dengan nilai maksimum. Akibatnya, selisih capaian IPM antara provinsi tertinggi dan terendah masih tetap lebar. Oleh karena itu, diperlukan akselerasi pertumbuhan pembangunan manusia, khususnya pada wilayah-wilayah dengan capaian IPM rendah dan sedang, agar kesenjangan antarprovinsi dapat dikurangi secara lebih signifikan. Meskipun demikian, apabila ditinjau berdasarkan status atau kategori capaian pembangunan manusia, perkembangan dari tahun ke tahun menunjukkan arah yang positif. Setiap tahun, semakin banyak provinsi yang mengalami peningkatan status capaian IPM. Pada tahun 2025, sebanyak 78,95 persen dari total provinsi di Indonesia (30 dari 38 provinsi) telah berada pada kategori tinggi, sementara 7,89 persen (3 dari 38 provinsi) telah mencapai status sangat tinggi. Persentase tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, jumlah provinsi dengan status capaian rendah dan sedang terus menurun dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2025, Provinsi Kepulauan Riau tercatat mengalami peningkatan status capaian IPM dari kategori tinggi menjadi sangat tinggi. Berdasarkan Tabel 2.6, capaian IPM Provinsi Kepulauan Riau berada pada angka 80,53, tumbuh 0,80 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan status ini didukung oleh pertumbuhan pada ketiga dimensi penyusunnya. Selain itu, secara spasial dua dari tujuh kabupaten/kota di provinsi tersebut telah mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi, yaitu Kota Batam dan Kota Tanjungpinang (ANTARA News, 2025). Berdasarkan Rabiya dkk. (2026), peningkatan IPM di Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari kuatnya kemampuan fiskal di daerah tersebut. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) khususnya untuk pengeluaran pada operasional dan pelayanan dasar, seperti belanja pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan masyarakat berhasil meningkatkan capaian IPM.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, 2025

Gambar 2.15 Persentase Provinsi Menurut Status Capaian Pembangunan Manusia, 2022–2025

Tabel 2.6 IPM dan Komponen Penyusunnya pada Provinsi dengan Capaian IPM Tertinggi dan Terendah, 2024 dan 2025

Provinsi	Umur Harapan Hidup (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran Riil per Kapita (ribu rupiah/kapita/tahun)		IPM (UHH LFSP2020)		Pertumbuhan IPM (persen)
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
IPM Tertinggi											
DKI Jakarta	75,99	76,27	13,51	13,80	11,49	11,59	19.953	20.676	84,15	85,05	1,07
DI Yogyakarta	75,36	75,64	15,70	15,78	9,92	10,20	15.361	15.855	81,62	82,48	1,05
Kepulauan Riau	75,12	75,46	13,27	13,28	10,50	10,72	15.573	15.881	79,89	80,53	0,80
Kalimantan Timur	74,94	75,28	14,03	14,04	10,02	10,10	13.793	14.254	78,79	79,39	0,76
Bali	75,10	75,46	13,62	13,63	9,54	9,75	14.920	15.383	78,63	79,37	0,94
IPM Terendah											
Nusa Tenggara Timur	71,83	72,16	13,23	13,34	8,02	8,22	8.534	8.735	69,14	69,89	1,08
Papua Selatan	68,46	68,71	12,67	12,68	8,38	8,64	9.756	9.983	68,86	69,54	0,99
Papua Barat	68,47	68,76	13,17	13,21	7,86	8,07	8.805	9.115	67,69	68,48	1,17
Papua Tengah	68,18	68,38	9,63	9,64	6,12	6,13	7.809	8.036	60,25	60,64	0,65
Papua Pegunungan	67,39	67,55	9,97	9,98	4,21	4,30	5.707	5.861	54,43	54,91	0,88

Sumber: Badan Pusat Statistik, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, 2025

Berdasarkan Tabel 2.6, dapat diketahui bahwa disparitas capaian antarprovinsi terjadi pada seluruh indikator pembentuk IPM, dengan kesenjangan yang sangat signifikan terlihat pada dimensi pendidikan dan standar hidup layak. Pada dimensi pendidikan, RLS di DKI Jakarta mencapai 11,59 tahun, yang menunjukkan secara rata-rata penduduk di wilayah tersebut menempuh pendidikan hingga hampir menyelesaikan jenjang SMA atau

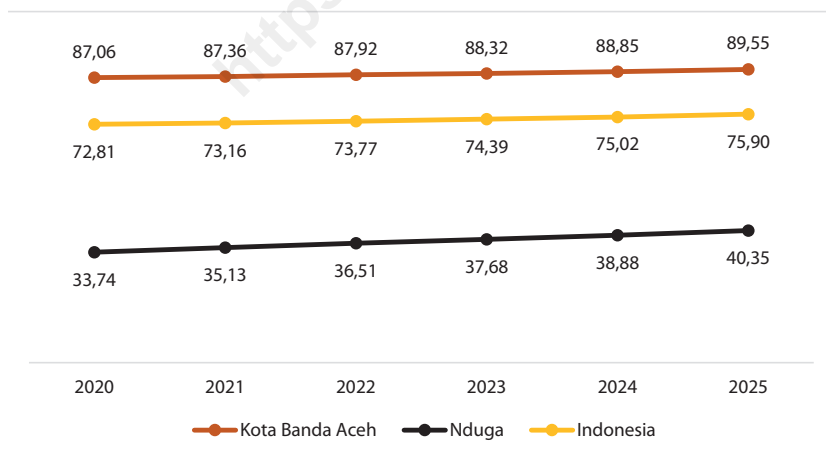
sederajat. Sebaliknya, RLS di Provinsi Papua Pegunungan hanya mencapai 4,30 tahun, yang berarti bahwa secara rata-rata penduduk belum menamatkan pendidikan SD atau sederajat. Variasi kualitas sumber daya manusia ini semakin terlihat jika membandingkan HLS, di mana Provinsi DI Yogyakarta mencatatkan capaian tertinggi sebesar 15,78 tahun, jauh di atas Provinsi Papua Pegunungan yang baru mencapai 9,98 tahun.

Selain itu, pengeluaran riil per kapita di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 20,67 juta rupiah, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Papua Pegunungan yang hanya sebesar 5,86 juta rupiah per kapita. Perbedaan ini mencerminkan kesenjangan kemampuan ekonomi masyarakat, yang berimplikasi pada keterjangkauan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dengan demikian, peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya percepatan pembangunan manusia di wilayah dengan capaian IPM rendah.

Kesenjangan kemampuan ekonomi dan keterjangkauan akses layanan ini sejalan dengan ketimpangan yang terjadi pada dimensi kesehatan. Tercatat, UHH penduduk Provinsi DKI Jakarta telah mencapai 76,27 tahun, sementara penduduk di Provinsi Papua Pegunungan memiliki harapan hidup yang lebih pendek, yakni 67,55 tahun.

Capaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota selama periode 2020–2025 menunjukkan dinamika yang cukup konsisten dengan arah pembangunan manusia secara nasional, meskipun masih diwarnai oleh kesenjangan antarwilayah yang relatif nyata (Gambar 2.16). Berdasarkan grafik perkembangan IPM, terlihat bahwa secara agregat IPM Indonesia mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pola ini juga tercermin pada IPM kabupaten/kota dengan capaian IPM tertinggi maupun terendah, walaupun dengan level dan kecepatan pertumbuhan yang berbeda.

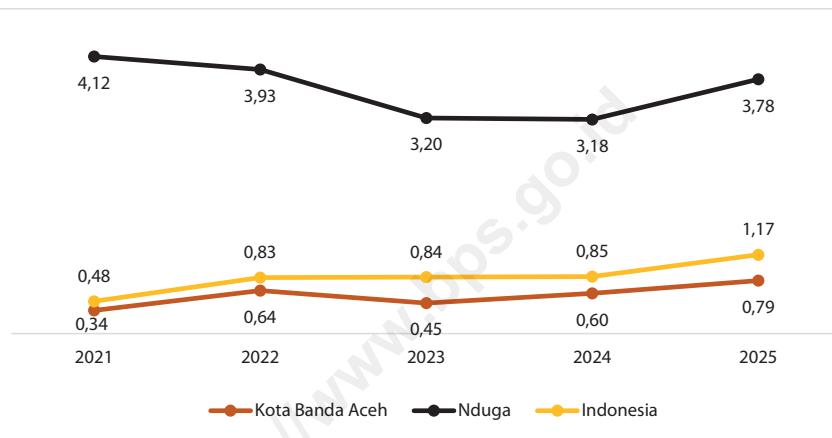


Sumber: Badan Pusat Statistik, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, 2025

Gambar 2.16 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota Tertinggi (Kota Banda Aceh) dan Kabupaten / Kota Terendah (Nduga) terhadap Indonesia, 2020–2025

Kabupaten/kota dengan IPM tertinggi yaitu Kota Banda Aceh, secara konsisten berada jauh di atas rata-rata nasional. Nilai IPM Kota Banda Aceh sejak Tahun 2020 hingga 2025 menunjukkan tren meningkat secara stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa fondasi pembangunan manusia di wilayah tersebut sudah cukup kuat, baik dari dimensi kesehatan, pendidikan, maupun standar hidup layak.

Di sisi lain, kabupaten dengan IPM terendah yaitu Kabupaten Nduga masih menunjukkan posisi yang jauh di bawah rata-rata nasional. Meskipun demikian, IPM Kabupaten Nduga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan IPM nasional dan IPM Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun (Gambar 2.17). Kenaikan ini menjadi sinyal positif bahwa upaya pembangunan manusia di wilayah dengan keterbatasan geografis dan struktural tetap berjalan. Namun, jarak antara IPM Kabupaten Nduga dan IPM nasional masih cukup lebar, yang menunjukkan bahwa tantangan pembangunan di wilayah tertinggal memerlukan intervensi yang lebih terarah serta berkelanjutan.

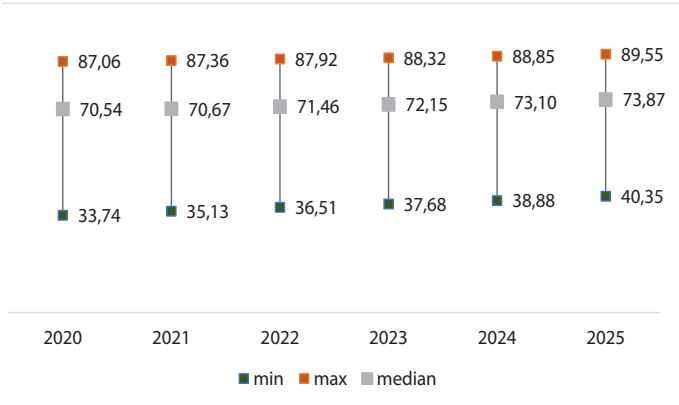


Sumber: Badan Pusat Statistik, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, 2025

Gambar 2.17 Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tertinggi (Kota Banda Aceh) dan Kabupaten / Kota Terendah (Nduga) terhadap Indonesia, 2021–2025

Grafik disparitas IPM antara kabupaten/kota tertinggi dan terendah memberikan gambaran lebih jelas mengenai ketimpangan pembangunan manusia. Selama periode 2020–2025, selisih IPM antara wilayah dengan capaian tertinggi dan terendah cenderung menunjukkan tren menurun (Gambar 2.18). Penurunan gap ini mengindikasikan bahwa secara perlahan disparitas IPM antarwilayah mulai menyempit. Meskipun demikian, nilai disparitas yang masih cukup besar menunjukkan bahwa kesenjangan tersebut belum dapat dikatakan kecil.

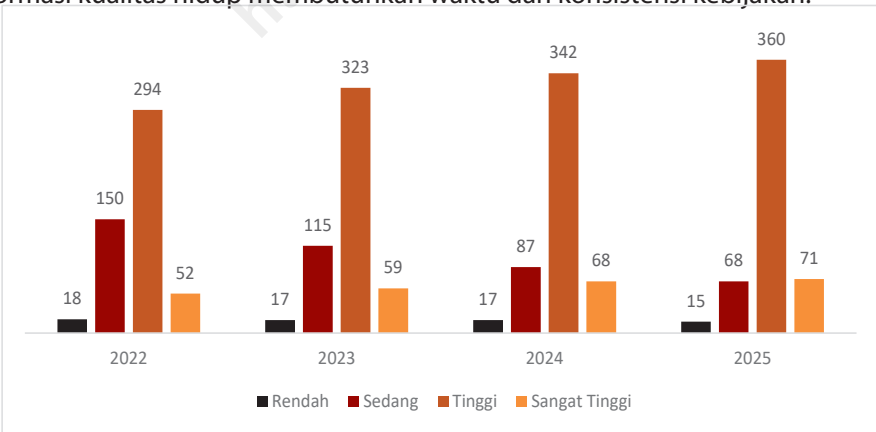
Penyempitan disparitas IPM ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari dua proses yang berjalan bersamaan. Pertama, adanya peningkatan IPM yang relatif lebih cepat di wilayah dengan capaian rendah, meskipun dari basis yang sangat rendah. Kedua, pertumbuhan IPM di wilayah dengan capaian tinggi yang cenderung melambat karena mendekati batas atas pencapaian indikator. Kombinasi kedua proses ini menghasilkan tren konvergensi secara perlahan, meskipun belum cukup kuat untuk menghasilkan pemerataan yang signifikan dalam jangka pendek.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, 2025

Gambar 2.18 Disparitas dan Capaian Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Indonesia, 2020–2025

Gambar 2.19 memperlihatkan bahwa mayoritas angka IPM kabupaten/kota di Indonesia berstatus tinggi. Jika dilihat perkembangannya, jumlah kabupaten/kota menurut status IPM selama periode 2020–2025 menunjukkan adanya pergeseran distribusi ke arah yang lebih baik. Jumlah kabupaten/kota dengan status IPM rendah dan sedang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada saat yang sama, jumlah kabupaten/kota dengan status IPM tinggi dan sangat tinggi mengalami peningkatan. Pergeseran ini menjadi indikasi positif bahwa secara struktural kualitas pembangunan manusia di tingkat daerah mengalami perbaikan. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan status IPM tinggi dan sangat tinggi menunjukkan bahwa banyak daerah berhasil keluar dari kategori rendah dan sedang, meskipun belum sepenuhnya mencapai kategori sangat tinggi. Hal ini mencerminkan keberhasilan intervensi pembangunan dasar, seperti peningkatan akses pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, dan penguatan daya beli masyarakat. Namun, laju perpindahan antarstatus IPM masih relatif bertahap, menandakan bahwa transformasi kualitas hidup membutuhkan waktu dan konsistensi kebijakan.



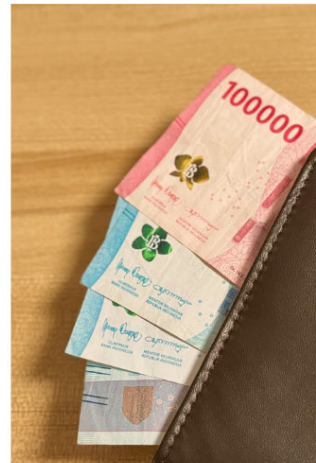
Sumber: Badan Pusat Statistik, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, 2025

Gambar 2.19 Jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia Menurut Status IPM, 2020–2025

BAB 3

TANTANGAN DAN PELUANG MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN MANUSIA

<https://www.>



Tantangan dan Peluang Mempercepat Pembangunan Manusia

Kualitas penduduk menjadi faktor kunci dalam mendorong daya saing sekaligus sebagai fondasi utama pembangunan. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki. Pembangunan manusia tidak hanya terbatas pada penguatan aspek ekonomi dan ketenagakerjaan, tetapi juga meliputi peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, serta perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Pembangunan manusia yang optimal akan memperkuat kreativitas dan produktivitas masyarakat, sehingga mampu mendorong tercapainya taraf hidup yang lebih sejahtera (Hilal & Sukamdi, 2015).

Upaya mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu permasalahan utama adalah ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta sumber-sumber ekonomi. Kesenjangan tersebut tercermin dalam perbedaan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara wilayah Barat dan Timur Indonesia. Secara umum, wilayah Timur menunjukkan tingkat IPM yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan wilayah Barat.

Meskipun berbagai hambatan masih dihadapi, terdapat potensi besar untuk mempercepat kemajuan pembangunan manusia. Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu peluang strategis, karena mampu memperluas jangkauan layanan pendidikan dan kesehatan serta memperkuat ekosistem ekonomi digital dalam mendukung pengembangan UMKM (Andalas, 2020; Negash, Musa, Vogel, & Sahay, 2018). Agar peluang tersebut dapat dioptimalkan sekaligus menjawab tantangan yang ada, dibutuhkan perumusan strategi yang komprehensif disertai regulasi yang fleksibel dan mampu mengakomodasi perubahan.

3.1 Tantangan

Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Kesenjangan capaian IPM antarwilayah menunjukkan masih kuatnya disparitas sosial dan ekonomi di Indonesia. Ketidaksetaraan tersebut sekaligus menjadi indikator adanya ketimpangan dalam proses dan hasil pembangunan (Ersad, Amir, & Zulgani, 2022). Dampaknya, peluang masyarakat untuk memperluas pilihan dan meningkatkan kualitas hidup menjadi tidak seimbang. Penduduk di daerah dengan tingkat pembangunan yang lebih maju umumnya menikmati akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan

kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di wilayah dengan tingkat pembangunan rendah sering kali menghadapi berbagai keterbatasan, bahkan dalam memperoleh layanan dan kebutuhan dasar secara memadai.

Terdapat kesenjangan signifikan dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara wilayah barat dan timur Indonesia, khususnya di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Ketimpangan ini dipicu oleh tidak meratanya akses pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi antarwilayah. Kondisi geografis Indonesia yang luas dan berupa kepulauan menjadi kendala utama dalam mendistribusikan layanan dasar serta infrastruktur. Akibatnya, daerah-daerah yang terisolasi dan jauh dari pusat ekonomi seperti Maluku dan Papua mengalami keterbatasan fasilitas, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kualitas pembangunan manusia di wilayah tersebut.

Ketimpangan antarwilayah pada dimensi kesehatan masih terlihat cukup signifikan, yang salah satunya tercermin dari perbedaan capaian Umur Harapan Hidup (UHH). Wilayah Maluku dan Papua tercatat memiliki nilai UHH yang berada pada kelompok terendah dibandingkan dengan wilayah lainnya (Tabel 3.1). Berdasarkan Teori Blum, derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa determinan utama, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan faktor genetik (Universitas Lambung Mangkurat 2021).

Tabel 3.1 Beberapa Indikator Kesehatan, 2025

Wilayah	Umur Harapan Hidup (UHH) ¹	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Kesehatan			Rasio Tenaga Medis per 1.000 Penduduk ²	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak
		Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sumatera	69,92–76,37	2,76	10,67	29,30	0,80	88,71	86,21
Jawa	73,47–78,75	5,46	13,40	24,76	0,77	96,54	84,94
Bali dan Nusa Tenggara	66,88–76,18	3,15	13,52	39,50	0,76	94,97	88,88
Kalimantan	72,48–76,24	2,54	13,01	45,16	0,59	83,22	87,87
Sulawesi	67,83–75,99	2,69	13,39	33,53	0,82	92,26	89,54
Maluku dan Papua	63,94–73,66	1,23	10,41	20,72	0,44	77,80	63,56
Indonesia	74,47	3,33	12,19	29,49	0,76	93,22	85,37

Catatan: ¹ Rentang nilai minimum dan maksimum kabupaten/kota

² Tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran).

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kesehatan

Dari perspektif pelayanan kesehatan, masih terdapat disparitas dalam akses terhadap fasilitas kesehatan maupun ketersediaan tenaga medis. Di wilayah Maluku dan Papua,

persentase desa yang memiliki rumah sakit, puskesmas, serta puskesmas pembantu relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Kondisi serupa juga tercermin pada rasio tenaga medis yang masih terbatas. Selain faktor pelayanan kesehatan, derajat kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh kualitas lingkungan tempat tinggal. Ketersediaan akses terhadap sumber air minum layak dan sanitasi layak merupakan indikator penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Sejalan dengan kondisi pelayanan kesehatan, wilayah Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua, juga menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak yang relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya (Tabel 3.1).

Ketimpangan pada dimensi pendidikan juga tercermin dari perbedaan capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) antarwilayah (Tabel 3.2). Nilai RLS terendah tercatat di kawasan Maluku dan Papua, khususnya di Provinsi Papua Pegunungan. Di provinsi tersebut, rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas hanya menempuh pendidikan hingga sekitar kelas IV sekolah dasar, sedangkan di Provinsi DKI Jakarta RLS telah mencapai setara kelas II sekolah menengah atas.

Kesenjangan capaian tersebut antara lain dipengaruhi oleh ketidakmerataan ketersediaan fasilitas pendidikan serta distribusi tenaga pengajar, terutama pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP) dan menengah atas (SMA). Secara umum, ketersediaan fasilitas pendidikan di tingkat desa di Pulau Jawa relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Sebaliknya, desa-desa di wilayah Maluku dan Papua memiliki ketersediaan fasilitas pendidikan yang jauh lebih terbatas. Sebagai ilustrasi, hanya sekitar 50 persen desa di Maluku dan Papua yang memiliki fasilitas sekolah dasar, sementara secara nasional lebih dari 80 persen desa telah memiliki sekolah dasar (Tabel 3.2). Ketimpangan ini cenderung semakin besar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dimana ketersediaan sekolah di tingkat desa semakin terbatas.

Tabel 3.2 Beberapa Indikator Pendidikan Menurut Pulau, 2025

Wilayah	Rata-rata Lama Sekolah ¹ (RLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sekolah			Rasio Murid-Guru SD TA 2023/2024
			SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	6,41–13,37	11,78–17,95	79,86	40,89	29,84	12,87
Jawa	5,19–12,13	12,03–17,67	99,15	58,74	52,06	16,55
Bali dan Nusa Tenggara	6,47–11,66	12,33–16,55	95,92	54,69	40,36	11,04
Kalimantan	6,55–11,69	11,55–15,41	93,56	47,59	27,09	13,08
Sulawesi	7,02–12,56	11,82–16,94	90,99	48,89	29,60	10,73
Maluku dan Papua	2,19–12,37	4,73–16,09	53,31	22,46	13,94	12,58
Indonesia	9,07	13,30	86,16	46,56	35,05	14,19

Catatan: ¹ Rentang nilai minimum dan maksimum kabupaten/kota

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Potensi Desa-Statistik Pendidikan-<https://www.bps.go.id/id/query-builder>, diolah penulis

Ketimpangan antarwilayah juga tercermin pada dimensi standar hidup layak, yang dapat dilihat dari perbedaan capaian pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Wilayah Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur mencatat tingkat pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat di wilayah tersebut dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa masih terbatas. Salah satu faktor yang memengaruhi tingkat pengeluaran adalah aktivitas ekonomi masyarakat, yang antara lain tercermin dari akses terhadap sumber pembiayaan, seperti kredit. Akses kredit memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Beck, Demirgüç-Kunt, dan Levine (2007) menyatakan bahwa akses terhadap kredit merupakan salah satu indikator perkembangan sektor keuangan yang berkaitan erat dengan dinamika aktivitas ekonomi di suatu wilayah.

Di wilayah Maluku dan Papua, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap kredit tercatat kurang dari 10 persen, sementara di sebagian besar wilayah lainnya, kecuali Sulawesi, proporsinya telah melampaui 20 persen (Tabel 3.3). Rendahnya akses terhadap kredit tersebut mencerminkan keterbatasan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat pengeluaran masyarakat di wilayah tersebut.

Tabel 3.3 Beberapa Indikator Capaian Standar Hidup Layak Menurut Pulau, 2025

Wilayah	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun) ³	Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit	Persentase Rumah Tangga Penerima KKS ¹	Persentase Pekerja Informal	Persentase Kondisi Permukaan Jalan Nasional Rusak Berat ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumatera	7.032–19.944	21,55	13,88	34,25–65,17	0,66
Jawa	9.173–26.387	25,37	17,96	36,63–61,73	0,04
Bali dan Nusa Tenggara	6.452–21.185	31,09	17,96	50,47–68,44	0,29
Kalimantan	8.598–18.861	16,59	8,16	43,22–56,39	2,29
Sulawesi	8.286–18.878	24,67	17,91	54,56–70,63	0,33
Maluku dan Papua	4.773–15.549	9,98	6,43	52,88–95,30	5,14
Indonesia	12.802	23,90	16,21	57,80	1,44

Catatan: ¹Data tahun 2024

²Kondisi Semester I 2025

³Rentang nilai minimum dan maksimum kabupaten/kota

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pekerjaan Umum

Selain akses terhadap pembiayaan, ketersediaan dan kualitas infrastruktur juga berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi. Infrastruktur transportasi, khususnya jalan, merupakan faktor kunci dalam memperlancar distribusi barang dan jasa. Namun demikian, pembangunan infrastruktur di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan antarwilayah. Hingga saat ini, kondisi permukaan jalan nasional yang mengalami kerusakan berat masih relatif banyak ditemukan di wilayah Indonesia bagian timur. Kondisi jalan yang kurang memadai dapat menghambat proses distribusi barang dan

jasa, sehingga meningkatkan biaya logistik dan harga produk. Peningkatan biaya tersebut pada akhirnya berpotensi menurunkan daya beli masyarakat apabila tidak diimbangi dengan tingkat pendapatan atau upah yang memadai.

Rendahnya tingkat aktivitas ekonomi di suatu wilayah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang dihadapi masyarakatnya (Ginting & Rasbin, 2010). Kemiskinan juga sering kali berkaitan erat dengan dominasi kegiatan ekonomi di sektor informal. Tingginya jumlah penduduk miskin di wilayah Maluku dan Papua tercermin dari besarnya proporsi pekerja yang berada di sektor informal di kawasan tersebut (Tabel 3.3). Sektor informal umumnya dikaitkan dengan karakteristik pekerjaan yang kurang layak, seperti tingkat upah yang relatif rendah, kondisi kerja yang berat dan berisiko, serta ketiadaan jaminan sosial maupun perlindungan ketenagakerjaan (ILO, 2010). Oleh karena itu, tingginya proporsi pekerja di sektor informal dapat berimplikasi pada rendahnya tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan.

Bagi masyarakat yang berada dalam kondisi miskin, keberadaan program jaring pengaman sosial menjadi penting untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar. Wilayah Indonesia bagian timur yang memiliki jumlah penduduk miskin relatif lebih besar seharusnya memperoleh cakupan program perlindungan sosial yang lebih luas, salah satunya melalui program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Namun demikian, akses masyarakat terhadap program KKS di wilayah tersebut masih relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Kondisi ini berpotensi menyebabkan program perlindungan sosial belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok sasaran, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin di wilayah Maluku dan Papua menjadi kurang optimal. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi rendahnya capaian pembangunan manusia di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan capaian pembangunan manusia antarwilayah, baik pada dimensi pendidikan, kesehatan, maupun standar hidup layak, masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional. Meskipun pembangunan manusia di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir, kesenjangan antarwilayah masih relatif lebar. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang memadai dan terdistribusi secara lebih merata menjadi salah satu kunci untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Infrastruktur yang baik, seperti jaringan jalan yang layak, akses listrik, konektivitas internet, serta ketersediaan fasilitas kesehatan yang merata, tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga dapat mendorong terbukanya peluang ekonomi yang lebih luas di berbagai wilayah.

Pengangguran dan Kemiskinan

Pengangguran dan kemiskinan merupakan dua permasalahan utama yang banyak dihadapi oleh negara-negara berkembang. Dalam perspektif ekonomi makro, teori Keynes menyatakan bahwa pengangguran merupakan salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan (Prasetyo & Cahyani, 2022). Temuan tersebut juga didukung oleh berbagai penelitian empiris di sejumlah negara. Penelitian yang dilakukan oleh Akinmulegun (2014) di Nigeria menunjukkan bahwa tingginya tingkat

pengangguran menjadi penyebab utama meningkatnya kemiskinan di negara tersebut. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian Kiaušienė (2015), yang menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran perempuan di 28 negara Eropa memiliki korelasi positif dengan risiko kemiskinan.

Dari sudut pandang ekonomi, pengangguran berimplikasi pada rendahnya tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat, sehingga meningkatkan risiko individu atau rumah tangga untuk jatuh ke dalam kondisi kemiskinan. Secara umum, kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi ketika individu tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam perkembangannya, konsep kemiskinan tidak lagi terbatas pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup keterbatasan kapasitas individu dalam mengakses berbagai sumber daya penting, seperti pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta infrastruktur dasar yang meliputi perumahan yang memadai, akses listrik, dan air bersih. Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga sebagai kegagalan dalam pemenuhan hak-hak dasar manusia. Hak-hak dasar tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, perumahan, akses terhadap sumber daya alam, lingkungan hidup yang layak, rasa aman dari ancaman kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Tabel 3.4 Hubungan Antara Kemiskinan dan IPM di Tingkat Provinsi, 2025

Kategori	Jumlah Provinsi	Provinsi
(1)	(2)	(3)
Persentase penduduk miskin provinsi di atas persentase penduduk miskin nasional dan IPM provinsi di bawah angka IPM nasional	17	Sumsel, Bengkulu, Lampung, Jateng, NTB, NTT, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Maluku, semua provinsi di Pulau Papua
Persentase penduduk miskin provinsi di atas persentase penduduk miskin nasional dan IPM provinsi di atas angka IPM nasional	3	Aceh, D.I. Yogyakarta, Jatim
Persentase penduduk miskin provinsi di bawah persentase penduduk miskin nasional dan IPM provinsi di bawah angka IPM nasional	6	Jambi, Kep. Bangka Belitung, Kalbar, Kalteng, Kaltara, Maluku Utara
Persentase penduduk miskin provinsi di bawah persentase penduduk miskin nasional dan IPM provinsi di atas angka IPM nasional	12	Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, DKI Jakarta, Jabar, Banten, Bali, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulsel

Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap berbagai sumber daya tersebut pada akhirnya berdampak pada rendahnya capaian pembangunan manusia. Tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat menjadi hambatan utama bagi suatu wilayah dalam mempercepat proses pembangunan. Pada Tabel 3.4 disajikan pengelompokan provinsi berdasarkan kategori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan yang menunjukkan adanya hubungan yang cukup erat antara kedua indikator tersebut. Sebagian besar provinsi di Indonesia yang memiliki persentase penduduk miskin di atas rata-rata nasional juga menunjukkan capaian IPM yang berada di bawah rata-rata nasional.

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan, maka semakin rendah pula capaian IPM di wilayah tersebut. Dengan kata lain, kemiskinan memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan tingkat pembangunan manusia. Hasil analisis korelasi juga menunjukkan hubungan yang kuat antara kedua variabel tersebut, dengan nilai koefisien korelasi Pearson sebesar -0,82.

Teknologi dan Digitalisasi

Digitalisasi memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kemudahan dan perluasan akses terhadap berbagai layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi. Pemanfaatan teknologi digital, khususnya internet, memungkinkan masyarakat memperoleh layanan secara jarak jauh, antara lain melalui pembelajaran daring dan layanan kesehatan berbasis telemedicine (Vandelanotte dkk., 2011; ITU, 2017). Selain itu, digitalisasi juga menciptakan peluang untuk memperluas jangkauan pasar sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat (Astuti dan Wulandari, 2023). Dengan demikian, transformasi digital berperan dalam mendukung terciptanya kehidupan yang lebih sehat, berumur panjang, serta produktivitas yang lebih tinggi (Natakusumah, 2022).

Tabel 3.5 Persentase Pengguna Internet, 2023

Negara	Persentase
(1)	(2)
Dunia	70,10
Negara berpendapatan tinggi (<i>High income</i>)	91,80
Negara berpendapatan menengah ke atas (<i>Upper middle income</i>)	79,10
Negara berpendapatan menengah ke bawah (<i>Lower middle income</i>)	56,20
Negara berpendapatan rendah (<i>Low income</i>)	24,70
Malaysia	97,70
Singapura	94,30
Thailand	89,50
Vietnam	78,10
Indonesia	69,20

Sumber: World Bank, <https://databank.worldbank.org/>

Dalam konteks global, perkembangan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dipantau oleh *International Telecommunication Union* (ITU) melalui penyusunan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK). Rata-rata nilai IP-TIK negara berpendapatan tinggi tercatat berada di atas 90 poin, sementara negara berpendapatan rendah hanya mencapai rata-rata 36,2 poin. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan digital masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan yang cukup signifikan antar kelompok negara berdasarkan tingkat pendapatan (ITU, 2024). Temuan ini sejalan dengan data Bank Dunia yang mengindikasikan adanya kesenjangan akses layanan internet antarnegara. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.5, persentase pengguna internet di negara berpendapatan tinggi telah melampaui 90 persen,

sedangkan di negara berpendapatan rendah masih berada di bawah 30 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa sekitar 70 persen penduduk di negara berpendapatan rendah masih belum memiliki akses terhadap layanan internet.

Tingkat penggunaan internet di Indonesia berada diantara rata-rata penggunaan internet di negara berpendapatan menengah atas dan negara berpendapatan menengah bawah. Jika ditinjau secara regional, persentase pengguna internet di Indonesia juga masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara (Tabel 3.5). Meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu mendorong pemerataan akses digital, setiap negara menghadapi karakteristik, tantangan, dan pendekatan kebijakan yang berbeda dalam mewujudkan transformasi digital (ITU, 2024).

Pada tingkat nasional, Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan kapasitas dan kapabilitas dalam pembangunan digital, yang antara lain disebabkan oleh infrastruktur digital dan tingkat literasi digital yang masih relatif rendah serta belum merata (UU No. 59 Tahun 2024; IMD, 2024). Keterbatasan infrastruktur tersebut salah satunya tercermin dari ketersediaan Base Transceiver Station (BTS). Hingga tahun 2025, secara nasional sekitar 42,74 persen desa masih belum memiliki BTS (Tabel 3.6), yang berimplikasi pada terbatasnya jangkauan sinyal telepon seluler di berbagai wilayah. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 3,23 persen desa yang belum terjangkau sinyal telepon seluler (Tabel 3.6). Selain itu, kepemilikan perangkat pendukung akses internet seperti komputer, laptop, atau tablet di rumah tangga juga masih relatif terbatas. Saat ini, hanya sekitar satu dari lima rumah tangga di Indonesia yang memiliki perangkat tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mengakses internet melalui telepon seluler.

Tabel 3.6 Beberapa Indikator Digitalisasi di Indonesia, 2025

Wilayah	Persentase Desa yang Tidak Memiliki BTS	Persentase Desa yang Tidak Dapat Menerima Sinyal Telepon Seluler	Persentase Desa yang Tidak Dapat Menerima Sinyal Internet	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Komputer/ Laptop/Tablet	Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Internet	Persentase Penduduk yang Mengakses Internet
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	50,55	0,98	1,35	18,13	88,87	75,10
Jawa	30,85	0,02	0,02	20,80	87,94	75,93
Bali Nusa Tenggara	41,45	0,35	0,63	18,02	83,38	68,63
Kalimantan	35,66	2,26	3,77	21,60	90,50	76,15
Sulawesi	46,39	1,23	1,94	20,14	87,22	71,69
Maluku Papua	53,86	21,71	26,29	15,08	67,82	51,32
Indonesia	42,74	3,23	4,12	19,94	86,13	74,34

Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain pertumbuhan yang relatif terbatas, kesenjangan digital terutama yang dipengaruhi oleh faktor geografis merupakan salah satu tantangan utama dalam proses digitalisasi

(ITU, 2024). Perbedaan kondisi antarwilayah menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses dan ketersediaan infrastruktur digital antara wilayah barat dan timur Indonesia (Tabel 3.6). Wilayah Maluku dan Papua secara konsisten mencatat capaian terendah dalam hal keterjangkauan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi ini juga tercermin pada kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan informasi dan komunikasi yang masih relatif terbatas dibandingkan wilayah lainnya.

Keterbatasan pembangunan infrastruktur dasar yang belum merata turut menjadi hambatan dalam percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi daerah, khususnya di Papua dan wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Berbagai faktor struktural turut memengaruhi kondisi tersebut, antara lain karakteristik geografis yang menantang, terutama wilayah pegunungan dengan aksesibilitas rendah, pola permukiman yang tersebar dan relatif terisolasi, serta kondisi keamanan yang belum sepenuhnya stabil akibat konflik yang terjadi di beberapa wilayah (UU No. 59 Tahun 2024). Selain itu, rendahnya arus investasi domestik ke kawasan ini, yang antara lain dipengaruhi oleh jaraknya yang relatif jauh dari pusat-pusat kegiatan ekonomi, juga berkontribusi terhadap lambatnya pembangunan di wilayah timur Indonesia.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital terbukti memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama pada sektor kesehatan (WHO, 2006) dan pendidikan (ITU, 2017). Pengembangan infrastruktur digital yang disertai dengan peningkatan literasi digital berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai peluang ekonomi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mendorong peningkatan capaian pembangunan manusia, seperti meningkatnya harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Namun demikian, ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur digital berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan manusia antarwilayah apabila tidak diatasi secara memadai.

3.2 Peluang

Bonus Demografi

Bonus demografi yang tengah dialami Indonesia merupakan peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pencapaian pembangunan manusia (Adioetomo dan Mujahid, 2014). Besarnya proporsi penduduk usia kerja dapat menjadi potensi penting dalam mencapai tujuan tersebut apabila didukung oleh peningkatan kualitas modal manusia. Adioetomo dan Mujahid (2014) menyebutkan bahwa peningkatan modal manusia merupakan bagian dari penguatan kapabilitas manusia dalam kerangka pembangunan manusia. Oleh karena itu, secara konseptual modal manusia menjadi bagian integral dari pembangunan manusia.

Namun, bonus demografi tidak secara otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Bloom et al. menyatakan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga kerja. Selain itu, Cuaresma, Lutz, dan Sanderson (2014) menegaskan bahwa pendidikan merupakan kekuatan utama dalam memanfaatkan bonus demografi,

sehingga pendidikan menjadi aspek penting dalam pembangunan manusia.

Pendidikan bertujuan untuk menghasilkan modal manusia yang memiliki kapabilitas yang tidak hanya bersumber dari penguasaan keterampilan teknis. Dalam dunia kerja, tenaga kerja juga dituntut memiliki keterampilan hidup (*life skills*) seperti kejujuran, kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, integritas, serta perilaku yang mendukung peningkatan produktivitas (Di Gropello, 2013). Selain melalui pendidikan formal, keterampilan teknis juga dapat diperoleh melalui pelatihan dan kursus yang berperan dalam meningkatkan keahlian serta kompetensi tenaga kerja.

Peningkatan kapabilitas sumber daya manusia tidak hanya bergantung pada kualitas pendidikan, tetapi juga pada kondisi kesehatan yang baik agar individu mampu bekerja secara produktif dan memiliki daya saing di era globalisasi (Adioetomo dan Mujahid, 2014). Di sisi lain, jika pasar kerja mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang melimpah, maka produktivitas tenaga kerja perlu dioptimalkan (Hayes dan Setyonaluri, 2015).

Dari perspektif pendidikan, akses pendidikan di Indonesia tergolong cukup baik. Namun demikian, dari sisi kualitas, Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Hal ini tercermin dari hasil *Programme for International Student Assessment* (PISA) tahun 2022 yang menunjukkan bahwa skor Indonesia masih relatif rendah pada bidang membaca, matematika, dan sains. Indonesia menempati peringkat 69 dari 81 negara pada kemampuan membaca, peringkat 71 pada matematika, serta peringkat 70 pada sains (OECD, 2023). Dibandingkan dengan negara-negara di kawasan, capaian Indonesia hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan Kamboja (Tabel 3.7).

Tabel 3.7 Skor *Programme for International Student Assessment* (PISA) Indonesia dan Negara-Negara ASEAN, 2022

Negara	Skor Membaca	Skor Matematika	Skor Sains
(1)	(2)	(3)	(4)
Singapura	575	543	561
Brunei Darussalam	442	429	446
Malaysia	409	388	416
Thailand	394	379	409
Indonesia	366	359	383
Kamboja	336	329	347

Sumber: OECD, *PISA 2022 Results* (Volume I)

Peningkatan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan upaya mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan dan kesenjangan akses terhadap fasilitas pendidikan. Saat ini masih terdapat perbedaan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, khususnya wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal), masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan yang memadai. Di tengah perkembangan digitalisasi, akses internet telah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia, yaitu sekitar 99 persen wilayah, meskipun kualitas sinyal yang diterima masyarakat masih bervariasi. Akses internet menjadi komponen penting dalam

mendukung proses pembelajaran, baik sebagai sumber informasi maupun sebagai media pembelajaran daring.

Pada sektor kesehatan, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang terjangkau. Implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan layanan kesehatan yang bersifat universal. Selain itu, berbagai program kesehatan reproduksi terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi yang lebih sehat dan bebas dari stunting. Di sisi lain, kondisi pasar kerja di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Meningkatnya proporsi tenaga kerja di sektor informal dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kualitas dan struktur pasar kerja masih perlu diperbaiki. Pada tahun 2025, proporsi tenaga kerja informal mencapai 57,80 persen, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 56,70 persen.

Berdasarkan berbagai kondisi tersebut, pemanfaatan bonus demografi sebagai momentum untuk mempercepat pembangunan manusia memerlukan upaya yang lebih serius dan terarah. Tantangan sosial ekonomi yang dihadapi Indonesia masih cukup kompleks dan membutuhkan pembenahan dari berbagai sektor. Keberhasilan dalam memanfaatkan bonus demografi juga perlu dimulai sejak usia dini melalui investasi yang berkelanjutan pada pembangunan sumber daya manusia.

Teknologi Digital dan Inovasi

Kemajuan teknologi digital berkembang dengan sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pemanfaatannya semakin meluas di berbagai sektor, terutama sejak terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Situasi tersebut mendorong berbagai inovasi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai solusi alternatif dalam menjalankan berbagai kegiatan. Saat ini teknologi digital telah diterapkan pada berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, keuangan dan perbankan, transportasi, serta pariwisata. Digitalisasi memberikan peluang yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih inklusif. Selain itu, perkembangan internet dan teknologi digital juga membuka peluang yang luas dalam mendukung pembangunan manusia melalui peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi berbasis digital.

Dalam sektor pendidikan, perkembangan teknologi digital memberikan peluang yang signifikan dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh dan *e-learning* (World Bank, 2022). Model pembelajaran ini memungkinkan peserta didik dari berbagai wilayah untuk memperoleh akses terhadap materi pembelajaran yang sama tanpa terbatas oleh lokasi geografis. Pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan melalui berbagai program, salah satunya melalui platform Belajar.id yang menyediakan bahan ajar digital bagi guru dan siswa di seluruh Indonesia (World Bank, 2021). Selain itu, sumber pengetahuan juga semakin mudah diakses melalui berbagai platform digital seperti YouTube, *e-book*, serta berbagai sumber pembelajaran daring lainnya. Meskipun demikian, implementasi digitalisasi pendidikan perlu tetap disesuaikan

dengan kerangka kebijakan nasional agar penggunaannya efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Di sektor kesehatan, pemanfaatan teknologi digital juga semakin berkembang dalam mendukung penyediaan layanan kesehatan. Berbagai inovasi berbasis TIK memungkinkan pelayanan kesehatan dapat diakses secara lebih luas dan efisien. Teknologi ini memungkinkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan tanpa terbatas oleh ruang dan waktu (Negash et al., 2018). Salah satu contoh implementasinya adalah layanan digital di Puskesmas seperti LAGEMAS yang membantu meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan melalui sistem administrasi digital. Sistem ini memfasilitasi berbagai proses seperti manajemen antrean pasien, informasi ketersediaan obat, serta pengelolaan laporan keuangan secara lebih transparan (Basri et al., 2020). Selain itu, perkembangan layanan telemedicine melalui aplikasi seperti Halodoc, Alodokter, dan Doctor Anywhere juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkonsultasi dengan tenaga medis secara daring.

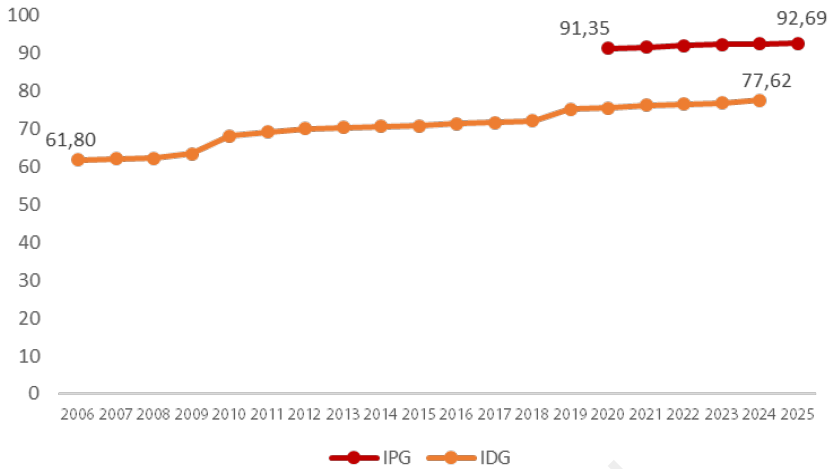
Dalam sektor ekonomi, digitalisasi berperan penting dalam transformasi sistem keuangan dan transaksi ekonomi. Berbagai inovasi seperti dompet digital, fintech, serta layanan perbankan digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara cepat dan efisien. Selain itu, perkembangan platform *e-commerce* dan *marketplace* digital juga membuka peluang bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk memperluas jangkauan pasar mereka tanpa terhambat oleh batasan geografis. Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi digital pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi layanan serta mendukung pembangunan manusia. Namun demikian, agar manfaat tersebut dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, diperlukan dukungan infrastruktur TIK yang memadai dan tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kesetaraan dan Inklusi

Kesetaraan dan inklusivitas merupakan prinsip utama dalam pembangunan manusia. Konsep ini menjadi rujukan bagi berbagai lembaga internasional seperti *United Nations Development Programme*, *United Nations*, *World Bank*, dan *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* dalam merumuskan pendekatan pembangunan manusia. UNDP (2016) dan UN (2015) menegaskan bahwa pembangunan manusia yang berkelanjutan harus dilaksanakan secara setara dan inklusif, sehingga seluruh individu memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya kesenjangan. *World Bank* (2013) juga menekankan pentingnya inklusivitas dalam pasar tenaga kerja dengan memastikan kesempatan kerja yang setara bagi perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok marginal. Sementara itu, UN ESCAP (2012) memberikan pedoman strategi pembangunan inklusif yang berfokus pada pemenuhan hak dan partisipasi penyandang disabilitas.

Dilihat dari perspektif gender, perkembangan menuju kesetaraan menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini tercermin dari peningkatan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), khususnya IDG yang mengalami peningkatan cukup pesat. Indikator penyusun IDG perempuan menunjukkan tren yang terus meningkat. Demikian pula indikator penyusun IPG perempuan yang terus mengalami perbaikan. Bahkan sejak tahun 2010, nilai Harapan Lama Sekolah perempuan

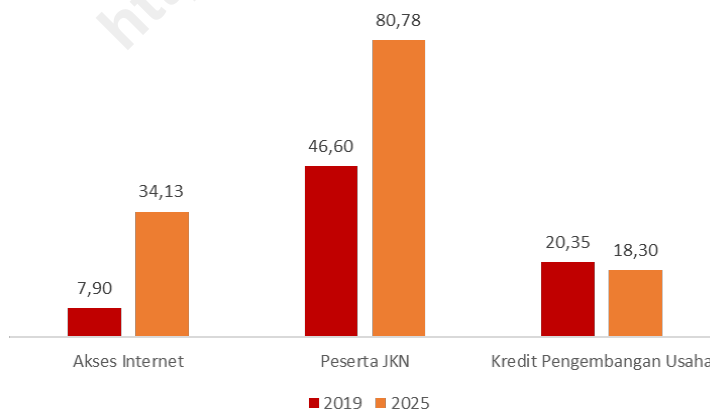
telah melampaui laki-laki. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan dan inklusivitas gender telah menunjukkan kemajuan yang positif serta membuka peluang yang besar bagi pembangunan manusia yang lebih inklusif.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), 2006–2025

Kelompok rentan seperti penduduk lanjut usia dan penyandang disabilitas perlu mendapatkan perlindungan serta kesempatan yang setara untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk itu, akses terhadap pengetahuan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi perlu terus diperluas dan dipermudah. Bagi lansia, internet dapat berperan sebagai media komunikasi sekaligus sumber informasi dan pembelajaran yang dapat mendukung pengembangan diri. Walaupun tingkat penggunaan internet oleh lansia masih tergolong rendah, tren dalam enam tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.2.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Lanjut Usia 2019 dan 2025

Gambar 3.2 Persentase Lansia yang Mengakses Internet, Sebagai Peserta JKN, dan yang Menerima Kredit Pengembangan Usaha, 2019 dan 2025

Dari sisi kesehatan, pada tahun 2025 lebih 80 persen lansia telah tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Angka ini meningkat tajam dibandingkan lima tahun sebelumnya, ketika kepesertaan lansia dalam program tersebut masih berada di bawah separuh dari total populasi lansia. Dari aspek ekonomi, secara umum terjadi penurunan proporsi lansia yang menerima kredit untuk pengembangan usaha. Meskipun demikian, persentase lansia yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengalami peningkatan, dari 4,51 persen pada tahun 2019 menjadi 5,87 persen pada tahun 2025 (Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Lansia 2019 dan 2025).

Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Ratifikasi konvensi tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta fasilitas publik yang inklusif. Namun demikian, implementasi pemenuhan hak-hak tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pemerataan akses terhadap layanan dasar dan fasilitas publik yang ramah disabilitas.

Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah keterbatasan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Ketersediaan Sekolah Luar Biasa (SLB) masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan jumlah wilayah yang memiliki penduduk penyandang disabilitas. Dari sekitar 76 ribu desa/kelurahan yang memiliki penyandang disabilitas, hanya sekitar 4.500 desa atau sekitar lima persen yang memiliki fasilitas SLB (Tabel 3.8). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan khusus di wilayah tempat tinggalnya.

Tabel 3.8 Jumlah dan Persentase Desa yang Memiliki Sekolah Luar Biasa (SLB) serta Penyandang Disabilitas, 2014 dan 2024

Keterangan	2014		2024	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SLB	1.505	1,83	4.564	5,42
Penyandang Disabilitas	76.197	92,71	76.021	90,20

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Potensi Desa 2014 dan 2024

Selain itu, penyediaan fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas juga belum tersedia secara merata. Hingga saat ini, fasilitas yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas umumnya masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Sementara itu, di banyak wilayah lainnya, khususnya di daerah perdesaan, ketersediaan infrastruktur publik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas.

Meskipun demikian, perkembangan positif tetap terlihat dalam satu dekade terakhir. Jumlah SLB menunjukkan tren peningkatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.8. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang terus dilakukan untuk memperluas akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Namun demikian, peningkatan jumlah sekolah saja belum cukup untuk menjawab kebutuhan yang ada. Peningkatan kualitas layanan pendidikan,

penguatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik, serta pengembangan sistem pendidikan yang lebih inklusif masih menjadi agenda penting dalam pembangunan manusia.

Di samping itu, peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi penyandang disabilitas juga perlu terus diperkuat. Pendekatan pembangunan yang lebih inklusif akan memperluas cakupan manfaat pembangunan serta memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, upaya penguatan kebijakan dan program inklusi disabilitas menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tabel 3.9 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Kelompok Pengeluaran Penduduk Terendah (Kuintil 1) dan Tertinggi (Kuintil 5), 2019 dan 2025

Indikator Pendidikan dan Kesehatan	2019		2025	
	Kuintil 1	Kuintil 5	Kuintil 1	Kuintil 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angka Partisipasi Sekolah				
7–12 tahun	98,64	99,62	98,95	99,52
13–15 tahun	92,08	98,17	93,53	98,71
16–18 tahun	62,81	81,04	69,20	85,11
19–23 tahun	16,02	46,88	19,60	43,69
Rata-rata Lama Sekolah 15+	6,82	11,31	7,58	11,76
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak	62,77	89,22	76,70	92,08

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berbagai indikator menunjukkan bahwa ketimpangan dalam akses terhadap fasilitas dasar masih terjadi di masyarakat. Meskipun demikian, dalam lima tahun terakhir perkembangan yang terjadi menunjukkan arah yang cukup positif. Tingkat disparitas pada berbagai aspek cenderung mengalami penurunan, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam pemerataan akses layanan dasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan mulai memberikan hasil, meskipun masih diperlukan langkah-langkah yang lebih kuat dan berkelanjutan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan.

Dalam konteks tersebut, dukungan kebijakan dan penguatan regulasi menjadi faktor penting untuk mendorong pemerataan pembangunan. Berbagai program pembangunan yang berorientasi pada inklusivitas yang telah digalakkan oleh pemerintah membuka peluang yang lebih besar untuk mewujudkan kesetaraan antar kelompok penduduk. Program-program tersebut diharapkan dapat memperluas akses dan partisipasi kelompok masyarakat yang selama ini relatif tertinggal, termasuk penyandang disabilitas, penduduk miskin, serta kelompok marginal lainnya, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

3.3 Strategi Menghadapi Tantangan dan Memanfaatkan Peluang

Pembangunan manusia pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kapabilitas penduduk agar dapat hidup panjang dan sehat, memperoleh pendidikan yang memadai, serta mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Ketimpangan dalam akses terhadap layanan dasar, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan, dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat percepatan pembangunan manusia. Keterbatasan akses tersebut seringkali dipengaruhi oleh kondisi geografis maupun perbedaan sosial ekonomi antar kelompok masyarakat.

Dalam konteks tersebut, pemanfaatan teknologi digital berpotensi menjadi salah satu solusi untuk mengurangi berbagai hambatan tersebut. Digitalisasi dapat membantu mengatasi keterbatasan geografis, memperluas akses terhadap layanan dasar, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga dapat mendorong peningkatan standar hidup masyarakat dan berkontribusi pada upaya pengurangan kemiskinan apabila didukung oleh partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh *United Nations Development Programme* (2024).

Sejalan dengan hal tersebut, strategi pembangunan diarahkan untuk memperkuat peningkatan kualitas manusia melalui perbaikan pada setiap komponen pembentuknya. Upaya tersebut mencakup peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, perluasan kesempatan pendidikan, serta penguatan kapasitas ekonomi masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Berbagai strategi dapat ditempuh untuk mempercepat laju pembangunan manusia sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional serta rekomendasi lembaga internasional, termasuk UNDP. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk secara menyeluruh melalui pendekatan yang terintegrasi di berbagai sektor pembangunan. Secara umum, strategi percepatan pembangunan manusia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang utama, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta sosial dan lingkungan.

Pendekatan yang komprehensif pada keempat bidang tersebut diharapkan dapat memperkuat peningkatan kapabilitas manusia secara berkelanjutan. Melalui sinergi kebijakan dan program pada masing-masing sektor, upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif dan inklusif. Dalam konteks tersebut, strategi di bidang kesehatan antara lain meliputi:

1. Peningkatan penyediaan dan kualitas layanan kesehatan primer terutama di wilayah sulit atau terpencil (UNDP, 2024);
2. Peningkatan penyediaan dan distribusi tenaga medis di seluruh wilayah (UNDP, 2024);
3. Peningkatkan cakupan program kesehatan seperti imunisasi, layanan kesehatan ibu dan anak, serta perawatan lansia terutama bagi kelompok miskin dan rentan (UNDP, 2024);

4. Peningkatan pemanfaatan teknologi untuk kesehatan seperti telemedicine (Natakusumah dkk 2022) dan teknologi medis terkini untuk diagnosis dan pengobatan penyakit;
5. Edukasi kesehatan masyarakat dengan peningkatan literasi pola hidup sehat dan partisipasi kesehatan masyarakat.

Strategi kedua di bidang pendidikan meliputi:

1. Peningkatan akses pendidikan berkualitas dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan secara merata, terutama wilayah timur Indonesia, sehingga memungkinkan setiap penduduk memiliki akses pendidikan yang setara;
2. Pemberian bantuan pendidikan atau beasiswa terutama bagi kelompok miskin dan rentan (UNDP 2024);
3. Peningkatan literasi digital melalui pemanfaatan TIK dalam sistem pendidikan untuk meningkatkan keterampilan digital yang diiringi pembangunan infrastruktur digital (UNDP 2024);
4. Penyesuaian kurikulum pendidikan berbasis kebutuhan pasar tenaga kerja.

Selanjutnya strategi bidang ekonomi meliputi:

1. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan akses pembiayaan, pelatihan, dan pasar bagi UMKM;
2. Pengembangan ekonomi digital dengan meningkatkan infrastruktur digital terutama di wilayah perdesaan dan meningkatkan pelatihan digital;
3. Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui program pelatihan dan sertifikasi sesuai kebutuhan industri;
4. Pembangunan infrastruktur untuk daerah sulit menjadi upaya yang harus dilakukan untuk menjembatani penduduk pada akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang lebih baik. Kehadiran infrastruktur juga memudahkan arus logistik barang dan jasa sehingga mengurangi tekanan pada harga kebutuhan. Undang-undang mengamankan pembangunan jaringan internet dan infrastruktur pendukung yang dapat menjangkau wilayah sulit terutama di Indonesia timur sehingga mendorong akselerasi digitalisasi dan mengurangi ketimpangan;
5. Pembangunan infrastruktur TIK secara merata menjadi upaya penting untuk mengatasi ketimpangan wilayah dan memperkuat konektivitas. Salah satunya dengan memperluas jaringan broadband yang menjangkau seluruh pelosok (UU No 59 Tahun 2024). Dari segi biaya, penyediaan akses internet yang terjangkau akan memperluas cakupan pengguna internet (UNDP, 2024).

Terakhir adalah strategi di bidang sosial dan lingkungan yang meliputi:

1. Pengentasan ketimpangan sosial dengan meningkatkan cakupan jaminan/ perlindungan sosial dan penurunan ketimpangan gender dengan inklusi sosial dalam kebijakan pembangunan (UNDP, 2024);
2. Pembangunan berwawasan risiko untuk mengurangi dampak kerugian akibat bencana (UNDP, 2024);
3. Mitigasi perubahan iklim dengan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan peningkatan partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat dalam penghijauan dan pengelolaan lingkungan;
4. Diversifikasi pangan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan (UNDP, 2024);
5. Tata kelola dan kerjasama internasional dalam hal mitigasi dan penanggulangan dampak bencana akibat perubahan iklim berperan untuk menggeser perspektif negatif dari tantangan menjadi peluang yang dapat diraih, seperti dengan pengembangan inovasi dan teknologi dalam pemanfaatan sumber energi yang bersih dan terbarukan (UNDP, 2024). Untuk mengatasi tantangan global, diperlukan kerjasama multilateral dan solidaritas antarnegara guna upaya mitigasi dan perbaikan secara universal.

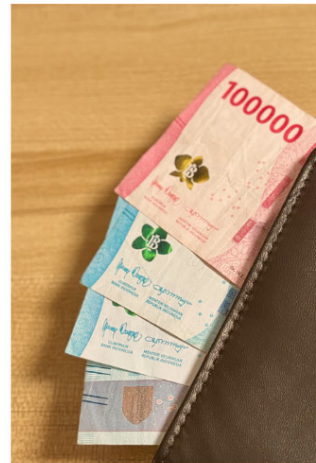
Pembangunan pada sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta digitalisasi perlu dilaksanakan secara terpadu dan simultan, mengingat setiap sektor memiliki peran yang sama pentingnya dalam mendukung peningkatan kualitas manusia. Pendekatan yang terintegrasi antar sektor menjadi kunci untuk memastikan bahwa berbagai intervensi pembangunan dapat saling memperkuat dalam mencapai tujuan pembangunan manusia.

Dalam pelaksanaannya, setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kewenangannya. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui dukungan kebijakan serta penyediaan alokasi anggaran yang memadai, efektif, dan efisien untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan berperan penting dalam memastikan bahwa program-program yang dijalankan mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu, sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan perlu diperkuat melalui penyusunan peta jalan pembangunan yang jelas dan terarah. Peta jalan tersebut berfungsi sebagai kerangka koordinasi untuk menghindari tumpang tindih program sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya koordinasi yang baik, upaya percepatan dan pemerataan pembangunan manusia di Indonesia diharapkan dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

BAB 4

PERAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN MANUSIA



<https://www.bps.go.id>

Peran Gender dalam Pembangunan Manusia

4.1 Capaian Pembangunan Gender

Pentingnya Pembangunan Berbasis Gender

Pembangunan manusia yang berkualitas tidak dapat dilepaskan dari upaya mewujudkan kesetaraan gender sebagai salah satu fondasi utama. Dalam konteks ini, pengintegrasian perspektif gender menjadi pendekatan strategis untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi. Kesetaraan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, pembangunan yang responsif gender berperan signifikan dalam mendorong capaian pembangunan manusia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Komitmen Indonesia dalam memperkuat kesetaraan gender tercermin dalam berbagai kebijakan pembangunan nasional. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) menegaskan pentingnya integrasi perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2025, PUG ditetapkan sebagai salah satu strategi utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa hasil pembangunan manusia tidak hanya meningkat secara agregat, tetapi juga merata dan responsif terhadap kesenjangan gender.

Sejalan dengan komitmen tersebut, peran perempuan dalam pembangunan ekonomi Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja selama empat tahun terakhir (Gambar 4.1). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan meningkat dari 53,34 persen pada tahun 2021 menjadi 56,63 persen pada tahun 2025. Selain itu, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) perempuan juga mengalami peningkatan dari 93,89 persen menjadi 95,16 persen pada periode yang sama. Peningkatan ini mencerminkan semakin besarnya keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi serta membaiknya kondisi ketenagakerjaan perempuan, yang pada akhirnya turut memperkuat kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas pembangunan manusia di Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, 2025

Gambar 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Perempuan di Indonesia (persen), 2021–2025

Meski demikian, peningkatan partisipasi perempuan dalam ketenagakerjaan belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan kualitas dan kesetaraan kondisi kerja. Perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan akses terhadap teknologi, belum optimalnya cakupan perlindungan sosial, serta adanya kesenjangan pendapatan dibandingkan laki-laki. Di samping itu, banyak perempuan juga menghadapi beban peran ganda, yaitu sebagai pencari nafkah sekaligus pengelola rumah tangga, yang berpotensi membatasi partisipasi dan produktivitas mereka di pasar kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan partisipasi saja belum cukup, melainkan perlu diiringi dengan kebijakan yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih setara dan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan publik melalui peningkatan akses pendidikan dan pelatihan, perluasan kesempatan kerja yang setara, serta penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan yang responsif gender.

Dalam konteks yang lebih luas, pembangunan berbasis gender tidak hanya diarahkan untuk mengurangi ketimpangan antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Pemenuhan hak dan kesempatan yang setara bagi perempuan akan mendorong terciptanya pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, optimalisasi peran perempuan dalam berbagai sektor strategis akan memperkuat kualitas pembangunan nasional secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang menempatkan pengarusutamaan gender sebagai salah satu prioritas nasional dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan.

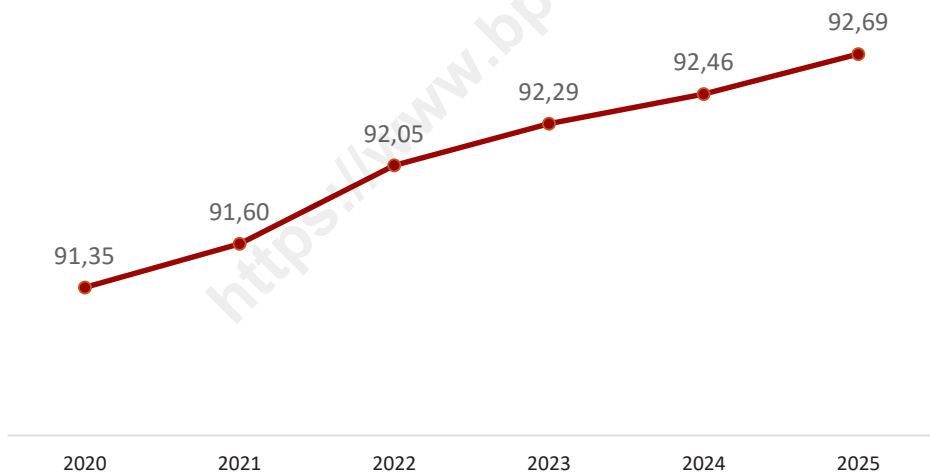
Capaian Pertumbuhan Pembangunan Berbasis Gender

Pembangunan manusia yang menggambarkan kualitas hidup idealnya bisa dinikmati secara adil oleh perempuan maupun laki-laki. Tiga dimensi utama pembangunan wajib

dipenuhi secara seimbang tanpa adanya bias gender. Dimensi tersebut meliputi umur harapan hidup yang panjang dan sehat, akses terhadap pengetahuan, serta standar hidup layak yang direalisasikan melalui layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Perempuan dan laki-laki perlu mempunyai hak serta kesempatan yang seimbang agar tidak muncul ketimpangan dalam menjangkau layanan tersebut. Melalui implementasi prinsip kesetaraan gender, kualitas sumber daya manusia akan meningkat, yang pada prosesnya akan menguatkan pembangunan nasional.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan parameter yang diaplikasikan untuk meninjau kesetaraan pembangunan manusia melalui perspektif gender. Indikator ini mengomparasi perolehan pembangunan antara perempuan dan laki-laki mengacu pada dimensi-dimensi dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin setara hasil pembangunan yang diraih antara perempuan dan laki-laki, maka angka IPG akan kian mendekati 100.

Angka IPG mengalami kenaikan secara konsisten dari 91,35 pada tahun 2020 menjadi 92,69 di tahun 2025 (Gambar 4.2). Skor IPG yang mendekati 100 merepresentasikan bahwa hasil pembangunan perempuan semakin setara dengan pembangunan laki-laki. Capaian IPG Indonesia pada tahun 2025 yang berada di angka 92,69 mengindikasikan bahwa laju pembangunan laki-laki masih lebih unggul dibandingkan pembangunan perempuan.

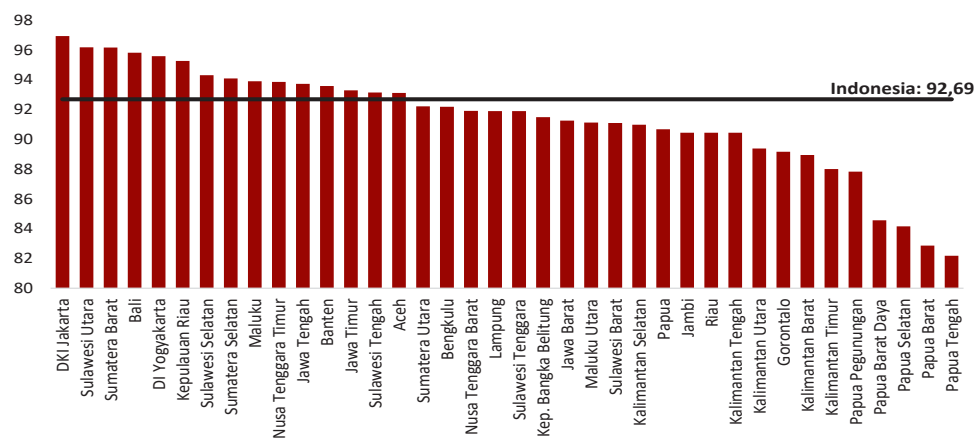


Sumber: Badan Pusat Statistik, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, 2025

Gambar 4.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia, 2020–2025

Keseimbangan gender dalam konteks pembangunan manusia juga terlihat di tingkat provinsi. Pada tahun 2025, tercatat 15 provinsi telah mencapai angka IPG di atas rata-rata nasional, sedangkan 23 provinsi lainnya masih berada di bawah angka tersebut (Gambar 4.3). Provinsi DKI Jakarta mencatat angka IPG tertinggi mencapai 96,93. Di sisi lain, 5 dari 6 provinsi di wilayah Papua berada di urutan 5 terendah IPG, yakni Papua Pegunungan (87,83), Papua Barat Daya (84,57), Papua Selatan (84,16), Papua Barat (82,87), dan Papua Tengah (82,18).

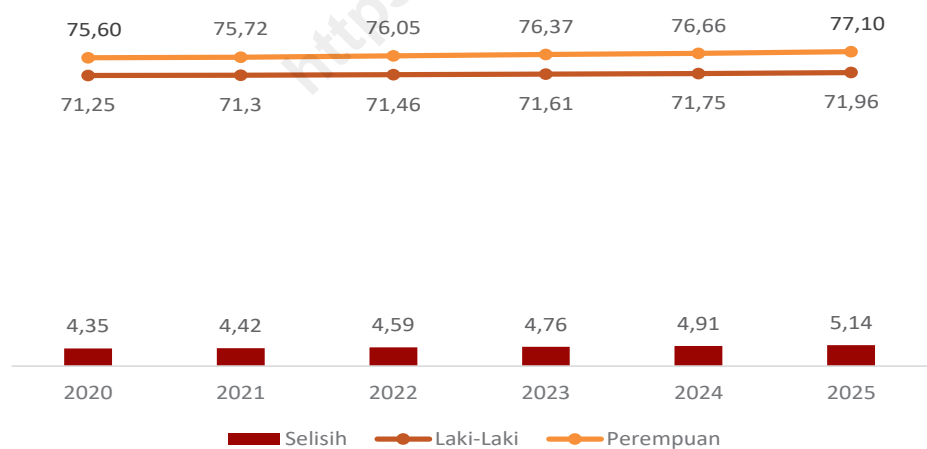
Indeks Pembangunan Manusia 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, 2025

Gambar 4.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Provinsi, 2025

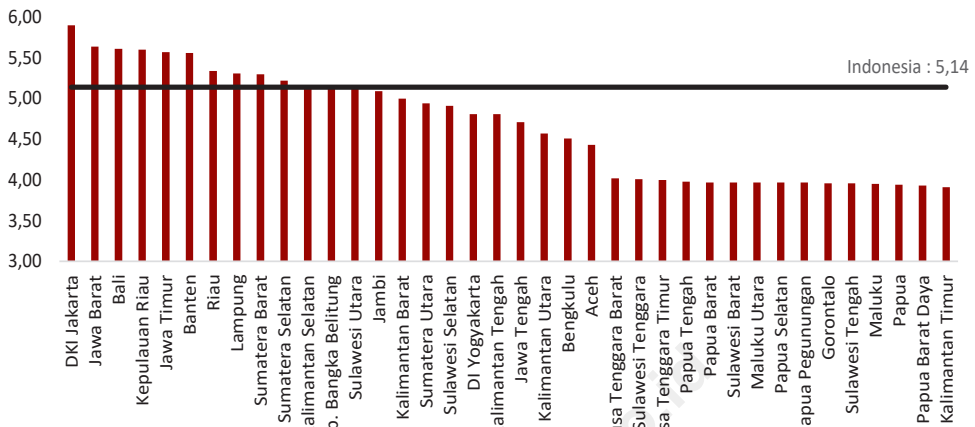
Terkait indikator umur harapan hidup saat lahir, angka untuk perempuan senantiasa lebih tinggi daripada laki-laki dengan gap yang terus melebar tiap tahun sepanjang 2020 hingga 2025 (Gambar 4.4). Di tahun 2020, usia harapan hidup laki-laki berada pada 71,25 tahun dan perempuan 75,60 tahun dengan margin 4,35 tahun. Kesenjangan ini terus meningkat hingga mencapai 5,14 tahun pada 2025, dengan usia harapan hidup laki-laki 71,96 tahun dan perempuan 77,10 tahun. Walau usia harapan hidup laki-laki menunjukkan kenaikan, perempuan tetap mendominasi dengan laju peningkatan yang lebih pesat. Hal ini merefleksikan adanya variasi faktor kesehatan, akses pelayanan medis, serta pola hidup antara laki-laki dan perempuan. Dibutuhkan langkah lebih lanjut guna meminimalkan ketimpangan ini dengan memacu kualitas hidup laki-laki.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, 2025

Gambar 4.4 Umur Harapan Hidup saat Lahir Menurut Jenis Kelamin (tahun), 2020–2025

Serupa dengan kondisi nasional, umur harapan hidup perempuan di lingkup provinsi juga lebih tinggi daripada laki-laki (Gambar 4.5). Selisih paling kecil ditemukan di Provinsi Kalimantan Timur (3,91 tahun) dan paling lebar di Provinsi DKI Jakarta (5,90 tahun). Jika disandingkan dengan selisih umur harapan hidup nasional sebesar 5,14 tahun, terdapat 12 provinsi yang melampaui angka nasional, sementara 26 provinsi lainnya berada di bawah nilai nasional tersebut.



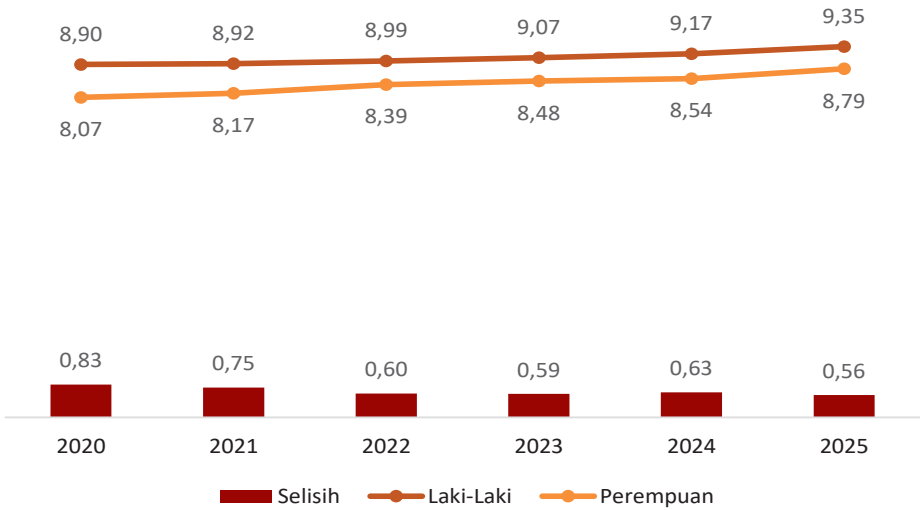
Sumber: Badan Pusat Statistik, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, 2025

Gambar 4.5 Selisih Umur Harapan Hidup saat Lahir antara Perempuan dan Laki-Laki Menurut Provinsi (tahun), 2025

Pada dimensi pengetahuan, hal ini terpotret melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Data RLS memperlihatkan bahwa RLS laki-laki secara stabil memiliki angka lebih tinggi dibanding RLS perempuan sepanjang 2020 sampai 2025, meskipun selisihnya cenderung menyusut, dari 0,83 tahun di 2020 menjadi 0,56 pada 2025 (Gambar 4.6). RLS laki-laki pada tahun 2025 mencapai 9,35 tahun. Artinya, rata-rata penduduk laki-laki berusia 25 tahun ke atas telah menuntaskan sekolah hingga kelas IX SMP. Sementara itu, RLS perempuan tahun 2025 adalah 8,79 tahun atau setara kelas VIII SMP. Pola ini mengindikasikan adanya perbaikan akses edukasi bagi perempuan, walau gap masih eksis dan perlu terus dikurangi demi meraih kesetaraan capaian pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

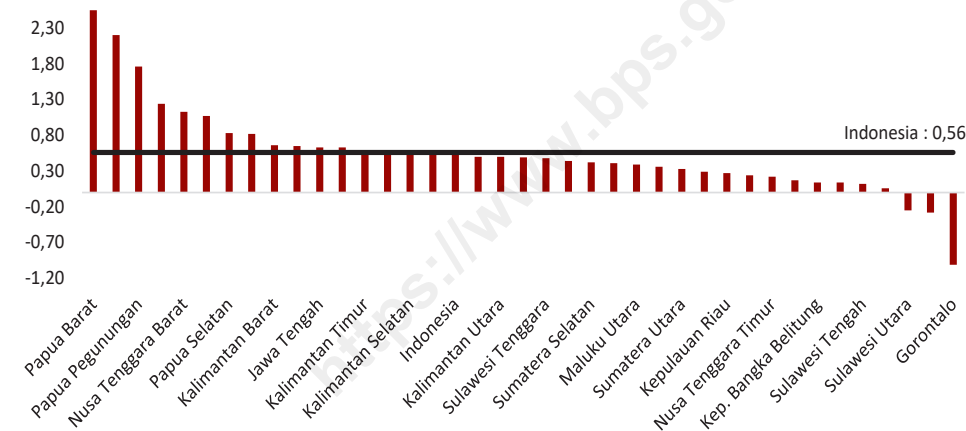
Di level provinsi, RLS laki-laki pun memiliki nilai yang lebih besar daripada RLS perempuan di mayoritas provinsi Indonesia, kecuali di Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo (Gambar 4.7). Secara umum, margin angka RLS tersebut berada pada rentang -1,01 sampai 2,55 tahun. Nilai negatif menandakan bahwa RLS perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Berdasarkan klasifikasi besaran selisih RLS (Gambar 4.7), 15 provinsi melampaui angka nasional dan 23 provinsi lainnya berada di bawah nasional. Semakin selisih tersebut mendekati nol, maka semakin tipis kesenjangan atau kian terwujud kesetaraan gender.

Indeks Pembangunan Manusia 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, 2025

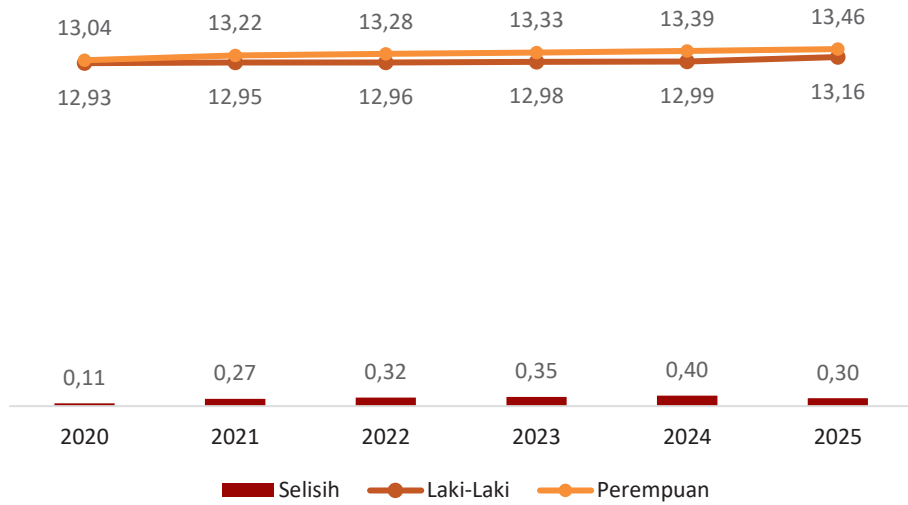
Gambar 4.6 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Jenis Kelamin (tahun), 2020–2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, 2025

Gambar 4.7 Selisih Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) antara Perempuan dan Laki-Laki Menurut Provinsi (tahun), 2025

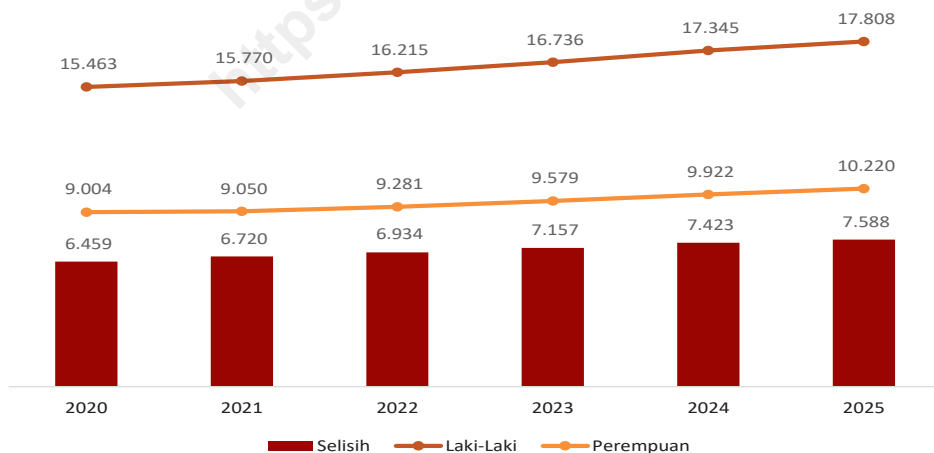
Kendati RLS perempuan masih di bawah laki-laki, situasi berbeda tampak pada angka HLS. Sepanjang masa 2020–2025, HLS perempuan justru lebih tinggi daripada HLS laki-laki (Gambar 4.8). Pada kurun waktu tersebut, margin antara HLS perempuan dan laki-laki sempat merenggang dari 0,11 tahun di 2020 menjadi 0,40 tahun di 2024, namun menyempit kembali menjadi 0,30 di 2025. Walaupun angka HLS bagi kedua gender terus naik, lebar selisih HLS menunjukkan adanya ketidakseimbangan akselerasi HLS antara laki-laki dan perempuan. Meskipun perempuan lebih unggul pada capaian HLS, hal ini belum merepresentasikan pencapaian kesetaraan gender seutuhnya. Idealnya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hasil pendidikan yang setara.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, 2025

Gambar 4.8 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin (tahun), 2020–2025

Dimensi standar hidup layak yang berkaitan dengan faktor ekonomi dapat ditinjau dari indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Di tahun 2025, pengeluaran riil per kapita warga laki-laki berada pada angka 17.808 ribu rupiah, sedangkan perempuan sebesar 10.220 ribu rupiah (Gambar 4.9). Walau tren pengeluaran riil per kapita menunjukkan tren meningkat tiap tahun bagi laki-laki maupun perempuan, kesenjangan antargender justru makin melebar.

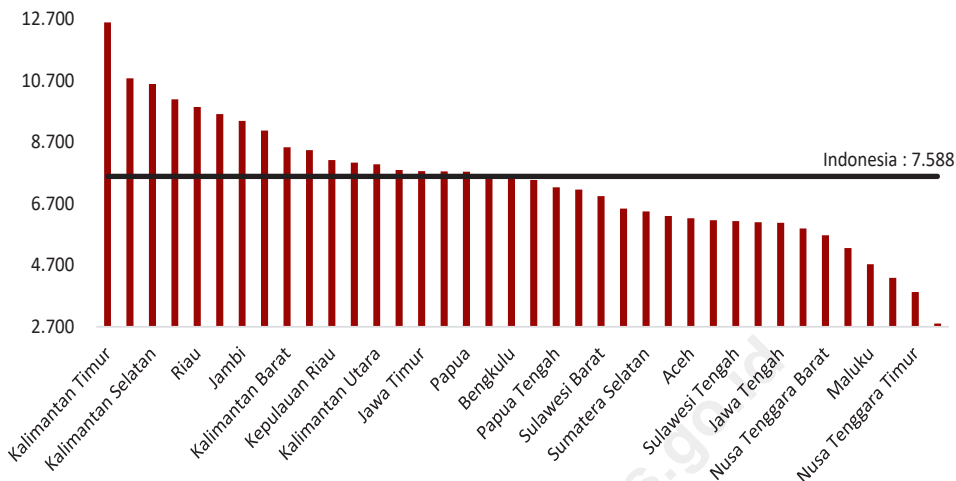


Sumber: Badan Pusat Statistik, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, 2025

Gambar 4.9 Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan Menurut Jenis Kelamin (tahun), 2020–2025

Indeks Pembangunan Manusia 2025

Data mengungkap bahwa selisih pengeluaran riil per kapita antara laki-laki dan perempuan terus naik dari 6.459 ribu rupiah di tahun 2020 menjadi 7.588 ribu rupiah pada tahun 2025. Kenaikan gap ini terlihat konsisten selama enam tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi secara merata dari aspek gender dan belum mampu memangkas ketimpangan gender dalam hal akses terhadap standar hidup yang layak.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, 2025

Gambar 4.10 Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan antara Perempuan dan Laki-Laki Menurut Provinsi (tahun), 2025

Selaras dengan ketimpangan pengeluaran riil per kapita antara laki-laki dan perempuan di skala nasional, ranah provinsi pun memperlihatkan pola serupa. Gap tertinggi ditemukan di Provinsi Kalimantan Timur dengan margin mencapai 12.595 ribu rupiah, sementara yang paling kecil ada di Provinsi Papua Pegunungan dengan selisih 2.810 ribu rupiah (Gambar 4.10). Secara keseluruhan, terdapat 19 provinsi dengan gap pengeluaran riil per kapita antargender yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, sedangkan 19 provinsi lainnya mencatat selisih yang lebih rendah.

Strategi Meningkatkan Pembangunan Gender

Peningkatan pembangunan berbasis gender di Indonesia memerlukan pendekatan yang terintegrasi, dengan fokus utama pada pengurangan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di berbagai dimensi pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Data menunjukkan bahwa meskipun perempuan memiliki umur harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, disparitas tetap ada dalam dimensi lain, seperti pendidikan dan ekonomi. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan perlu difokuskan pada penyempurnaan capaian pembangunan manusia secara merata. Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh yaitu dengan memperkuat regulasi serta mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh kebijakan pembangunan

manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Dalam bidang kesehatan, meskipun perempuan memiliki umur harapan hidup yang lebih tinggi, hal tersebut tidak secara otomatis mencerminkan kualitas hidup yang setara antara perempuan dan laki-laki. Perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan pemenuhan gizi, khususnya di wilayah perdesaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem layanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan gender, peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas, dan pelaksanaan program edukasi kesehatan yang menjangkau perempuan dari berbagai kelompok sosial ekonomi (WHO, 2019).

Dalam bidang pendidikan, meskipun Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya hambatan dalam keberlanjutan pendidikan pada perempuan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan intervensi afirmatif seperti bantuan pendidikan bagi anak perempuan dari keluarga kurang mampu, peningkatan akses pendidikan di wilayah tertinggal, serta penguatan peran komunitas dalam mendukung pendidikan anak perempuan. Pendekatan berbasis komunitas terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah perempuan (UNESCO, 2020).

Dalam bidang ekonomi, kesenjangan pengeluaran riil per kapita antara laki-laki dan perempuan menunjukkan perlunya penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan akses terhadap pelatihan keterampilan, pembiayaan usaha, serta perluasan kesempatan kerja di sektor formal. Pemberdayaan ekonomi perempuan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (World Bank, 2025).

Strategi penguatan kelembagaan gender menjadi fondasi penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan gender. Setiap kementerian dan lembaga perlu memastikan keberadaan unit pengarusutamaan gender yang berfungsi optimal serta didukung oleh sumber daya dan anggaran yang memadai. Selain itu, inovasi berbasis digital, seperti sistem informasi data terpilah gender, dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Kolaborasi multisektor antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga menjadi faktor kunci dalam mempercepat pencapaian kesetaraan gender (UNDP, 2025). Dengan demikian, sinergi antara kebijakan afirmatif, intervensi berbasis data, dan partisipasi aktif masyarakat akan menjadi kunci dalam memperkuat pembangunan gender di Indonesia.

4.2 Hubungan IPG dan IPM

Hubungan Konseptual antara IPG dan IPM

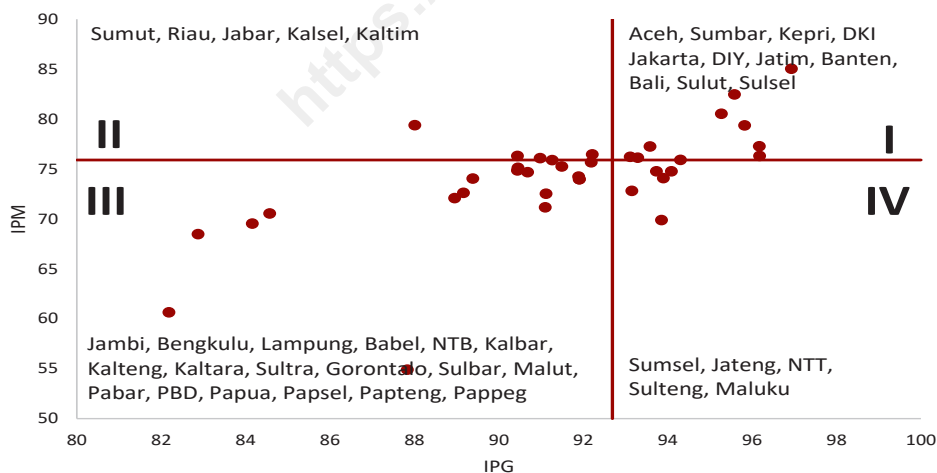
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar manusia di suatu negara (UNDP, 1995). Namun, indikator ini masih bersifat agregat sehingga belum mampu menunjukkan adanya ketimpangan antar

kelompok penduduk, termasuk ketimpangan berdasarkan gender. Untuk melengkapi keterbatasan tersebut, UNDP mengembangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Dalam proses penghitungan IPG, IPM dihitung secara terpisah berdasarkan gender, perempuan dan laki-laki, dengan menggunakan metode yang sama seperti penghitungan IPM. IPG diformulasikan sebagai IPM perempuan dibagi dengan IPM laki-laki untuk suatu wilayah. Oleh karena itu, interpretasi IPG perlu dilakukan bersamaan dengan nilai IPM. Nilai IPG yang semakin mendekati 100 menunjukkan semakin kecilnya kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Nilai IPG yang kurang dari 100 menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia perempuan lebih rendah dibandingkan capaian pembangunan manusia laki-laki. Nilai IPG yang sama dengan 100 mencerminkan kondisi pembangunan manusia yang setara antara perempuan dan laki-laki. Nilai IPG yang lebih dari 100 menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia perempuan lebih tinggi dibandingkan capaian pembangunan manusia laki-laki.

Analisis Kuadran

Hubungan antara Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dianalisis menggunakan pendekatan kuadran. Melalui pendekatan metode ini, data IPG dan IPM dari seluruh provinsi di Indonesia dipetakan ke dalam bentuk diagram pencar dan dibagi menjadi empat kuadran berdasarkan capaian nasional dari masing-masing indeks. Kuadran I menunjukkan provinsi dengan capaian IPG dan IPM yang berada di atas capaian nasional. Kuadran II menggambarkan provinsi dengan capaian IPM di atas capaian nasional, namun IPG masih berada di bawah capaian nasional. Kuadran III mencakup provinsi dengan capaian IPG dan IPM yang keduanya berada di bawah capaian nasional. Sementara itu, Kuadran IV menunjukkan provinsi dengan capaian IPG di atas capaian nasional, namun IPM masih berada di bawah capaian nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, 2025

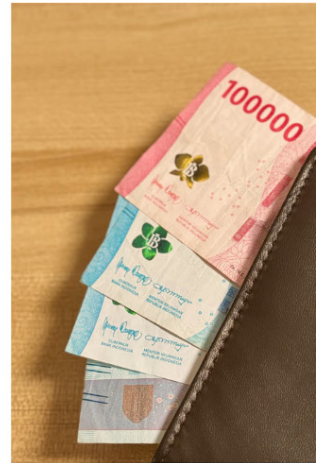
Gambar 4.11 Pembagian Kuadran Provinsi berdasarkan Angka IPG dan IPM, 2025

Provinsi yang termasuk dalam Kuadran I mencerminkan tingkat keselarasan dalam pembangunan manusia, yang ditunjukkan oleh capaian IPM dan IPG yang sama-sama tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hasil pembangunan manusia telah dirasakan secara merata oleh penduduk laki-laki maupun perempuan. Sebaliknya, provinsi yang berada pada Kuadran II menunjukkan adanya ketidakseimbangan, di mana capaian IPM yang tinggi belum diiringi oleh capaian IPG yang tinggi. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun pembangunan manusia secara umum sudah baik, namun manfaatnya belum dinikmati secara adil oleh kedua kelompok gender. Pada Kuadran III, tantangan pembangunan manusia menjadi lebih kompleks karena rendahnya capaian IPM disertai dengan tingginya kesenjangan gender. Sementara itu, Kuadran IV menunjukkan provinsi yang memiliki capaian IPM yang masih relatif rendah, tetapi memiliki tingkat kesenjangan gender yang lebih kecil. Kondisi ini menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan pemerataan hasil pembangunan manusia di masa depan.

<https://www.bps.go.id>

BAB 5

PROFIL PEMBANGUNAN MANUSIA NASIONAL DAN PROVINSI



Profil Pembangunan Manusia Nasional dan Provinsi

Pada bab sebelumnya telah dibahas tentang bagaimana pembangunan manusia di Indonesia tahun 2025. Dalam bab ini disajikan profil pembangunan manusia nasional dan provinsi. Informasi profil pembangunan manusia ini disajikan dalam dua halaman yang berisikan gambaran tentang capaian dan status pembangunan manusia nasional dan setiap provinsi.

Halaman pertama memuat informasi tentang capaian IPM tahun 2025 dan indikator komponen penyusunnya serta rata-rata pertumbuhan selama periode 2022–2025. Informasi selanjutnya adalah perbandingan capaian IPM provinsi dengan IPM nasional. Informasi ini menunjukkan sejauh mana kinerja provinsi dalam pembangunan manusia jika dibandingkan dengan capaian nasional. Pada halaman ini juga memuat data capaian pemerataan pembangunan manusia di setiap provinsi. Informasi tersebut disajikan melalui perkembangan data disparitas dan capaian IPM kabupaten/kota tertinggi dan terendah selama tahun 2022–2025 serta status IPM kabupaten/kota tahun 2022 dan 2025 dari masing-masing provinsi.

Halaman kedua memuat data beberapa indikator yang terkait dengan pembangunan manusia serta perubahannya antara tahun 2024 dan 2025. Indikator-indikator tersebut memberikan informasi lain yang terkait dengan capaian pembangunan manusia di setiap provinsi. Selain itu, indikator-indikator tersebut diharapkan juga menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan sekaligus evaluasi dari upaya peningkatan pembangunan manusia di tingkat provinsi.

Upaya peningkatan pembangunan manusia tidak dapat berdiri sendiri. Capaian pembangunan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tiga diantaranya terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Strategi yang tepat dan sinergi dari seluruh elemen bangsa sangat dibutuhkan untuk menaklukkan berbagai tantangan, serta untuk mewujudkan pembangunan manusia yang lebih baik dan berkelanjutan.

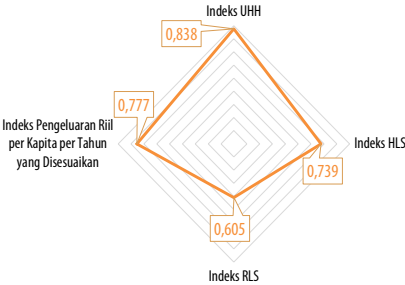
Indonesia

IPM 2025: 75,90 Status Pembangunan Manusia: TINGGI
Pertumbuhan 2025: 1,17% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 0,95%

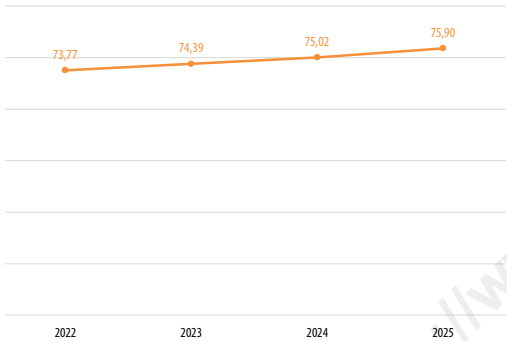
Tabel 5.1 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Indonesia, 2025

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025(%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,47 tahun	0,35
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,30 tahun	0,51
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,07 tahun	1,44
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp12.802 ribu	3,70

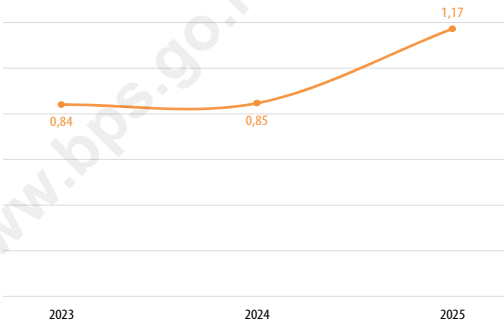
Catatan: ¹⁾ Ditungkat berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



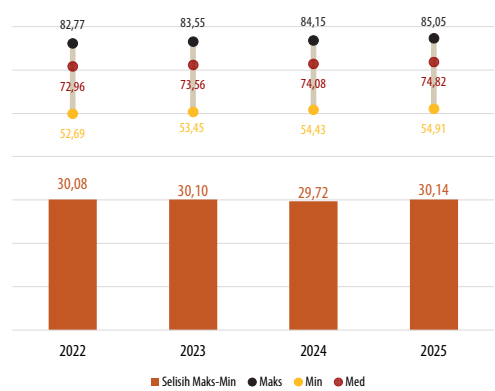
Gambar 5.1 Indeks Indikator Komponen IPM Indonesia, 2025



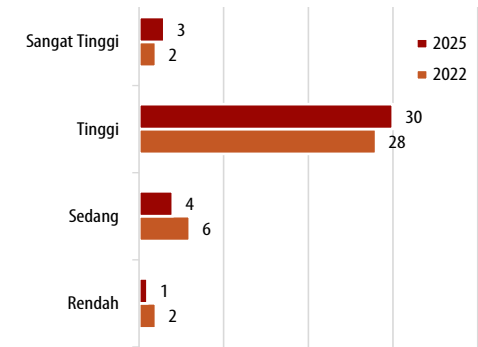
Gambar 5.2 Perkembangan IPM Indonesia, 2022–2025



Gambar 5.3 Pertumbuhan IPM Indonesia, 2023–2025



Gambar 5.4 Disparitas dan Capaian IPM Provinsi Tertinggi dan Terendah di Indonesia, 2022–2025



Gambar 5.5 Jumlah Provinsi di Indonesia Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.2 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Indonesia, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	78,72	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	92,64	93,22	0,58
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	3,11	2,30	-0,81
Morbiditas ^b	%	12,12	12,66	0,54
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun ^b	%	14,21	13,21	-1,00
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	92,42	93,95	1,53
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	97,22	97,63	0,41
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,19	99,23	0,04
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	96,17	96,30	0,13
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	74,64	77,86	3,22
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	29,01	29,13	0,12
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,67	0,52	-0,15
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	6,37	5,75	-0,62
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	19,20	15,38	-3,82
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	89,93	94,40	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	90,20	80,10	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	78.618*	83.748**	5.130,22
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	45.882*	47.745**	1.863,03
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	144.642.004	147.000.000	2.357.996
Persentase Pekerja Formal ¹	%	42,05	42,20	0,15
Persentase Pekerja Informal ¹	%	57,95	57,80	-0,15
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	3.267.618	3.331.012	63.394
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	4,91	4,85	-0,06
Penduduk Miskin ²	ribu orang	25.219	23.855	-1.365
Penduduk Miskin ³	ribu orang	24.055	23.360	-695
Persentase Penduduk Miskin ²	%	9,03	8,47	-0,56
Persentase Penduduk Miskin ³	%	8,57	8,25	-0,32
Gini Rasio ²	-	0,379	0,375	-0,004
Gini Rasio ³	-	0,381	0,363	-0,018

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan ^dwww.bps.go.id

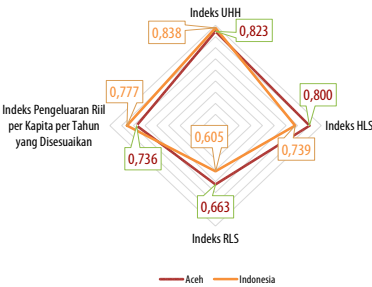
Aceh

IPM 2025: 76,23 Status Pembangunan Manusia: TINGGI
Pertumbuhan 2025: 1,15% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 0,94%

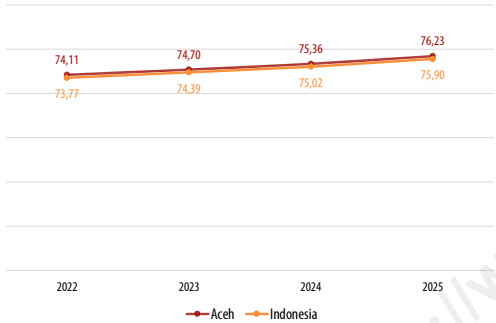
Tabel 5.3 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Aceh, 2025

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	73,48 tahun	0,26
Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,40 tahun	0,07
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,95 tahun	1,77
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp11.191 ribu	3,95

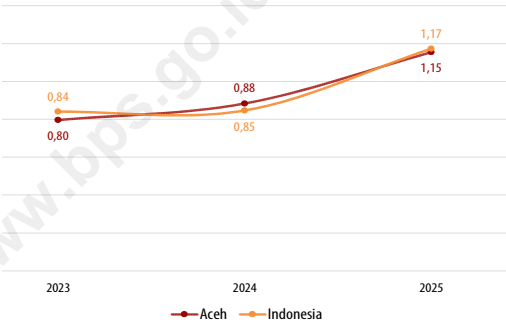
Catatan: ¹⁾ Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



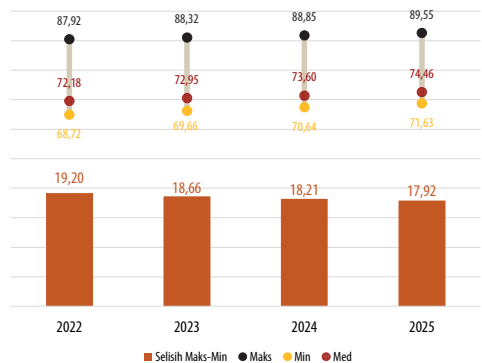
Gambar 5.6 Indeks Indikator Komponen IPM Aceh, 2025



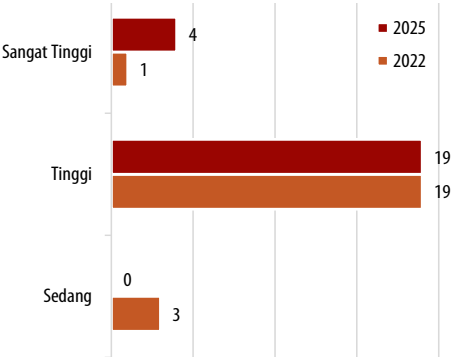
Gambar 5.7 Perkembangan IPM Aceh, 2022–2025



Gambar 5.8 Pertumbuhan IPM Aceh, 2023–2025



Gambar 5.9 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Aceh, 2022–2025



Gambar 5.10 Jumlah Kabupaten/Kota di Aceh Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.4 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Aceh, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	74,76	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	90,08	92,06	1,98
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	7,50	6,48	-1,02
Morbiditas ^b	%	13,58	13,33	-0,25
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun ^b	%	7,85	6,94	-0,91
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	95,27	96,51	1,24
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	99,30	99,52	0,22
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,42	99,38	-0,04
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	97,77	97,65	-0,12
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	81,55	80,94	-0,61
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	34,81	34,95	0,14
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,37	0,69	0,32
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	3,55	3,58	0,03
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	10,86	9,09	-1,77
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	86,34	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	89,83	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	43.782*	45.770**	1.988,18
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	27.684*	28.145**	460,42
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	2.508.354	2.561.329	52.975
Persentase Pekerja Formal ¹	%	39,83	36,09	-3,74
Persentase Pekerja Informal ¹	%	60,17	63,91	3,74
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.624.922	2.837.520	212.598
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	5,75	5,64	-0,11
Penduduk Miskin ²	ribu orang	805	705	-100
Penduduk Miskin ³	ribu orang	719	703	-16
Persentase Penduduk Miskin ²	%	14,23	12,33	-1,90
Persentase Penduduk Miskin ³	%	12,64	12,22	-0,42
Gini Rasio ²	-	0,294	0,282	-0,012
Gini Rasio ³	-	0,294	0,274	-0,020

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan^dwww.bps.go.id

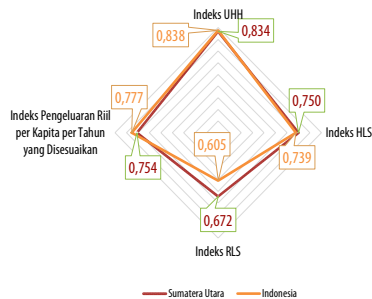
Sumatera Utara

IPM 2025: 76,47 Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2025: 0,94% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 0,87%

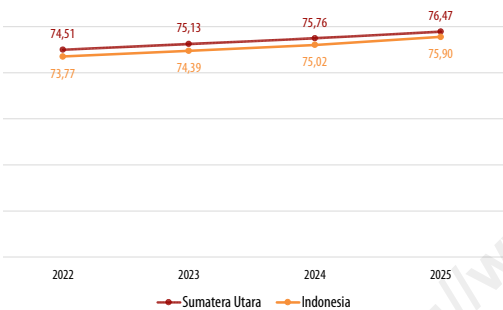
Tabel 5.5 Capaian Indikator Komponen Penyusun
IPM Sumatera Utara, 2025

Indikator	Capaian	Rata- rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,19 tahun	0,36
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,50 tahun	0,47
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,08 tahun	1,25
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp11.898 ribu	3,13

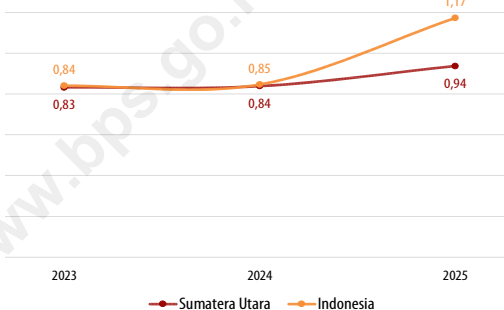
Catatan: ¹⁾ Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



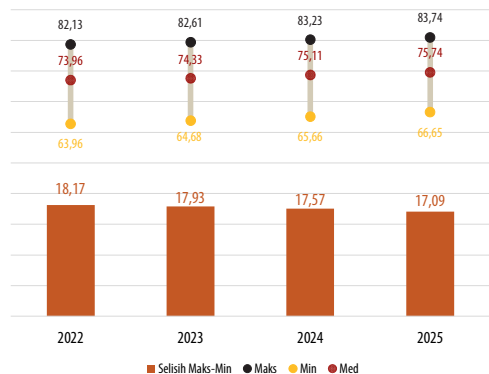
Gambar 5.11 Indeks Indikator Komponen
IPM Sumatera Utara, 2025



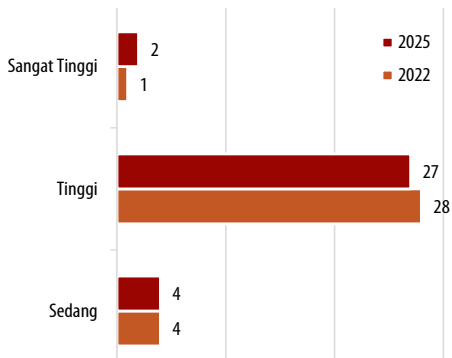
Gambar 5.12 Perkembangan IPM Sumatera
Utara, 2022–2025



Gambar 5.13 Pertumbuhan IPM Sumatera
Utara, 2023–2025



Gambar 5.14 Disparitas dan Capaian IPM
Kabupaten/Kota Tertinggi dan
Terendah di Sumatera Utara,
2022–2025



Gambar 5.15 Jumlah Kabupaten/Kota di
Sumatera Utara Menurut Status
IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.6 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sumatera Utara, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	74,55	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	92,94	93,24	0,30
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	4,38	3,53	-0,85
Morbiditas ^b	%	10,08	10,43	0,35
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	4,59	4,16	-0,43
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	90,64	91,41	0,77
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	98,09	98,24	0,15
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,50	99,54	0,04
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	97,35	97,67	0,32
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	78,59	77,51	-1,08
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	30,22	30,48	0,26
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,38	0,30	-0,08
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	3,35	3,88	0,53
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	11,02	11,34	0,32
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	86,81	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	94,95	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	73.575*	78.310**	4.735,67
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	40.577*	41.886**	1.308,96
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	7.723.364	7.976.273	252.909
Persentase Pekerja Formal ¹	%	42,65	42,74	0,09
Persentase Pekerja Informal ¹	%	57,35	57,26	-0,09
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.760.361	2.815.066	54.705
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	5,60	5,32	-0,28
Penduduk Miskin ²	ribu orang	1.228	1.140	-88
Penduduk Miskin ³	ribu orang	1.111	1.128	17
Persentase Penduduk Miskin ²	%	7,99	7,36	-0,63
Persentase Penduduk Miskin ³	%	7,19	7,24	0,05
Gini Rasio ²	-	0,297	0,295	-0,002
Gini Rasio ³	-	0,306	0,283	-0,023

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan ^dwww.bps.go.id

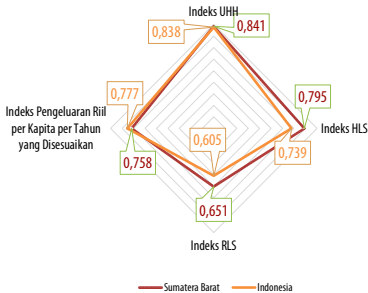
Sumatera Barat

IPM 2025: 77,27 Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2025: 1,10% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 0,93%

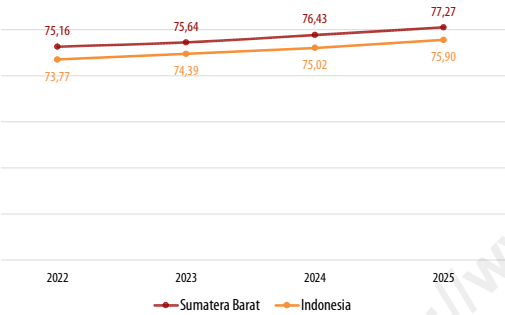
Tabel 5.7 Capaian Indikator Komponen Penyusun
IPM Sumatera Barat, 2025

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,69 tahun	0,36
Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,31 tahun	0,49
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,77 tahun	2,10
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp12.041 ribu	2,66

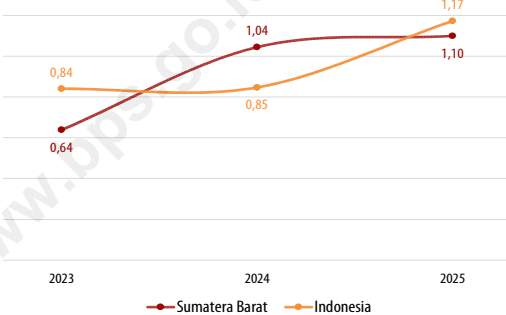
Catatan: ¹⁾ Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



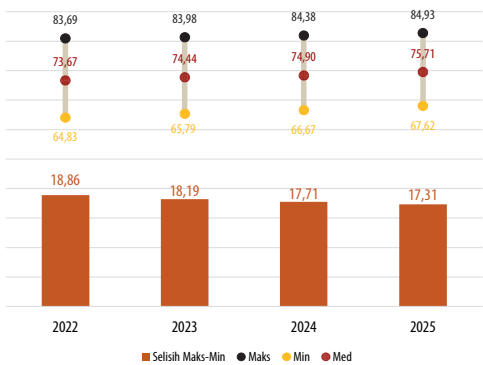
Gambar 5.16 Indeks Indikator Komponen
IPM Sumatera Barat, 2025



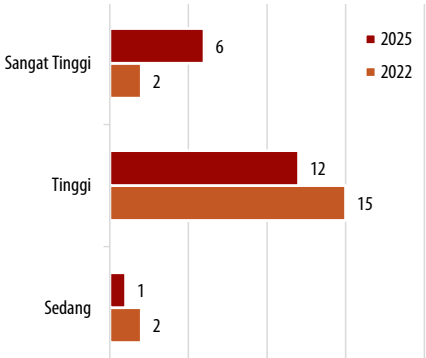
Gambar 5.17 Perkembangan IPM Sumatera
Barat, 2022–2025



Gambar 5.18 Pertumbuhan IPM Sumatera
Barat, 2023–2025



Gambar 5.19 Disparitas dan Capaian IPM
Kabupaten/Kota Tertinggi dan
Terendah di Sumatera Barat,
2022–2025



Gambar 5.20 Jumlah Kabupaten/Kota di
Sumatera Barat Menurut Status
IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.8 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sumatera Barat, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	79,73	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	86,85	87,26	0,41
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	6,87	5,16	-1,71
Morbiditas ^b	%	15,50	13,57	-1,93
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	7,43	6,65	-0,78
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	95,45	96,97	1,52
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	98,39	98,49	0,10
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,71	99,63	-0,08
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	96,80	97,00	0,20
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	84,40	85,04	0,64
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	42,75	38,84	-3,91
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,34	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	5,02	4,58	-0,44
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	12,25	10,97	-1,28
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	90,25	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	93,52	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	57.083*	59.549**	2.465,74
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	34.170*	34.854**	684,42
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	2.924.753	3.018.582	93.829
Persentase Pekerja Formal ¹	%	37,45	35,67	-1,78
Persentase Pekerja Informal ¹	%	62,55	64,33	1,78
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.772.393	2.911.450	139.057
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	5,75	5,62	-0,13
Penduduk Miskin ²	ribu orang	346	312	-33
Penduduk Miskin ³	ribu orang	315	312	-3
Persentase Penduduk Miskin ²	%	5,97	5,35	-0,62
Persentase Penduduk Miskin ³	%	5,42	5,31	-0,11
Gini Rasio ²	-	0,283	0,282	-0,001
Gini Rasio ³	-	0,287	0,280	-0,007

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan ^dwww.bps.go.id

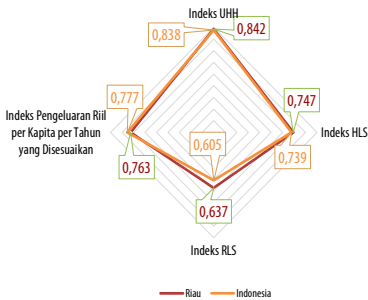
Riau

IPM 2025: 76,31 Status Pembangunan Manusia: TINGGI
Pertumbuhan 2025: 0,85% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 0,83%

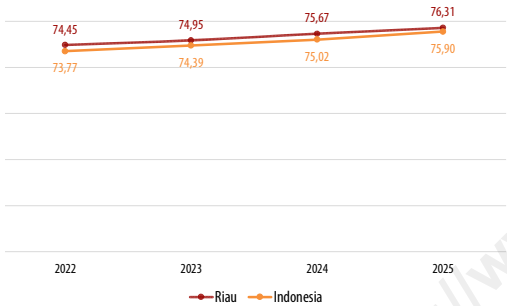
Tabel 5.9 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Riau, 2025

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,74 tahun	0,35
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,44 tahun	0,37
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,55 tahun	1,18
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp12.233 ribu	3,11

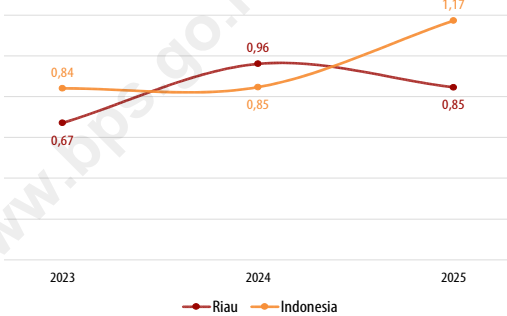
Catatan: ¹⁾ Ditungkat berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



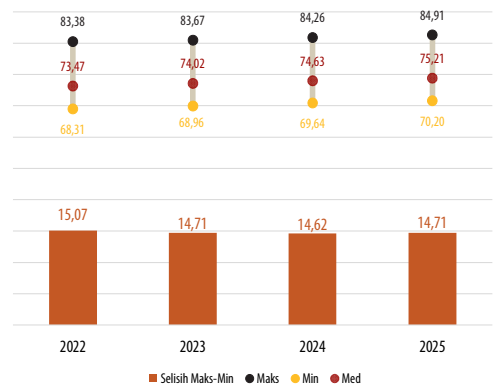
Gambar 5.21 Indeks Indikator Komponen IPM Riau, 2025



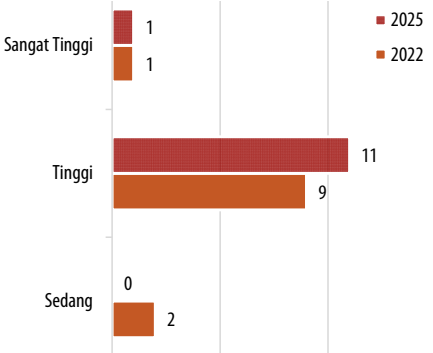
Gambar 5.22 Perkembangan IPM Riau, 2022–2025



Gambar 5.23 Pertumbuhan IPM Riau, 2023–2025



Gambar 5.24 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Riau, 2022–2025



Gambar 5.25 Jumlah Kabupaten/Kota di Riau Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.10 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Riau, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	75,00	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	92,24	92,17	-0,07
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	1,31	0,98	-0,33
Morbiditas ^b	%	10,19	9,79	-0,40
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun ^b	%	8,19	6,93	-1,26
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	88,35	91,76	3,41
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	97,01	96,52	-0,49
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,67	99,74	0,07
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	95,94	95,47	-0,47
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	78,49	77,42	-1,07
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	31,34	33,03	1,69
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,32	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	5,36	6,25	0,89
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	16,92	17,90	0,98
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	90,29	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	94,45	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	165.350*	176.385**	11.034,95
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	84.903*	87.887**	2.983,49
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	3.159.367	3.210.929	51.562
Persentase Pekerja Formal ¹	%	49,93	48,00	-1,93
Persentase Pekerja Informal ¹	%	50,07	52,00	1,93
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	3.139.242	3.144.261	5.019
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	3,70	4,16	0,46
Penduduk Miskin ²	ribu orang	492	461	-31
Penduduk Miskin ³	ribu orang	473	476	3
Persentase Penduduk Miskin ²	%	6,67	6,16	-0,51
Persentase Penduduk Miskin ³	%	6,36	6,30	-0,06
Gini Rasio ²	-	0,307	0,307	0,000
Gini Rasio ³	-	0,306	0,304	-0,002

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan^dwww.bps.go.id

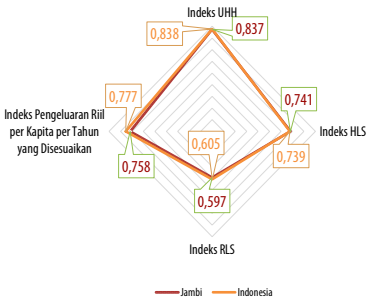
Jambi

IPM 2025: 75,13 Status Pembangunan Manusia: TINGGI
Pertumbuhan 2025: 1,04% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 0,91%

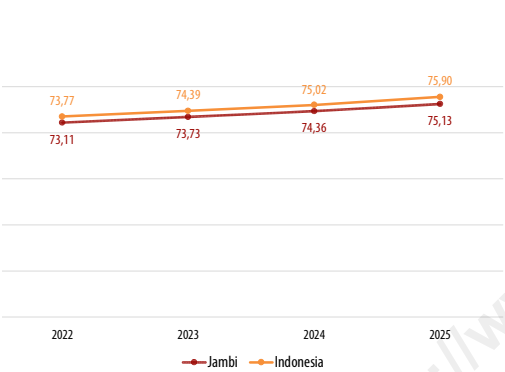
Tabel 5.11 Capaian Indikator Komponen Penyusun
IPM Jambi, 2025

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,39 tahun	0,35
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,34 tahun	0,74
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,95 tahun	1,03
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp12.018 ribu	3,40

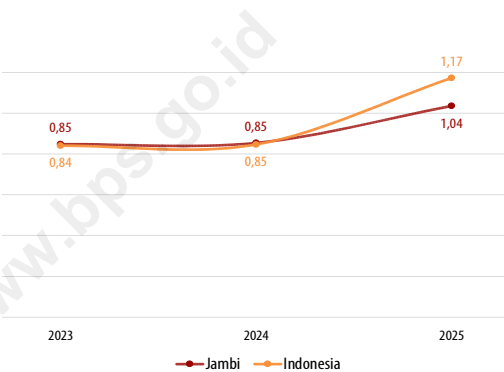
Catatan: ¹⁾ Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



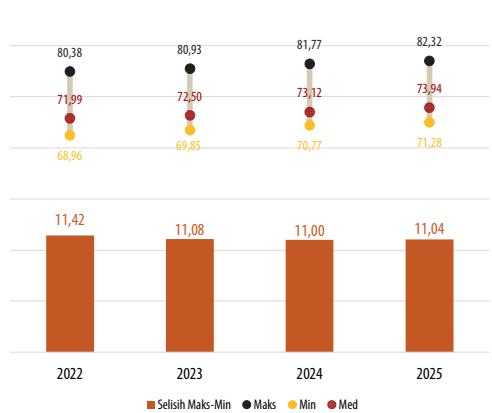
Gambar 5.26 Indeks Indikator Komponen
IPM Jambi, 2025



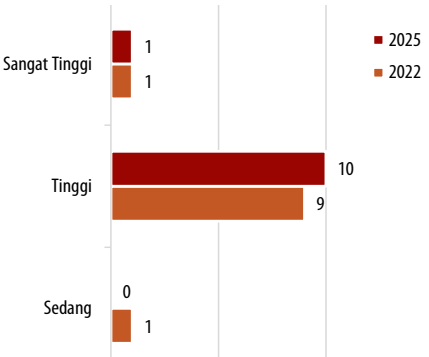
Gambar 5.27 Perkembangan IPM Jambi,
2022–2025



Gambar 5.28 Pertumbuhan IPM Jambi,
2023–2025



Gambar 5.29 Disparitas dan Capaian IPM
Kabupaten/Kota Tertinggi dan
Terendah di Jambi, 2022–2025



Gambar 5.30 Jumlah Kabupaten/Kota di Jambi
Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.12 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Jambi, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	68,35	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	82,16	82,46	0,30
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	4,76	3,69	-1,07
Morbiditas ^b	%	10,08	10,61	0,53
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	16,15	16,01	-0,14
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	83,14	87,10	3,96
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	97,16	95,22	-1,94
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,61	99,45	-0,16
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	96,25	95,59	-0,66
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	71,97	74,39	2,42
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	25,85	25,23	-0,62
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,71	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	4,39	5,37	0,98
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	19,73	17,37	-2,36
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	84,35	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	90,67	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	86.775*	92.786**	6.011,17
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	47.491*	49.246**	1.755,29
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	1.833.267	1.851.864	18.597
Persentase Pekerja Formal ¹	%	41,65	42,73	1,08
Persentase Pekerja Informal ¹	%	58,35	57,27	-1,08
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.831.081	2.975.646	144.565
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	4,48	4,26	-0,22
Penduduk Miskin ²	ribu orang	265	271	6
Penduduk Miskin ³	ribu orang	273	261	-11
Persentase Penduduk Miskin ²	%	7,10	7,19	0,09
Persentase Penduduk Miskin ³	%	7,26	6,89	-0,37
Gini Rasio ²	-	0,321	0,301	-0,020
Gini Rasio ³	-	0,315	0,291	-0,024

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan^dwww.bps.go.id

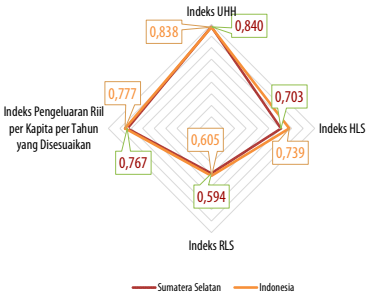
Sumatera Selatan

IPM 2025: 74,76 Status Pembangunan Manusia: TINGGI
Pertumbuhan 2025: 1,25% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 1,04%

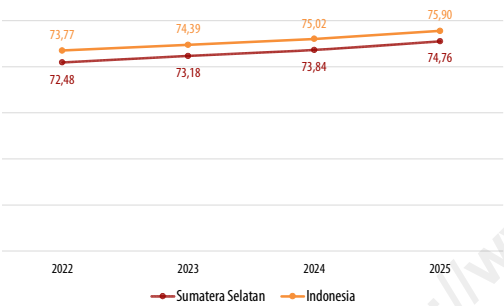
Tabel 5.13 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Sumatera Selatan, 2025

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,58 tahun	0,37
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,65 tahun	0,26
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,91 tahun	2,11
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp12.416 ribu	3,78

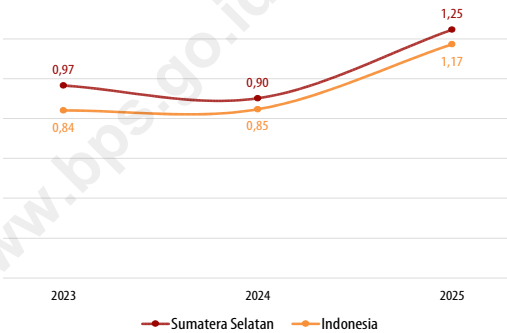
Catatan: ¹⁾ Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



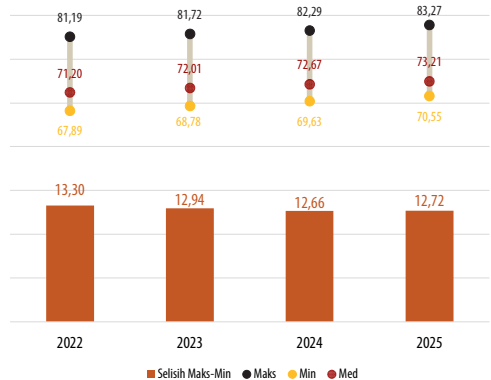
Gambar 5.31 Indeks Indikator Komponen IPM Sumatera Selatan, 2025



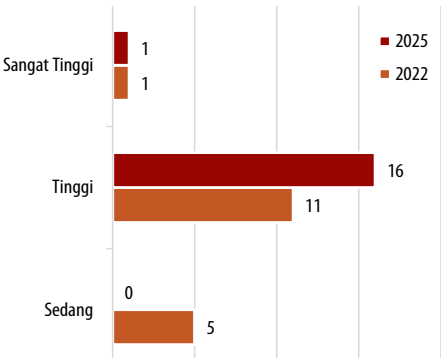
Gambar 5.32 Perkembangan IPM Sumatera Selatan, 2022–2025



Gambar 5.33 Pertumbuhan IPM Sumatera Selatan, 2023–2025



Gambar 5.34 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Sumatera Selatan, 2022–2025



Gambar 5.35 Jumlah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.14 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sumatera Selatan, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	69,40	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	87,23	86,82	-0,41
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	4,59	2,92	-1,67
Morbiditas ^b	%	10,35	8,63	-1,72
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	13,03	12,42	-0,61
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	89,18	91,00	1,82
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	97,62	97,66	0,04
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,39	99,50	0,11
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	95,45	95,68	0,23
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	70,80	73,78	2,98
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	20,11	21,24	1,13
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,50	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	6,98	6,47	-0,51
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	20,53	17,91	-2,62
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	82,34	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	90,90	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	75.132*	80.663**	5.531,76
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	42.900*	44.731**	1.831,56
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	4.480.100	4.492.574	12.474
Persentase Pekerja Formal ¹	%	37,66	36,87	-0,79
Persentase Pekerja Informal ¹	%	62,34	63,13	0,79
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.886.117	3.015.055	128.938
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	3,86	3,69	-0,17
Penduduk Miskin ²	ribu orang	984	920	-65
Penduduk Miskin ³	ribu orang	949	898	-51
Persentase Penduduk Miskin ²	%	10,97	10,15	-0,82
Persentase Penduduk Miskin ³	%	10,51	9,85	-0,66
Gini Rasio ²	-	0,333	0,311	-0,022
Gini Rasio ³	-	0,331	0,298	-0,033

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan ^dwww.bps.go.id

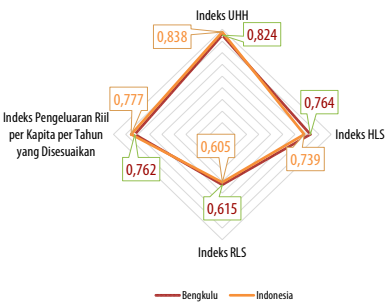
Bengkulu

IPM 2025: 75,68 Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2025: 1,03% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 0,90%

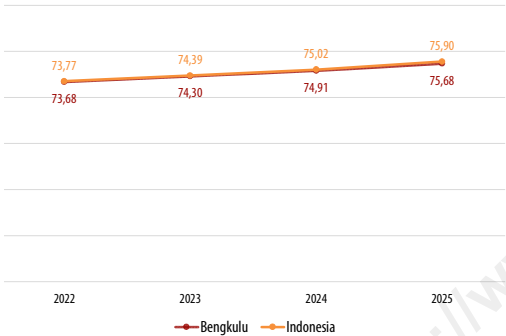
Tabel 5.15 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Bengkulu, 2025

Indikator	Capaian	Rata- rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	73,59 tahun	0,31
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,76 tahun	0,19
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,23 tahun	1,18
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp12.197 ribu	4,01

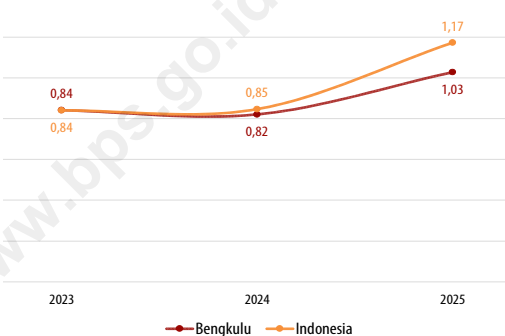
Catatan: ¹⁾ Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



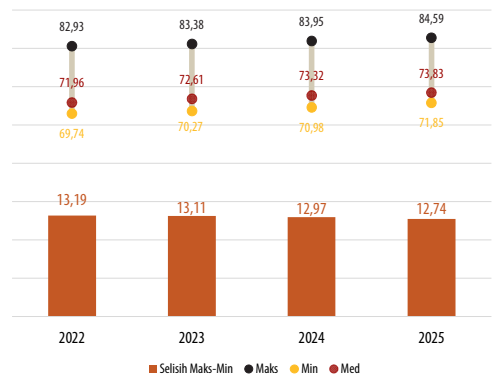
Gambar 5.36 Indeks Indikator Komponen IPM Bengkulu, 2025



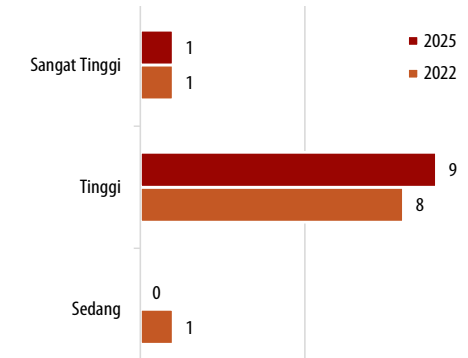
Gambar 5.37 Perkembangan IPM Bengkulu, 2022–2025



Gambar 5.38 Pertumbuhan IPM Bengkulu, 2023–2025



Gambar 5.39 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Bengkulu, 2022–2025



Gambar 5.40 Jumlah Kabupaten/Kota di Bengkulu Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.16 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Bengkulu, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	57,25	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	72,10	70,47	-1,63
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	4,31	2,62	-1,69
Morbiditas ^b	%	12,80	12,52	-0,28
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	15,14	15,06	-0,08
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	96,18	95,30	-0,88
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	99,23	98,37	-0,86
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,51	99,29	-0,22
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	97,93	97,01	-0,92
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	79,07	80,48	1,41
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	35,13	34,18	-0,95
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,30	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	3,27	5,29	2,02
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	19,18	11,61	-7,57
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	89,47	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	90,55	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	49.233*	52.305**	3.071,42
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	25.781*	26.691**	910,55
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	1.101.234	1.115.334	14.100
Persentase Pekerja Formal ¹	%	33,99	34,83	0,84
Persentase Pekerja Informal ¹	%	66,01	65,17	-0,84
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.839.093	2.935.681	96.588
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	3,11	3,41	0,30
Penduduk Miskin ²	ribu orang	281	253	-28
Penduduk Miskin ³	ribu orang	261	250	-11
Persentase Penduduk Miskin ²	%	13,56	12,08	-1,48
Persentase Penduduk Miskin ³	%	12,52	11,88	-0,64
Gini Rasio ²	-	0,342	0,349	0,007
Gini Rasio ³	-	0,343	0,339	-0,004

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan ^dwww.bps.go.id

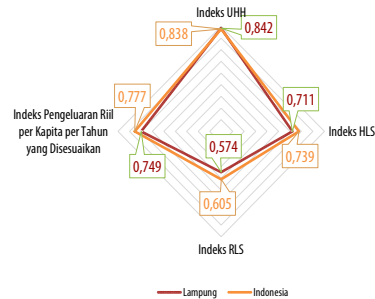
Lampung

IPM 2025: 73,98 Status Pembangunan Manusia: TINGGI
Pertumbuhan 2025: 1,16% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 1,01%

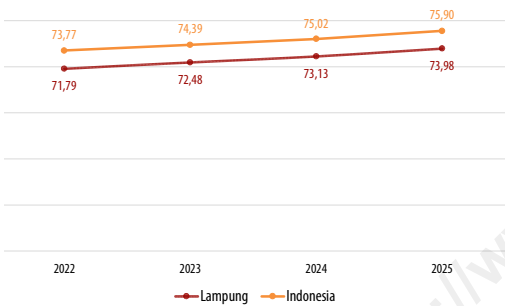
Tabel 5.17 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Lampung, 2025

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,71 tahun	0,34
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,79 tahun	0,13
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,61 tahun	1,72
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp11.683 ribu	4,17

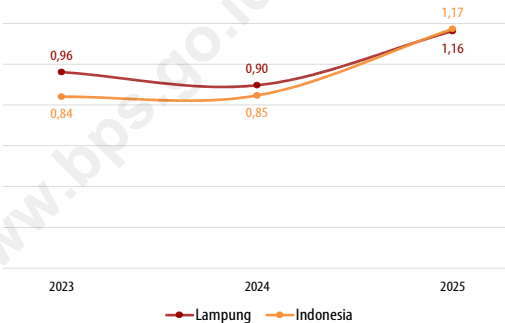
Catatan: ¹⁾ Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



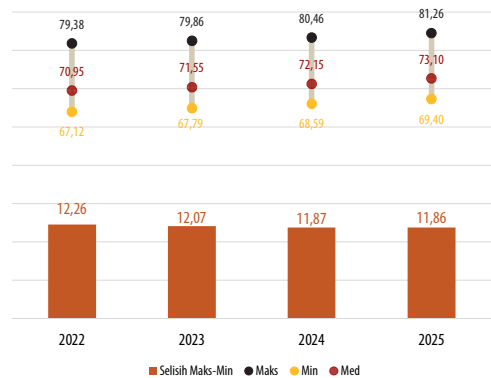
Gambar 5.41 Indeks Indikator Komponen IPM Lampung, 2025



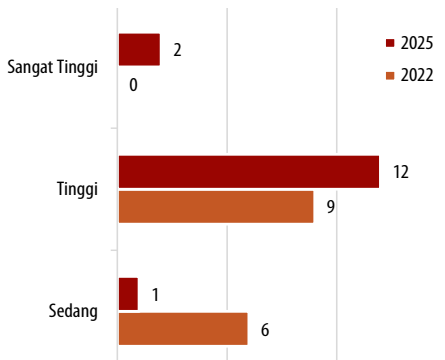
Gambar 5.42 Perkembangan IPM Lampung, 2022–2025



Gambar 5.43 Pertumbuhan IPM Lampung, 2023–2025



Gambar 5.44 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Lampung, 2022–2025



Gambar 5.45 Jumlah Kabupaten/Kota di Lampung Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.18 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Lampung, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	69,90	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	84,51	85,13	0,62
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	1,04	0,74	-0,30
Morbiditas ^b	%	12,91	12,97	0,06
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	12,39	12,39	0,00
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	95,05	95,87	0,82
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	97,96	99,50	1,54
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,50	99,62	0,12
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	96,07	95,72	-0,35
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	72,35	75,35	3,00
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	22,53	20,68	-1,85
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,29	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	6,62	5,72	-0,90
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	20,73	16,71	-4,02
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	91,70	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	92,21	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	51.387*	55.009**	3.622,23
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	29.891*	31.127**	1.236,47
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	4.787.589	4.853.377	65.788
Persentase Pekerja Formal ¹	%	30,86	35,28	4,42
Persentase Pekerja Informal ¹	%	69,14	64,72	-4,42
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.517.788	2.520.619	2.831
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	4,19	4,21	0,02
Penduduk Miskin ²	ribu orang	941	887	-54
Penduduk Miskin ³	ribu orang	939	860	-79
Persentase Penduduk Miskin ²	%	10,69	10,00	-0,69
Persentase Penduduk Miskin ³	%	10,62	9,66	-0,96
Gini Rasio ²	-	0,302	0,292	-0,010
Gini Rasio ³	-	0,301	0,287	-0,014

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan ^dwww.bps.go.id

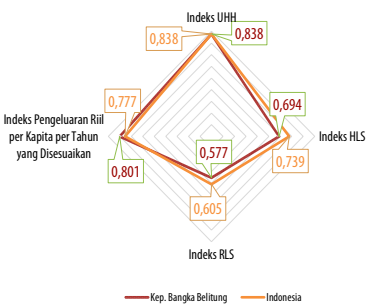
Kep. Bangka Belitung

IPM 2025: 75,26 Status Pembangunan Manusia: TINGGI
Pertumbuhan 2025: 0,95% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 0,79%

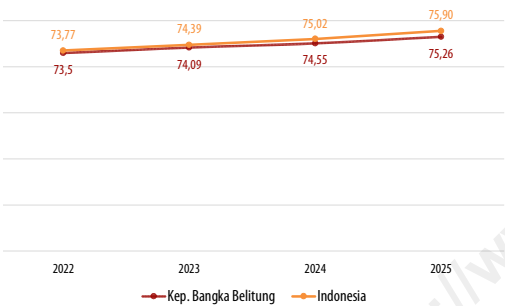
Tabel 5.19 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kepulauan Bangka Belitung, 2025

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,46 tahun	0,35
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,50 tahun	0,87
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,65 tahun	2,17
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp13.837 ribu	1,18

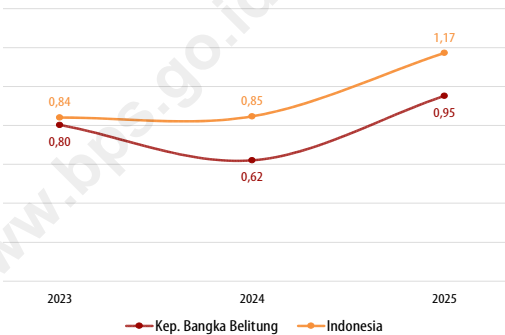
Catatan: ¹⁾ Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



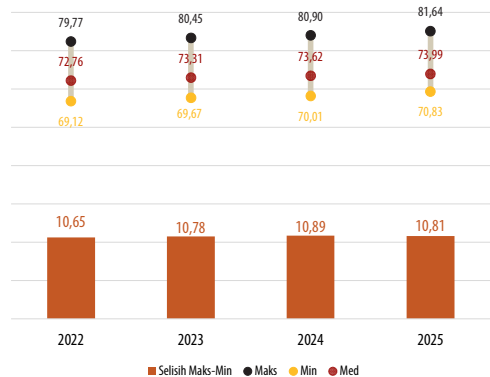
Gambar 5.46 Indeks Indikator Komponen IPM Kepulauan Bangka Belitung, 2025



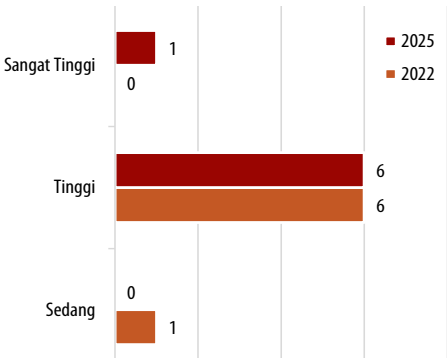
Gambar 5.47 Perkembangan IPM Kepulauan Bangka Belitung, 2022–2025



Gambar 5.48 Pertumbuhan IPM Kepulauan Bangka Belitung, 2023–2025



Gambar 5.49 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kepulauan Bangka Belitung, 2022–2025



Gambar 5.50 Jumlah Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.20 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kepulauan Bangka Belitung, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	87,69	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	82,97	83,54	0,57
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	1,72	1,29	-0,43
Morbiditas ^b	%	10,08	10,40	0,32
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	12,49	11,37	-1,12
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	97,56	98,07	0,51
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	98,60	98,59	-0,01
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,66	99,49	-0,17
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	93,52	92,90	-0,62
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	72,69	76,03	3,34
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	19,74	21,13	1,39
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	1,03	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	8,17	10,76	2,59
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	17,86	18,59	0,73
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	91,95	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	94,16	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	70.193*	75.323**	5.129,21
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	39.700*	40.811**	1.111,30
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	766.084	785.723	19.639
Persentase Pekerja Formal ¹	%	48,86	48,71	-0,15
Persentase Pekerja Informal ¹	%	51,14	51,29	0,15
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	3.264.692	3.202.690	-62.002
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	4,63	4,45	-0,18
Penduduk Miskin ²	ribu orang	70	78	8
Penduduk Miskin ³	ribu orang	79	75	-4
Persentase Penduduk Miskin ²	%	4,55	5,00	0,45
Persentase Penduduk Miskin ³	%	5,08	4,77	-0,31
Gini Rasio ²	-	0,244	0,222	-0,022
Gini Rasio ³	-	0,235	0,214	-0,021

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan^dwww.bps.go.id

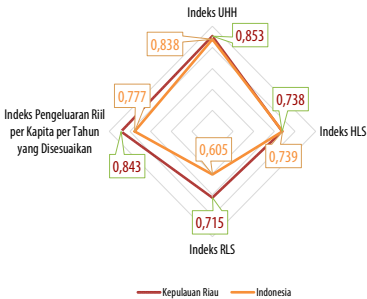
Kepulauan Riau

IPM 2025: 80,53 Status Pembangunan Manusia: **SANGAT TINGGI**
Pertumbuhan 2025: 0,80% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 0,86%

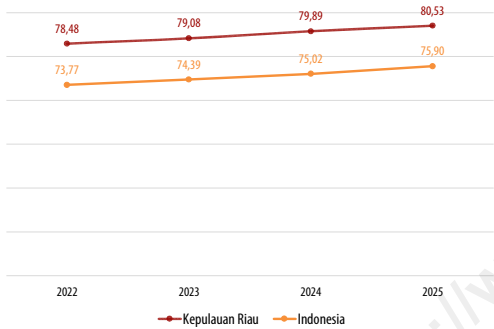
Tabel 5.21 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kepulauan Riau, 2025

Indikator	Capaian	Rata- rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	75,46 tahun	0,37
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,28 tahun	0,74
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,72 tahun	1,11
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp15.881 ribu	3,15

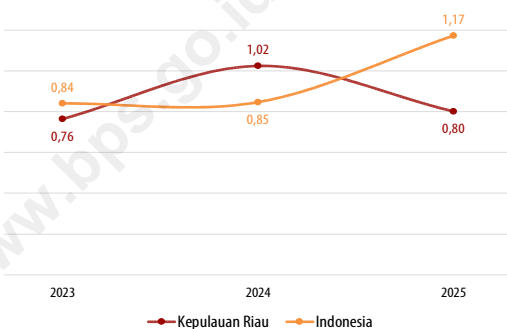
Catatan: ¹⁾ Ditungkat berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



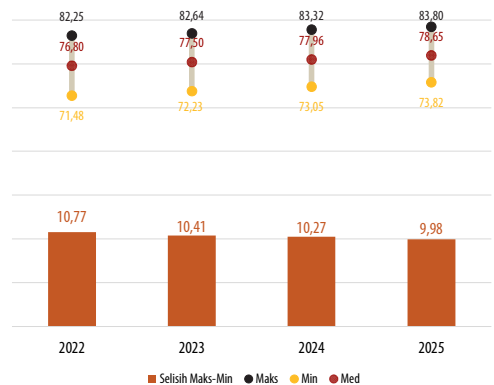
Gambar 5.51 Indeks Indikator Komponen IPM Kepulauan Riau, 2025



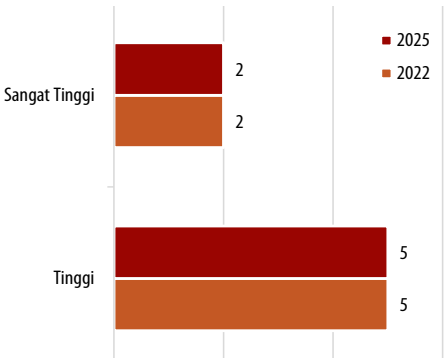
Gambar 5.52 Perkembangan IPM Kepulauan Riau, 2022–2025



Gambar 5.53 Pertumbuhan IPM Kepulauan Riau, 2023–2025



Gambar 5.54 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kepulauan Riau, 2022–2025



Gambar 5.55 Jumlah Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.22 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kepulauan Riau, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	94,53	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	94,71	94,60	-0,11
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	0,54	0,25	-0,29
Morbiditas ^b	%	10,25	7,46	-2,79
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	4,40	4,08	-0,32
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	98,63	97,87	-0,76
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	99,21	99,76	0,55
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,47	99,71	0,24
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	98,91	98,60	-0,31
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	85,56	88,24	2,68
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	26,28	26,61	0,33
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	NA	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	4,04	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	9,49	6,64	-2,85
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	96,51	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	90,75	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	161.424*	172.459**	11.034,44
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	96.157*	101.427**	5.270,11
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	1.049.087	1.051.975	2.888
Persentase Pekerja Formal ¹	%	68,45	65,75	-2,70
Persentase Pekerja Informal ¹	%	31,55	34,25	2,70
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	4.911.036	4.768.990	-142.046
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	6,39	6,45	0,06
Penduduk Miskin ²	ribu orang	138	117	-21
Penduduk Miskin ³	ribu orang	125	115	-10
Persentase Penduduk Miskin ²	%	5,37	4,44	-0,93
Persentase Penduduk Miskin ³	%	4,78	4,26	-0,52
Gini Rasio ²	-	0,349	0,382	0,033
Gini Rasio ³	-	0,357	0,385	0,028

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan^dwww.bps.go.id

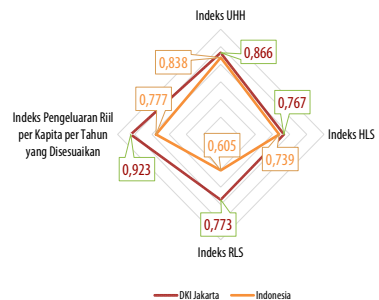
DKI Jakarta

IPM 2025: 85,05 Status Pembangunan Manusia: SANGAT TINGGI
Pertumbuhan 2025: 1,07% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 0,91%

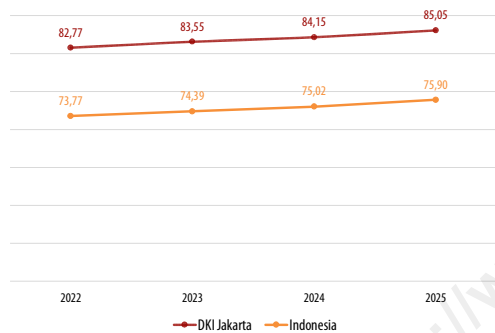
Tabel 5.23 Capaian Indikator Komponen Penyusun
IPM DKI Jakarta, 2025

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	76,27 tahun	0,32
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,80 tahun	1,80
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,59 tahun	0,82
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp20.676 ribu	2,99

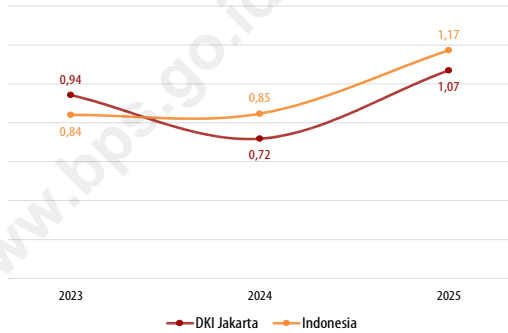
Catatan: ¹⁾ Ditungkat berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



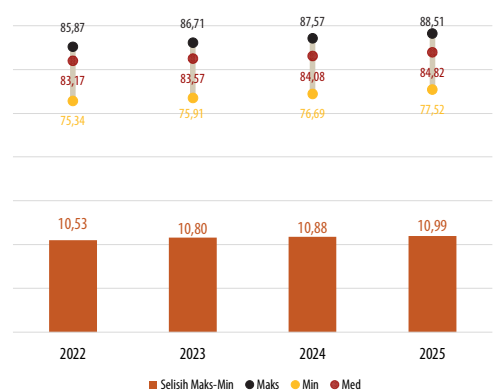
Gambar 5.56 Indeks Indikator Komponen
IPM DKI Jakarta, 2025



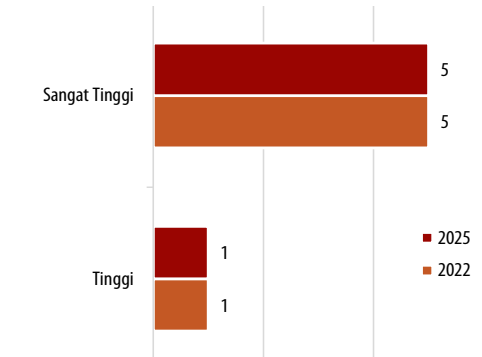
Gambar 5.57 Perkembangan IPM DKI
Jakarta, 2022–2025



Gambar 5.58 Pertumbuhan IPM DKI Jakarta,
2023–2025



Gambar 5.59 Disparitas dan Capaian IPM
Kabupaten/Kota Tertinggi dan
Terendah di DKI Jakarta, 2022–2025



Gambar 5.60 Jumlah Kabupaten/Kota di DKI
Jakarta Menurut Status IPM,
2022 dan 2025

Tabel 5.24 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia DKI Jakarta, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	94,61	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	99,96	99,98	0,02
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	0,17	0,00	-0,17
Morbiditas ^b	%	9,10	8,92	-0,18
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	5,34	5,12	-0,22
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	100,00	100,00	0,00
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	95,20	98,18	2,98
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,25	99,32	0,07
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	98,36	98,74	0,38
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	79,95	88,22	8,27
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	32,98	34,21	1,23
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	NA	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	5,39	2,22	-3,17
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	11,63	6,24	-5,39
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	97,72	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	90,55	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	344.383*	367.687**	23.304,54
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	201.330*	211.954**	10.623,90
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	5.107.775	5.128.464	20.689
Persentase Pekerja Formal ¹	%	63,69	63,37	-0,32
Persentase Pekerja Informal ¹	%	36,31	36,63	0,32
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	5.806.940	5.903.603	96.663
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	6,21	6,05	-0,16
Penduduk Miskin ²	ribu orang	465	465	0
Penduduk Miskin ³	ribu orang	449	439	-10
Persentase Penduduk Miskin ²	%	4,30	4,28	-0,02
Persentase Penduduk Miskin ³	%	4,14	4,03	-0,11
Gini Rasio ²	-	0,423	0,441	0,018
Gini Rasio ³	-	0,431	0,423	-0,008

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan ^dwww.bps.go.id

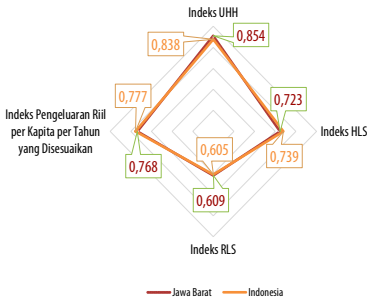
Jawa Barat

IPM 2025: 75,90 Status Pembangunan Manusia: TINGGI
Pertumbuhan 2025: 1,31% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 1,02%

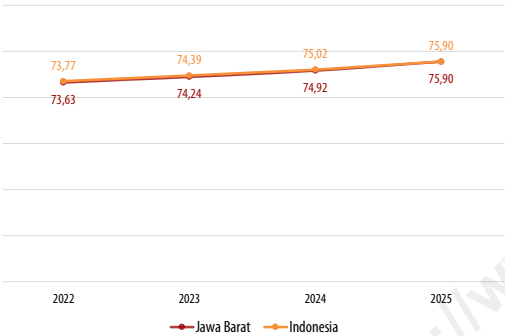
Tabel 5.25 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Jawa Barat, 2025

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	75,53 tahun	0,39
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,02 tahun	1,05
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,14 tahun	1,35
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp12.447 ribu	3,35

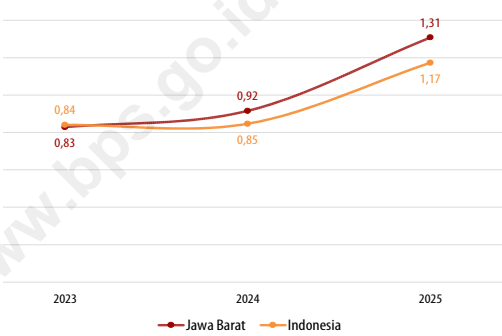
Catatan: ¹⁾ Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



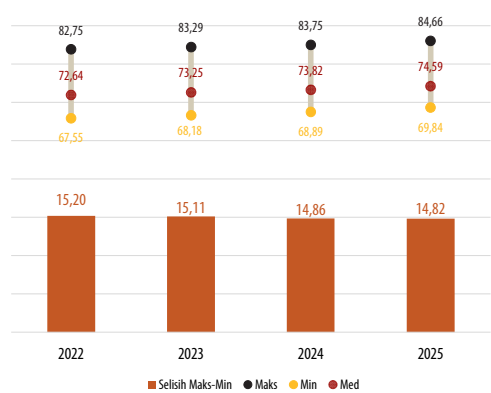
Gambar 5.61 Indeks Indikator Komponen IPM Jawa Barat, 2025



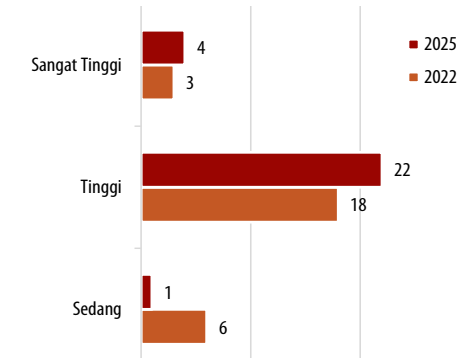
Gambar 5.62 Perkembangan IPM Jawa Barat, 2022–2025



Gambar 5.63 Pertumbuhan IPM Jawa Barat, 2023–2025



Gambar 5.64 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Jawa Barat, 2022–2025



Gambar 5.65 Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.26 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Jawa Barat, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	80,07	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	94,90	95,84	0,94
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	1,28	0,78	-0,50
Morbiditas ^b	%	13,92	14,93	1,01
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	19,37	16,50	-2,87
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	88,74	91,10	2,36
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	94,92	95,56	0,64
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,46	99,50	0,04
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	95,86	96,58	0,72
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	71,15	75,80	4,65
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	26,59	27,98	1,39
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,57	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	7,71	6,52	-1,19
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	22,33	17,35	-4,98
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	90,31	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	88,24	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	56.082*	59.865**	3.782,75
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	34.802*	36.354**	1.552,25
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	24.417.110	24.506.852	89.742
Persentase Pekerja Formal ¹	%	45,61	45,05	-0,56
Persentase Pekerja Informal ¹	%	54,39	54,95	0,56
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	3.774.498	3.768.080	-6.418
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	6,75	6,77	0,02
Penduduk Miskin ²	ribu orang	3.849	3.655	-194
Penduduk Miskin ³	ribu orang	3.668	3.551	-118
Persentase Penduduk Miskin ²	%	7,46	7,02	-0,44
Persentase Penduduk Miskin ³	%	7,08	6,78	-0,30
Gini Rasio ²	-	0,421	0,416	-0,005
Gini Rasio ³	-	0,428	0,397	-0,031

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

... Data Tidak Tersedia

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan ^dwww.bps.go.id

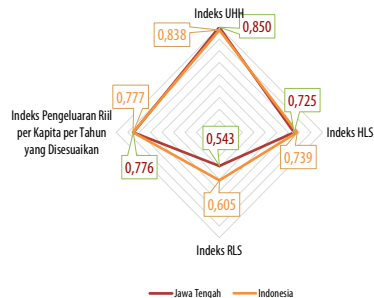
Jawa Tengah

IPM 2025: 74,77 Status Pembangunan Manusia: TINGGI
Pertumbuhan 2025: 1,22% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 0,89%

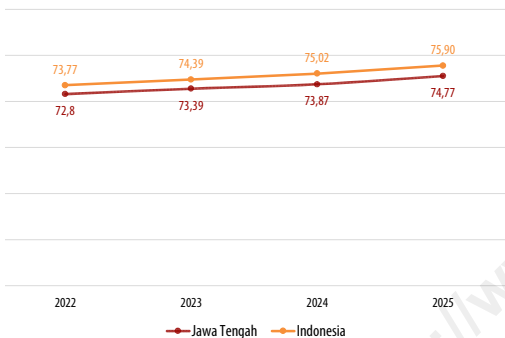
Tabel 5.27 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Jawa Tengah, 2025

Indikator	Capaian	Rata- rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	75,24 tahun	0,29
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,05 tahun	0,62
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,15 tahun	0,92
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp12.746 ribu	3,86

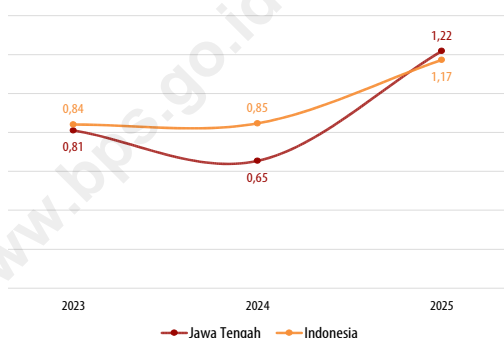
Catatan: ¹⁾ Ditungkat berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



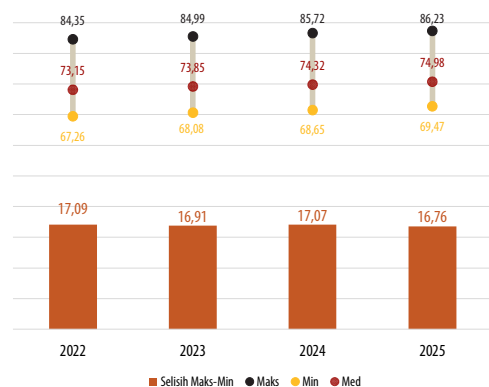
Gambar 5.66 Indeks Indikator Komponen IPM Jawa Tengah, 2025



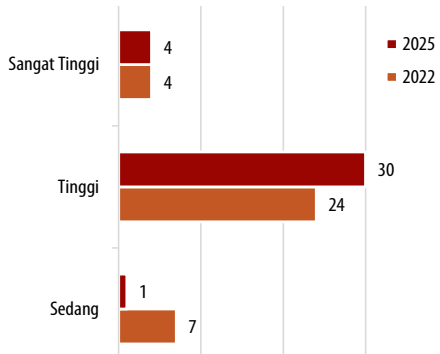
Gambar 5.67 Perkembangan IPM Jawa Tengah, 2022–2025



Gambar 5.68 Pertumbuhan IPM Jawa Tengah, 2023–2025



Gambar 5.69 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Jawa Tengah, 2022–2025



Gambar 5.70 Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.28 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Jawa Tengah, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	83,28	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	95,43	95,73	0,30
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	1,89	1,28	-0,61
Morbiditas ^b	%	13,83	15,27	1,44
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun ^b	%	15,66	15,15	-0,51
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	98,63	99,12	0,49
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	99,62	99,93	0,31
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,57	99,54	-0,03
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	97,12	97,05	-0,07
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	71,60	77,97	6,37
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	25,61	27,44	1,83
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,30	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	5,96	4,65	-1,31
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	23,11	15,15	-7,96
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	94,63	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	88,92	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	47.970*	50.824**	2.853,16
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	30.534*	31.887**	1.352,67
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	20.861.393	21.295.797	434.404
Persentase Pekerja Formal ¹	%	40,36	41,21	0,85
Persentase Pekerja Informal ¹	%	59,64	58,79	-0,85
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.405.447	2.528.470	123.023
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	4,78	4,66	-0,12
Penduduk Miskin ²	ribu orang	3.704	3.367	-338
Penduduk Miskin ³	ribu orang	3.396	3.345	-52
Persentase Penduduk Miskin ²	%	10,47	9,48	-0,99
Persentase Penduduk Miskin ³	%	9,58	9,39	-0,19
Gini Rasio ²	-	0,367	0,359	-0,008
Gini Rasio ³	-	0,364	0,350	-0,014

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan ^dwww.bps.go.id

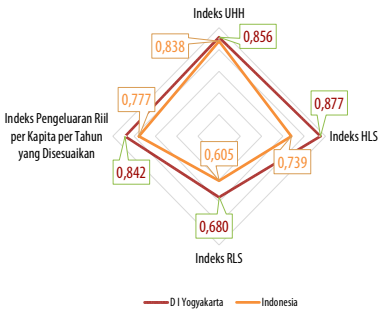
D.I. Yogyakarta

IPM 2025: 82,48 Status Pembangunan Manusia: **SANGAT TINGGI**
Pertumbuhan 2025: 1,05% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 0,75%

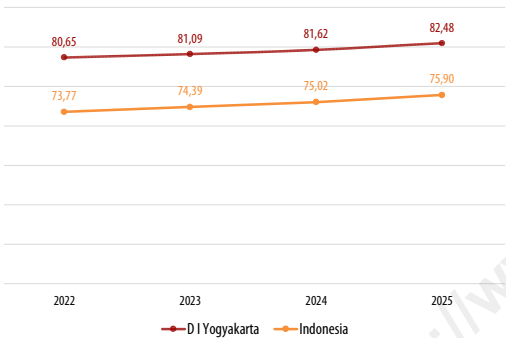
Tabel 5.29 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM D.I. Yogyakarta, 2025

Indikator	Capaian	Rata- rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	75,64 tahun	0,23
Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,78 tahun	0,28
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,20 tahun	1,52
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp15.855 ribu	3,07

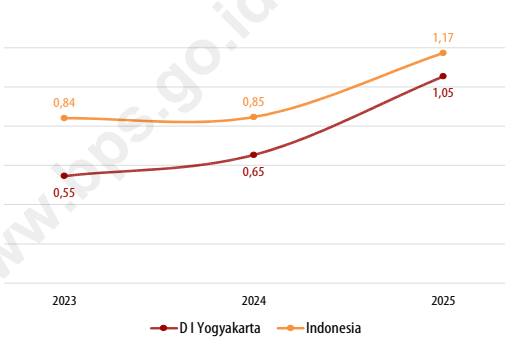
Catatan: ¹⁾ Dhitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



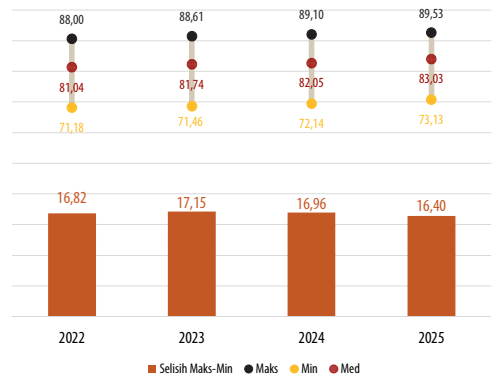
Gambar 5.71 Indeks Indikator Komponen IPM D.I. Yogyakarta, 2025



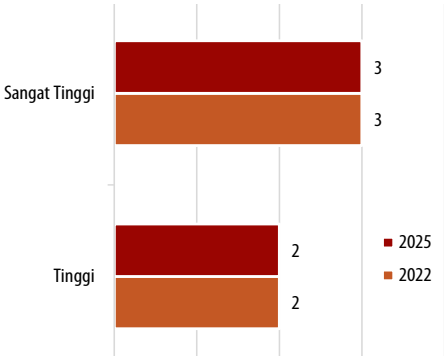
Gambar 5.72 Perkembangan IPM D.I. Yogyakarta, 2022–2025



Gambar 5.73 Pertumbuhan IPM D.I. Yogyakarta, 2023–2025



Gambar 5.74 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di D.I. Yogyakarta, 2022–2025



Gambar 5.75 Jumlah Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.30 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia D.I. Yogyakarta, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	77,93	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	96,91	97,33	0,42
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	0,56	0,35	-0,21
Morbiditas ^b	%	12,32	13,42	1,10
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	6,62	7,79	1,17
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	100,00	99,47	-0,53
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	99,06	96,30	-2,76
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,65	99,61	-0,04
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	98,90	99,60	0,70
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	90,36	93,03	2,67
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	54,17	54,72	0,55
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	NA	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	2,19	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	7,98	NA	NA
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	98,08	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	97,47	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	51.486*	55.039**	3.553,25
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	33.140*	34.757**	1.617,03
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	2.182.769	2.200.071	17.302
Persentase Pekerja Formal ¹	%	46,88	46,03	-0,85
Persentase Pekerja Informal ¹	%	53,12	53,97	0,85
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.829.890	2.924.613	94.723
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	3,48	3,46	-0,02
Penduduk Miskin ²	ribu orang	446	426	-20
Penduduk Miskin ³	ribu orang	430	423	-8
Persentase Penduduk Miskin ²	%	10,83	10,23	-0,60
Persentase Penduduk Miskin ³	%	10,40	10,08	-0,32
Gini Rasio ²	-	0,435	0,426	-0,009
Gini Rasio ³	-	0,428	0,414	-0,014

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan^dwww.bps.go.id

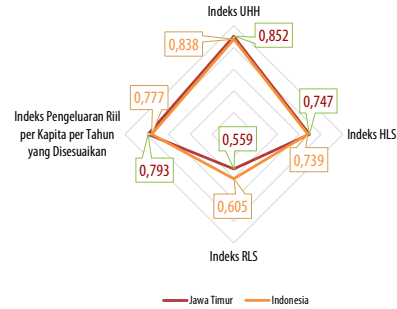
Jawa Timur

IPM 2025: 76,13 Status Pembangunan Manusia: TINGGI
Pertumbuhan 2025: 1,04% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 0,93%

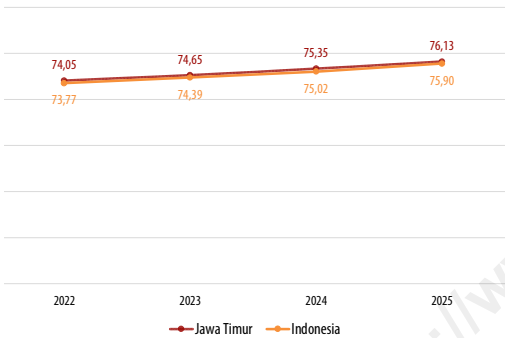
Tabel 5.31 Capaian Indikator Komponen Penyusun
IPM Jawa Timur, 2025

Indikator	Capaian	Rata- rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	75,36 tahun	0,35
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,44 tahun	0,17
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,39 tahun	1,47
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp13.509 ribu	4,05

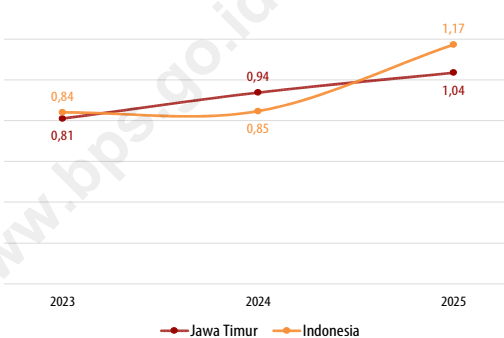
Catatan: ¹⁾ Ditungkat berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



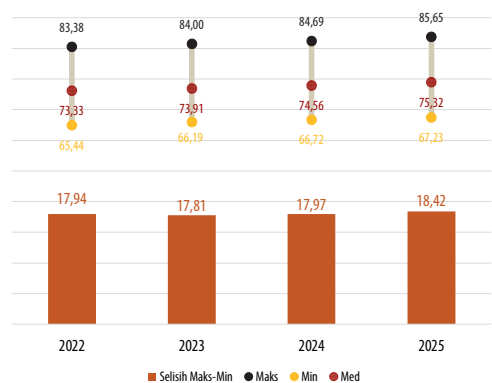
Gambar 5.76 Indeks Indikator Komponen
IPM Jawa Timur, 2025



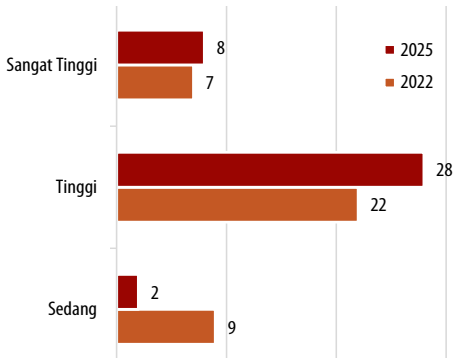
Gambar 5.77 Perkembangan IPM Jawa
Timur, 2022–2025



Gambar 5.78 Pertumbuhan IPM Jawa Timur,
2023–2025



Gambar 5.79 Disparitas dan Capaian IPM
Kabupaten/Kota Tertinggi dan
Terendah di Jawa Timur, 2022–2025



Gambar 5.80 Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa
Timur Menurut Status IPM,
2022 dan 2025

Tabel 5.32 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Jawa Timur, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	81,95	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	96,93	97,30	0,37
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	3,91	3,51	-0,40
Morbiditas ^b	%	12,22	12,87	0,65
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	19,33	18,24	-1,09
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	98,22	98,57	0,35
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	99,04	98,89	-0,15
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,34	99,28	-0,06
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	97,68	97,15	-0,53
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	76,44	80,96	4,52
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	28,88	28,90	0,02
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,27	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	4,93	4,43	-0,50
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	18,99	15,52	-3,47
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	91,58	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	87,72	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	75.770*	80.856**	5.085,66
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	46.295*	48.444**	2.148,55
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	23.361.110	23.801.034	439.924
Persentase Pekerja Formal ¹	%	38,51	38,27	-0,24
Persentase Pekerja Informal ¹	%	61,49	61,73	0,24
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.713.383	2.899.074	185.691
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	4,19	3,88	-0,31
Penduduk Miskin ²	ribu orang	3.983	3.876	-107
Penduduk Miskin ³	ribu orang	3.894	3.804	-90
Persentase Penduduk Miskin ²	%	9,79	9,50	-0,29
Persentase Penduduk Miskin ³	%	9,56	9,30	-0,26
Gini Rasio ²	-	0,372	0,369	-0,003
Gini Rasio ³	-	0,373	0,359	-0,014

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan^dwww.bps.go.id

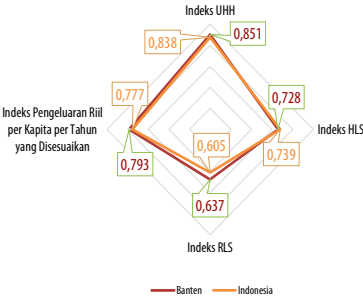
Banten

IPM 2025: 77,25 Status Pembangunan Manusia: TINGGI
Pertumbuhan 2025: 1,18% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 0,88%

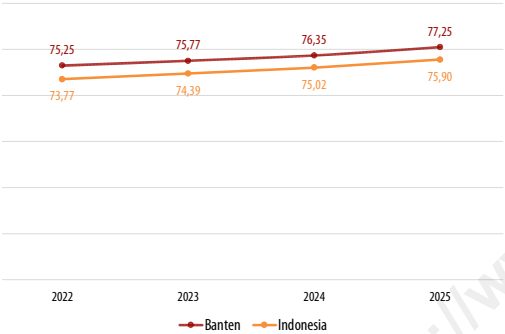
Tabel 5.33 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Banten, 2025

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	75,33 tahun	0,39
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,11 tahun	0,15
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,56 tahun	1,55
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp13.498 ribu	3,38

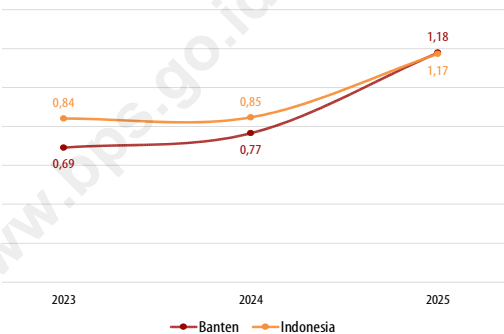
Catatan: ¹⁾ Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



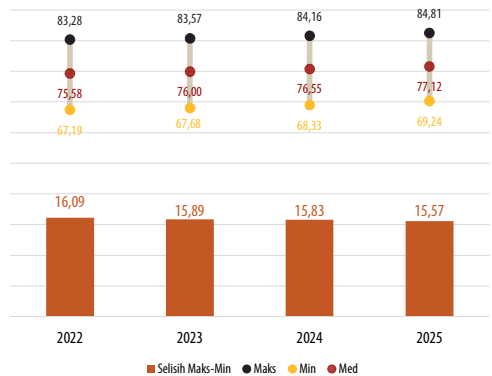
Gambar 5.81 Indeks Indikator Komponen IPM Banten, 2025



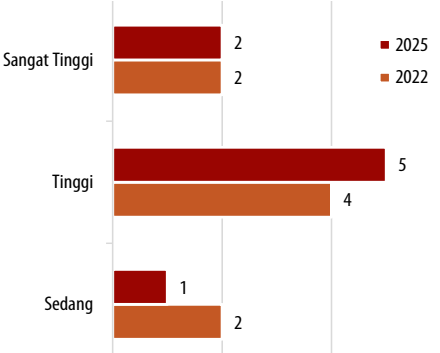
Gambar 5.82 Perkembangan IPM Banten, 2022–2025



Gambar 5.83 Pertumbuhan IPM Banten, 2023–2025



Gambar 5.84 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Banten, 2022–2025



Gambar 5.85 Jumlah Kabupaten/Kota di Banten Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.34 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Banten, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	78,35	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	94,01	96,03	2,02
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	3,05	1,46	-1,59
Morbiditas ^b	%	10,97	11,63	0,66
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	12,78	13,03	0,25
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	91,43	94,02	2,59
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	95,62	97,96	2,34
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,52	99,52	0,00
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	96,67	97,11	0,44
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	71,91	73,84	1,93
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	26,04	24,45	-1,59
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,48	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	6,73	6,47	-0,26
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	19,78	15,68	-4,10
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	83,36	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	84,55	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	70.276*	74.673**	4.396,86
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	42.774*	44.688**	1.914,24
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	5.797.923	5.755.926	-41.997
Persentase Pekerja Formal ¹	%	53,79	54,88	1,09
Persentase Pekerja Informal ¹	%	46,21	45,12	-1,09
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	4.392.768	4.062.488	-330.280
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	6,68	6,69	0,01
Penduduk Miskin ²	ribu orang	792	773	-19
Penduduk Miskin ³	ribu orang	777	761	-17
Persentase Penduduk Miskin ²	%	5,84	5,63	-0,21
Persentase Penduduk Miskin ³	%	5,70	5,51	-0,19
Gini Rasio ²	-	0,353	0,330	-0,023
Gini Rasio ³	-	0,359	0,312	-0,047

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan ^dwww.bps.go.id

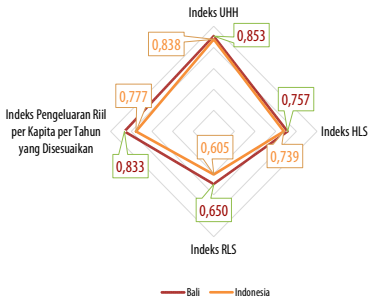
Bali

IPM 2025: 79,37 Status Pembangunan Manusia: TINGGI
Pertumbuhan 2025: 0,94% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 0,84%

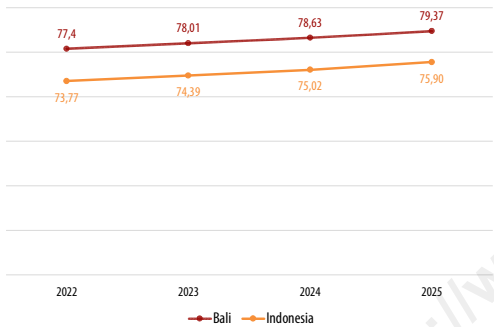
Tabel 5.35 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Bali, 2025

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	75,46 tahun	0,38
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,63 tahun	0,37
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,75 tahun	1,26
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp15.383 ribu	3,33

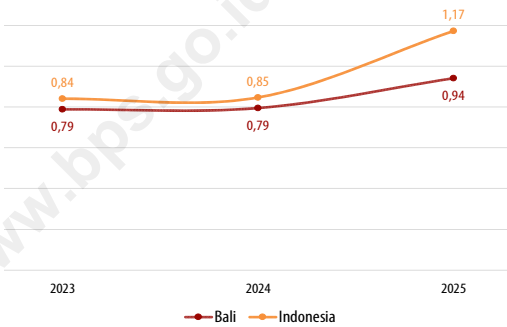
Catatan: ¹⁾ Ditungkat berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



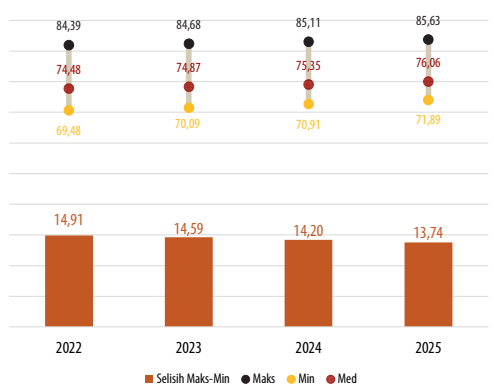
Gambar 5.86 Indeks Indikator Komponen IPM Bali, 2025



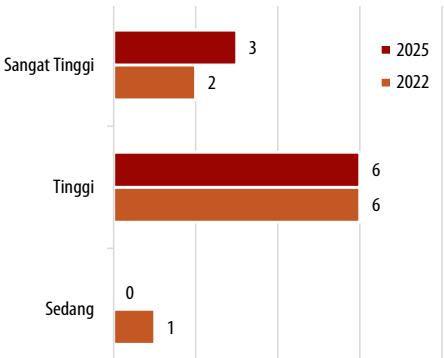
Gambar 5.87 Perkembangan IPM Bali, 2022–2025



Gambar 5.88 Pertumbuhan IPM Bali, 2023–2025



Gambar 5.89 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Bali, 2022–2025



Gambar 5.90 Jumlah Kabupaten/Kota di Bali Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.36 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Bali, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	88,64	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	98,32	98,75	0,43
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	1,65	1,10	-0,55
Morbiditas ^b	%	10,61	10,31	-0,30
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	5,15	4,83	-0,32
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	100,00	99,96	-0,04
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	99,57	98,32	-1,25
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,65	99,57	-0,08
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	98,79	98,88	0,09
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	85,17	90,68	5,51
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	35,39	34,32	-1,07
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,09	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	2,09	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	12,41	6,28	-6,13
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	96,31	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	92,35	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	67.318*	72.658**	5.340,21
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	37.940*	39.897**	1.957,24
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	2.665.421	2.701.726	36.305
Persentase Pekerja Formal ¹	%	49,32	49,53	0,21
Persentase Pekerja Informal ¹	%	50,68	50,47	-0,21
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	3.403.265	3.639.413	236.148
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	1,79	1,49	-0,30
Penduduk Miskin ²	ribu orang	184	173	-11
Penduduk Miskin ³	ribu orang	176	160	-16
Persentase Penduduk Miskin ²	%	4,00	3,72	-0,28
Persentase Penduduk Miskin ³	%	3,80	3,42	-0,38
Gini Rasio ²	-	0,361	0,353	-0,008
Gini Rasio ³	-	0,348	0,333	-0,015

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan ^dwww.bps.go.id

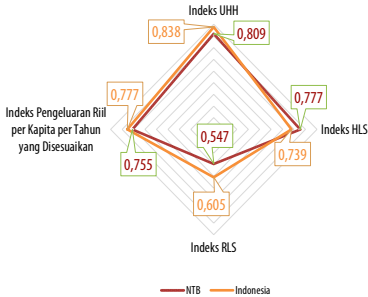
Nusa Tenggara Barat

IPM 2025: 73,97 Status Pembangunan Manusia: TINGGI
Pertumbuhan 2025: 1,19% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 1,07%

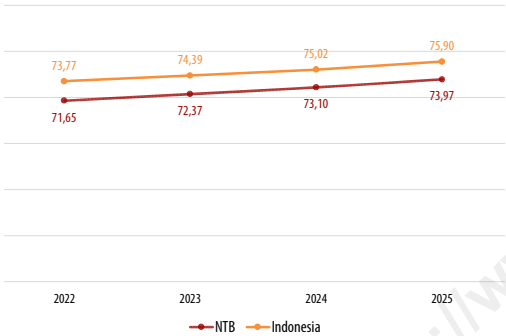
Tabel 5.37 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Nusa Tenggara Barat, 2025

Indikator	Capaian	Rata- rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	72,60 tahun	0,44
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,99 tahun	0,07
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,21 tahun	2,56
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp11.922 ribu	3,73

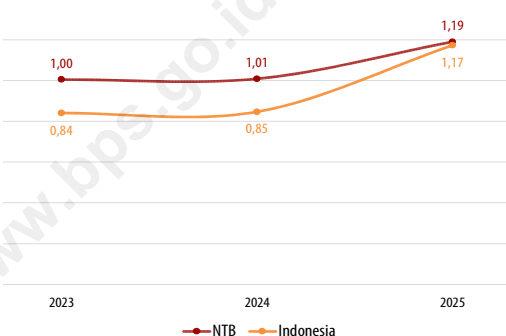
Catatan: ¹⁾ Ditungkat berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



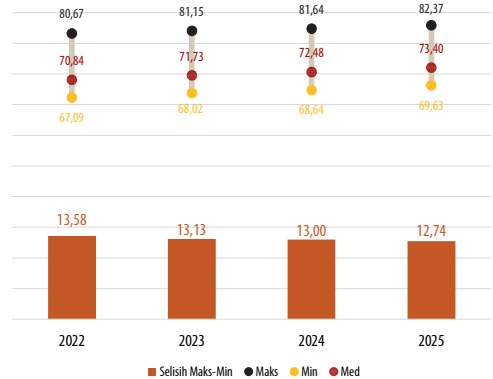
Gambar 5.91 Indeks Indikator Komponen IPM Nusa Tenggara Barat, 2025



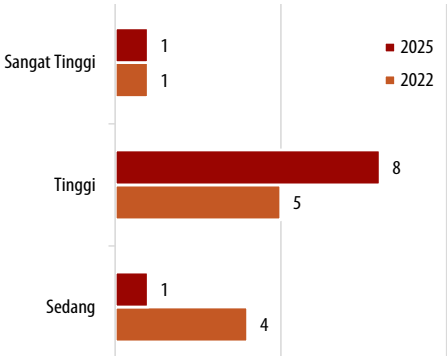
Gambar 5.92 Perkembangan IPM Nusa Tenggara Barat, 2022–2025



Gambar 5.93 Pertumbuhan IPM Nusa Tenggara Barat, 2023–2025



Gambar 5.94 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Nusa Tenggara Barat, 2022–2025



Gambar 5.95 Jumlah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.38 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Nusa Tenggara Barat, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	75,35	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	96,13	96,29	0,16
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	7,20	3,98	-3,22
Morbiditas ^b	%	19,34	20,59	1,25
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	14,65	15,09	0,44
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	96,06	97,25	1,19
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	97,42	99,15	1,73
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,47	99,38	-0,09
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	97,86	96,92	-0,94
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	77,81	79,21	1,40
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	28,88	28,88	0,00
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,29	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	4,60	3,69	-0,91
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	17,22	15,03	-2,19
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	90,97	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	92,44	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	32.282*	33.667**	1.385,24
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	19.379*	19.706**	327,12
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	3.105.549	3.106.729	1.180
Persentase Pekerja Formal ¹	%	29,49	31,58	2,09
Persentase Pekerja Informal ¹	%	70,51	68,42	-2,09
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.365.102	2.569.181	204.079
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	2,73	3,06	0,33
Penduduk Miskin ²	ribu orang	709	655	-54
Penduduk Miskin ³	ribu orang	659	637	-21
Persentase Penduduk Miskin ²	%	12,91	11,78	-1,13
Persentase Penduduk Miskin ³	%	11,91	11,38	-0,53
Gini Rasio ²	-	0,361	0,369	0,008
Gini Rasio ³	-	0,364	0,364	0,000

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan^dwww.bps.go.id

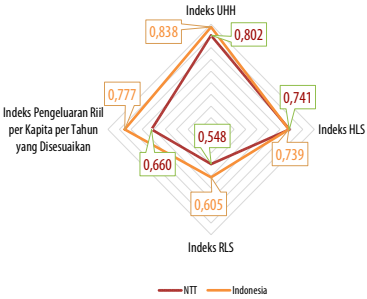
Nusa Tenggara Timur

IPM 2025: 69,89 Status Pembangunan Manusia: SEDANG
Pertumbuhan 2025: 1,08% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 1,10%

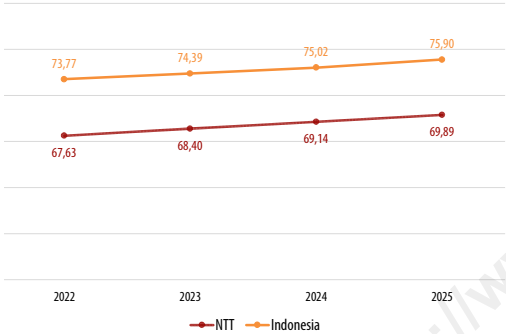
Tabel 5.39 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Nusa Tenggara Timur, 2025

Indikator	Capaian	Rata- rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	72,16 tahun	0,40
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,34 tahun	0,33
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,22 tahun	2,20
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp8.735 ribu	3,51

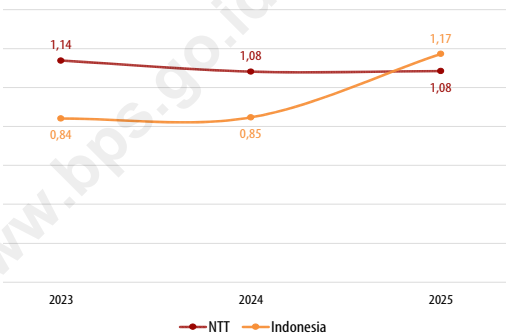
Catatan: ¹⁾ Ditungkat berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



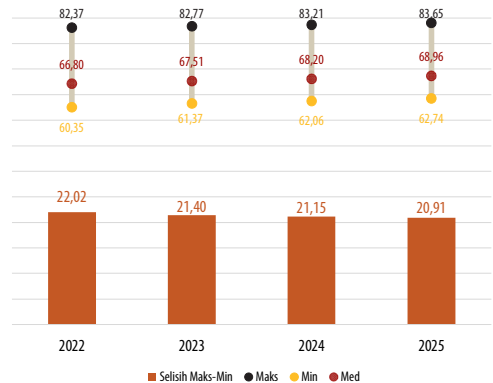
Gambar 5.96 Indeks Indikator Komponen IPM Nusa Tenggara Timur, 2025



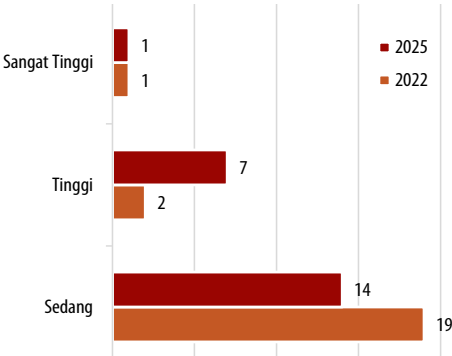
Gambar 5.97 Perkembangan IPM Nusa Tenggara Timur, 2022–2025



Gambar 5.98 Pertumbuhan IPM Nusa Tenggara Timur, 2023–2025



Gambar 5.99 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Nusa Tenggara Timur, 2022–2025



Gambar 5.100 Jumlah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.40 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Nusa Tenggara Timur, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	68,03	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	88,55	89,86	1,31
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	5,37	3,50	-1,87
Morbiditas ^b	%	13,60	15,28	1,68
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun ^b	%	4,11	3,94	-0,17
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	88,05	90,20	2,15
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	92,51	93,02	0,51
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	98,81	98,89	0,08
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	94,76	95,44	0,68
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	75,75	76,65	0,90
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	33,24	31,41	-1,83
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,81	0,98	0,17
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	8,01	6,43	-1,58
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	23,21	18,13	-5,08
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	85,84	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	92,92	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	24.303*	25.837**	1.534,52
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	13.819*	14.310**	490,93
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	3.024.462	2.989.090	-35.372
Persentase Pekerja Formal ¹	%	26,68	31,56	4,88
Persentase Pekerja Informal ¹	%	73,32	68,44	-4,88
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.370.111	2.674.136	304.025
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	3,02	3,31	0,29
Penduduk Miskin ²	ribu orang	1.128	1.089	-39
Penduduk Miskin ³	ribu orang	1.108	1.032	-76
Persentase Penduduk Miskin ²	%	19,48	18,60	-0,88
Persentase Penduduk Miskin ³	%	19,02	17,50	-1,52
Gini Rasio ²	-	0,316	0,315	-0,001
Gini Rasio ³	-	0,316	0,322	0,006

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan ^dwww.bps.go.id

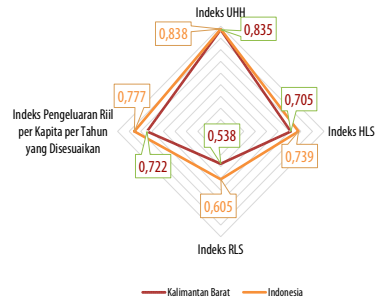
Kalimantan Barat

IPM 2025: 72,09 Status Pembangunan Manusia: TINGGI
Pertumbuhan 2025: 1,26% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 1,13%

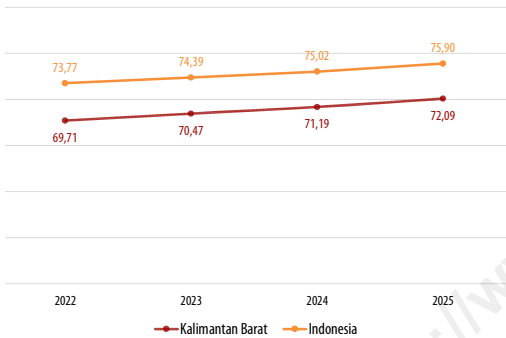
Tabel 5.41 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kalimantan Barat, 2025

Indikator	Capaian	Rata- rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,28 tahun	0,37
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,69 tahun	0,08
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,07 tahun	2,07
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp10.689 ribu	4,54

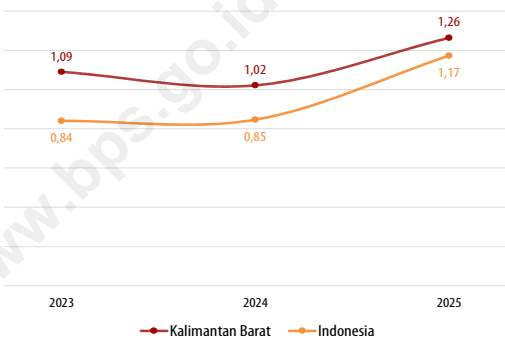
Catatan: ¹⁾ Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



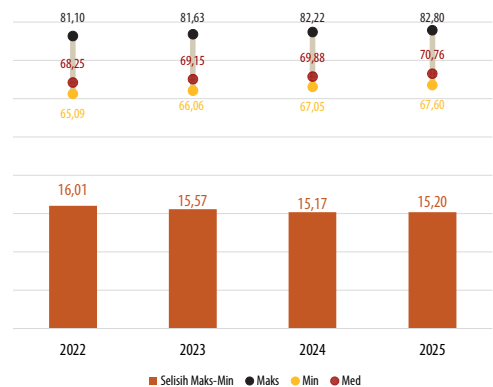
Gambar 5.101 Indeks Indikator Komponen IPM Kalimantan Barat, 2025



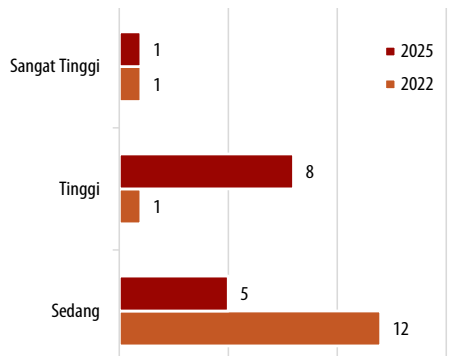
Gambar 5.102 Perkembangan IPM Kalimantan Barat, 2022–2025



Gambar 5.103 Pertumbuhan IPM Kalimantan Barat, 2023–2025



Gambar 5.104 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kalimantan Barat, 2022–2025



Gambar 5.105 Jumlah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.42 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kalimantan Barat, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	40,50	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	82,13	84,32	2,19
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	5,13	2,50	-2,63
Morbiditas ^b	%	10,20	10,99	0,79
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	11,65	12,19	0,54
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	83,54	84,10	0,56
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	94,25	93,14	-1,11
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,00	98,95	-0,05
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	93,05	94,36	1,31
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	69,39	70,95	1,56
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	26,98	26,84	-0,14
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	1,06	1,10	0,04
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	10,05	8,53	-1,52
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	24,17	22,69	-1,48
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	78,92	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	90,20	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	52.703*	56.984**	4.280,96
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	28.545*	29.714**	1.169,30
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	2.863.521	2.930.432	66.911
Persentase Pekerja Formal ¹	%	43,98	43,61	-0,37
Persentase Pekerja Informal ¹	%	56,02	56,39	0,37
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.904.061	2.972.111	68.050
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	4,86	4,82	-0,04
Penduduk Miskin ²	ribu orang	336	331	-5
Penduduk Miskin ³	ribu orang	334	323	-11
Persentase Penduduk Miskin ²	%	6,32	6,16	-0,16
Persentase Penduduk Miskin ³	%	6,25	5,97	-0,28
Gini Rasio ²	-	0,310	0,316	0,006
Gini Rasio ³	-	0,314	0,308	-0,006

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan ^dwww.bps.go.id

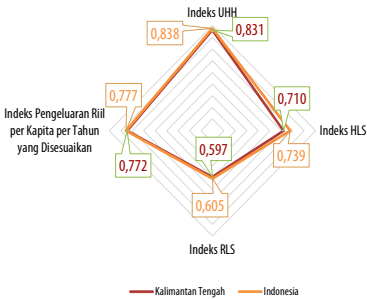
Kalimantan Tengah

IPM 2025: 74,86 Status Pembangunan Manusia: TINGGI
Pertumbuhan 2025: 0,78% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 0,76%

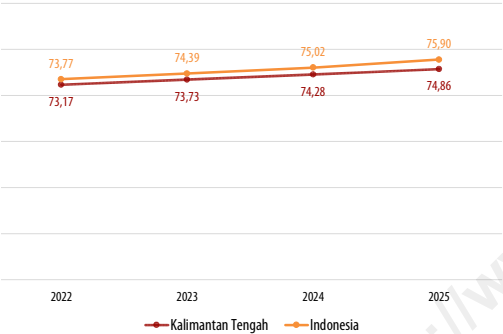
Tabel 5.43 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kalimantan Tengah, 2025

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,01 tahun	0,30
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,78 tahun	0,08
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,96 tahun	1,18
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp12.612 ribu	3,25

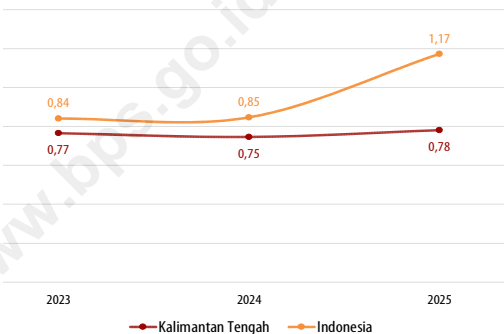
Catatan: ¹⁾ Ditungkat berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



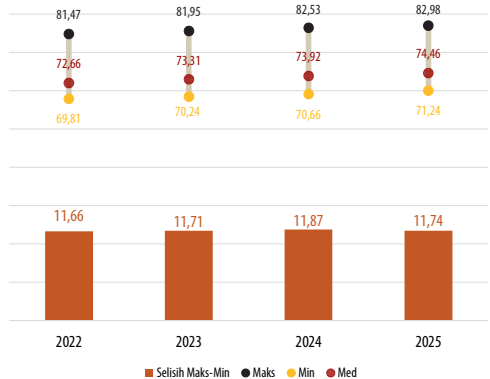
Gambar 5.106 Indeks Indikator Komponen IPM Kalimantan Tengah, 2025



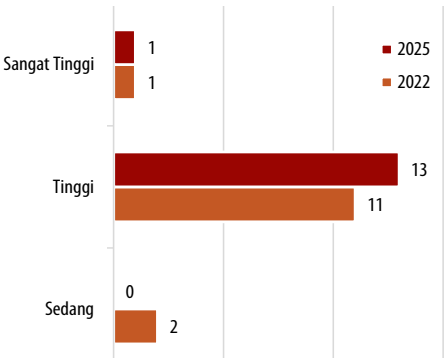
Gambar 5.107 Perkembangan IPM Kalimantan Tengah, 2022–2025



Gambar 5.108 Pertumbuhan IPM Kalimantan Tengah, 2023–2025



Gambar 5.109 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kalimantan Tengah, 2022–2025



Gambar 5.110 Jumlah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.44 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kalimantan Tengah, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	73,99	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	78,71	80,58	1,87
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	1,82	0,69	-1,13
Morbiditas ^b	%	7,68	9,26	1,58
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	18,45	16,00	-2,45
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	71,54	74,00	2,46
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	94,53	92,89	-1,64
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,32	99,45	0,13
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	95,24	95,74	0,50
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	68,33	70,76	2,43
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	24,12	24,91	0,79
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,43	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	8,38	8,46	0,08
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	21,97	17,61	-4,36
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	88,41	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	85,85	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	79.320*	84.730**	5.410,11
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	42.240*	43.719**	1.478,27
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	1.402.275	1.417.683	15.408
Persentase Pekerja Formal ¹	%	50,67	49,85	-0,82
Persentase Pekerja Informal ¹	%	49,33	50,15	0,82
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	3.384.610	3.451.676	67.066
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	4,01	3,97	-0,04
Penduduk Miskin ²	ribu orang	146	148	2
Penduduk Miskin ³	ribu orang	149	142	-7
Persentase Penduduk Miskin ²	%	5,17	5,19	0,02
Persentase Penduduk Miskin ³	%	5,26	4,94	-0,32
Gini Rasio ²	-	0,301	0,292	-0,009
Gini Rasio ³	-	0,304	0,284	-0,020

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan^dwww.bps.go.id

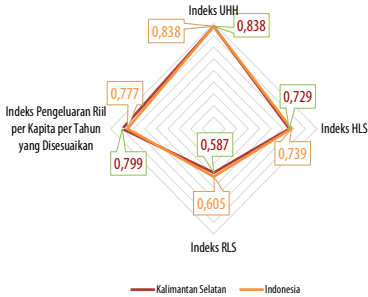
Kalimantan Selatan

IPM 2025: 76,10 Status Pembangunan Manusia: TINGGI
Pertumbuhan 2025: 1,21% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 0,94%

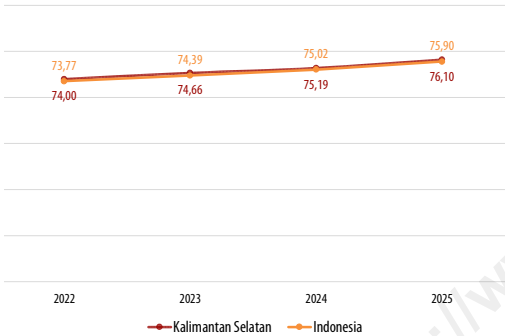
Tabel 5.45 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kalimantan Selatan, 2025

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,49 tahun	0,36
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,12 tahun	0,77
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,81 tahun	1,36
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp13.757 ribu	3,33

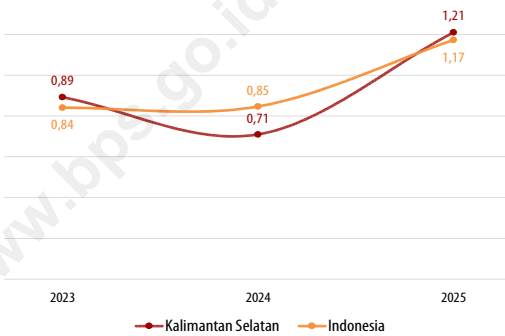
Catatan: ¹⁾ Ditungkat berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



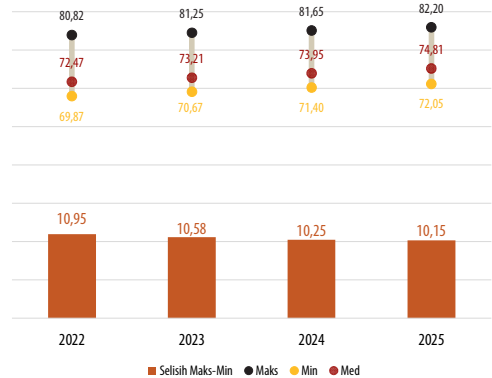
Gambar 5.111 Indeks Indikator Komponen IPM Kalimantan Selatan, 2025



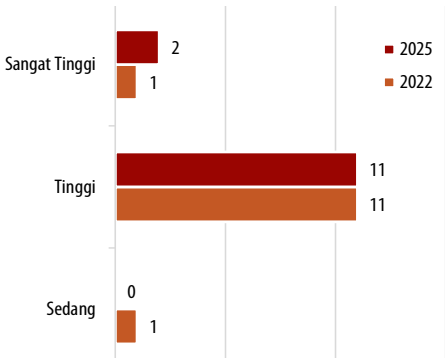
Gambar 5.112 Perkembangan IPM Kalimantan Selatan, 2022–2025



Gambar 5.113 Pertumbuhan IPM Kalimantan Selatan, 2023–2025



Gambar 5.114 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kalimantan Selatan, 2022–2025



Gambar 5.115 Jumlah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.46 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kalimantan Selatan, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	79,94	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	77,34	78,27	0,93
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	1,46	0,41	-1,05
Morbiditas ^b	%	10,33	10,09	-0,24
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	20,61	20,16	-0,45
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	90,26	92,93	2,67
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	96,93	97,95	1,02
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,30	99,14	-0,16
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	93,70	93,82	0,12
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	72,31	75,16	2,85
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	29,45	30,91	1,46
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,52	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	9,46	9,59	0,13
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	18,88	17,82	-1,06
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	94,21	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	90,98	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	67.122*	70.577**	3.454,62
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	36.685*	38.155**	1.470,32
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	2.129.276	2.153.139	23.863
Persentase Pekerja Formal ¹	%	46,44	46,52	0,08
Persentase Pekerja Informal ¹	%	53,56	53,48	-0,08
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	3.239.646	3.164.480	-75.166
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	4,20	4,16	-0,04
Penduduk Miskin ²	ribu orang	183	173	-11
Penduduk Miskin ³	ribu orang	180	169	-11
Persentase Penduduk Miskin ²	%	4,11	3,84	-0,27
Persentase Penduduk Miskin ³	%	4,02	3,73	-0,29
Gini Rasio ²	-	0,302	0,287	-0,015
Gini Rasio ³	-	0,298	0,281	-0,017

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan ^dwww.bps.go.id

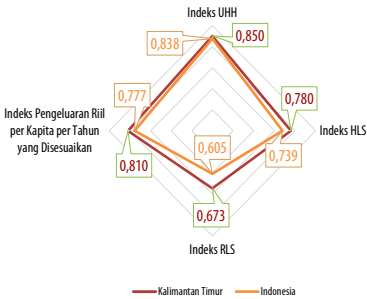
Kalimantan Timur

IPM 2025: 79,39 Status Pembangunan Manusia: TINGGI
Pertumbuhan 2025: 0,76% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 0,87%

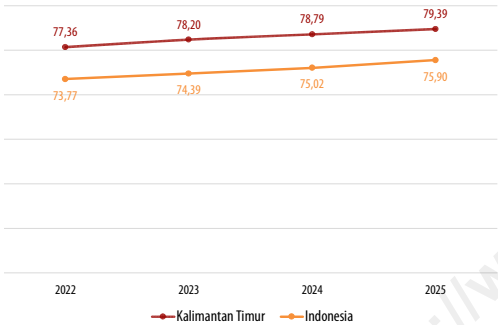
Tabel 5.47 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kalimantan Timur, 2025

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	75,28 tahun	0,37
Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,04 tahun	0,48
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,10 tahun	0,60
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp14.254 ribu	4,08

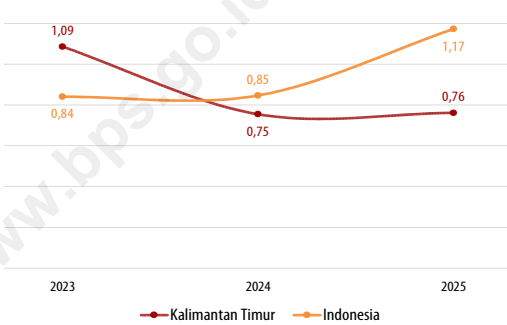
Catatan: ¹⁾ Ditungkat berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



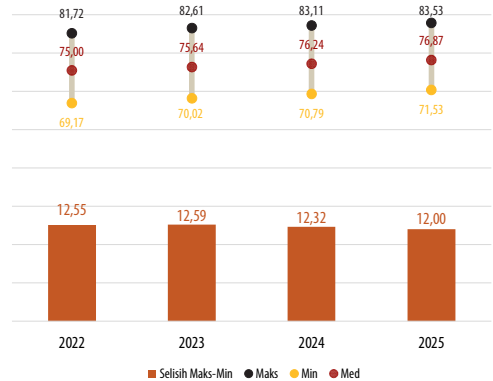
Gambar 5.116 Indeks Indikator Komponen IPM Kalimantan Timur, 2025



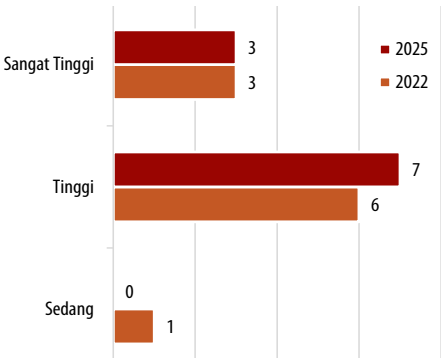
Gambar 5.117 Perkembangan IPM Kalimantan Timur, 2022–2025



Gambar 5.118 Pertumbuhan IPM Kalimantan Timur, 2023–2025



Gambar 5.119 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kalimantan Timur, 2022–2025



Gambar 5.120 Jumlah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.48 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kalimantan Timur, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	95,63	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	89,11	88,45	-0,66
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	0,71	0,39	-0,32
Morbiditas ^b	%	8,42	8,88	0,46
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	11,19	10,94	-0,25
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	95,66	96,80	1,14
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	97,63	97,59	-0,04
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,69	99,64	-0,05
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	98,73	97,34	-1,39
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	81,84	84,15	2,31
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	33,43	33,15	-0,28
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	NA	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	2,70	3,94	1,24
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	12,50	10,26	-2,24
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	93,45	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	96,15	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	212.117*	208.331**	-3.785,72
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	141.088*	139.812**	-1.276,67
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	1.976.447	1.969.739	-6.708
Persentase Pekerja Formal ¹	%	57,68	56,78	-0,90
Persentase Pekerja Informal ¹	%	42,32	43,22	0,90
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	4.400.771	4.475.944	75.173
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	5,14	5,18	0,04
Penduduk Miskin ²	ribu orang	221	200	-22
Penduduk Miskin ³	ribu orang	212	202	-10
Persentase Penduduk Miskin ²	%	5,78	5,17	-0,61
Persentase Penduduk Miskin ³	%	5,51	5,19	-0,32
Gini Rasio ²	-	0,321	0,312	-0,009
Gini Rasio ³	-	0,310	0,310	0,000

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan ^dwww.bps.go.id

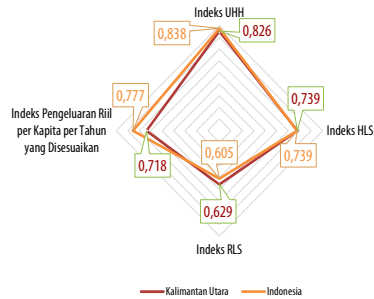
Kalimantan Utara

IPM 2025: 74,04 Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2025: 0,86% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 0,84%

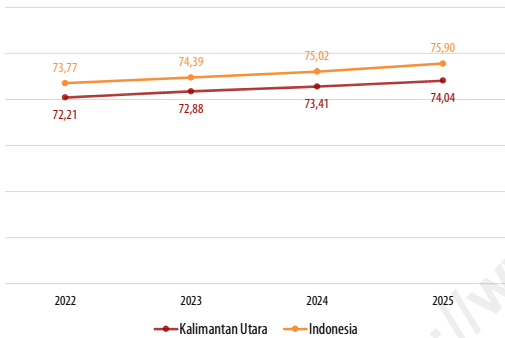
Tabel 5.49 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kalimantan Utara, 2025

Indikator	Capaian	Rata- rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	73,68 tahun	0,08
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,31 tahun	0,63
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,44 tahun	0,61
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp10.568 ribu	4,17

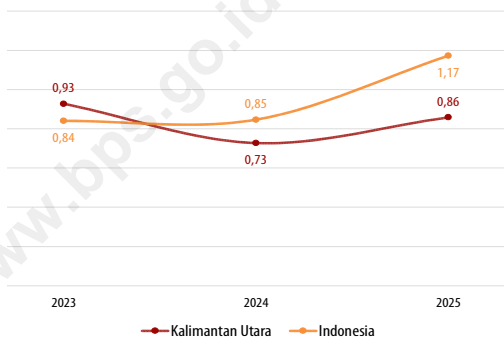
Catatan: ¹⁾ Ditungkat berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



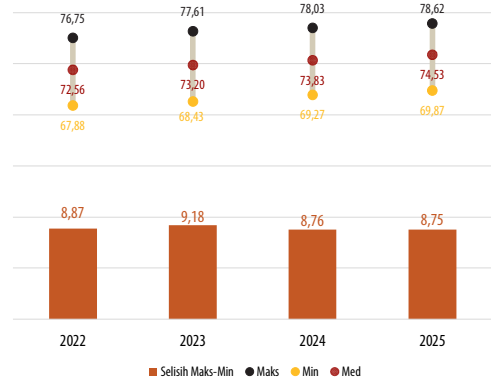
Gambar 5.121 Indeks Indikator Komponen IPM Kalimantan Utara, 2025



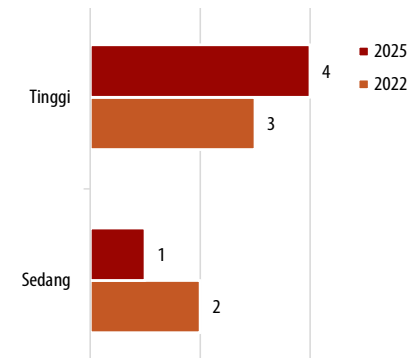
Gambar 5.122 Perkembangan IPM Kalimantan Utara, 2022–2025



Gambar 5.123 Pertumbuhan IPM Kalimantan Utara, 2023–2025



Gambar 5.124 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kalimantan Utara, 2022–2025



Gambar 5.125 Jumlah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.50 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kalimantan Utara, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	83,61	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	89,42	91,59	2,17
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	1,19	1,51	0,32
Morbiditas ^b	%	8,95	10,23	1,28
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	13,47	12,50	-0,97
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	94,44	96,21	1,77
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	97,92	94,65	-3,27
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	98,97	99,14	0,17
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	96,57	95,96	-0,61
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	78,89	81,93	3,04
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	30,71	29,25	-1,46
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	NA	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	5,74	5,30	-0,44
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	15,60	13,99	-1,61
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	96,03	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	91,62	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	198.677*	208.210**	9.533,30
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	98.860*	102.045**	3.184,70
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	378.361	380.572	2.211
Persentase Pekerja Formal ¹	%	49,59	51,56	1,97
Persentase Pekerja Informal ¹	%	50,41	48,44	-1,97
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	3.748.909	3.675.921	-72.988
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	3,90	3,85	-0,05
Penduduk Miskin ²	ribu orang	48	43	-5
Penduduk Miskin ³	ribu orang	41	42	1
Persentase Penduduk Miskin ²	%	6,32	5,54	-0,78
Persentase Penduduk Miskin ³	%	5,38	5,47	0,09
Gini Rasio ²	-	0,264	0,261	-0,003
Gini Rasio ³	-	0,259	0,251	-0,008

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan^dwww.bps.go.id

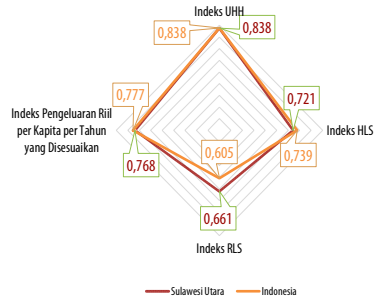
Sulawesi Utara

IPM 2025: 76,32 Status Pembangunan Manusia: TINGGI
Pertumbuhan 2025: 0,85% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 0,80%

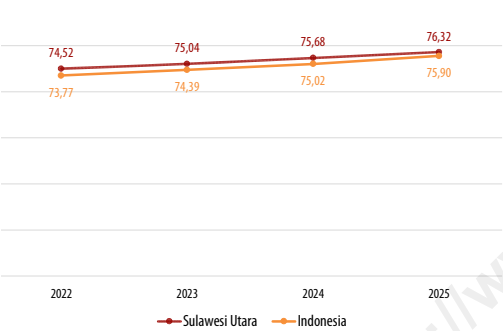
Tabel 5.51 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Sulawesi Utara, 2025

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,44 tahun	0,38
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,98 tahun	0,08
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,91 tahun	0,79
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp12.450 ribu	3,65

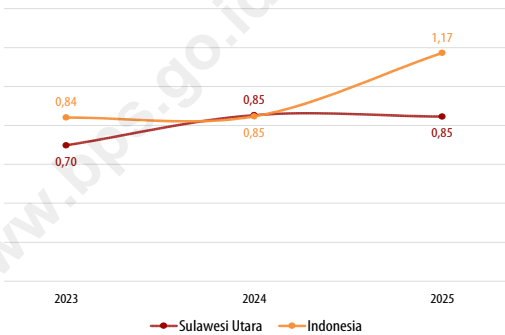
Catatan: ¹⁾ Ditungkat berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



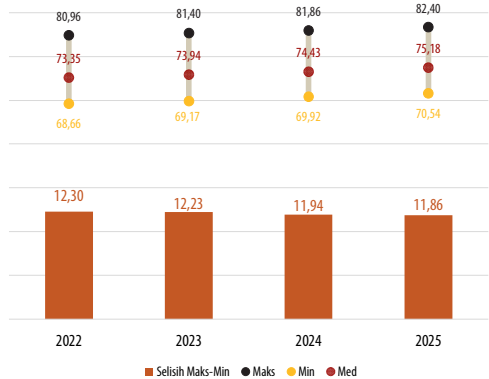
Gambar 5.126 Indeks Indikator Komponen IPM Sulawesi Utara, 2025



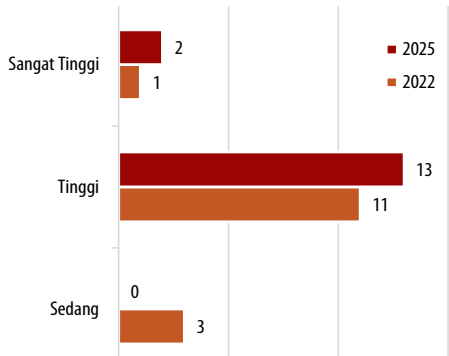
Gambar 5.127 Perkembangan IPM Sulawesi Utara, 2022–2025



Gambar 5.128 Pertumbuhan IPM Sulawesi Utara, 2023–2025



Gambar 5.129 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Sulawesi Utara, 2022–2025



Gambar 5.130 Jumlah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.52 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sulawesi Utara, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	83,95	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	94,46	94,86	0,40
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	4,68	3,22	-1,46
Morbiditas ^b	%	11,64	10,98	-0,66
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	7,31	7,37	0,06
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	92,73	95,23	2,50
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	97,46	96,47	-0,99
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,37	99,28	-0,09
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	96,24	96,11	-0,13
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	72,48	71,45	-1,03
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	25,83	25,57	-0,26
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,53	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	5,03	5,88	0,85
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	16,38	17,04	0,66
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	90,18	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	85,02	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	69.352*	75.235**	5.882,67
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	39.816*	41.764**	1.948,09
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	1.305.834	1.339.333	33.499
Persentase Pekerja Formal ¹	%	44,53	45,44	0,91
Persentase Pekerja Informal ¹	%	55,47	54,56	-0,91
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	3.453.051	3.420.935	-32.116
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	5,85	5,99	0,14
Penduduk Miskin ²	ribu orang	187	174	-13
Penduduk Miskin ³	ribu orang	173	172	-1
Persentase Penduduk Miskin ²	%	7,25	6,71	-0,54
Persentase Penduduk Miskin ³	%	6,70	6,62	-0,08
Gini Rasio ²	-	0,360	0,343	-0,017
Gini Rasio ³	-	0,347	0,341	-0,006

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan^dwww.bps.go.id

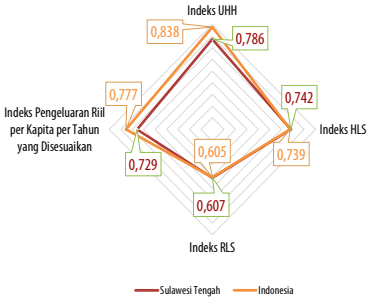
Sulawesi Tengah

IPM 2025: 72,82 Status Pembangunan Manusia: TINGGI
Pertumbuhan 2025: 0,80% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 0,84%

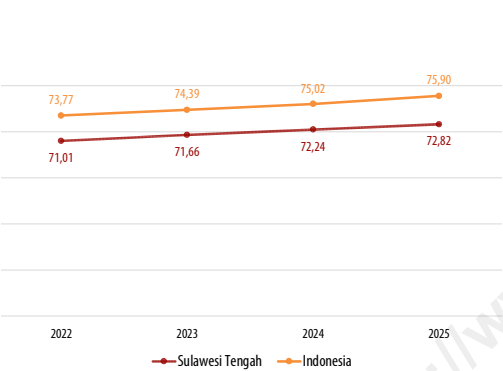
Tabel 5.53 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Sulawesi Tengah, 2025

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	71,10 tahun	0,29
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,35 tahun	0,08
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,10 tahun	0,78
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp10.934 ribu	4,09

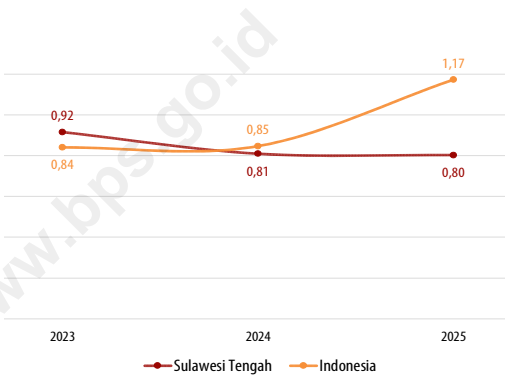
Catatan: ¹⁾ Ditungkat berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



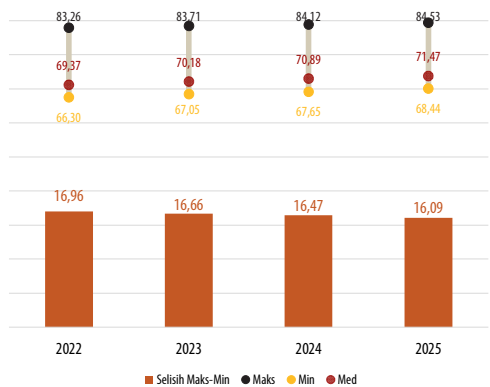
Gambar 5.131 Indeks Indikator Komponen IPM Sulawesi Tengah, 2025



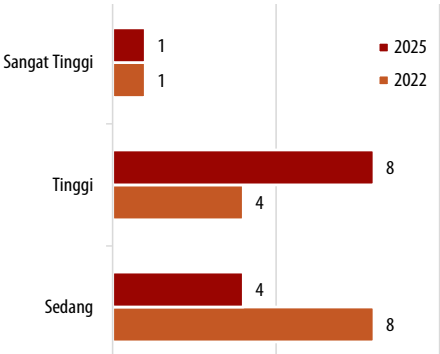
Gambar 5.132 Perkembangan IPM Sulawesi Tengah, 2022–2025



Gambar 5.133 Pertumbuhan IPM Sulawesi Tengah, 2023–2025



Gambar 5.134 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Sulawesi Tengah, 2022–2025



Gambar 5.135 Jumlah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.54 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sulawesi Tengah, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	76,66	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	87,86	87,55	-0,31
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	8,97	7,92	-1,05
Morbiditas ^b	%	11,69	11,40	-0,29
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	13,23	12,94	-0,29
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	89,20	91,04	1,84
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	95,48	95,70	0,22
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	98,47	98,56	0,09
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	94,12	94,58	0,46
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	74,16	75,36	1,20
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	30,38	26,50	-3,88
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	1,16	1,28	0,12
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	9,47	7,63	-1,84
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	23,54	18,71	-4,83
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	88,02	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	90,33	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	120.750*	131.643**	10.892,95
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	68.001*	72.959**	4.957,99
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	1.598.656	1.652.846	54.190
Persentase Pekerja Formal ¹	%	34,57	35,43	0,86
Persentase Pekerja Informal ¹	%	65,43	64,57	-0,86
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.863.721	3.056.120	192.399
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	2,94	2,92	-0,02
Penduduk Miskin ²	ribu orang	380	356	-24
Penduduk Miskin ³	ribu orang	358	345	-13
Persentase Penduduk Miskin ²	%	11,77	10,92	-0,85
Persentase Penduduk Miskin ³	%	11,04	10,52	-0,52
Gini Rasio ²	-	0,301	0,279	-0,022
Gini Rasio ³	-	0,309	0,277	-0,032

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan^dwww.bps.go.id

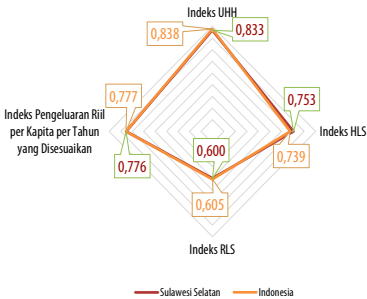
Sulawesi Selatan

IPM 2025: 75,92 Status Pembangunan Manusia: TINGGI
Pertumbuhan 2025: 0,98% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 0,88%

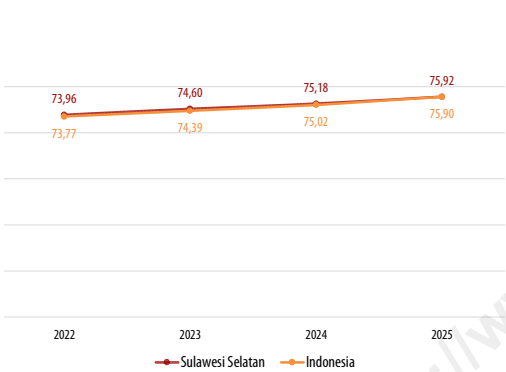
Tabel 5.55 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Sulawesi Selatan, 2025

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,15 tahun	0,34
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,56 tahun	0,07
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,00 tahun	1,41
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp12.773 ribu	3,77

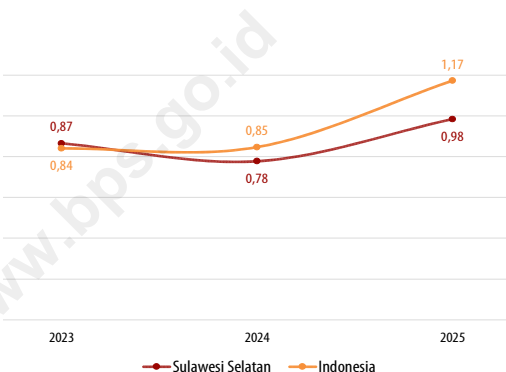
Catatan: ¹⁾ Ditungkat berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



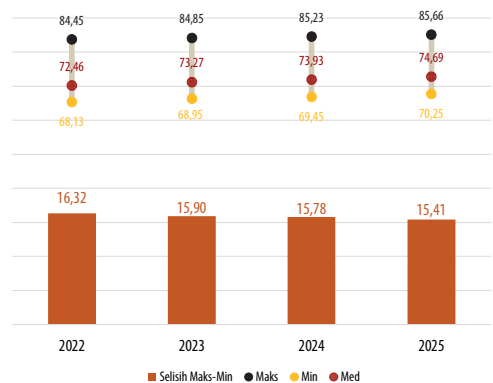
Gambar 5.136 Indeks Indikator Komponen IPM Sulawesi Selatan, 2025



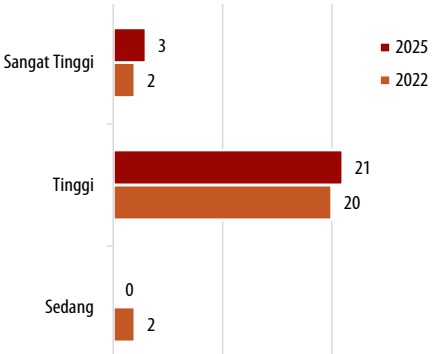
Gambar 5.137 Perkembangan IPM Sulawesi Selatan, 2022–2025



Gambar 5.138 Pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan, 2023–2025



Gambar 5.139 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Sulawesi Selatan, 2022–2025



Gambar 5.140 Jumlah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.56 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	82,48	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	92,23	93,25	1,02
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	1,70	1,29	-0,41
Morbiditas ^b	%	10,24	11,84	1,60
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	15,04	14,02	-1,02
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	96,26	97,43	1,17
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	98,69	99,08	0,39
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,50	99,21	-0,29
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	93,41	94,22	0,81
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	73,17	75,94	2,77
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	37,02	33,80	-3,22
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,75	0,96	0,21
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	7,86	7,31	-0,55
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	20,44	16,38	-4,06
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	86,00	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	92,44	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	73.573*	78.748**	5.174,67
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	41.860*	43.671**	1.810,80
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	4.680.928	4.759.077	78.149
Persentase Pekerja Formal ¹	%	39,50	39,55	0,05
Persentase Pekerja Informal ¹	%	60,50	60,45	-0,05
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.992.571	3.060.385	67.814
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	4,19	4,21	0,02
Penduduk Miskin ²	ribu orang	736	698	-38
Penduduk Miskin ³	ribu orang	712	685	-27
Persentase Penduduk Miskin ²	%	8,06	7,60	-0,46
Persentase Penduduk Miskin ³	%	7,77	7,43	-0,34
Gini Rasio ²	-	0,363	0,363	0,000
Gini Rasio ³	-	0,360	0,350	-0,010

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan^dwww.bps.go.id

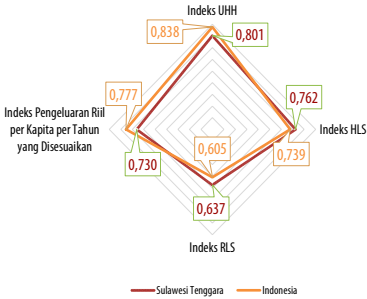
Sulawesi Tenggara

IPM 2025: 74,25 Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2025: 0,86% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 0,85%

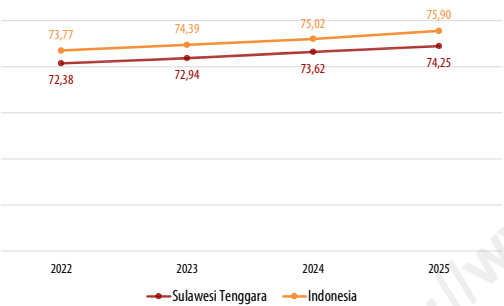
Tabel 5.57 Capaian Indikator Komponen Penyusun
IPM Sulawesi Tenggara, 2025

Indikator	Capaian	Rata- rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	72,06 tahun	0,17
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,72 tahun	0,07
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,56 tahun	1,10
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp10.992 ribu	4,23

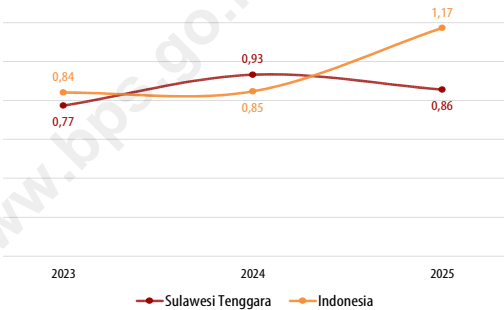
Catatan: ¹⁾ Ditungkat berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



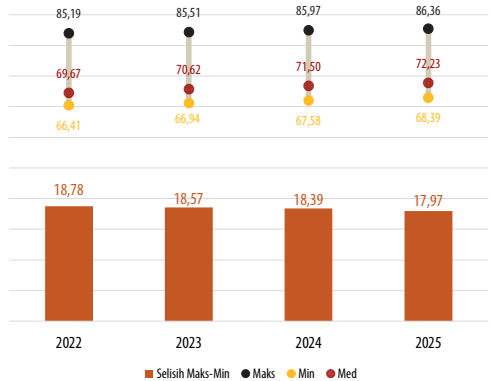
Gambar 5.141 Indeks Indikator Komponen
IPM Sulawesi Tenggara, 2025



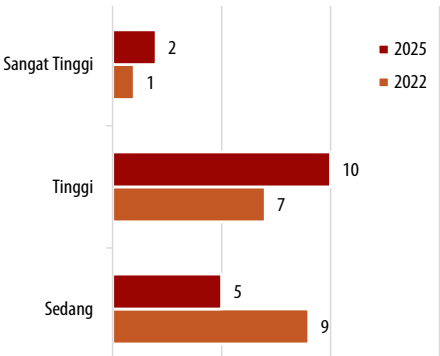
Gambar 5.142 Perkembangan IPM Sulawesi
Tenggara, 2022–2025



Gambar 5.143 Pertumbuhan IPM Sulawesi
Tenggara, 2023–2025



Gambar 5.144 Disparitas dan Capaian IPM
Kabupaten/Kota Tertinggi dan
Terendah di Sulawesi Tenggara,
2022–2025



Gambar 5.145 Jumlah Kabupaten/Kota di Sulawesi
Tenggara Menurut Status IPM,
2022 dan 2025

Tabel 5.58 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sulawesi Tenggara, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	86,76	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	95,31	94,91	-0,40
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	3,85	2,03	-1,82
Morbiditas ^b	%	10,58	9,68	-0,90
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	13,65	12,79	-0,86
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	85,18	86,72	1,54
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	94,19	94,06	-0,13
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,06	99,05	-0,01
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	95,76	96,53	0,77
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	75,73	79,58	3,85
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	33,37	33,67	0,30
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,53	0,78	0,25
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	6,97	5,29	-1,68
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	16,98	12,19	-4,79
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	86,27	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	95,54	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	67.840*	72.031**	4.191,27
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	40.812*	42.510**	1.698,66
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	1.430.889	1.434.033	3.144
Persentase Pekerja Formal ¹	%	38,08	38,87	0,79
Persentase Pekerja Informal ¹	%	61,92	61,13	-0,79
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.954.690	3.189.724	235.034
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	3,09	3,31	0,22
Penduduk Miskin ²	ribu orang	320	304	-15
Penduduk Miskin ³	ribu orang	305	295	-10
Persentase Penduduk Miskin ²	%	11,21	10,54	-0,67
Persentase Penduduk Miskin ³	%	10,63	10,14	-0,49
Gini Rasio ²	-	0,370	0,363	-0,007
Gini Rasio ³	-	0,365	0,357	-0,008

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan ^dwww.bps.go.id

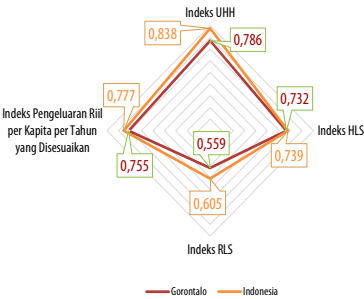
Gorontalo

IPM 2025: 72,62 Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2025: 0,85% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 0,94%

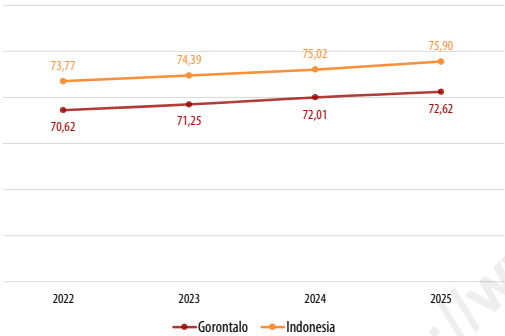
Tabel 5.59 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Gorontalo, 2025

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	71,06 tahun	0,40
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,18 tahun	0,15
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,38 tahun	1,47
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp11.937 ribu	3,76

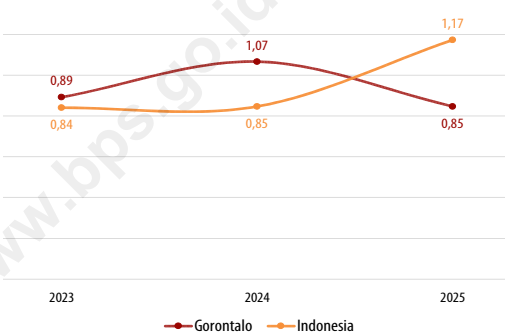
Catatan: ¹⁾ Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



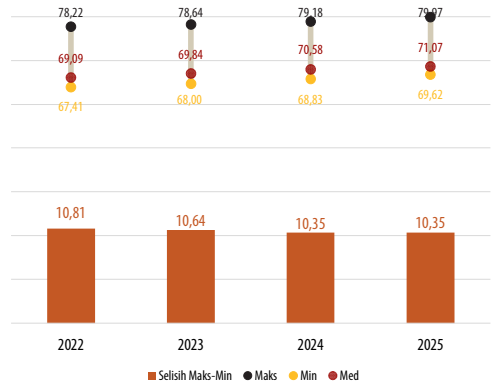
Gambar 5.146 Indeks Indikator Komponen IPM Gorontalo, 2025



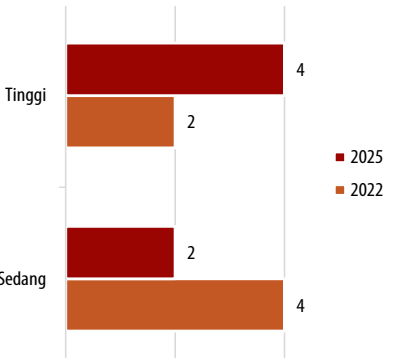
Gambar 5.147 Perkembangan IPM Gorontalo, 2022–2025



Gambar 5.148 Pertumbuhan IPM Gorontalo, 2023–2025



Gambar 5.149 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Gorontalo, 2022–2025



Gambar 5.150 Jumlah Kabupaten/Kota di Gorontalo Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.60 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Gorontalo, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	90,32	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	96,13	95,95	-0,18
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	6,70	4,53	-2,17
Morbiditas ^b	%	16,91	15,15	-1,76
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	13,44	11,53	-1,91
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	96,09	95,44	-0,65
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	98,33	97,33	-1,00
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	98,79	98,85	0,06
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	91,35	92,35	1,00
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	72,70	72,00	-0,70
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	34,43	35,02	0,59
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	1,39	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	11,99	11,33	-0,66
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	25,07	21,00	-4,07
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	91,60	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	95,93	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	44.437*	47.477**	3.039,68
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	26.838*	28.042**	1.203,37
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	632.184	633.263	1.079
Persentase Pekerja Formal ¹	%	38,55	38,86	0,31
Persentase Pekerja Informal ¹	%	61,45	61,14	-0,31
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.605.876	2.911.813	305.937
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	3,13	3,42	0,29
Penduduk Miskin ²	ribu orang	178	163	-15
Penduduk Miskin ³	ribu orang	170	156	-14
Persentase Penduduk Miskin ²	%	14,57	13,24	-1,33
Persentase Penduduk Miskin ³	%	13,87	12,62	-1,25
Gini Rasio ²	-	0,414	0,392	-0,022
Gini Rasio ³	-	0,413	0,383	-0,030

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan ^dwww.bps.go.id

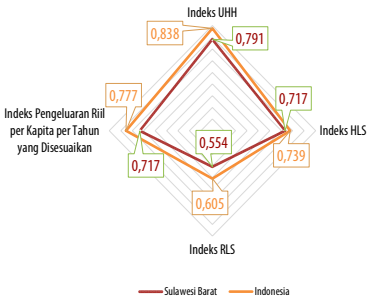
Sulawesi Barat

IPM 2025: 71,16 Status Pembangunan Manusia: TINGGI
Pertumbuhan 2025: 0,99% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 0,94%

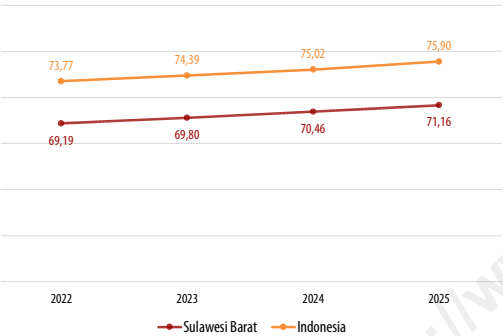
Tabel 5.61 Capaian Indikator Komponen Penyusun
IPM Sulawesi Barat, 2025

Indikator	Capaian	Rata- rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	71,44 tahun	0,48
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,90 tahun	0,08
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,31 tahun	0,94
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp10.516 ribu	3,97

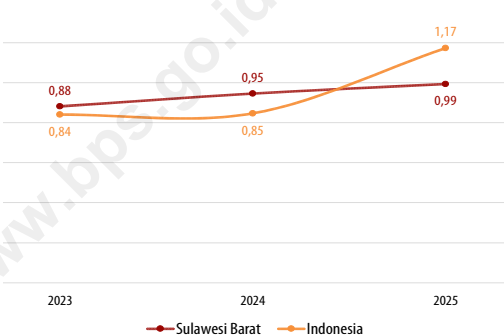
Catatan: ¹⁾ Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



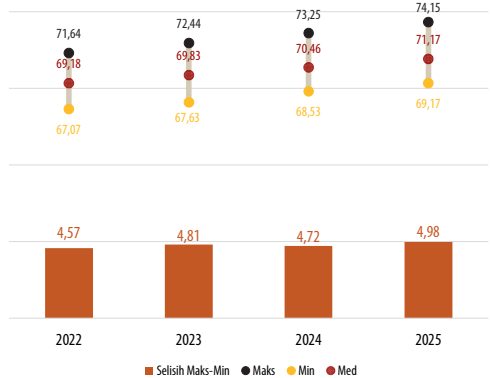
Gambar 5.151 Indeks Indikator Komponen
IPM Sulawesi Barat, 2025



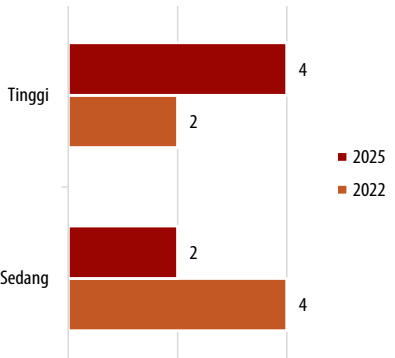
Gambar 5.152 Perkembangan IPM Sulawesi
Barat, 2022–2025



Gambar 5.153 Pertumbuhan IPM Sulawesi
Barat, 2023–2025



Gambar 5.154 Disparitas dan Capaian IPM
Kabupaten/Kota Tertinggi dan
Terendah di Sulawesi Barat,
2022–2025



Gambar 5.155 Jumlah Kabupaten/Kota di Sulawesi
Barat Menurut Status IPM,
2022 dan 2025

Tabel 5.62 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sulawesi Barat, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	71,88	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	80,14	83,00	2,86
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	6,74	5,81	-0,93
Morbiditas ^b	%	11,14	11,49	0,35
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	15,38	13,99	-1,39
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	88,97	89,34	0,37
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	95,60	94,05	-1,55
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	98,49	98,56	0,07
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	91,24	92,30	1,06
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	72,09	73,22	1,13
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	25,32	23,55	-1,77
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	1,66	1,79	0,13
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	11,29	9,32	-1,97
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	25,20	23,63	-1,57
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	91,51	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	91,81	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	42.718*	46.654**	3.935,91
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	24.672*	25.618**	946,00
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	757.507	800.433	42.926
Persentase Pekerja Formal ¹	%	27,92	29,37	1,45
Persentase Pekerja Informal ¹	%	72,08	70,63	-1,45
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.443.110	2.698.528	255.418
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	2,68	2,86	0,18
Penduduk Miskin ²	ribu orang	162	152	-10
Penduduk Miskin ³	ribu orang	156	150	-6
Persentase Penduduk Miskin ²	%	11,21	10,41	-0,80
Persentase Penduduk Miskin ³	%	10,71	10,18	-0,53
Gini Rasio ²	-	0,354	0,316	-0,038
Gini Rasio ³	-	0,330	0,308	-0,022

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, *Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan^dwww.bps.go.id

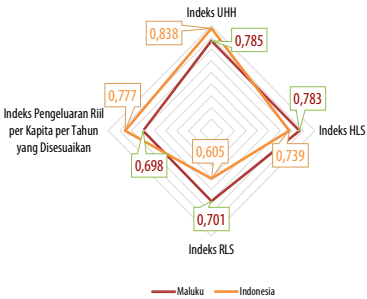
Maluku

IPM 2025: 74,09 Status Pembangunan Manusia: TINGGI
Pertumbuhan 2025: 0,94% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 0,94%

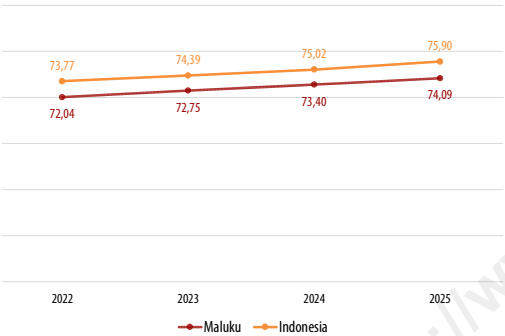
Tabel 5.63 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Maluku, 2025

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	71,02 tahun	0,41
Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,10 tahun	0,24
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,51 tahun	1,04
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp9.900 ribu	3,71

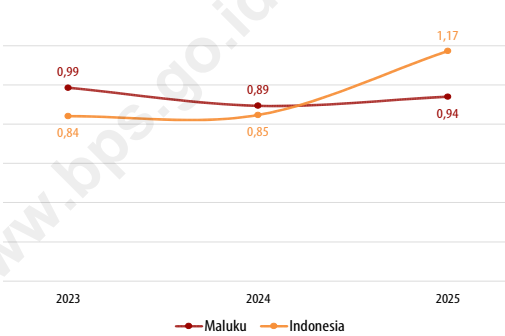
Catatan: ¹⁾ Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



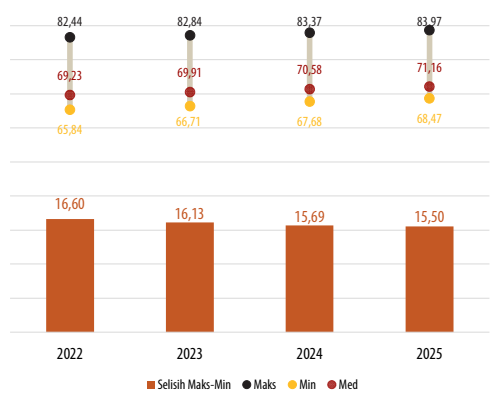
Gambar 5.156 Indeks Indikator Komponen IPM Maluku, 2025



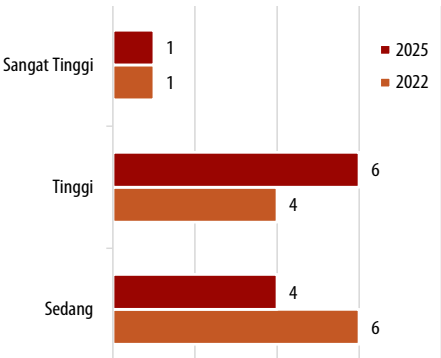
Gambar 5.157 Perkembangan IPM Maluku, 2022–2025



Gambar 5.158 Pertumbuhan IPM Maluku, 2023–2025



Gambar 5.159 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Maluku, 2022–2025



Gambar 5.160 Jumlah Kabupaten/Kota di Maluku Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.64 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Maluku, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	74,88	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	93,32	92,83	-0,49
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	8,18	5,90	-2,28
Morbiditas ^b	%	6,76	8,38	1,62
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun ^b	%	5,52	5,24	-0,28
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	55,65	58,62	2,97
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	76,64	79,36	2,72
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,49	99,56	0,07
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	97,83	97,75	-0,08
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	77,70	77,28	-0,42
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	39,58	29,66	-9,92
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,26	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	2,97	3,67	0,70
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	13,74	10,60	-3,14
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	84,70	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	91,81	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	32.199*	33.652**	1.453,08
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	19.125*	19.744**	618,86
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	907.713	922.486	14.773
Persentase Pekerja Formal ¹	%	34,96	33,94	-1,02
Persentase Pekerja Informal ¹	%	65,04	66,06	1,02
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.925.208	3.100.805	175.597
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	6,11	6,27	0,16
Penduduk Miskin ²	ribu orang	298	288	-10
Penduduk Miskin ³	ribu orang	294	287	-7
Persentase Penduduk Miskin ²	%	16,05	15,38	-0,67
Persentase Penduduk Miskin ³	%	15,78	15,25	-0,53
Gini Rasio ²	-	0,282	0,296	0,014
Gini Rasio ³	-	0,291	0,273	-0,018

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, *Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan^dwww.bps.go.id

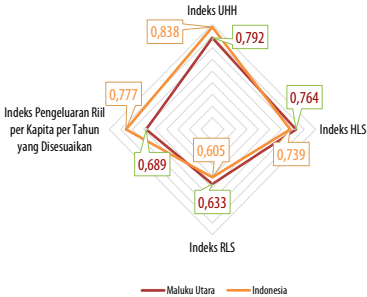
Maluku Utara

IPM 2025: 72,52 Status Pembangunan Manusia: TINGGI
Pertumbuhan 2025: 0,95% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 1,06%

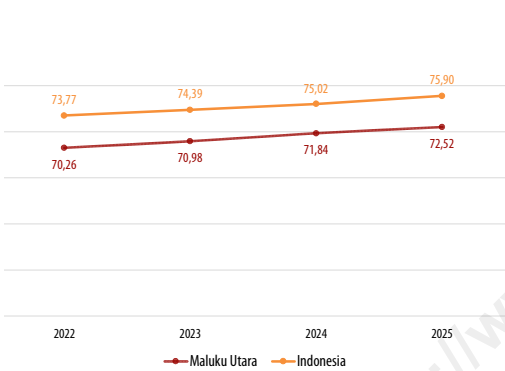
Tabel 5.65 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Maluku Utara, 2025

Indikator	Capaian	Rata- rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	71,47 tahun	0,47
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,76 tahun	0,07
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,50 tahun	0,93
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp9.613 ribu	4,61

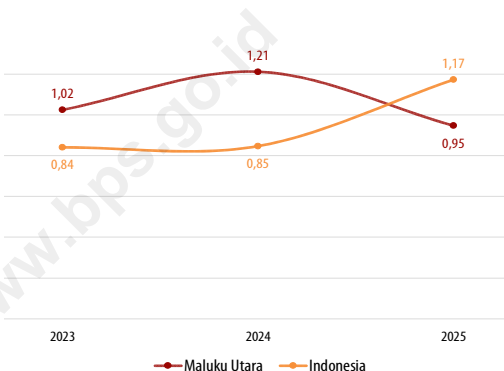
Catatan: ¹⁾ Ditungkat berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



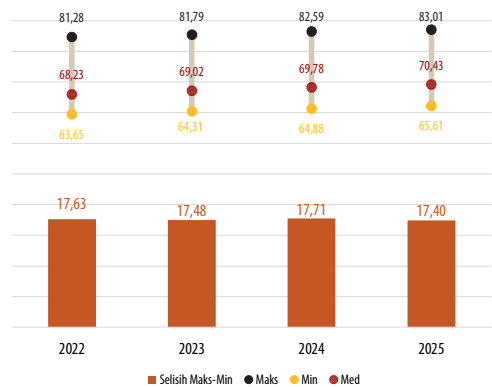
Gambar 5.161 Indeks Indikator Komponen IPM Maluku Utara, 2025



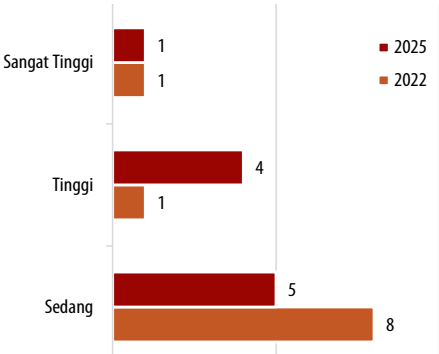
Gambar 5.162 Perkembangan IPM Maluku Utara, 2022–2025



Gambar 5.163 Pertumbuhan IPM Maluku Utara, 2023–2025



Gambar 5.164 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Maluku Utara, 2022–2025



Gambar 5.165 Jumlah Kabupaten/Kota di Maluku Utara Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.66 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Maluku Utara, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	70,61	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	88,92	90,01	1,09
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	5,84	2,28	-3,56
Morbiditas ^b	%	7,44	7,36	-0,08
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun ^b	%	8,91	7,01	-1,90
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	70,49	70,38	-0,11
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	88,53	90,81	2,28
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,11	99,04	-0,07
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	96,68	97,08	0,40
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	76,02	79,62	3,60
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	29,50	25,38	-4,12
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,69	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	4,52	4,16	-0,36
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	15,79	10,74	-5,05
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	83,32	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	90,88	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	71.517*	97.262**	25.745,02
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	41.118*	54.439**	13.321,13
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	661.488	673.456	11.968
Persentase Pekerja Formal ¹	%	35,24	35,49	0,25
Persentase Pekerja Informal ¹	%	64,76	64,51	-0,25
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	3.456.786	3.620.219	163.433
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	4,03	4,55	0,52
Penduduk Miskin ²	ribu orang	83	77	-6
Penduduk Miskin ³	ribu orang	80	75	-5
Persentase Penduduk Miskin ²	%	6,32	5,81	-0,51
Persentase Penduduk Miskin ³	%	6,03	5,59	-0,44
Gini Rasio ²	-	0,316	0,299	-0,017
Gini Rasio ³	-	0,296	0,275	-0,021

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan^dwww.bps.go.id

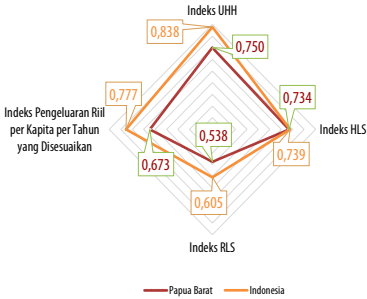
Papua Barat

IPM 2025: 68,48 Status Pembangunan Manusia: SEDANG
Pertumbuhan 2025: 1,17% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 1,22%

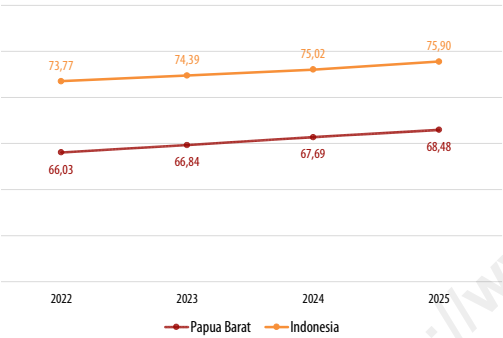
Tabel 5.67 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Papua Barat, 2025

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	68,76 tahun	0,34
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,21 tahun	0,18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,07 tahun	2,79
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp9.115 ribu	4,19

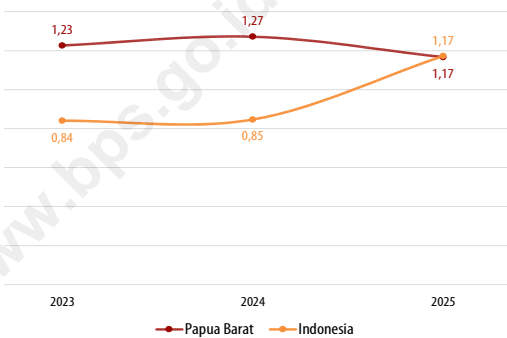
Catatan: ¹⁾ Ditungkat berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



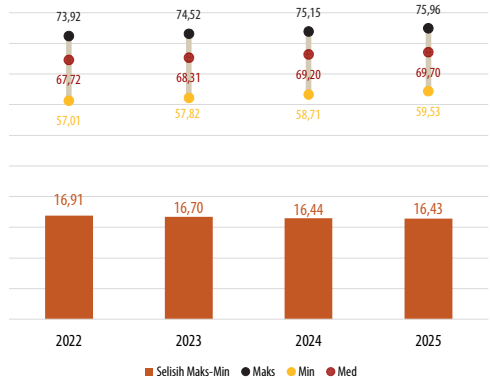
Gambar 5.166 Indeks Indikator Komponen IPM Papua Barat, 2025



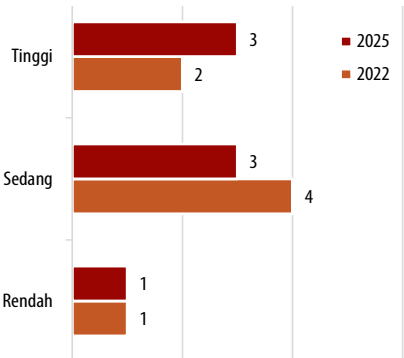
Gambar 5.167 Perkembangan IPM Papua Barat, 2022–2025



Gambar 5.168 Pertumbuhan IPM Papua Barat, 2023–2025



Gambar 5.169 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Papua Barat, 2022–2025



Gambar 5.170 Jumlah Kabupaten/Kota di Papua Barat Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.68 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Papua Barat, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	54,50	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	82,38	82,95	0,57
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	3,70	2,79	-0,91
Morbiditas ^b	%	6,07	7,10	1,03
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	10,79	10,62	-0,17
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	72,02	73,37	1,35
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	75,77	85,34	9,57
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	97,60	97,59	-0,01
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	95,61	96,22	0,61
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	75,32	77,53	2,21
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	31,18	34,53	3,35
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	1,34	2,12	0,78
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	7,25	5,87	-1,38
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	17,59	15,96	-1,63
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	81,32	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	88,94	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	131.636*	139.213**	7.576,11
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	85.513*	89.652**	4.138,38
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	290.077	288.323	-1.754
Persentase Pekerja Formal ¹	%	37,13	36,81	-0,32
Persentase Pekerja Informal ¹	%	62,87	63,19	0,32
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	3.392.758	3.765.973	373.215
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	4,13	4,55	0,42
Penduduk Miskin ²	ribu orang	110	107	-3
Penduduk Miskin ³	ribu orang	108	102	-6
Persentase Penduduk Miskin ²	%	21,66	20,66	-1,00
Persentase Penduduk Miskin ³	%	21,09	19,58	-1,51
Gini Rasio ²	-	0,389	0,374	-0,015
Gini Rasio ³	-	0,385	0,383	-0,002

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan^dwww.bps.go.id

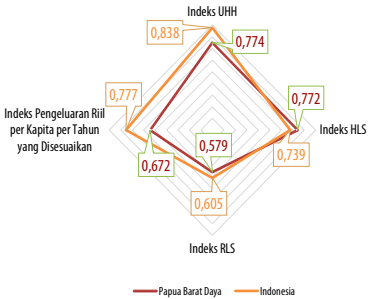
Papua Barat Daya

IPM 2025: 70,55 Status Pembangunan Manusia: TINGGI
Pertumbuhan 2025: 1,29% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 0,94%

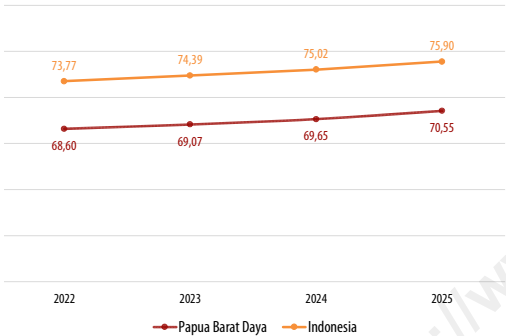
Tabel 5.69 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Papua Barat Daya, 2025

Indikator	Capaian	Rata- rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	70,31 tahun	0,35
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,89 tahun	0,07
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,69 tahun	1,87
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp9.076 ribu	3,28

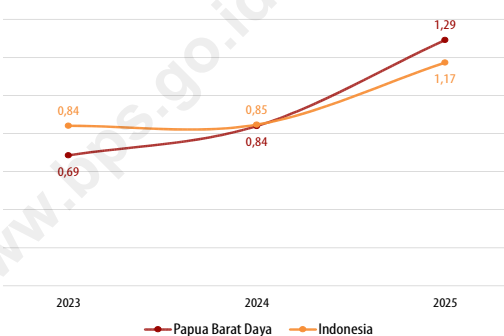
Catatan: ¹⁾ Ditungkat berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



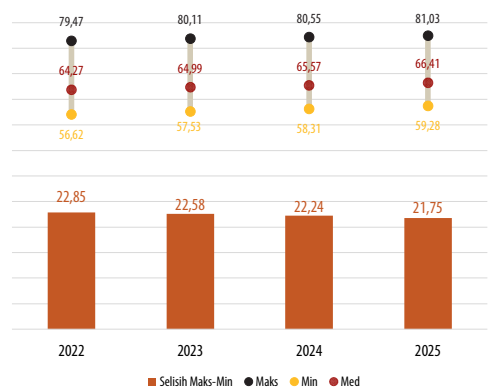
Gambar 5.171 Indeks Indikator Komponen IPM Papua Barat Daya, 2025



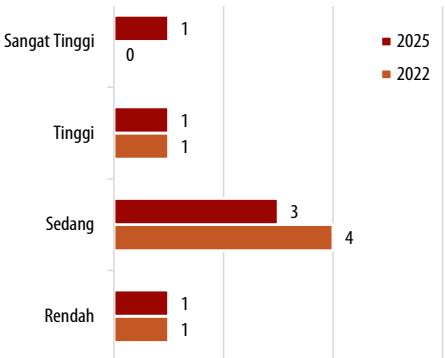
Gambar 5.172 Perkembangan IPM Papua Barat Daya, 2022–2025



Gambar 5.173 Pertumbuhan IPM Papua Barat Daya, 2023–2025



Gambar 5.174 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Papua Barat Daya, 2022–2025



Gambar 5.175 Jumlah Kabupaten/Kota di Papua Barat Daya Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.70 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Papua Barat Daya, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	70,93	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	81,68	80,64	-1,04
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	2,27	2,20	-0,07
Morbiditas ^b	%	8,15	9,11	0,96
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun ^b	%	9,63	8,71	-0,92
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	70,82	65,86	-4,96
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	82,73	83,66	0,93
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,17	98,67	-0,50
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	95,82	96,38	0,56
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	81,14	81,70	0,56
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	37,35	35,19	-2,16
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	NA	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	5,17	4,59	-0,58
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	12,20	10,34	-1,86
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	79,69	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	94,15	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	59.064*	61.624**	2.560,51
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	39.663*	40.657**	993,62
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	297.745	301.862	4.117
Persentase Pekerja Formal ¹	%	43,04	44,34	1,30
Persentase Pekerja Informal ¹	%	56,96	55,66	-1,30
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	3.739.328	3.837.947	98.619
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	6,48	6,85	0,37
Penduduk Miskin ²	ribu orang	102	104	1
Penduduk Miskin ³	ribu orang	97	102	6
Persentase Penduduk Miskin ²	%	18,13	17,95	-0,18
Persentase Penduduk Miskin ³	%	16,95	17,50	0,55
Gini Rasio ²	-	0,346	0,363	0,017
Gini Rasio ³	-	0,347	0,361	0,014

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan ^dwww.bps.go.id

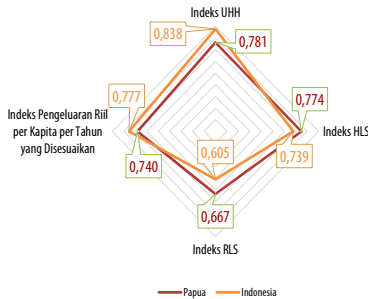
Papua

IPM 2025: 74,69 Status Pembangunan Manusia: TINGGI
Pertumbuhan 2025: 1,16% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 0,96%

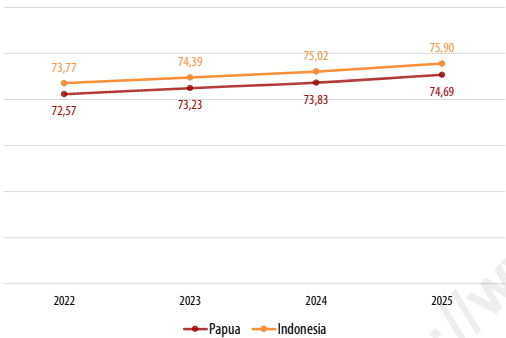
Tabel 5.71 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Papua, 2025

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	70,77 tahun	0,35
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,94 tahun	0,83
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,01 tahun	1,30
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp11.342 ribu	3,22

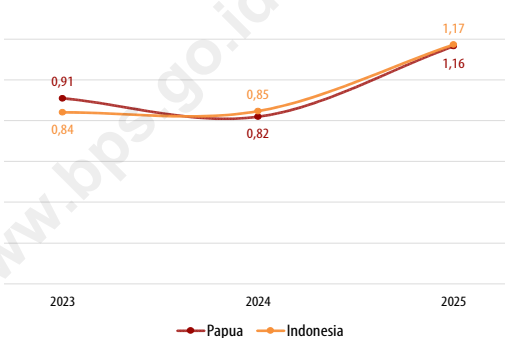
Catatan: ¹⁾ Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



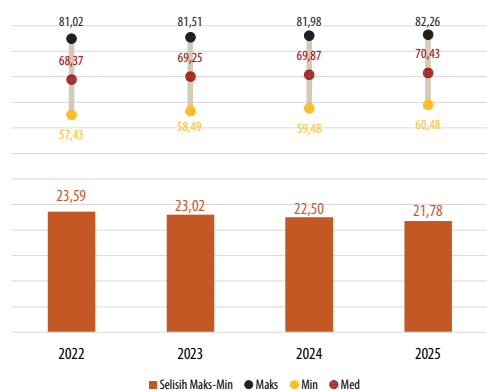
Gambar 5.176 Indeks Indikator Komponen IPM Papua, 2025



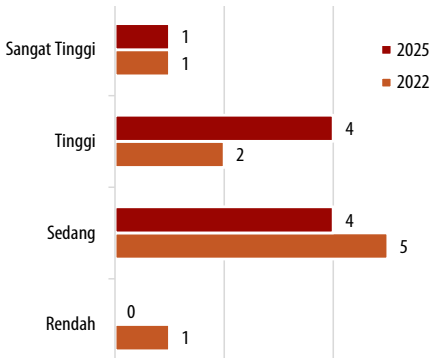
Gambar 5.177 Perkembangan IPM Papua, 2022–2025



Gambar 5.178 Pertumbuhan IPM Papua, 2023–2025



Gambar 5.179 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Papua, 2022–2025



Gambar 5.180 Jumlah Kabupaten/Kota di Papua Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.72 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Papua, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	72,13	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	85,84	87,70	1,86
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	2,63	2,56	-0,07
Morbiditas ^b	%	7,60	10,52	2,92
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun ^b	%	5,57	5,75	0,18
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	83,55	79,79	-3,76
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	88,24	92,89	4,65
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	97,09	97,51	0,42
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	96,98	97,32	0,34
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	80,38	81,78	1,40
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	38,17	38,16	-0,01
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	2,11	2,00	-0,11
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	2,75	2,97	0,22
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	12,57	13,24	0,67
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	86,91	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	90,99	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	81.009*	84.305**	3.296,05
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	48.642*	49.956**	1.314,20
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	458.792	434.016	-24.776
Persentase Pekerja Formal ¹	%	42,72	47,12	4,40
Persentase Pekerja Informal ¹	%	57,28	52,88	-4,40
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	4.151.674	4.426.645	274.971
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	6,48	6,96	0,48
Penduduk Miskin ²	ribu orang	153	171	18
Penduduk Miskin ³	ribu orang	161	160	-1
Persentase Penduduk Miskin ²	%	17,26	19,16	1,90
Persentase Penduduk Miskin ³	%	18,09	17,82	-0,27
Gini Rasio ²	-	0,362	0,404	0,042
Gini Rasio ³	-	0,405	0,397	-0,008

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan^dwww.bps.go.id

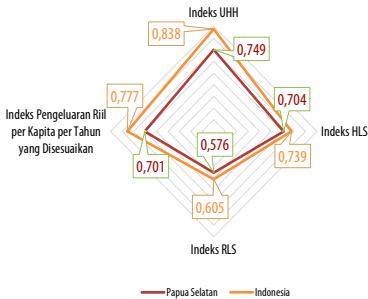
Papua Selatan

IPM 2025: 69,54 Status Pembangunan Manusia: SEDANG
Pertumbuhan 2025: 0,99% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 1,05%

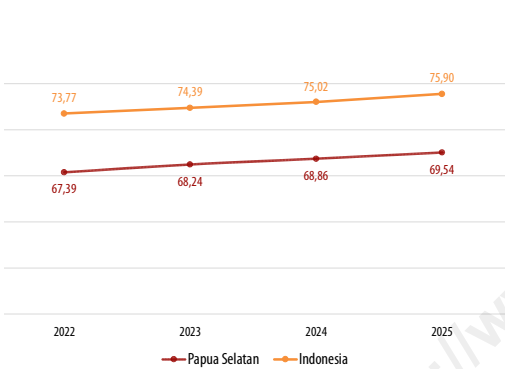
Tabel 5.73 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Papua Selatan, 2025

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	68,71 tahun	0,32
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,68 tahun	0,64
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,64 tahun	2,43
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp9.983 ribu	2,88

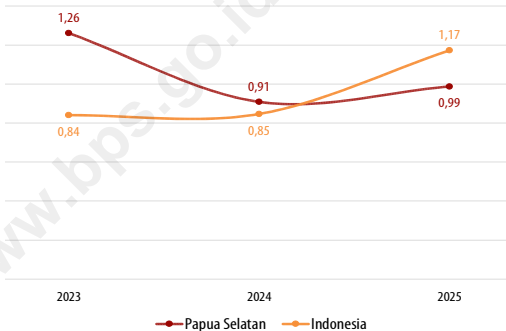
Catatan: ¹⁾ Ditungkat berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



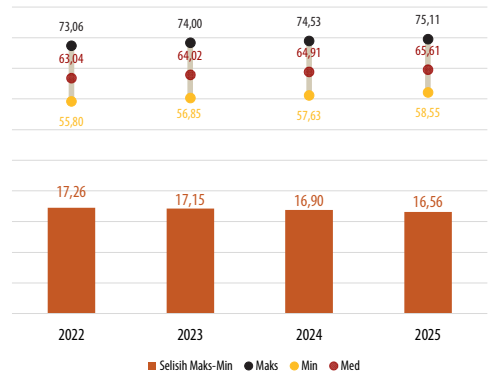
Gambar 5.181 Indeks Indikator Komponen IPM Papua Selatan, 2025



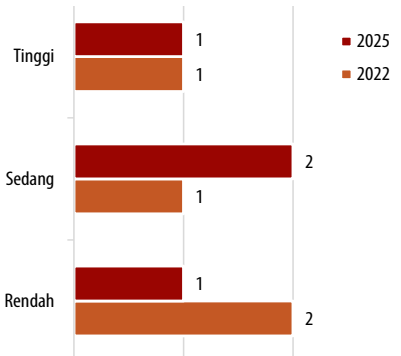
Gambar 5.182 Perkembangan IPM Papua Selatan, 2022–2025



Gambar 5.183 Pertumbuhan IPM Papua Selatan, 2023–2025



Gambar 5.184 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Papua Selatan, 2022–2025



Gambar 5.185 Jumlah Kabupaten/Kota di Papua Selatan Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.74 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Papua Selatan, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	52,32	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	71,90	71,28	-0,62
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	17,40	16,31	-1,09
Morbiditas ^b	%	10,02	10,10	0,08
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	14,80	10,80	-4,00
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	80,46	79,49	-0,97
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	81,33	83,29	1,96
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	90,47	91,65	1,18
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	85,51	89,29	3,78
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	71,68	66,97	-4,71
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	31,73	27,57	-4,16
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	8,47	4,64	-3,83
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	17,22	16,28	-0,94
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	26,55	29,73	3,18
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	69,77	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	96,20	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	61.622*	64.928**	3.306,43
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	35.164*	35.853**	689,25
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	226.586	217.682	-8.904
Persentase Pekerja Formal ¹	%	33,16	34,12	0,96
Persentase Pekerja Informal ¹	%	66,84	65,88	-0,96
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	3.639.485	4.264.963	625.478
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	4,05	4,04	-0,01
Penduduk Miskin ²	ribu orang	92	106	13
Penduduk Miskin ³	ribu orang	103	104	1
Persentase Penduduk Miskin ²	%	17,44	19,71	2,27
Persentase Penduduk Miskin ³	%	19,35	19,26	-0,09
Gini Rasio ²	-	0,404	0,412	0,008
Gini Rasio ³	-	0,424	0,426	0,002

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan^dwww.bps.go.id

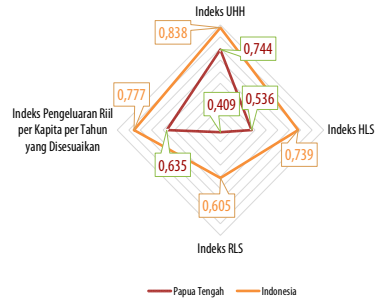
Papua Tengah

IPM 2025: 60,64 Status Pembangunan Manusia: SEDANG
Pertumbuhan 2025: 0,65% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 1,06%

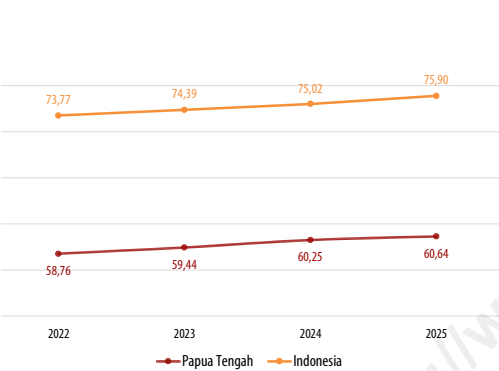
Tabel 5.75 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Papua Tengah, 2025

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	68,38 tahun	0,25
Harapan Lama Sekolah (HLS)	9,64 tahun	0,10
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6,13 tahun	1,23
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp8.036 ribu	4,54

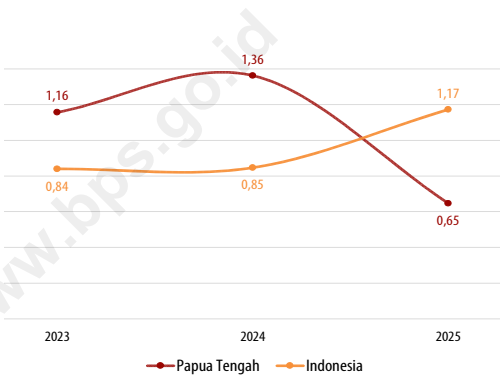
Catatan: ¹⁾ Dhitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



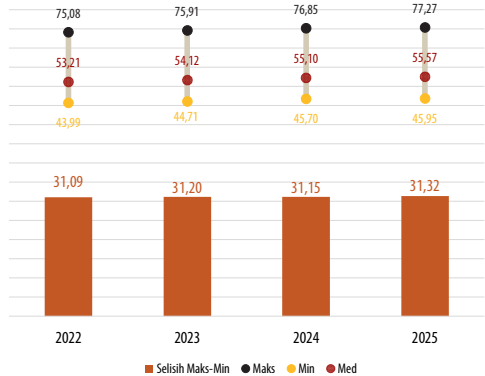
Gambar 5.186 Indeks Indikator Komponen IPM Papua Tengah, 2025



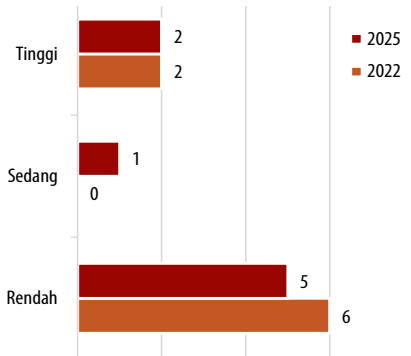
Gambar 5.187 Perkembangan IPM Papua Tengah, 2022–2025



Gambar 5.188 Pertumbuhan IPM Papua Tengah, 2023–2025



Gambar 5.189 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Papua Tengah, 2022–2025



Gambar 5.190 Jumlah Kabupaten/Kota di Papua Tengah Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.76 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Papua Tengah, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih ^a	%	32,83	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak ^a	%	81,53	83,21	1,68
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar ^b	%	22,99	21,70	-1,29
Morbiditas ^b	%	3,60	3,89	0,29
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun ^b	%	10,51	5,85	-4,66
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan ^b	%	81,26	71,16	-10,10
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ^b	%	85,66	80,63	-5,03
Dimensi Pengetahuan^c				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	74,63	80,13	5,50
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	68,42	67,86	-0,56
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	47,65	44,61	-3,04
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	17,96	15,48	-2,48
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	23,78	18,02	-5,76
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	34,28	35,14	0,86
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	50,58	53,37	2,79
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	93,87	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	80,44	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak^d				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	118.774*	107.566**	-11.207,59
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	71.608*	55.268**	-16.340,36
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	778.596	790.239	11.643
Persentase Pekerja Formal ¹	%	12,98	15,28	2,30
Persentase Pekerja Informal ¹	%	87,02	84,72	-2,30
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	5.071.157	4.808.336	-262.821
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	2,75	3,62	0,87
Penduduk Miskin ²	ribu orang	308	302	-6
Penduduk Miskin ³	ribu orang	288	310	22
Persentase Penduduk Miskin ²	%	29,76	28,90	-0,86
Persentase Penduduk Miskin ³	%	27,60	29,45	1,85
Gini Rasio ²	-	0,381	0,333	-0,048
Gini Rasio ³	-	0,355	0,340	-0,015

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan^dwww.bps.go.id

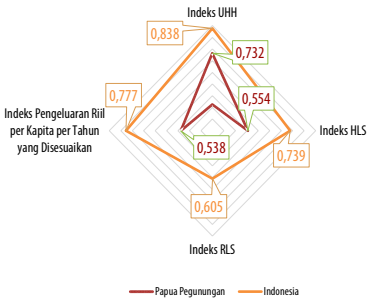
Papua Pegunungan

IPM 2025: 54,91 Status Pembangunan Manusia: RENDAH
Pertumbuhan 2025: 0,88% Rata-Rata Pertumbuhan¹⁾ 2022–2025: 1,39%

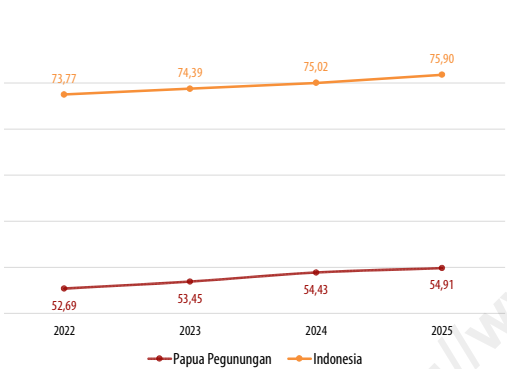
Tabel 5.77 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Papua Pegunungan, 2025

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹⁾ 2022–2025 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	67,55 tahun	0,22
Harapan Lama Sekolah (HLS)	9,98 tahun	0,10
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	4,30 tahun	3,40
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp5.861 ribu	4,58

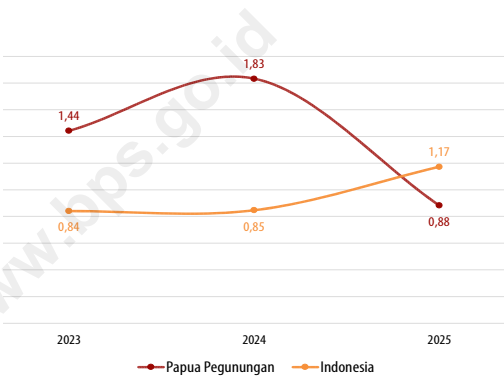
Catatan: ¹⁾ Ditungkat berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



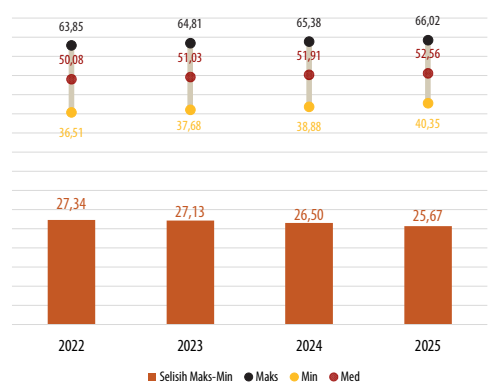
Gambar 5.191 Indeks Indikator Komponen IPM Papua Pegunungan, 2025



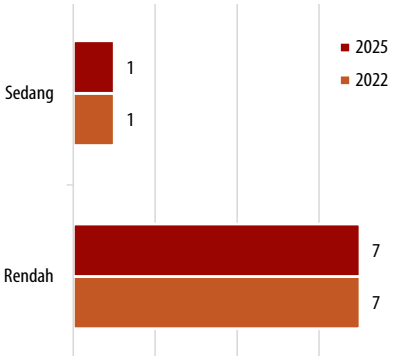
Gambar 5.192 Perkembangan IPM Papua Pegunungan, 2022–2025



Gambar 5.193 Pertumbuhan IPM Papua Pegunungan, 2023–2025



Gambar 5.194 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Papua Pegunungan, 2022–2025



Gambar 5.195 Jumlah Kabupaten/Kota di Papua Pegunungan Menurut Status IPM, 2022 dan 2025

Tabel 5.78 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Papua Pegunungan, 2024 dan 2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	13,33	...	...
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	30,64	32,89	2,25
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	34,45	32,79	-1,66
Morbiditas	%	3,76	6,53	2,77
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun	%	6,05	6,08	0,03
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	47,41	35,07	-12,34
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	70,28	66,10	-4,18
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	79,98	82,24	2,26
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	73,12	71,08	-2,04
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	56,09	50,79	-5,30
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	17,84	12,48	-5,36
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	18,55	16,67	-1,88
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	28,06	30,44	2,38
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	46,38	51,33	4,95
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	85,75	...	...
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	86,97	...	...
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	18.105*	19.111**	1.006,06
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	9.406*	9.641**	235,24
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	1.008.418	1.040.001	31.583
Persentase Pekerja Formal ¹	%	4,24	4,70	0,46
Persentase Pekerja Informal ¹	%	95,76	95,30	-0,46
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	4.089.877	3.941.546	-148.331
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	1,32	1,68	0,36
Penduduk Miskin ²	ribu orang	365	337	-28
Penduduk Miskin ³	ribu orang	331	308	-23
Persentase Penduduk Miskin ²	%	32,97	30,03	-2,94
Persentase Penduduk Miskin ³	%	29,66	27,21	-2,45
Gini Rasio ²	-	0,340	0,349	0,009
Gini Rasio ³	-	0,346	0,347	0,001

Catatan: ¹ Kondisi Agustus² Kondisi Maret³ Kondisi September

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

... Data Tidak Tersedia

NA Data Tidak Dapat Ditampilkan

Sumber: Badan Pusat Statistik, ^aPublikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, ^bPublikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat, ^cPublikasi Statistik Pendidikan, dan ^dwww.bps.go.id

Daftar Pustaka

- Aburto, J. M., Schöley, J., Kashnitsky, I., Zhang, L., Rahal, C., Missov, T. I., ... & Kashyap, R. (2022). Quantifying impacts of the COVID-19 pandemic through life-expectancy losses: a population-level study of 29 countries. *International journal of epidemiology*, 51(1), 63-74.
- Achadi, E. L. (2014). Seribu Hari yang Menentukan Masa Depan Bangsa. Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat. Fakultas Kesehatan Masyarakat, universitas Indonesia, Depok.
- Adioetomo, S.M. & Mujahid, G. (2014). UNFPA Indonesia Monograph Series No.1: Indonesia on the Threshold of Population Ageing. UNFPA, Jakarta.
- Adrian Hayes and Diah Hadi Setyonaluri. (2015). Taking Advantage of the Demographic Dividend in Indonesia, A Brief Introduction to Theory and Practice. United Nations Population Fund (UNFPA) Policy Memo, April 2015.
- Akinmulegun, S. (2014). Unemployment and poverty paradigm in Nigeria: Challenges and prospect. *International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS)*, 2(3), 16-23.
- Al-Nasser, A., & Al Hallaq, S. S. (2019). Impact of human poverty on the human development index in Jordan within the period 2003-2016. *International Journal of Business and Society*, 20(2), 552-562.
- Andalas, E. F. (2020). Digitalisasi Dunia Pendidikan? Humanisme Digital sebagai Poros Pembangunan Manusia. *Membangun Optimisme Meretas Kehidupan Baru dalam Dunia Pendidikan*, 1, 27.
- ANTARA News, "BPS catat IPM Kepri 2025 naik status dari tinggi jadi sangat tinggi". Pembaruan terakhir 9 November 2025. <https://kepri.antaranews.com/berita/241757/bps-catat-ipm-kepri-2025-naik-status-dari-tinggi-jadi-sangat-tinggi>.
- Azahari, A. (2000). Pembangunan sumberdaya manusia dan indeks pembangunan manusia sektor pertanian. *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*, 15(1), 56-69.
- Badan Pusat Statistik. (2015). Indeks Pembangunan Manusia 2014. Jakarta: BPS
- Băhnăreanu, C. 2020. The Economic Impact of COVID-19 Pandemic at the Beginning of 2020. *Strategic Impact*, 75(2), 102- 112.
- Basri, H., Toyibah, D., Fakhri, M., Musahar, H.D., Wati, W., dan Riski, N.I. (2020). Sistem Informasi Layanan Digital Puskesmas Berbasis Android. *Jurnal Teknologi Dan Open Source*, 3(2), 215-229.
- Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Levine, R. (2004). Finance, inequality, and poverty: Cross-country evidence.
- Becker, G. S. (1975). Investment in human capital: effects on earnings. In *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*, Second Edition (pp. 13-44). NBER.

- Blankeanu, W.F. dan Simpson, N.B. (2004). Public Education Expenditures and Growth. *Journal of Development Economics*, 73: 583-605.
- Cuaresma, J. C., Lutz, W. & Sanderson, W. (2014) Is the Demographic Dividend an Education Dividend?, *Demography*, 51.1 (2014), 299–315.
- Di Groppello, E. (2013). Role of the Education and Training Sector in Addressing Skill Mismatch in Indonesia. In Suryadarma, D, & Jones, G. (eds). *Education in Indonesia. The Institute of South East Asian Studies (ISEAS)*.
- Ersad, M. E., Amir, A., & Zulgani, Z. (2022). Dampak IPM, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(2), 425-438.
- Ginting, A. M., & Rasbin, R. (2010). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia sebelum dan setelah krisis. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 1(2), 279-312.
- Haryono, Dandan, dan St Ramlah. 2024. "Mengatasi Ketimpangan Pembangunan antara Wilayah Barat dan Timur Indonesia: Tantangan dan Solusi Ekonomi." *SINOMIKA JOURNAL: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi* 3, no. 3: 151-162.
- Hilal, G. M., & Sukamdi, S. (2015). Pengaruh Pembangunan Manusia terhadap Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang. *Jurnal Bumi Indonesia*, 4(4).
- Kiaušienė, I. (2015). Comparative assessment of women unemployment and poverty in European Union. *Intellectual Economy*, 9(2), 91-101.
- Lutz, W., Cuaresma, J. C., Kebede, E. & Striessnig, E. (2019). Education Rather than Age Structure Brings Demographic Dividend, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116.26, 12798–803.
- Lutz, W. and Samir, K. (2011). Global Human Capital: Integrating Education and Population. *Science*, 333.6042 (2011), 587–92.
- Negash, S., Musa, P., Vogel, D., & Sahay, S. (2018). Healthcare information technology for development: improvements in people's lives through innovations in the uses of technologies. *Information Technology for Development*, 24(2), 189-197.
- OECD. (2023), *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*, PISA, OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/53f23881-en>.
- Prasetyo, P. E., & Cahyani, E. N. (2022). Investigating Keynesian Theory in Reducing Unemployment and Poverty in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 9(10), 39-48.
- Rabiyah, dkk. 2026. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau Tahun 2019-2024)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 3, no. 2: 52-71.
- Ross, J. (2004). Understanding the demographic dividend. *POLICY Project Note*.
- Rotinsulu, A. M. T. T. O., & Kawung, G. M. (2018). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi (studi di provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* Vol, 19(8).

- Schöley, J., Aburto, J. M., Kashnitsky, I., Kniffka, M. S., Zhang, L., Jaadla, H., ... & Kashyap, R. (2022). Life expectancy changes since COVID-19. *Nature human behaviour*, 6(12), 1649-1659.
- Sumargo, B. dan Yuniarty, T. (2009). Model Persamaan Struktural Pembangunan Manusia dalam Kaitannya dengan Investasi Sektor Fisik, Manusia, Pendidikan, dan Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Mat Stat* 9(2): 108-117.
- Stanistreet, P., Elfert, M., & Atchoarena, D. (2020). Education in the age of COVID-19: Understanding the consequences. *International Review of Education*, 66, 627-633.
- Teräs, M., Suoranta, J., Teräs, H., & Curcher, M. (2020). Post-Covid-19 education and education technology 'solutionism': A seller's market. *Postdigital Science and Education*, 2(3), 863-878.
- UNDP. (1990). Human Development Report 1990: Concept and Measurement of Human Development. United Nations Development Programme. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1990>
- UNDP. (1994). Human Development Report 1994. New York: Oxford University Press.
- UNDP. (1995). Human Development Report 1995. Oxford University Press, Inc. <https://doi.org/10.1111/j.1536-7150.1995.tb02630.x>
- UNDP. (2016). Human Development Report 2016: Human Development for Everyone. New York: United Nations Development Programme.
- UNDP. (2024). Human Development Report 2023/2024. United Nations Development Programme. New York.
- UNDP. (2025). Human Development Report 2024/2025. United Nations Development Programme. New York.
- UNDP. (2025). Gender equality and social inclusion strategy UNDP Indonesia 2021-2025. In UNDP Indonesia.
- UN ESCAP. (2012). Incheon Strategy to "Make the Right Real" for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific. United Nations, Bangkok.
- UNESCO. (2020). A new generation: 25 years of efforts for gender equality in education.
- UNESCO. (2023). Global Education Monitoring Report 2023: Technology in education: A tool on Whose Terms? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Perancis
- United Nations. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations.
- United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME). (2024). Levels & trends in child mortality: Report 2023. United Nations Children's Fund. <https://childmortality.org/wp-content/uploads/2024/03/UNIGME2023-ChildMortality-Report.pdf>
- WHO. (2019). Gender equality strategy 2019-2023.
- WHO. (2023). Global Health Observatory. World Health Organization, Geneva. (<https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/service-coverage>).

WHO. (2024). World Health Statistics 2024: Monitoring Health for the SDGs, Sustainable Development Goals. World Health Organization, Geneva.

Weisbrod, B. A. (1962). Education and investment in human capital. *Journal of political Economy*, 70(5, Part 2), 106-123.

World Bank. (2006). World Development Report 2007: Development and the Next Generation. The World Bank, Washington D.C.

World Bank. (2013). World Development Report 2013: Jobs. World Bank, Washington DC.

World Bank. (2025). Driving Global Impact.

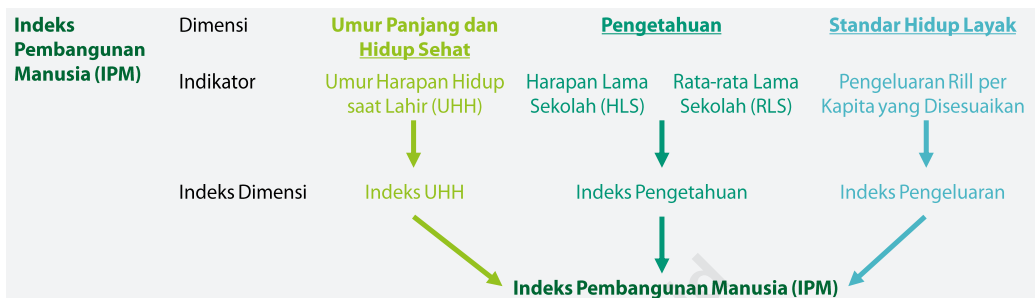
<https://www.bps.go.id>

CATATAN TEKNIS



Catatan Teknis

Diagram Penghitungan IPM



Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat, digunakan indikator umur harapan hidup saat lahir. Selanjutnya, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran rill per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk standar hidup layak.

Umur Harapan Hidup saat Lahir

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan umur harapan hidup melalui pendekatan tidak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan *input* data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004).

Pengetahuan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Pada proses penghitungan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pengetahuan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh anak yang berusia 7 tahun.

Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*) berbasis formula Rao.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}} \quad (1)$$

Keterangan:

PPP_j : paritas daya beli di wilayah j
 p_{ij} : harga komoditas i di kabupaten/kota j
 p_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan
 m : jumlah komoditas

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Paritas Daya Beli/*Purchasing Power Parity* (PPP)

Nama Komoditas (1)	Nama Komoditas (2)	Nama Komoditas (3)
Beras	Pisang lainnya	Rokok kretek tanpa filter
Tepung terigu	Pepaya	Rokok putih
Ketela pohon/singkong	Minyak kelapa	Rumah sendiri/bebas sewa
Kentang	Minyak goreng lainnya	Rumah kontrak
Tongkol/tuna/cakalang	Kelapa	Rumah sewa
Kembung	Gula pasir	Rumah dinas
Bandeng	Teh	Listrik
Mujair	Kopi	Air PAM
Mas	Garam	LPG
Lele	Kecap	Minyak tanah
Ikan segar lainnya	Penyedap masakan/vetsin	Lainnya(batu baterai,aki,korek,obat nyamuk dll)
Daging sapi	Mie instan	Perlengkapan mandi
Daging ayam ras	Roti manis/roti lainnya	Barang kecantikan
Daging ayam kampung	Kue kering	Perawatan kulit,muka,kuku,rambut
Telur ayam ras	Kue basah	Sabun cuci
Susu kental manis	Makanan gorengan	Biaya RS Pemerintah
Susu bubuk	Gado-gado/ketoprak	Biaya RS Swasta
Susu bubuk bayi	Nasi campur/rames	Puskesmas/pustu
Bayam	Nasi goreng	Praktek dokter/poliklinik
Kangkung	Nasi putih	SPP
Kacang panjang	Lontong/ketupat sayur	Bensin
Bawang merah	Soto/gule/sop/rawon/cincang	Transportasi/pengangkutan umum
Bawang putih	Sate/tongseng	Pos dan Telekomunikasi
Cabe merah	Mie bakso/mie rebus/mie goreng	Pakaian jadi laki-laki dewasa
Cabe rawit	Makanan ringan anak	Pakaian jadi perempuan dewasa
Tahu	Ikang (goreng/bakar dll)	Pakaian jadi anak-anak
Tempe	Ayam/daging (goreng dll)	Alas kaki
Jeruk	Makanan jadi lainnya	Minyak pelumas
Mangga	Air kemasan galon	Meubelair
Salak	Minuman jadi lainnya	Peralatan rumah tangga
Pisang ambon	Es lainnya	Perlengkapan perabot rumah tangga
Pisang raja	Roko kretek filter	Alat-alat dapur/makan

Langkah Penghitungan Indeks

Menghitung Indeks Dimensi

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum dalam Tabel 7.2.

Tabel 7.2 Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Komponen IPM

Indikator Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
(1)	(2)	(3)	(4)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	0	15
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	ribu rupiah	1.007,436 ¹	26.572,352 ²

Catatan:

¹Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

²Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Dengan mengacu pada nilai minimum dan maksimum pada Tabel 7.2, setiap indikator komponen IPM dihitung indeksnya dengan formula sebagai berikut:

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}} \quad (2)$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} \quad (3)$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}} \quad (4)$$

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} \quad (5)$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})} \quad (6)$$

Mengagregasikan Indeks Dimensi untuk Menghasilkan IPM

IPM dihitung sebagai rata-rata ukur (geometrik) dari tiga indeks dimensi:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{UHH} \times I_{pengetahuan} \times I_{pengeluaran}} \times 100 \quad (7)$$

Contoh Penghitungan: DKI Jakarta

Indikator	Nilai
(1)	(2)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	72,91
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,98
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,13
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	18.227

$$I_{UHH} = \frac{72,91 - 20}{85 - 20} = 0,814000$$

$$I_{HLS} = \frac{12,98 - 0}{18 - 0} = 0,721111$$

$$I_{RLS} = \frac{11,13 - 0}{15 - 0} = 0,742000$$

$$I_{pengetahuan} = \frac{0,721111 + 0,742000}{2} = 0,731556$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(18.227) - \ln(1.007,436)}{\ln(26.572,352) - \ln(1.007,436)} = 0,884806$$

$$IPM = \sqrt[3]{0,814000 \times 0,731556 \times 0,884806} \times 100 = 80,77$$

Status Pembangunan Manusia

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal capaian pembangunan manusia.

1. Kelompok "sangat tinggi": $IPM \geq 80$
2. Kelompok "tinggi": $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok "sedang": $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok "rendah": $IPM < 60$

Pertumbuhan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

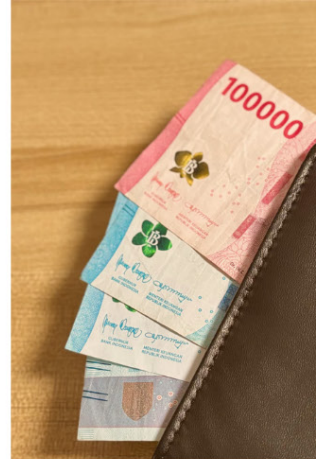
$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\% \quad (8)$$

Keterangan:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{(t-1)}$: IPM suatu wilayah pada tahun $(t-1)$

LAMPIRAN



Lampiran 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2025

Provinsi	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	73,48	14,40	9,95	11.191	76,23	1,15
Sumatera Utara	74,19	13,50	10,08	11.898	76,47	0,94
Sumatera Barat	74,69	14,31	9,77	12.041	77,27	1,10
Riau	74,74	13,44	9,55	12.233	76,31	0,85
Jambi	74,39	13,34	8,95	12.018	75,13	1,04
Sumatera Selatan	74,58	12,65	8,91	12.416	74,76	1,25
Bengkulu	73,59	13,76	9,23	12.197	75,68	1,03
Lampung	74,71	12,79	8,61	11.683	73,98	1,16
Kepulauan Bangka Belitung	74,46	12,50	8,65	13.837	75,26	0,95
Kepulauan Riau	75,46	13,28	10,72	15.881	80,53	0,80
DKI Jakarta	76,27	13,80	11,59	20.676	85,05	1,07
Jawa Barat	75,53	13,02	9,14	12.447	75,90	1,31
Jawa Tengah	75,24	13,05	8,15	12.746	74,77	1,22
D.I. Yogyakarta	75,64	15,78	10,20	15.855	82,48	1,05
Jawa Timur	75,36	13,44	8,39	13.509	76,13	1,04
Banten	75,33	13,11	9,56	13.498	77,25	1,18
Bali	75,46	13,63	9,75	15.383	79,37	0,94
Nusa Tenggara Barat	72,60	13,99	8,21	11.922	73,97	1,19
Nusa Tenggara Timur	72,16	13,34	8,22	8.735	69,89	1,08
Kalimantan Barat	74,28	12,69	8,07	10.689	72,09	1,26
Kalimantan Tengah	74,01	12,78	8,96	12.612	74,86	0,78
Kalimantan Selatan	74,49	13,12	8,81	13.757	76,10	1,21
Kalimantan Timur	75,28	14,04	10,10	14.254	79,39	0,76
Kalimantan Utara	73,68	13,31	9,44	10.568	74,04	0,86
Sulawesi Utara	74,44	12,98	9,91	12.450	76,32	0,85
Sulawesi Tengah	71,10	13,35	9,10	10.934	72,82	0,80
Sulawesi Selatan	74,15	13,56	9,00	12.773	75,92	0,98
Sulawesi Tenggara	72,06	13,72	9,56	10.992	74,25	0,86
Gorontalo	71,06	13,18	8,38	11.937	72,62	0,85
Sulawesi Barat	71,44	12,90	8,31	10.516	71,16	0,99
Maluku	71,02	14,10	10,51	9.900	74,09	0,94
Maluku Utara	71,47	13,76	9,50	9.613	72,52	0,95
Papua Barat	68,76	13,21	8,07	9.115	68,48	1,17
Papua Barat Daya	70,31	13,89	8,69	9.076	70,55	1,29
Papua	70,77	13,94	10,01	11.342	74,69	1,16
Papua Selatan	68,71	12,68	8,64	9.983	69,54	0,99
Papua Tengah	68,38	9,64	6,13	8.036	60,64	0,65
Papua Pegunungan	67,55	9,98	4,30	5.861	54,91	0,88
INDONESIA	74,47	13,30	9,07	12.802	75,90	1,17

Catatan:

UHH: Umur Harapan Hidup saat Lahir hasil LF SP2020

HLS: Harapan Lama Sekolah

RLS: Rata-Rata Lama Sekolah

Pengeluaran: Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, 2025

Lampiran 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ACEH	73,48	14,40	9,95	11.191	76,23	1,15
Simeulue	69,92	14,59	10,09	8.555	71,94	1,40
Aceh Singkil	70,15	14,37	9,05	10.227	72,62	1,20
Aceh Selatan	70,81	14,72	9,25	9.573	72,79	1,35
Aceh Tenggara	73,01	14,52	10,39	9.097	74,36	1,05
Aceh Timur	72,45	13,09	8,80	10.284	72,20	1,28
Aceh Tengah	73,29	15,04	10,35	12.175	78,09	1,06
Aceh Barat	72,31	14,94	10,27	10.937	76,30	1,13
Aceh Besar	73,51	14,92	10,69	11.072	77,46	1,16
Pidie	70,19	14,53	9,37	11.607	74,46	1,17
Bireuen	74,13	14,98	9,92	10.418	76,29	1,19
Aceh Utara	73,01	14,76	9,38	9.813	74,29	1,28
Aceh Barat Daya	70,95	13,70	9,11	9.922	72,10	1,32
Gayo Lues	70,12	14,73	8,75	10.237	72,61	1,20
Aceh Tamiang	74,12	14,52	9,42	9.959	74,78	1,05
Nagan Raya	72,95	14,19	9,57	9.759	73,87	1,05
Aceh Jaya	71,15	14,07	9,34	11.324	74,20	1,09
Bener Meriah	73,27	13,93	10,41	12.657	77,48	1,18
Pidie Jaya	73,62	15,02	9,80	11.543	77,04	0,85
Kota Banda Aceh	75,74	17,95	13,37	18.356	89,55	0,79
Kota Sabang	73,88	14,98	11,23	13.040	80,04	0,68
Kota Langsa	74,41	15,72	11,60	13.510	81,77	1,00
Kota Lhokseumawe	75,29	15,56	11,64	13.071	81,75	1,06
Kota Subulussalam	70,01	15,32	8,75	8.910	71,63	1,40
SUMATERA UTARA	74,19	13,50	10,08	11.898	76,47	0,94
Nias	72,04	13,32	6,41	8.115	66,79	1,00
Mandailing Natal	72,06	14,10	9,17	11.100	74,26	1,12
Tapanuli Selatan	71,97	13,90	9,60	12.557	75,78	0,80
Tapanuli Tengah	72,20	13,51	8,93	11.687	73,97	0,86
Tapanuli Utara	74,70	13,75	10,50	12.643	78,09	0,79
Toba Samosir	74,98	13,82	10,78	13.333	79,17	0,93
Labuhan Batu	73,45	13,30	9,53	12.537	75,79	0,78
Asahan	73,93	12,84	9,06	12.760	75,13	1,29
Simalungun	74,59	13,16	9,74	12.585	76,48	0,79
Dairi	74,71	13,54	10,09	11.794	76,68	1,05
Karo	74,71	13,27	10,30	13.583	78,10	0,79

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deli Serdang	74,02	13,46	10,50	13.697	78,29	0,94
Langkat	74,72	13,29	8,95	12.452	75,58	0,98
Nias Selatan	71,92	13,12	6,61	8.082	66,74	1,32
Humbang Hasundutan	74,55	13,47	10,26	9.097	73,93	0,82
Pakpak Bharat	73,35	13,92	9,94	9.462	73,89	1,09
Samosir	74,68	13,53	9,81	10.057	74,63	1,17
Serdang Bedagai	73,76	12,66	9,13	12.429	74,69	0,73
Batu Bara	73,40	13,13	8,71	11.747	73,92	1,07
Padang Lawas Utara	71,94	13,73	10,05	11.371	75,12	1,29
Padang Lawas	71,87	14,11	9,64	10.258	73,90	1,09
Labuhan Batu Selatan	73,01	13,54	9,29	12.797	75,74	0,84
Labuhan Batu Utara	74,45	13,59	9,15	13.347	76,71	0,67
Nias Utara	72,48	13,38	7,25	7.606	67,38	1,45
Nias Barat	72,82	13,17	7,43	7.032	66,65	1,51
Kota Sibolga	74,38	13,44	10,46	13.317	78,11	0,76
Kota Tanjung Balai	74,40	13,16	9,90	12.726	76,70	0,99
Kota Pematang Siantar	75,42	14,62	11,83	13.783	81,71	0,67
Kota Tebing Tinggi	74,58	13,14	10,88	14.499	79,26	0,74
Kota Medan	75,54	14,80	11,80	16.489	83,74	0,61
Kota Binjai	74,81	14,19	11,21	12.409	79,20	0,67
Kota Padangsidimpuan	73,97	14,72	11,22	12.274	79,19	0,74
Kota Gunungsitoli	74,47	13,95	8,95	9.477	73,29	1,37
SUMATERA BARAT	74,69	14,31	9,77	12.041	77,27	1,10
Kepulauan Mentawai	71,40	13,17	8,21	7.451	67,62	1,42
Pesisir Selatan	73,68	13,38	9,06	10.633	73,72	1,17
Solok	72,82	13,66	8,25	11.318	73,26	1,34
Sijunjung	73,30	12,99	8,66	11.829	73,73	1,17
Tanah Datar	74,35	15,06	9,46	11.552	77,04	0,72
Padang Pariaman	74,04	14,21	8,78	12.089	75,71	1,08
Agam	74,63	14,26	9,57	11.034	76,04	1,28
Lima Puluh Kota	73,64	13,53	8,49	10.917	73,43	1,27
Pasaman	72,76	13,65	8,49	9.418	71,60	1,40
Solok Selatan	72,77	13,08	9,20	11.542	74,01	1,15
Dharmasraya	74,34	13,02	9,31	12.604	75,70	1,18
Pasaman Barat	73,17	13,73	9,28	10.231	73,69	1,25
Kota Padang	75,59	16,58	11,64	15.957	84,93	0,65

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Solok	75,30	14,59	11,38	13.504	80,90	1,05
Kota Sawah Lunto	74,21	13,89	10,54	11.501	77,05	0,48
Kota Padang Panjang	74,86	15,74	12,01	12.148	81,32	0,89
Kota Bukittinggi	76,06	15,29	11,66	14.579	83,05	0,53
Kota Payakumbuh	75,54	14,79	11,08	14.536	81,62	1,06
Kota Pariaman	74,62	14,81	11,32	14.261	81,27	0,97
RIAU	74,74	13,44	9,55	12.233	76,31	0,85
Kuantan Singingi	73,34	13,39	9,33	11.400	74,62	0,84
Indragiri Hulu	73,97	12,78	8,62	11.495	73,48	1,00
Indragiri Hilir	72,55	12,39	7,49	11.248	70,74	0,96
Pelalawan	74,98	12,92	8,97	13.052	75,80	0,73
Siak	74,34	13,02	9,93	13.546	77,19	0,88
Kampar	75,05	13,70	9,78	12.200	76,97	0,89
Rokan Hulu	73,79	13,03	9,11	10.769	73,61	0,74
Bengkalis	74,68	13,47	9,93	12.521	77,02	0,85
Rokan Hilir	74,18	12,90	8,55	10.895	73,07	0,84
Kepulauan Meranti	72,40	12,90	8,13	9.380	70,20	0,80
Kota Pekanbaru	76,37	15,85	12,08	15.610	84,91	0,77
Kota Dumai	73,77	13,36	10,30	13.369	77,58	0,71
JAMBI	74,39	13,34	8,95	12.018	75,13	1,04
Kerinci	73,66	14,18	8,76	11.650	75,10	1,04
Merangin	74,40	12,50	8,41	11.847	73,41	1,05
Sarolangun	73,94	12,82	8,60	13.030	74,72	1,30
Batang Hari	75,14	13,20	8,41	11.219	73,94	1,12
Muaro Jambi	75,06	13,38	8,72	10.579	73,87	1,04
Tanjung Jabung Timur	74,82	12,22	7,71	10.626	71,28	0,72
Tanjung Jabung Barat	73,75	12,71	8,54	11.266	73,00	1,37
Tebo	73,88	13,20	8,05	11.791	73,41	1,02
Bungo	74,35	12,92	8,61	13.182	75,15	0,95
Kota Jambi	75,53	15,56	11,59	13.706	82,32	0,67
Kota Sungai Penuh	74,70	14,85	10,75	11.994	78,89	1,23
SUMATERA SELATAN	74,58	12,65	8,91	12.416	74,76	1,25
Ogan Komering Ulu	73,97	13,01	9,07	11.700	74,47	1,04
Ogan Komering Ilir	74,47	11,99	7,49	12.547	72,20	1,01
Muara Enim	74,82	12,03	8,45	12.646	73,77	0,92

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lahat	73,93	12,46	9,03	11.620	73,75	1,26
Musi Rawas	74,45	12,43	7,61	11.407	71,92	1,00
Musi Banyuasin	74,72	12,34	8,29	11.790	73,17	1,25
Banyu Asin	74,73	12,54	7,65	11.638	72,42	1,22
Ogan Komering Ulu Selatan	73,74	12,02	8,48	10.010	70,98	1,40
Ogan Komering Ulu Timur	74,80	12,66	8,13	13.154	74,42	1,06
Ogan Ilir	73,78	12,43	8,16	12.445	73,21	0,74
Empat Lawang	71,14	12,12	8,02	11.315	70,56	1,34
Penulak Abab Lematang Ilir	74,33	12,69	7,42	9.965	70,55	1,32
Musi Rawas Utara	73,46	12,07	7,80	11.460	71,39	1,33
Kota Palembang	76,26	14,47	11,25	16.725	83,27	1,19
Kota Prabumulih	75,33	13,42	10,37	14.342	79,17	0,62
Kota Pagar Alam	74,18	13,51	9,78	10.610	74,92	1,24
Kota Lubuklinggau	75,46	13,88	10,15	15.090	79,94	1,22
BENGKULU	73,59	13,76	9,23	12.197	75,68	1,03
Bengkulu Selatan	73,32	13,67	9,60	11.518	75,32	1,06
Rejang Lebong	74,17	14,21	9,05	11.824	75,87	1,11
Bengkulu Utara	73,52	12,93	8,35	12.045	73,56	0,63
Kaur	73,31	13,16	8,71	10.180	72,45	1,29
Seluma	73,19	13,34	8,34	9.919	71,85	1,23
Mukomuko	74,31	13,06	8,65	12.055	74,45	1,09
Lebong	73,10	12,92	8,48	12.776	74,10	0,76
Kepahiang	72,61	13,31	8,61	11.010	72,96	1,26
Bengkulu Tengah	72,71	13,64	7,94	10.973	72,48	1,13
Kota Bengkulu	75,14	16,08	11,95	15.971	84,59	0,76
LAMPUNG	74,71	12,79	8,61	11.683	73,98	1,16
Lampung Barat	74,24	12,31	8,57	11.612	73,14	1,01
Tanggamus	74,39	12,34	7,63	10.888	71,36	1,16
Lampung Selatan	74,84	12,79	7,98	11.540	73,10	1,32
Lampung Timur	74,54	13,00	8,46	11.670	73,92	1,19
Lampung Tengah	74,70	13,18	8,17	12.975	74,86	0,94
Lampung Utara	74,41	12,64	8,63	10.160	72,28	1,20
Way Kanan	74,61	12,53	7,91	10.831	71,98	1,14
Tulangbawang	74,32	12,39	7,90	12.513	73,11	1,20
Pesawaran	74,30	12,64	8,01	9.638	70,90	0,94

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pringsewu	74,92	13,09	8,72	11.950	74,76	1,25
Mesuji	74,16	11,97	7,30	9.843	69,40	1,18
Tulang Bawang Barat	74,55	12,13	7,81	10.032	70,61	0,81
Pesisir Barat	74,21	12,31	8,76	9.879	71,72	0,96
Kota Bandar Lampung	75,21	14,74	11,11	14.270	81,26	0,99
Kota Metro	75,86	14,97	11,19	13.380	81,22	1,01
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	74,46	12,50	8,65	13.837	75,26	0,95
Bangka	73,56	13,13	8,77	13.411	75,38	0,96
Belitung	73,13	12,10	9,11	14.559	75,29	0,44
Bangka Barat	72,35	11,95	7,80	13.380	72,23	1,22
Bangka Tengah	74,11	12,34	7,33	13.768	73,10	0,77
Bangka Selatan	72,07	11,78	7,25	12.920	70,83	1,17
Belitung Timur	74,12	11,78	9,03	12.694	73,99	0,50
Kota Pangkal Pinang	75,64	13,50	10,90	16.856	81,64	0,91
KEPULAUAN RIAU	75,46	13,28	10,72	15.881	80,53	0,80
Karimun	75,05	12,63	9,06	13.649	76,08	0,78
Bintan	75,21	13,46	9,45	15.303	78,65	0,89
Natuna	74,77	13,95	9,25	15.683	78,94	0,43
Lingga	74,04	12,77	7,87	13.108	73,82	1,05
Kepulauan Anambas	74,05	13,07	7,79	13.141	74,07	0,82
Kota Batam	75,54	13,57	11,34	19.944	83,80	0,58
Kota Tanjung Pinang	75,27	14,19	10,80	16.838	82,02	0,54
DKI JAKARTA	76,27	13,80	11,59	20.676	85,05	1,07
Kepulauan Seribu	75,24	12,97	9,27	14.691	77,52	1,08
Kota Jakarta Selatan	76,55	14,28	12,06	26.387	88,51	1,07
Kota Jakarta Timur	75,93	14,32	12,01	19.824	85,51	0,88
Kota Jakarta Pusat	76,91	13,50	11,62	19.309	84,45	0,84
Kota Jakarta Barat	76,23	13,47	11,25	22.831	85,18	0,92
Kota Jakarta Utara	75,32	13,05	11,08	20.584	83,12	1,21
JAWA BARAT	75,53	13,02	9,14	12.447	75,90	1,31
Bogor	75,23	12,76	8,72	11.933	74,53	1,22
Sukabumi	75,12	12,40	7,63	10.244	71,13	1,35
Cianjur	75,05	12,31	7,62	9.173	69,84	1,38
Bandung	75,70	12,99	9,40	11.619	75,58	1,33
Garut	75,14	12,43	7,86	9.479	70,67	1,09

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tasikmalaya	74,37	12,92	7,98	9.258	70,76	1,11
Ciamis	75,69	14,31	8,23	10.406	74,33	0,94
Kuningan	75,64	12,52	7,91	10.707	72,31	1,05
Cirebon	75,39	12,67	7,88	11.769	73,27	1,34
Majalengka	75,32	12,50	7,81	11.094	72,37	1,40
Sumedang	75,70	13,21	8,92	11.963	75,50	1,25
Indramayu	75,16	12,58	7,06	11.316	71,58	1,22
Subang	75,41	12,38	7,68	12.144	73,00	1,32
Purwakarta	75,28	12,51	8,37	13.400	74,97	1,32
Karawang	75,57	12,22	8,31	13.251	74,59	1,04
Bekasi	75,71	13,22	10,07	13.004	77,80	1,30
Bandung Barat	75,44	12,26	8,34	9.862	71,65	1,24
Pangandaran	75,45	12,41	8,11	9.995	71,66	0,89
Kota Bogor	76,25	13,69	10,72	13.571	79,75	0,91
Kota Sukabumi	75,45	13,63	10,39	12.692	78,23	0,70
Kota Bandung	76,30	14,27	11,41	19.280	84,66	1,09
Kota Cirebon	75,97	13,45	10,54	13.341	78,99	1,15
Kota Bekasi	76,61	14,15	12,11	17.216	84,43	1,05
Kota Depok	76,30	14,21	11,83	17.279	84,04	1,19
Kota Cimahi	76,00	13,86	11,53	13.697	80,85	0,68
Kota Tasikmalaya	75,66	13,51	9,64	11.849	76,59	0,74
Kota Banjar	75,35	13,29	8,84	12.222	75,54	0,71
JAWA TENGAH	75,24	13,05	8,15	12.746	74,77	1,22
Cilacap	75,30	12,70	7,65	12.371	73,45	1,24
Banyumas	74,79	13,53	8,10	13.301	75,44	1,23
Purbalingga	74,48	12,11	7,37	11.949	71,71	1,04
Banjarnegara	74,86	12,04	7,10	10.992	70,61	1,42
Kebumen	75,56	13,42	7,89	10.658	73,17	0,95
Purworejo	76,06	13,58	8,74	12.085	75,93	1,02
Wonosobo	74,56	12,05	6,91	12.552	71,50	1,23
Magelang	74,93	12,83	8,04	11.343	73,09	1,37
Boyolali	76,76	12,90	8,41	14.594	76,95	1,30
Klaten	77,69	13,44	9,30	13.948	78,68	0,67
Sukoharjo	78,21	14,03	10,02	13.238	79,90	0,76
Wonogiri	77,30	12,76	7,85	10.938	73,42	1,21

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Karanganyar	78,21	13,74	9,27	13.244	78,67	0,72
Sragen	76,48	13,21	7,89	14.461	76,38	1,13
Grobogan	75,57	12,58	7,51	11.991	72,94	1,28
Blora	75,23	12,83	7,45	11.240	72,35	1,30
Rembang	75,29	12,50	7,89	12.189	73,40	1,20
Pati	76,83	13,08	8,09	12.186	74,98	1,19
Kudus	77,21	13,49	9,51	12.842	77,94	0,95
Jepara	76,49	12,87	8,28	12.242	74,90	0,78
Demak	76,08	13,37	8,29	12.014	75,08	0,68
Semarang	76,45	13,23	8,17	13.923	76,40	0,96
Temanggung	76,16	12,63	7,61	10.995	72,52	0,92
Kendal	74,96	13,01	7,97	13.721	75,07	0,98
Batang	75,35	12,18	7,35	11.424	71,70	1,37
Pekalongan	74,59	12,63	7,50	12.185	72,71	1,06
Pemalang	74,55	12,03	6,69	10.521	69,47	1,19
Tegal	74,62	12,97	7,37	11.498	72,36	0,92
Brebes	74,40	12,66	6,61	11.853	71,18	1,42
Kota Magelang	78,03	14,84	11,44	14.023	82,92	0,94
Kota Surakarta	78,18	15,08	11,26	16.883	84,92	0,60
Kota Salatiga	78,75	15,47	11,49	17.523	86,23	0,59
Kota Semarang	78,72	15,58	11,11	17.402	85,80	0,66
Kota Pekalongan	75,10	12,98	9,35	14.988	77,76	0,71
Kota Tegal	75,30	13,26	9,29	14.801	77,95	0,58
D I YOGYAKARTA	75,64	15,78	10,20	15.855	82,48	1,05
Kulon Progo	75,71	14,55	9,33	11.499	76,97	1,04
Bantul	75,04	15,91	10,11	17.240	83,03	1,19
Gunung Kidul	75,12	13,56	7,64	11.006	73,13	1,37
Sleman	75,81	16,80	11,42	18.231	86,35	0,75
Kota Yogyakarta	76,05	17,67	12,13	21.104	89,53	0,48
JAWA TIMUR	75,36	13,44	8,39	13.509	76,13	1,04
Pacitan	74,98	12,70	7,91	10.756	72,26	1,08
Ponorogo	75,61	13,93	7,95	11.561	74,65	1,29
Trenggalek	75,63	12,78	8,09	11.322	73,39	1,27
Tulungagung	75,51	13,50	8,69	12.505	75,88	1,00
Blitar	75,63	12,83	8,01	12.633	74,43	1,35

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kediri	75,41	13,77	8,38	12.968	76,09	1,21
Malang	75,63	13,60	7,98	11.681	74,45	1,25
Lumajang	74,80	12,53	7,28	10.603	71,02	1,01
Jember	74,37	13,51	6,64	11.147	71,57	0,90
Banyuwangi	74,43	13,32	7,84	13.963	75,17	1,17
Bondowoso	73,47	13,34	6,54	12.192	71,72	0,70
Situbondo	73,54	13,21	7,03	11.713	71,87	0,91
Probolinggo	74,10	12,80	6,43	12.749	71,65	1,13
Pasuruan	74,81	12,91	7,47	12.117	73,02	0,91
Sidoarjo	76,08	15,23	10,94	16.366	83,35	0,82
Mojokerto	75,28	13,16	9,14	14.525	77,46	1,00
Jombang	74,97	13,62	8,88	12.976	76,37	0,93
Nganjuk	74,96	13,19	8,26	14.068	75,89	0,86
Madiun	75,11	13,28	8,21	13.325	75,47	0,88
Magetan	75,76	14,09	8,84	13.515	77,58	1,06
Ngawi	75,49	12,90	7,88	12.837	74,43	0,70
Bojonegoro	75,20	13,27	7,78	11.796	73,74	1,36
Tuban	75,23	12,77	7,54	12.117	73,15	1,16
Lamongan	75,40	14,04	8,73	12.963	76,81	1,20
Gresik	74,90	13,99	10,13	14.983	79,69	0,96
Bangkalan	73,62	12,09	6,15	10.265	68,15	1,22
Sampang	73,89	12,56	5,19	10.030	67,23	0,76
Pamekasan	73,85	13,83	7,29	10.206	71,64	1,12
Sumenep	74,09	13,60	6,24	10.631	70,54	1,09
Kota Kediri	76,28	15,72	11,09	14.284	82,71	1,01
Kota Blitar	75,47	14,82	10,83	15.586	82,03	0,72
Kota Malang	75,88	15,80	11,36	18.596	85,55	1,03
Kota Probolinggo	74,64	13,99	9,73	14.134	78,50	0,91
Kota Pasuruan	75,19	13,68	9,98	15.289	79,52	0,79
Kota Mojokerto	76,31	14,14	11,44	15.374	82,35	0,72
Kota Madiun	76,11	14,55	12,12	18.173	85,12	0,72
Kota Surabaya	76,34	14,88	11,15	20.679	85,65	1,13
Kota Batu	75,70	14,59	9,95	14.807	80,35	0,83
BANTEN	75,33	13,11	9,56	13.498	77,25	1,18
Pandeglang	74,56	13,75	7,50	9.923	71,84	1,35

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lebak	74,30	12,12	6,78	10.165	69,24	1,33
Tangerang	75,63	12,89	9,16	13.625	76,74	0,72
Serang	75,39	13,02	8,03	12.065	74,10	1,12
Kota Tangerang	75,86	13,96	11,46	16.058	82,41	1,08
Kota Cilegon	75,45	13,41	10,40	14.759	79,54	0,90
Kota Serang	75,63	12,85	8,94	15.250	77,50	0,78
Kota Tangerang Selatan	76,09	14,71	12,10	17.396	84,81	0,77
BALI	75,46	13,63	9,75	15.383	79,37	0,94
Jembrana	75,42	13,13	8,71	13.113	75,94	0,82
Tabanan	76,07	13,37	9,81	15.752	79,70	1,10
Badung	76,18	14,26	11,26	19.004	84,27	0,64
Gianyar	76,14	14,12	9,93	16.244	80,96	0,91
Klungkung	75,32	13,14	8,75	13.023	75,89	0,98
Bangli	74,60	12,54	7,80	12.447	73,22	0,98
Karangasem	74,52	12,92	6,98	11.676	71,89	1,38
Buleleng	74,87	13,31	7,94	14.827	76,06	0,94
Kota Denpasar	76,16	14,14	11,64	21.185	85,63	0,61
NUSA TENGGARA BARAT	72,60	13,99	8,21	11.922	73,97	1,19
Lombok Barat	73,03	14,17	7,15	12.544	73,52	1,13
Lombok Tengah	71,89	13,90	7,08	11.870	72,07	1,24
Lombok Timur	72,29	14,08	7,71	10.851	72,35	1,22
Sumbawa	73,07	13,35	8,88	10.716	73,27	1,26
Dompu	72,09	14,01	9,38	10.230	73,58	1,36
Bima	72,22	13,67	8,61	9.821	71,97	1,38
Sumbawa Barat	73,44	13,84	9,35	12.983	76,46	1,24
Lombok Utara	71,88	13,16	6,75	10.502	69,63	1,44
Kota Mataram	75,12	15,69	9,89	16.851	82,37	0,89
Kota Bima	73,45	15,21	10,97	12.623	79,41	0,63
NUSA TENGGARA TIMUR	72,16	13,34	8,22	8.735	69,89	1,08
Sumba Barat	71,63	13,41	7,39	8.530	68,46	1,12
Sumba Timur	71,91	12,88	7,94	10.619	70,99	1,01
Kupang	69,91	13,91	7,87	8.745	69,03	1,13
Timor Tengah Selatan	71,47	12,63	7,43	7.951	66,88	1,00
Timor Tengah Utara	71,39	13,39	8,36	7.364	67,87	0,89
Belu	74,77	12,33	7,73	8.354	68,89	1,12

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Alor	71,33	12,59	8,72	8.022	68,44	1,09
Lembata	73,81	12,54	8,49	8.397	69,70	1,09
Flores Timur	74,37	13,17	8,19	8.700	70,61	1,17
Sikka	74,64	13,68	7,20	9.219	70,65	0,99
Ende	73,06	13,84	8,52	10.126	72,73	0,68
Ngada	74,89	12,76	8,84	9.827	72,53	0,68
Manggarai	72,76	13,74	8,17	8.423	70,10	1,08
Rote Ndao	70,17	13,24	7,84	7.652	67,01	0,92
Manggarai Barat	73,24	12,62	8,26	8.351	69,20	0,76
Sumba Tengah	69,77	13,15	7,50	6.965	65,29	1,29
Sumba Barat Daya	69,46	13,12	6,47	7.588	64,82	0,86
Nagekeo	72,89	12,74	8,47	9.213	70,48	1,12
Manggarai Timur	73,19	12,67	8,11	6.745	66,63	0,91
Sabu Raijua	66,88	13,20	7,10	6.452	62,74	1,10
Malaka	71,72	12,84	7,38	7.067	65,84	1,09
Kota Kupang	75,38	16,55	11,66	14.262	83,65	0,53
KALIMANTAN BARAT	74,28	12,69	8,07	10.689	72,09	1,26
Sambas	74,80	12,77	7,00	11.939	72,08	1,24
Bengkayang	74,74	12,24	7,62	10.462	70,99	0,98
Landak	74,40	12,55	7,76	9.104	69,92	1,14
Mempawah	74,82	13,00	7,40	9.518	70,59	1,38
Sanggau	74,36	12,02	7,81	9.990	70,36	1,38
Ketapang	73,92	12,09	7,99	10.826	71,30	1,36
Sintang	74,71	12,33	7,86	9.993	70,92	1,13
Kapuas Hulu	73,69	12,24	8,04	8.765	69,24	0,68
Sekadau	74,30	12,02	7,53	8.862	68,73	1,46
Melawi	73,96	11,55	8,05	9.799	69,80	1,44
Kayong Utara	73,02	12,21	6,55	9.306	67,60	0,82
Kubu Raya	73,66	13,91	7,35	10.500	72,01	1,22
Kota Pontianak	75,96	15,07	10,48	16.725	82,80	0,71
Kota Singkawang	75,23	12,96	8,58	13.344	75,67	1,33
KALIMANTAN TENGAH	74,01	12,78	8,96	12.612	74,86	0,78
Kotawaringin Barat	73,53	12,92	8,87	14.507	76,02	0,89
Kotawaringin Timur	74,61	12,90	8,25	13.434	74,96	0,66
Kapuas	73,02	13,02	8,04	12.602	73,47	0,67

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Barito Selatan	73,00	13,01	9,35	12.736	75,21	0,60
Barito Utara	73,75	12,56	8,93	11.534	73,58	0,56
Sukamara	74,75	12,18	8,23	10.178	71,45	0,88
Lamandau	74,01	12,65	8,83	12.498	74,46	0,69
Seruyan	73,59	12,24	8,08	10.620	71,24	0,82
Katingan	74,39	13,09	8,96	11.781	74,68	0,42
Pulang Pisau	73,62	12,61	8,47	11.545	72,99	0,87
Gunung Mas	73,97	12,19	9,40	12.215	74,46	0,79
Barito Timur	72,48	12,89	9,71	13.018	75,50	0,92
Murung Raya	73,73	12,20	8,12	11.776	72,34	1,06
Kota Palangka Raya	74,92	15,14	11,69	15.469	82,98	0,55
KALIMANTAN SELATAN	74,49	13,12	8,81	13.757	76,10	1,21
Tanah Laut	74,88	12,70	8,09	12.986	74,32	1,23
Kota Baru	74,03	12,23	7,71	13.163	73,03	0,84
Banjar	73,87	13,05	8,15	14.101	75,11	0,94
Barito Kuala	72,85	12,69	7,99	11.469	72,05	0,91
Tapin	75,09	12,60	8,38	13.381	74,98	1,24
Hulu Sungai Selatan	73,27	12,78	8,18	14.453	74,81	1,16
Hulu Sungai Tengah	73,02	12,58	8,45	13.608	74,26	1,27
Hulu Sungai Utara	72,95	13,47	8,00	11.168	72,67	1,30
Tabalong	74,95	13,18	9,37	13.541	76,94	1,28
Tanah Bumbu	74,68	12,80	8,44	13.380	75,09	0,79
Balangan	74,14	13,35	8,34	12.675	74,78	1,29
Kota Banjarmasin	75,38	14,02	10,36	16.013	80,88	0,43
Kota Banjar Baru	75,44	14,87	11,07	15.361	82,20	0,67
KALIMANTAN TIMUR	75,28	14,04	10,10	14.254	79,39	0,76
Paser	74,39	13,39	9,04	12.709	75,85	0,96
Kutai Barat	74,23	13,40	9,01	12.251	75,38	0,83
Kutai Kartanegara	74,65	13,85	9,28	13.365	77,25	0,89
Kutai Timur	74,87	13,22	9,48	12.755	76,48	0,76
Berau	73,95	13,44	9,58	14.582	77,72	0,71
Penajam Paser Utara	74,60	13,00	8,72	13.636	75,82	1,17
Mahakam Ulu	73,91	12,85	8,71	9.381	71,53	1,05
Kota Balikpapan	76,24	14,26	11,04	17.482	83,23	0,74
Kota Samarinda	75,89	15,41	11,04	16.345	83,53	0,51

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Bontang	75,36	13,80	11,03	18.861	83,04	0,67
KALIMANTAN UTARA	73,68	13,31	9,44	10.568	74,04	0,86
Malinau	73,33	13,58	9,64	11.436	75,21	0,66
Bulungan	73,99	13,26	9,42	10.997	74,53	0,95
Tana Tidung	73,64	12,85	9,41	9.037	71,86	1,28
Nunukan	73,21	12,81	8,40	8.598	69,87	0,87
Kota Tarakan	74,40	14,23	10,46	12.961	78,62	0,76
SULAWESI UTARA	74,44	12,98	9,91	12.450	76,32	0,85
Bolaang Mongondow	72,48	11,82	8,49	11.756	71,83	0,97
Minahasa	75,60	14,20	10,25	14.035	79,73	0,59
Kepulauan Sangihe	75,02	12,80	8,70	12.839	75,18	1,01
Kepulauan Talaud	73,92	12,84	9,97	9.953	73,68	1,17
Minahasa Selatan	74,74	13,03	9,53	12.986	76,47	0,90
Minahasa Utara	75,02	13,27	10,36	12.846	77,76	0,92
Bolaang Mongondow Utara	73,93	12,58	8,63	10.434	72,28	0,87
Siau Tagulandang Biaro	75,10	12,05	9,51	9.335	72,17	0,87
Minahasa Tenggara	73,71	12,61	9,16	11.981	74,28	0,81
Bolaang Mongondow Selatan	71,14	12,35	8,38	10.519	70,54	0,89
Bolaang Mongondow Timur	73,73	12,11	8,30	10.600	71,43	1,06
Kota Manado	75,58	14,21	11,52	15.755	82,40	0,66
Kota Bitung	74,76	12,88	10,05	13.804	77,57	0,87
Kota Tomohon	75,99	14,39	11,04	13.503	80,65	0,74
Kota Kotamobagu	75,37	13,25	10,36	12.337	77,49	0,82
SULAWESI TENGAH	71,10	13,35	9,10	10.934	72,82	0,80
Banggai Kepulauan	67,83	13,12	8,88	8.723	68,44	1,17
Banggai	72,52	13,43	8,94	11.000	73,44	0,80
Morowali	71,34	13,40	9,39	12.527	74,70	0,46
Poso	73,34	13,76	9,84	10.314	74,55	1,22
Donggala	71,03	12,75	8,01	9.337	69,23	0,76
Toli-Toli	71,62	13,18	9,00	9.295	71,09	1,01
Buol	71,62	13,19	9,21	9.410	71,47	0,82
Parigi Moutong	69,09	12,53	8,07	11.194	69,99	0,73
Tojo Una-Una	71,30	12,62	8,58	9.200	69,76	1,04
Sigi	71,63	13,30	9,05	9.659	71,68	1,10
Banggai Laut	71,45	13,17	8,66	9.184	70,46	1,16

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Morowali Utara	72,61	12,60	9,14	10.258	72,16	0,73
Kota Palu	74,25	16,53	11,76	16.269	84,53	0,49
SULAWESI SELATAN	74,15	13,56	9,00	12.773	75,92	0,98
Kepulauan Selayar	73,79	12,96	8,64	10.589	72,78	1,11
Bulukumba	74,43	13,46	8,66	12.456	75,26	1,12
Bantaeng	73,11	12,92	7,43	13.310	73,12	1,27
Jeneponto	74,28	12,28	7,02	10.691	70,25	1,15
Takalar	74,08	12,62	7,84	12.014	72,79	1,01
Gowa	74,43	13,72	8,54	11.103	74,22	0,69
Sinjai	73,36	13,46	7,97	11.111	72,76	1,32
Maros	74,10	13,52	8,20	12.709	74,79	1,01
Pangkajene dan Kepulauan	73,48	12,94	8,48	13.209	74,62	1,02
Barru	73,18	13,76	8,93	12.559	75,41	1,21
Bone	73,84	13,03	7,70	10.538	71,63	1,16
Soppeng	74,21	13,40	8,59	10.929	73,69	1,28
Wajo	73,77	13,34	7,72	13.957	74,72	1,00
Sidenreng Rappang	74,69	13,11	8,36	13.604	75,49	0,91
Pinrang	74,87	13,29	8,54	13.419	75,87	0,58
Enrekang	74,30	13,90	9,26	12.571	76,50	0,88
Luwu	73,85	13,44	8,96	11.634	74,66	1,08
Tana Toraja	75,17	14,25	8,92	8.595	72,77	1,15
Luwu Utara	74,25	12,63	8,51	13.390	74,81	1,04
Luwu Timur	74,86	13,38	9,04	14.381	77,28	1,10
Toraja Utara	75,24	13,53	8,72	9.753	73,24	1,29
Kota Makasar	75,60	15,63	11,59	18.878	85,66	0,50
Kota Parepare	74,90	14,62	10,89	15.408	81,50	0,65
Kota Palopo	74,47	15,14	11,17	14.837	81,74	0,60
SULAWESI TENGGARA	72,06	13,72	9,56	10.992	74,25	0,86
Buton	70,66	13,97	8,69	8.607	70,22	0,72
Muna	71,77	14,18	8,86	9.526	72,23	1,02
Konawe	73,04	13,11	9,80	11.763	75,09	0,79
Kolaka	73,86	13,17	9,55	13.941	76,92	0,94
Konawe Selatan	71,95	12,95	8,97	10.574	72,32	1,13
Bombana	71,31	11,98	8,27	9.957	69,54	1,00
Wakatobi	71,10	13,55	8,54	11.199	72,59	0,78

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kolaka Utara	70,77	12,25	9,06	11.941	72,37	0,86
Buton Utara	71,47	13,33	9,28	9.119	71,29	0,76
Konawe Utara	70,73	13,15	9,79	11.104	73,42	0,98
Kolaka Timur	73,47	12,73	8,65	9.420	71,19	1,24
Konawe Kepulauan	70,38	12,57	9,61	8.286	69,39	0,90
Muna Barat	71,32	12,75	8,31	8.858	69,18	1,18
Buton Tengah	70,65	13,44	7,37	8.825	68,39	1,20
Buton Selatan	70,36	13,37	7,80	8.684	68,54	0,73
Kota Kendari	75,72	16,94	12,56	16.002	86,36	0,45
Kota Baubau	74,93	15,54	11,11	12.260	80,29	0,85
GORONTALO	71,06	13,18	8,38	11.937	72,62	0,85
Boalemo	71,70	12,60	7,32	10.720	69,89	0,79
Gorontalo	71,26	13,23	7,96	11.110	71,54	0,82
Pohuwato	70,00	12,49	7,79	11.872	70,59	0,57
Bone Bolango	70,73	13,70	8,62	11.935	73,30	0,66
Gorontalo Utara	70,25	12,71	7,56	10.678	69,62	1,15
Kota Gorontalo	74,03	14,63	10,59	14.285	79,97	1,00
SULAWESI BARAT	71,44	12,90	8,31	10.516	71,16	0,99
Majene	70,74	13,84	9,68	11.299	74,15	1,23
Polewali Mandar	71,46	13,51	7,84	9.999	70,71	1,19
Mamasa	72,43	12,61	8,41	8.779	69,56	1,28
Mamuju	72,61	13,30	8,71	10.682	72,77	1,27
Pasangkayu	70,86	12,10	8,14	12.644	71,62	0,82
Mamuju Tengah	70,44	12,69	8,10	9.484	69,17	0,93
MALUKU	71,02	14,10	10,51	9.900	74,09	0,94
Maluku Tenggara Barat	70,53	12,58	9,93	7.342	68,47	1,15
Maluku Tenggara	71,24	13,11	9,85	8.738	71,16	0,82
Maluku Tengah	71,28	14,68	10,06	11.532	75,87	1,03
Buru	70,56	13,25	9,28	11.562	73,24	0,95
Kepulauan Aru	70,60	12,51	9,46	8.650	69,73	1,06
Seram Bagian Barat	71,58	13,71	9,60	9.854	72,91	0,51
Seram Bagian Timur	69,19	13,07	9,25	10.204	71,10	1,17
Maluku Barat Daya	70,11	12,94	9,39	7.776	68,66	1,45
Buru Selatan	70,54	13,01	8,74	8.664	69,36	1,20
Kota Ambon	73,56	16,09	12,37	15.549	83,97	0,72

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Tual	72,05	14,03	10,68	8.401	72,88	0,55
MALUKU UTARA	71,47	13,76	9,50	9.613	72,52	0,95
Halmahera Barat	71,11	13,26	8,60	8.705	69,75	0,79
Halmahera Tengah	70,90	13,69	9,21	9.361	71,57	0,89
Kepulauan Sula	69,19	13,16	9,20	8.251	68,89	1,03
Halmahera Selatan	70,98	13,05	8,43	8.515	69,05	0,91
Halmahera Utara	72,30	13,81	8,84	8.815	71,25	1,04
Halmahera Timur	72,04	13,01	9,07	9.227	71,11	1,08
Pulau Morotai	71,63	13,19	7,91	7.775	67,86	1,42
Pulau Taliabu	67,52	12,89	8,15	7.503	65,61	1,13
Kota Ternate	73,36	15,93	12,09	14.945	83,01	0,51
Kota Tidore Kepulauan	73,00	14,50	10,18	9.539	74,63	0,84
PAPUA BARAT	68,76	13,21	8,07	9.115	68,48	1,17
Fakfak	71,78	14,80	9,35	8.401	72,00	0,67
Kaimana	69,54	12,52	9,02	9.481	69,70	0,72
Teluk Wondama	65,74	11,97	7,56	9.192	65,26	1,15
Teluk Bintuni	68,49	12,63	8,77	10.799	70,32	0,76
Manokwari	72,90	13,87	8,89	13.364	75,96	1,08
Manokwari Selatan	68,53	12,84	7,33	6.373	63,24	1,27
Pegunungan Arfak	67,92	11,81	5,84	6.043	59,53	1,40
PAPUA BARAT DAYA	70,31	13,89	8,69	9.076	70,55	1,29
Raja Ampat	67,32	12,20	8,55	9.109	67,36	1,14
Sorong	70,38	14,10	9,02	8.617	70,60	1,31
Sorong Selatan	67,40	13,32	8,06	7.227	65,45	1,41
Maybrat	66,21	13,52	7,66	6.074	62,68	1,37
Tambrauw	66,17	12,47	6,01	5.827	59,28	1,66
Kota Sorong	73,66	14,44	11,59	14.664	81,03	0,60
PAPUA	70,77	13,94	10,01	11.342	74,69	1,16
Jayapura	70,82	14,81	10,77	11.088	76,14	1,09
Kepulauan Yapen	71,05	13,00	9,80	8.752	70,93	1,16
Biak Numfor	71,21	14,25	10,69	10.823	75,48	0,71
Sarmi	70,25	12,61	9,79	7.713	68,78	1,31
Keerom	70,29	12,53	8,78	10.109	70,43	0,80
Waropen	69,94	12,96	9,43	7.960	68,91	1,14
Supiori	70,00	13,21	9,39	6.786	67,30	1,40

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mamberamo Raya	69,21	12,05	6,74	5.568	60,48	1,68
Kota Jayapura	72,34	15,28	12,08	15.522	82,26	0,34
PAPUA SELATAN	68,71	12,68	8,64	9.983	69,54	0,99
Merauke	71,65	14,49	9,61	11.260	75,11	0,78
Boven Digoel	69,63	11,69	9,43	8.796	68,62	0,67
Mappi	66,49	11,42	7,41	7.364	62,60	1,52
Asmat	68,31	9,75	6,10	6.495	58,55	1,60
PAPUA TENGAH	68,38	9,64	6,13	8.036	60,64	0,65
Mimika	73,45	13,17	10,73	12.745	77,27	0,55
Dogiyai	66,75	10,64	4,99	6.856	57,96	0,42
Deiyai	66,84	9,87	3,30	5.743	52,81	0,99
Nabire	70,50	12,97	10,43	10.093	72,89	0,84
Paniai	69,84	10,55	4,82	7.719	60,04	0,72
Intan Jaya	66,85	7,84	3,38	6.622	51,56	1,26
Puncak	66,94	5,61	2,40	6.496	45,95	0,55
Puncak Jaya	68,16	7,66	4,59	6.194	53,18	1,35
PAPUA PEGUNUNGAN	67,55	9,98	4,30	5.861	54,91	0,88
Nduga	63,94	4,73	2,19	4.773	40,35	3,78
Jayawijaya	70,37	12,86	6,15	8.750	66,02	0,98
Lanny Jaya	67,43	9,73	3,87	5.102	52,47	1,22
Tolikara	67,52	9,04	3,70	5.802	52,71	0,76
Mamberamo Tengah	69,09	9,79	3,99	5.119	53,36	1,64
Nduga	66,53	9,85	3,83	5.305	52,63	1,50
Jayawijaya	66,68	8,06	4,36	5.997	52,48	0,98
Lanny Jaya	66,50	7,30	3,59	6.300	50,56	1,75
INDONESIA	74,47	13,30	9,07	12.802	75,90	1,17

Catatan:

UHH: Umur Harapan Hidup saat Lahir hasil LF SP2020

HLS: Harapan Lama Sekolah

RLS: Rata-Rata Lama Sekolah

Pengeluaran: Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, 2025

Lampiran 3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2022–2025

Provinsi	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	74,11	74,70	75,36	76,23
Sumatera Utara	74,51	75,13	75,76	76,47
Sumatera Barat	75,16	75,64	76,43	77,27
Riau	74,45	74,95	75,67	76,31
Jambi	73,11	73,73	74,36	75,13
Sumatera Selatan	72,48	73,18	73,84	74,76
Bengkulu	73,68	74,30	74,91	75,68
Lampung	71,79	72,48	73,13	73,98
Kepulauan Bangka Belitung	73,50	74,09	74,55	75,26
Kepulauan Riau	78,48	79,08	79,89	80,53
DKI Jakarta	82,77	83,55	84,15	85,05
Jawa Barat	73,63	74,24	74,92	75,90
Jawa Tengah	72,80	73,39	73,87	74,77
D I Yogyakarta	80,65	81,09	81,62	82,48
Jawa Timur	74,05	74,65	75,35	76,13
Banten	75,25	75,77	76,35	77,25
Bali	77,40	78,01	78,63	79,37
Nusa Tenggara Barat	71,65	72,37	73,10	73,97
Nusa Tenggara Timur	67,63	68,40	69,14	69,89
Kalimantan Barat	69,71	70,47	71,19	72,09
Kalimantan Tengah	73,17	73,73	74,28	74,86
Kalimantan Selatan	74,00	74,66	75,19	76,10
Kalimantan Timur	77,36	78,20	78,79	79,39
Kalimantan Utara	72,21	72,88	73,41	74,04
Sulawesi Utara	74,52	75,04	75,68	76,32
Sulawesi Tengah	71,01	71,66	72,24	72,82
Sulawesi Selatan	73,96	74,60	75,18	75,92
Sulawesi Tenggara	72,38	72,94	73,62	74,25
Gorontalo	70,62	71,25	72,01	72,62
Sulawesi Barat	69,19	69,80	70,46	71,16
Maluku	72,04	72,75	73,40	74,09
Maluku Utara	70,26	70,98	71,84	72,52
Papua Barat	66,03	66,84	67,69	68,48
Papua Barat Daya	68,60	69,07	69,65	70,55
Papua	72,57	73,23	73,83	74,69
Papua Selatan	67,39	68,24	68,86	69,54
Papua Tengah	58,76	59,44	60,25	60,64
Papua Pegunungan	52,69	53,45	54,43	54,91
INDONESIA	73,77	74,39	75,02	75,90

Catatan: IPM dihitung menggunakan UHH hasil LF SP2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, 2025

Lampiran 4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2022–2025

Provinsi/Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH	74,11	74,70	75,36	76,23
Simeulue	69,17	69,98	70,95	71,94
Aceh Singkil	70,61	71,14	71,76	72,62
Aceh Selatan	70,56	71,14	71,82	72,79
Aceh Tenggara	72,18	72,93	73,59	74,36
Aceh Timur	70,13	70,73	71,29	72,20
Aceh Tengah	75,79	76,45	77,27	78,09
Aceh Barat	74,09	74,62	75,45	76,30
Aceh Besar	75,44	75,98	76,57	77,46
Pidie	72,49	72,95	73,60	74,46
Bireuen	74,10	74,56	75,39	76,29
Aceh Utara	71,85	72,50	73,35	74,29
Aceh Barat Daya	69,79	70,47	71,16	72,10
Gayo Lues	70,12	70,82	71,75	72,61
Aceh Tamiang	72,08	73,02	74,00	74,78
Nagan Raya	71,46	72,15	73,10	73,87
Aceh Jaya	71,92	72,44	73,40	74,20
Bener Meriah	75,46	76,06	76,58	77,48
Pidie Jaya	75,59	76,04	76,39	77,04
Kota Banda Aceh	87,92	88,32	88,85	89,55
Kota Sabang	78,03	78,70	79,50	80,04
Kota Langsa	79,96	80,50	80,96	81,77
Kota Lhokseumawe	79,38	80,26	80,89	81,75
Kota Subulussalam	68,72	69,66	70,64	71,63
SUMATERA UTARA	74,51	75,13	75,76	76,47
Nias	64,30	65,15	66,13	66,79
Mandailing Natal	72,17	72,65	73,44	74,26
Tapanuli Selatan	73,96	74,58	75,18	75,78
Tapanuli Tengah	72,18	72,77	73,34	73,97
Tapanuli Utara	76,43	76,86	77,48	78,09
Toba Samosir	77,58	77,83	78,44	79,17
Labuhan Batu	73,96	74,70	75,20	75,79
Asahan	73,18	73,59	74,17	75,13
Simalungun	74,68	75,17	75,88	76,48
Dairi	74,60	75,18	75,88	76,68
Karo	76,37	76,88	77,49	78,10
Deli Serdang	76,86	77,16	77,56	78,29
Langkat	74,03	74,33	74,85	75,58
Nias Selatan	64,05	64,98	65,87	66,74
Humbang Hasundutan	72,05	72,49	73,33	73,93
Pakpak Bharat	71,57	72,30	73,09	73,89
Samosir	72,57	72,93	73,77	74,63
Serdang Bedagai	72,89	73,40	74,15	74,69

Lanjutan Lampiran 4

Provinsi/Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Batu Bara	71,75	72,56	73,14	73,92
Padang Lawas Utara	72,77	73,45	74,16	75,12
Padang Lawas	71,41	72,16	73,10	73,90
Labuhan Batu Selatan	73,59	74,23	75,11	75,74
Labuhan Batu Utara	74,61	75,45	76,20	76,71
Nias Utara	64,55	65,44	66,42	67,38
Nias Barat	63,96	64,68	65,66	66,65
Kota Sibolga	76,69	77,07	77,52	78,11
Kota Tanjung Balai	74,73	75,42	75,95	76,70
Kota Pematang Siantar	79,71	80,46	81,17	81,71
Kota Tebing Tinggi	77,39	78,17	78,68	79,26
Kota Medan	82,13	82,61	83,23	83,74
Kota Binjai	77,50	78,11	78,67	79,20
Kota Padangsidimpuan	77,73	78,10	78,61	79,19
Kota Gunungsitoli	71,11	71,55	72,30	73,29
SUMATERA BARAT	75,16	75,64	76,43	77,27
Kepulauan Mentawai	64,83	65,79	66,67	67,62
Pesisir Selatan	71,72	72,24	72,87	73,72
Solok	71,39	71,92	72,29	73,26
Sijunjung	71,32	72,30	72,88	73,73
Tanah Datar	74,87	75,57	76,49	77,04
Padang Pariaman	73,67	74,54	74,90	75,71
Agam	73,84	74,44	75,08	76,04
Lima Puluh Kota	71,64	72,05	72,51	73,43
Pasaman	69,12	69,85	70,61	71,60
Solok Selatan	71,36	72,24	73,17	74,01
Dharmasraya	73,19	73,87	74,82	75,70
Pasaman Barat	71,39	72,03	72,78	73,69
Kota Padang	83,69	83,98	84,38	84,93
Kota Solok	79,35	79,66	80,06	80,90
Kota Sawah Lunto	75,21	75,91	76,68	77,05
Kota Padang Panjang	79,28	79,76	80,60	81,32
Kota Bukittinggi	81,52	81,88	82,61	83,05
Kota Payakumbuh	79,70	80,14	80,76	81,62
Kota Pariaman	79,31	79,76	80,49	81,27
RIAU	74,45	74,95	75,67	76,31
Kuantan Singingi	72,78	73,35	74,00	74,62
Indragiri Hulu	71,69	72,28	72,75	73,48
Indragiri Hilir	69,12	69,64	70,07	70,74
Pelalawan	74,15	74,69	75,25	75,80
Siak	75,53	75,97	76,52	77,19
Kampar	75,21	75,59	76,29	76,97
Rokan Hulu	71,70	72,28	73,07	73,61

Lanjutan Lampiran 4

Provinsi/Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bengkalis	75,38	75,96	76,37	77,02
Rokan Hilir	71,35	71,98	72,46	73,07
Kepulauan Meranti	68,31	68,96	69,64	70,20
Kota Pekanbaru	83,38	83,67	84,26	84,91
Kota Dumai	76,20	76,45	77,03	77,58
JAMBI	73,11	73,73	74,36	75,13
Kerinci	73,24	73,77	74,33	75,10
Merangin	70,98	71,81	72,65	73,41
Sarolangun	72,66	73,05	73,76	74,72
Batang Hari	71,99	72,50	73,12	73,94
Muaro Jambi	71,41	72,26	73,11	73,87
Tanjung Jabung Timur	68,96	69,85	70,77	71,28
Tanjung Jabung Barat	70,88	71,44	72,01	73,00
Tebo	71,14	71,99	72,67	73,41
Bungo	73,08	73,57	74,44	75,15
Kota Jambi	80,38	80,93	81,77	82,32
Kota Sungai Penuh	76,75	77,20	77,93	78,89
SUMATERA SELATAN	72,48	73,18	73,84	74,76
Ogan Komering Ulu	72,41	73,17	73,70	74,47
Ogan Komering Ilir	70,17	70,80	71,48	72,20
Muara Enim	71,52	72,33	73,10	73,77
Lahat	71,45	72,15	72,83	73,75
Musi Rawas	70,04	70,52	71,21	71,92
Musi Banyuasin	70,73	71,30	72,27	73,17
Banyu Asin	69,95	70,67	71,55	72,42
Ogan Komering Ulu Selatan	68,33	69,05	70,00	70,98
Ogan Komering Ulu Timur	72,33	73,05	73,64	74,42
Ogan Ilir	71,20	72,01	72,67	73,21
Empat Lawang	68,39	69,07	69,63	70,56
Penakal Abab Lematang Ilir	67,89	68,78	69,63	70,55
Musi Rawas Utara	68,76	69,63	70,45	71,39
Kota Palembang	81,19	81,72	82,29	83,27
Kota Prabumulih	77,14	78,07	78,68	79,17
Kota Pagar Alam	72,40	73,25	74,00	74,92
Kota Lubuklinggau	77,71	78,36	78,98	79,94
BENGKULU	73,68	74,30	74,91	75,68
Bengkulu Selatan	73,58	74,06	74,53	75,32
Rejang Lebong	73,54	74,43	75,04	75,87
Bengkulu Utara	71,76	72,27	73,10	73,56
Kaur	70,30	70,92	71,53	72,45
Seluma	69,74	70,27	70,98	71,85
Mukomuko	72,15	73,00	73,65	74,45
Lebong	72,35	72,95	73,54	74,10

Lanjutan Lampiran 4

Provinsi/Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepahiang	70,85	71,38	72,05	72,96
Bengkulu Tengah	70,29	70,81	71,67	72,48
Kota Bengkulu	82,93	83,38	83,95	84,59
LAMPUNG	71,79	72,48	73,13	73,98
Lampung Barat	71,01	71,72	72,41	73,14
Tanggamus	69,32	69,93	70,54	71,36
Lampung Selatan	70,95	71,55	72,15	73,10
Lampung Timur	71,82	72,44	73,05	73,92
Lampung Tengah	72,59	73,39	74,16	74,86
Lampung Utara	70,19	70,78	71,42	72,28
Way Kanan	69,92	70,51	71,17	71,98
Tulangbawang	71,08	71,56	72,24	73,11
Pesawaran	68,55	69,46	70,24	70,90
Pringsewu	72,57	73,11	73,84	74,76
Mesuji	67,12	67,79	68,59	69,40
Tulang Bawang Barat	68,70	69,38	70,04	70,61
Pesisir Barat	69,58	70,40	71,04	71,72
Kota Bandar Lampung	79,33	79,86	80,46	81,26
Kota Metro	79,38	79,85	80,41	81,22
KEP. BANGKA BELITUNG	73,50	74,09	74,55	75,26
Bangka	73,62	74,34	74,66	75,38
Belitung	73,83	74,49	74,96	75,29
Bangka Barat	70,79	71,13	71,36	72,23
Bangka Tengah	72,06	72,36	72,54	73,10
Bangka Selatan	69,12	69,67	70,01	70,83
Belitung Timur	72,76	73,31	73,62	73,99
Kota Pangkal Pinang	79,77	80,45	80,90	81,64
KEPULAUAN RIAU	78,48	79,08	79,89	80,53
Karimun	73,96	74,70	75,49	76,08
Bintan	76,80	77,50	77,96	78,65
Natuna	77,59	78,23	78,60	78,94
Lingga	71,48	72,23	73,05	73,82
Kepulauan Anambas	72,15	72,80	73,47	74,07
Kota Batam	82,25	82,64	83,32	83,80
Kota Tanjung Pinang	80,58	81,14	81,58	82,02
DKI JAKARTA	82,77	83,55	84,15	85,05
Kepulauan Seribu	75,34	75,91	76,69	77,52
Kota Jakarta Selatan	85,87	86,71	87,57	88,51
Kota Jakarta Timur	83,60	84,26	84,76	85,51
Kota Jakarta Pusat	82,90	83,29	83,75	84,45
Kota Jakarta Barat	83,43	83,85	84,40	85,18
Kota Jakarta Utara	81,56	81,85	82,13	83,12
JAWA BARAT	73,63	74,24	74,92	75,90

Lanjutan Lampiran 4

Provinsi/Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bogor	72,45	73,02	73,63	74,53
Sukabumi	68,87	69,71	70,18	71,13
Cianjur	67,55	68,18	68,89	69,84
Bandung	73,46	74,03	74,59	75,58
Garut	68,51	69,22	69,91	70,67
Tasikmalaya	68,45	69,38	69,98	70,76
Ciamis	72,52	73,12	73,64	74,33
Kuningan	70,44	70,99	71,56	72,31
Cirebon	70,92	71,81	72,30	73,27
Majalengka	70,18	70,76	71,37	72,37
Sumedang	73,53	74,02	74,57	75,50
Indramayu	69,52	70,19	70,72	71,58
Subang	70,54	71,42	72,05	73,00
Purwakarta	72,89	73,43	73,99	74,97
Karawang	72,64	73,25	73,82	74,59
Bekasi	75,60	76,13	76,80	77,80
Bandung Barat	69,82	70,33	70,77	71,65
Pangandaran	70,21	70,57	71,03	71,66
Kota Bogor	77,68	78,36	79,03	79,75
Kota Sukabumi	76,24	77,16	77,69	78,23
Kota Bandung	82,75	83,29	83,75	84,66
Kota Cirebon	76,89	77,45	78,09	78,99
Kota Bekasi	82,52	83,06	83,55	84,43
Kota Depok	82,02	82,53	83,05	84,04
Kota Cimahi	79,01	79,69	80,30	80,85
Kota Tasikmalaya	74,84	75,47	76,03	76,59
Kota Banjar	73,93	74,45	75,01	75,54
JAWA TENGAH	72,80	73,39	73,87	74,77
Cilacap	71,22	72,04	72,55	73,45
Banyumas	73,30	73,96	74,52	75,44
Purbalingga	69,80	70,51	70,97	71,71
Banjarnegara	68,62	69,16	69,62	70,61
Kebumen	71,29	71,88	72,48	73,17
Purworejo	73,67	74,35	75,16	75,93
Wonosobo	69,69	70,18	70,63	71,50
Magelang	70,96	71,56	72,10	73,09
Boyolali	74,97	75,41	75,96	76,95
Klaten	76,95	77,59	78,16	78,68
Sukoharjo	77,94	78,65	79,30	79,90
Wonogiri	71,04	71,97	72,54	73,42
Karanganyar	76,58	77,31	78,11	78,67
Sragen	74,65	75,10	75,53	76,38
Grobogan	70,97	71,49	72,02	72,94

Lanjutan Lampiran 4

Provinsi/Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Blora	69,95	70,63	71,42	72,35
Rembang	71,00	71,89	72,53	73,40
Pati	73,14	73,59	74,10	74,98
Kudus	75,89	76,71	77,21	77,94
Jepara	73,15	73,85	74,32	74,90
Demak	73,36	74,07	74,57	75,08
Semarang	74,67	75,13	75,67	76,40
Temanggung	70,77	71,33	71,86	72,52
Kendal	73,19	73,86	74,34	75,07
Batang	69,45	70,20	70,73	71,70
Pekalongan	70,81	71,45	71,95	72,71
Pemalang	67,26	68,08	68,65	69,47
Tegal	70,42	71,12	71,70	72,36
Brebes	68,81	69,71	70,18	71,18
Kota Magelang	80,39	81,17	82,15	82,92
Kota Surakarta	83,08	83,54	84,41	84,92
Kota Salatiga	84,35	84,99	85,72	86,23
Kota Semarang	84,08	84,43	85,24	85,80
Kota Pekalongan	75,90	76,71	77,21	77,76
Kota Tegal	76,21	77,06	77,50	77,95
D I YOGYAKARTA	80,65	81,09	81,62	82,48
Kulon Progo	75,48	75,82	76,18	76,97
Bantul	81,04	81,74	82,05	83,03
Gunung Kidul	71,18	71,46	72,14	73,13
Sleman	84,40	84,86	85,71	86,35
Kota Yogyakarta	88,00	88,61	89,10	89,53
JAWA TIMUR	74,05	74,65	75,35	76,13
Pacitan	70,19	70,94	71,49	72,26
Ponorogo	72,59	73,18	73,70	74,65
Trenggalek	71,28	71,96	72,47	73,39
Tulungagung	74,14	74,65	75,13	75,88
Blitar	72,25	72,84	73,44	74,43
Kediri	74,20	74,68	75,18	76,09
Malang	72,23	73,00	73,53	74,45
Lumajang	68,48	69,37	70,31	71,02
Jember	69,80	70,42	70,93	71,57
Banyuwangi	73,15	73,79	74,30	75,17
Bondowoso	69,91	70,56	71,22	71,72
Situbondo	69,76	70,65	71,22	71,87
Probolinggo	69,56	70,36	70,85	71,65
Pasuruan	71,29	71,91	72,36	73,02
Sidoarjo	81,37	81,88	82,67	83,35
Mojokerto	75,61	76,23	76,69	77,46

Lanjutan Lampiran 4

Provinsi/Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jombang	74,66	75,16	75,67	76,37
Nganjuk	73,95	74,70	75,24	75,89
Madiun	73,51	74,02	74,81	75,47
Magetan	75,76	76,30	76,77	77,58
Ngawi	72,62	73,28	73,91	74,43
Bojonegoro	71,15	71,80	72,75	73,74
Tuban	70,79	71,40	72,31	73,15
Lamongan	74,83	75,29	75,90	76,81
Gresik	77,62	78,44	78,93	79,69
Bangkalan	66,11	66,82	67,33	68,15
Sampang	65,44	66,19	66,72	67,23
Pamekasan	69,35	70,32	70,85	71,64
Sumenep	68,49	69,13	69,78	70,54
Kota Kediri	80,12	80,97	81,88	82,71
Kota Blitar	80,15	80,78	81,44	82,03
Kota Malang	83,38	84,00	84,68	85,55
Kota Probolinggo	76,08	76,93	77,79	78,50
Kota Pasuruan	77,71	78,30	78,90	79,52
Kota Mojokerto	80,19	80,90	81,76	82,35
Kota Madiun	83,02	83,71	84,51	85,12
Kota Surabaya	83,32	83,99	84,69	85,65
Kota Batu	78,13	79,07	79,69	80,35
BANTEN	75,25	75,77	76,35	77,25
Pandeglang	69,70	70,28	70,88	71,84
Lebak	67,19	67,68	68,33	69,24
Tangerang	75,15	75,56	76,19	76,74
Serang	71,99	72,63	73,28	74,10
Kota Tangerang	80,44	80,98	81,53	82,41
Kota Cilegon	77,68	78,24	78,83	79,54
Kota Serang	76,01	76,43	76,90	77,50
Kota Tangerang Selatan	83,28	83,57	84,16	84,81
BALI	77,40	78,01	78,63	79,37
Jembrana	74,38	74,80	75,32	75,94
Tabanan	77,22	77,87	78,83	79,70
Badung	82,13	83,00	83,73	84,27
Gianyar	78,87	79,69	80,23	80,96
Klungkung	73,77	74,18	75,15	75,89
Bangli	71,47	71,99	72,51	73,22
Karangasem	69,48	70,09	70,91	71,89
Buleleng	74,48	74,87	75,35	76,06
Kota Denpasar	84,39	84,68	85,11	85,63
NUSA TENGGARA BARAT	71,65	72,37	73,10	73,97
Lombok Barat	71,44	72,18	72,70	73,52

Lanjutan Lampiran 4

Provinsi/Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lombok Tengah	69,57	70,41	71,19	72,07
Lombok Timur	69,83	70,65	71,48	72,35
Sumbawa	70,71	71,68	72,36	73,27
Dompu	70,96	71,77	72,59	73,58
Bima	69,63	70,33	70,99	71,97
Sumbawa Barat	74,34	74,84	75,52	76,46
Lombok Utara	67,09	68,02	68,64	69,63
Kota Mataram	80,67	81,15	81,64	82,37
Kota Bima	77,75	78,24	78,91	79,41
NUSA TENGGARA TIMUR	67,63	68,40	69,14	69,89
Sumba Barat	66,03	66,82	67,70	68,46
Sumba Timur	68,82	69,63	70,28	70,99
Kupang	66,72	67,51	68,26	69,03
Timor Tengah Selatan	64,54	65,39	66,22	66,88
Timor Tengah Utara	65,65	66,56	67,27	67,87
Belu	66,87	67,50	68,13	68,89
Alor	66,08	66,82	67,70	68,44
Lembata	67,76	68,41	68,95	69,70
Flores Timur	68,36	69,24	69,79	70,61
Sikka	68,66	69,41	69,96	70,65
Ende	71,10	71,77	72,24	72,73
Ngada	70,73	71,61	72,04	72,53
Manggarai	67,88	68,48	69,35	70,10
Rote Ndao	65,05	65,79	66,40	67,01
Manggarai Barat	66,95	67,84	68,68	69,20
Sumba Tengah	62,84	63,63	64,46	65,29
Sumba Barat Daya	63,15	63,74	64,27	64,82
Nagekeo	68,17	69,03	69,70	70,48
Manggarai Timur	64,11	65,05	66,03	66,63
Sabu Raijua	60,35	61,37	62,06	62,74
Malaka	63,84	64,50	65,13	65,84
Kota Kupang	82,37	82,77	83,21	83,65
KALIMANTAN BARAT	69,71	70,47	71,19	72,09
Sambas	69,88	70,60	71,20	72,08
Bengkayang	68,74	69,53	70,30	70,99
Landak	67,28	68,22	69,13	69,92
Mempawah	67,91	68,91	69,63	70,59
Sanggau	67,87	68,73	69,40	70,36
Ketapang	68,86	69,61	70,34	71,30
Sintang	68,59	69,39	70,13	70,92
Kapuas Hulu	66,91	67,86	68,77	69,24
Sekadau	66,13	66,83	67,74	68,73
Melawi	66,99	67,92	68,81	69,80

Lanjutan Lampiran 4

Provinsi/Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kayong Utara	65,09	66,06	67,05	67,60
Kubu Raya	69,83	70,50	71,14	72,01
Kota Pontianak	81,10	81,63	82,22	82,80
Kota Singkawang	73,66	74,13	74,68	75,67
KALIMANTAN TENGAH	73,17	73,73	74,28	74,86
Kotawaringin Barat	74,39	74,92	75,35	76,02
Kotawaringin Timur	73,45	73,99	74,47	74,96
Kapuas	71,72	72,40	72,98	73,47
Barito Selatan	73,45	74,01	74,76	75,21
Barito Utara	72,16	72,71	73,17	73,58
Sukamara	69,86	70,35	70,83	71,45
Lamandau	72,81	73,44	73,95	74,46
Seruyan	69,81	70,24	70,66	71,24
Katingan	73,43	73,90	74,37	74,68
Pulang Pisau	71,05	71,62	72,36	72,99
Gunung Mas	72,50	73,18	73,88	74,46
Barito Timur	73,69	74,21	74,81	75,50
Murung Raya	70,13	70,91	71,58	72,34
Kota Palangka Raya	81,47	81,95	82,53	82,98
KALIMANTAN SELATAN	74,00	74,66	75,19	76,10
Tanah Laut	72,33	72,98	73,42	74,32
Kota Baru	71,57	72,01	72,42	73,03
Banjar	73,25	74,01	74,41	75,11
Barito Kuala	69,87	70,67	71,40	72,05
Tapin	72,61	73,52	74,06	74,98
Hulu Sungai Selatan	72,47	73,21	73,95	74,81
Hulu Sungai Tengah	72,32	72,76	73,33	74,26
Hulu Sungai Utara	70,33	71,12	71,74	72,67
Tabalong	74,82	75,43	75,97	76,94
Tanah Bumbu	73,34	73,86	74,50	75,09
Balangan	72,20	72,97	73,83	74,78
Kota Banjarmasin	79,46	79,98	80,53	80,88
Kota Banjar Baru	80,82	81,25	81,65	82,20
KALIMANTAN TIMUR	77,36	78,20	78,79	79,39
Paser	73,85	74,56	75,13	75,85
Kutai Barat	73,16	73,97	74,76	75,38
Kutai Kartanegara	75,31	75,95	76,57	77,25
Kutai Timur	74,69	75,33	75,90	76,48
Berau	76,24	76,71	77,17	77,72
Penajam Paser Utara	73,56	74,33	74,94	75,82
Mahakam Ulu	69,17	70,02	70,79	71,53
Kota Balikpapan	81,49	82,03	82,62	83,23
Kota Samarinda	81,72	82,61	83,11	83,53

Lanjutan Lampiran 4

Provinsi/Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kota Bontang	81,00	81,63	82,49	83,04
KALIMANTAN UTARA	72,21	72,88	73,41	74,04
Malinau	73,55	74,00	74,72	75,21
Bulungan	72,56	73,20	73,83	74,53
Tana Tidung	69,45	70,06	70,95	71,86
Nunukan	67,88	68,43	69,27	69,87
Kota Tarakan	76,75	77,61	78,03	78,62
SULAWESI UTARA	74,52	75,04	75,68	76,32
Bolaang Mongondow	69,82	70,48	71,14	71,83
Minahasa	77,72	78,48	79,26	79,73
Kepulauan Sangihe	73,35	73,94	74,43	75,18
Kepulauan Talaud	71,53	72,22	72,83	73,68
Minahasa Selatan	74,50	75,25	75,79	76,47
Minahasa Utara	75,92	76,50	77,05	77,76
Bolaang Mongondow Utara	70,39	70,97	71,66	72,28
Siau Tagulandang Biaro	70,18	70,81	71,55	72,17
Minahasa Tenggara	72,56	72,97	73,68	74,28
Bolaang Mongondow Selatan	68,66	69,17	69,92	70,54
Bolaang Mongondow Timur	69,35	70,09	70,68	71,43
Kota Manado	80,96	81,40	81,86	82,40
Kota Bitung	75,94	76,33	76,90	77,57
Kota Tomohon	78,65	79,29	80,06	80,65
Kota Kotamobagu	75,56	76,01	76,86	77,49
SULAWESI TENGAH	71,01	71,66	72,24	72,82
Banggai Kepulauan	66,30	67,05	67,65	68,44
Banggai	71,58	72,19	72,86	73,44
Morowali	73,39	73,82	74,36	74,70
Poso	72,75	73,25	73,65	74,55
Donggala	67,49	68,17	68,71	69,23
Toli-Toli	68,77	69,68	70,38	71,09
Buol	69,37	70,18	70,89	71,47
Parigi Moutong	68,29	69,06	69,48	69,99
Tojo Una-Una	67,62	68,47	69,04	69,76
Sigi	69,40	70,28	70,90	71,68
Banggai Laut	68,40	69,12	69,65	70,46
Morowali Utara	70,02	70,74	71,64	72,16
Kota Palu	83,26	83,71	84,12	84,53
SULAWESI SELATAN	73,96	74,60	75,18	75,92
Kepulauan Selayar	70,27	71,13	71,98	72,78
Bulukumba	72,75	73,64	74,43	75,26
Bantaeng	70,41	71,28	72,20	73,12
Jeneponto	68,13	68,95	69,45	70,25
Takalar	70,86	71,46	72,06	72,79

Lanjutan Lampiran 4

Provinsi/Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Gowa	72,44	73,01	73,71	74,22
Sinjai	70,60	71,20	71,81	72,76
Maros	72,92	73,56	74,04	74,79
Pangkajene dan Kepulauan	72,41	73,23	73,87	74,62
Barru	72,96	73,80	74,51	75,41
Bone	69,43	70,25	70,81	71,63
Soppeng	71,05	71,94	72,76	73,69
Wajo	72,69	73,56	73,98	74,72
Sidenreng Rappang	73,81	74,38	74,81	75,49
Pinrang	73,90	74,70	75,43	75,87
Enrekang	74,61	75,11	75,83	76,50
Luwu	72,42	73,23	73,86	74,66
Tana Toraja	70,16	71,01	71,94	72,77
Luwu Utara	72,48	73,31	74,04	74,81
Luwu Timur	75,41	75,84	76,44	77,28
Toraja Utara	70,83	71,69	72,31	73,24
Kota Makassar	84,45	84,85	85,23	85,66
Kota Parepare	79,87	80,36	80,97	81,50
Kota Palopo	80,24	80,77	81,25	81,74
SULAWESI TENGGARA	72,38	72,94	73,62	74,25
Buton	68,05	68,96	69,72	70,22
Muna	70,09	70,62	71,50	72,23
Konawe	73,14	73,88	74,50	75,09
Kolaka	74,98	75,73	76,20	76,92
Konawe Selatan	69,67	70,64	71,51	72,32
Bombana	67,49	68,12	68,85	69,54
Wakatobi	70,88	71,45	72,03	72,59
Kolaka Utara	70,47	71,11	71,75	72,37
Buton Utara	69,17	69,85	70,75	71,29
Konawe Utara	71,52	72,11	72,71	73,42
Kolaka Timur	68,77	69,61	70,32	71,19
Konawe Kepulauan	67,49	68,11	68,77	69,39
Muna Barat	66,53	67,44	68,37	69,18
Buton Tengah	66,41	66,94	67,58	68,39
Buton Selatan	66,47	67,19	68,04	68,54
Kota Kendari	85,19	85,51	85,97	86,36
Kota Baubau	78,15	79,00	79,61	80,29
GORONTALO	70,62	71,25	72,01	72,62
Boalemo	67,86	68,78	69,34	69,89
Gorontalo	69,51	70,37	70,96	71,54
Pohuwato	68,67	69,30	70,19	70,59
Bone Bolango	71,39	71,97	72,82	73,30
Gorontalo Utara	67,41	68,00	68,83	69,62

Lanjutan Lampiran 4

Provinsi/Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kota Gorontalo	78,22	78,64	79,18	79,97
SULAWESI BARAT	69,19	69,80	70,46	71,16
Majene	71,64	72,44	73,25	74,15
Polewali Mandar	68,42	69,24	69,88	70,71
Mamasa	67,53	68,14	68,68	69,56
Mamuju	70,35	71,07	71,86	72,77
Pasangkayu	69,94	70,42	71,04	71,62
Mamuju Tengah	67,07	67,63	68,53	69,17
MALUKU	72,04	72,75	73,40	74,09
Maluku Tenggara Barat	66,33	67,04	67,69	68,47
Maluku Tenggara	69,23	69,91	70,58	71,16
Maluku Tengah	73,73	74,34	75,10	75,87
Buru	71,52	72,11	72,55	73,24
Kepulauan Aru	67,36	68,19	69,00	69,73
Seram Bagian Barat	70,76	71,68	72,54	72,91
Seram Bagian Timur	69,05	69,84	70,28	71,10
Maluku Barat Daya	65,84	66,71	67,68	68,66
Buru Selatan	66,81	67,68	68,54	69,36
Kota Ambon	82,44	82,84	83,37	83,97
Kota Tual	70,85	71,67	72,48	72,88
MALUKU UTARA	70,26	70,98	71,84	72,52
Halmahera Barat	67,84	68,56	69,20	69,75
Halmahera Tengah	68,95	69,95	70,94	71,57
Kepulauan Sula	66,90	67,49	68,19	68,89
Halmahera Selatan	66,78	67,55	68,43	69,05
Halmahera Utara	69,13	69,79	70,52	71,25
Halmahera Timur	68,62	69,48	70,35	71,11
Pulau Morotai	64,99	65,93	66,91	67,86
Pulau Taliabu	63,65	64,31	64,88	65,61
Kota Ternate	81,28	81,79	82,59	83,01
Kota Tidore Kepulauan	72,57	73,40	74,01	74,63
PAPUA BARAT	66,03	66,84	67,69	68,48
Fakfak	70,26	70,85	71,52	72,00
Kaimana	67,72	68,31	69,20	69,70
Teluk Wondama	63,02	63,84	64,52	65,26
Teluk Bintuni	68,29	69,01	69,79	70,32
Manokwari	73,92	74,52	75,15	75,96
Manokwari Selatan	60,68	61,55	62,45	63,24
Pegunungan Arfak	57,01	57,82	58,71	59,53
PAPUA BARAT DAYA	68,60	69,07	69,65	70,55
Raja Ampat	65,41	66,00	66,60	67,36
Sorong	68,10	68,89	69,69	70,60
Sorong Selatan	63,13	63,98	64,54	65,45

Lanjutan Lampiran 4

Provinsi/Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Maybrat	60,49	61,29	61,83	62,68
Tambrau	56,62	57,53	58,31	59,28
Kota Sorong	79,47	80,11	80,55	81,03
PAPUA	72,57	73,23	73,83	74,69
Jayapura	73,92	74,74	75,32	76,14
Kepulauan Yapen	68,94	69,62	70,12	70,93
Biak Numfor	73,87	74,45	74,95	75,48
Sarmi	66,09	67,00	67,89	68,78
Keerom	68,37	69,25	69,87	70,43
Waropen	66,88	67,67	68,13	68,91
Supiori	64,88	65,84	66,37	67,30
Mamberamo Raya	57,43	58,49	59,48	60,48
Kota Jayapura	81,02	81,51	81,98	82,26
PAPUA SELATAN	67,39	68,24	68,86	69,54
Merauke	73,06	74,00	74,53	75,11
Boven Digoel	66,33	67,32	68,16	68,62
Mappi	59,75	60,71	61,66	62,60
Asmat	55,80	56,85	57,63	58,55
PAPUA TENGAH	58,76	59,44	60,25	60,64
Mimika	75,08	75,91	76,85	77,27
Dogiyai	55,77	56,74	57,72	57,96
Deiyai	50,64	51,40	52,29	52,81
Nabire	70,46	71,36	72,28	72,89
Paniai	58,05	58,83	59,61	60,04
Intan Jaya	49,45	50,39	50,92	51,56
Puncak	43,99	44,71	45,70	45,95
Puncak Jaya	50,50	51,49	52,47	53,18
PAPUA PEGUNUNGAN	52,69	53,45	54,43	54,91
Nduga	36,51	37,68	38,88	40,35
Jayawijaya	63,85	64,81	65,38	66,02
Lanny Jaya	49,87	50,81	51,84	52,47
Tolikara	50,77	51,74	52,31	52,71
Mamberamo Tengah	50,96	51,98	52,50	53,36
Yalimo	49,90	50,87	51,85	52,63
Yahukimo	50,25	51,19	51,97	52,48
Pegunungan Bintang	47,54	48,51	49,69	50,56
INDONESIA	73,77	74,39	75,02	75,90

Catatan: IPM dihitung menggunakan UHH hasil LF SP2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia, 2025

Lampiran 5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Negara-Negara Anggota ASEAN, 1990–2023

Rank IPM (2022)	Negara	1990	2000	2010	2015	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	Singapura	0.819	0.882	0.932	0.935	0.942	0.944	0.948	0.942	0.946
55	Brunei Darussalam	0.781	0.792	0.830	0.839	0.835	0.836	0.835	0.825	0.837
63	Malaysia	0.653	0.733	0.779	0.800	0.812	0.810	0.802	0.810	0.819
66	Thailand	0.584	0.657	0.742	0.788	0.800	0.798	0.800	0.792	0.798
107	Viet Nam	0.499	0.604	0.686	0.717	0.744	0.755	0.754	0.764	0.766
112	Indonesia	0.531	0.600	0.670	0.701	0.714	0.710	0.707	0.726	0.728
113	Filipina	0.593	0.632	0.669	0.690	0.708	0.699	0.690	0.714	0.720
139	Laos	0.409	0.473	0.556	0.604	0.615	0.616	0.613	0.614	0.617
144	Kamboja	0.387	0.438	0.543	0.562	0.593	0.595	0.594	0.602	0.606
148	Myanmar	0.347	0.415	0.515	0.566	0.610	0.609	0.605	0.606	0.609

Catatan: IPM yang dihitung oleh UNDP memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1

Sumber: <https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4 Fax: (021) 3857046

Email: bpshq@bps.go.id Homepage: <http://www.bps.go.id>

